



Prosiding

Seminar Nasional

**“Pemberdayaan Masyarakat Menuju
Kemandirian Desa”**

Bandarlampung, 12 November 2016

Penyelenggara:



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung

PROSIDING

Seminar Nasional Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung dengan tema:

“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU KEMANDIRIAN DESA“

PEMBICARA:

1. Drs. Yudha Setiawan, M.M. (Kepala BPMPD Provinsi Lampung)
2. Drs. Edi Firnandi, M.Si. (Kepala BPMD Kabupaten Lampung Selatan)
3. Drs. Abdul Syani, M.IP. (Universitas Lampung)
4. Drs. Witoro (NGO)
5. Dewi Cahyani Puspitasari, S.Sos., M.A. (Universitas Gadjah Mada)
6. Dr. Anggraeni Primawati, M.Si. (Universitas Nasional)
7. Dr. Erna Rochana, M.Si. (Universitas Lampung)

REVIEWER:

1. Dr. Sindung Haryanto, M.Si
2. Drs. Abdul Syani, M.IP.
3. Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.
4. Drs. I Gede Sidemen, M.Si
5. Dr. Benjamin, M.Si.

EDITOR:

1. Drs. Susetyo, M.Si.
2. Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim.
3. Damar Wibisono, S.Sos. M.A.

SAMBUTAN KETUA PANITIA

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat karuniannya kita dapat mengikuti seminar ini dalam keadaan sehat walafiat.

Seminar yang bertajuk “Pemberdayaan Masyarakat menuju kemandirian desa” ini diselenggarakan oleh Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Kami mengundang kurang lebih 100 orang untuk hadir dalam seminar ini yang mewakili dari berbagai unsur antara lain: politisi, akademisi, praktisi (Kepala Desa, pendamping desa), Dinas/instansi Pemerintah, LSM, Pers, mahasiswa dan juga alumni Jurusan Sosiologi Fisip Unila.

Seminar ini merupakan forum untuk berbagai pengalaman dan pengetahuan mengenai pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, kami secara khusus mengundang kolega kami (para akademisi) di seluruh nusantara untuk berpartisipasi dalam seminar ini baik sebagai peserta, nara sumber maupun pemakalah. Alhamdulillah niat baik kami mendapat sambutan luar biasa.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan FISIP Universitas Lampung dan Bapak Drs. Yudha Setiawan, M.M. sebagai keynote speaker. Ucapan yang sama kami tujukan kepada Bapak/ibu nara sumber dan para peserta. Seminar ini terselenggara dengan baik, berkat kerja keras teman-teman panitia. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia.

Tak ada gading yang tak retak. Seminar ini dalam pelaksanaannya tentu terdapat kekurangannya, untuk itu atas nama panitia kami memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Terakhir, kami ucapkan selamat berseminar semoga sekecil apapun upaya kita dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara ini, amin.

Akhirul kalam Bitaufik wal hidayah, Assalamu’alaikum warohmatullohiwabarokatuh.

Bandarlampung, 12 November 2016

Dr. Sindung Haryanto, M.Si
Ketua Panitia

DAFTAR ISI

STRATEGI DAN PENDEKATAN NILAI KEARIFAN LOKAL LAMPUNG DALAM PEMELIHARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DESA Abdul Syani	1-12
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INKLUSIF: MELALUI PERSPEKTIF MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA SEKITAR PERTAMBANGAN BATUBARA DI DESA MANDUIN KECAMATANMUARA HARUS KABUPATEN TABALONG PROPINSI KALIMANTAN SELATAN Anggraeni Primawati, Yoyok Hendarso	13-26
WIRUSAHA SOSIAL MUDA DESA: PERAN STRATEGIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Dewi Cahyani Puspitasari	27-37
PARTISIPASI KOMUNITAS LOKAL DALAM PEMBANGUNAN DESA MELALUIPEMBERDAYAAN MASYARAKAT Susetyo, Benjamin	38-50
STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI PERAN WANITA DALAM PENGEMBANGAN UMKM BERBASIS DESA DI KOTA SUNGAI PENUH Yolla Ramadani	51-57
KENDALA DAN TANTANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA UJUNGJAYA MENUJU DESA MANDIRI Yanti Setianti, Iriana Bakti, Aat Ruchiat Nugraha	58-64
STRATEGI PERENCANAAN PARTISIPATIF KELOMPOK WANITA TANI USAHA PENGOLAHAN PRODUK PANGAN BERBASIS SINGKONG Henita Astuti, Joko Ari Wibowo	65-73
PENYULUHAN HAK AZASI ANAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PEKERJA ANAK KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT DAN APARAT PEMERINTAH DESA TARAHAN KECAMATAN KETIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Yuni Ratnasari, Dwi Wahyu Handayani	74-83
TAHAP PRAKONFLIK DAN KONFRONTASI PADA KONFLIK ANTAR WARGA DESA AGOM DENGAN DESA BALINURAGA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Benjamin	84-96

<p>PROSES DAN UPAYA MEMBANGUN PERDAMAIAN “MENCAPAI KESEPAKATAN UNTUK MEMBANGUN PERDAMAIAN SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PEMENUHAN HAK BERIBADAH”</p> <p>Ikram</p>	97-101
<p>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TERTINGGAL MELALUI PEMANFAATAN LIMBAH ALAM (STUDI KASUS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TANJUNG KARYA MELALUI PEMANFAATAN LIMBAH ECENG GONDOK DI KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT)</p> <p>Ilham Gemiharto</p>	102-108
<p>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG WISATA UNTUK PROMOSI MUSEUM ADAT SAI BATIN SANGGI UNGGAK BANDAR NEGERI SEMOUNG BERBASISKAN TEKNOLOGI</p> <p>Bartoven vivit Nurdin, Damayanti, Dadang Karya Bakti, Suprihatin Ali...</p>	109-118
<p>EKONOMI KREATIF BUDIDAYA CACING TANAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT BANYUAJUH, KAMAL, BANGKALAN</p> <p>Sugeng Purwoko, Abdur Rohman, Ahmad Mughni</p>	119-123
<p>TANAH UNTUK RAKYAT (SUATU PELAYANAN DIAKONI GEREJA MELALUI YABIMA INDONESIA DALAM BENTUK ADVOKASI ALIH FUNGSI TANAH MUKIM DAN GARAP UNTUK PEMBERDAYAAN PETANI)</p> <p>Ikram</p>	124-130

STRATEGI DAN PENDEKATAN NILAI KEARIFAN LOKAL LAMPUNG DALAM PEMELIHARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DESA

Abdul Syani

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
Email: abdul.syani@gmail.com

Abstrak

Keberagaman etnis dan budaya masyarakat desa di Lampung seringkali rentan terhadap perubahan-perubahan di lingkungan sekitarnya. Untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban hidup masyarakat diperlukan perlindungan sosial budaya sebagai penopang ketahanan masyarakat berupa nilai kearifan lokal Lampung, khususnya pandangan hidup *Piil Pesenggiri* dan adat *Hippun*. Untuk mewujudkan harapan itu, maka perlu menggali dan mengaktualisasikan nilai-nilai kearifan lokal tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari, terutama kegiatan pembangunan desa.

Kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang berkaitan secara spesifik dengan budaya lokal dan mencerminkan cara hidup masyarakat setempat. Nilai-nilai kearifan lokal itu berlaku dan dihormati sebagai sumber pengetahuan dan kebijakan dalam kegiatan pembangunan dan pemecahan masalah melalui adat hippun. Sebagai pandangan hidup, nilai-nilai kearifan lokal dipercaya dan diyakini dapat mempengaruhi dan meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup mereka. Dengan demikian pandangan hidup *Piil Pesenggiri* dan adat *Hippun* dapat menjadi kekuatan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya masyarakat dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa. Oleh karena itu dalam penyebarluasan praktik-praktik pembangunan desa secara formal sebaiknya mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal sebagai pedoman dalam merangkai ragam kepentingan pertumbuhan aspirasi masyarakat secara harmonis, tanpa ada pihak yang dikorbankan.

Kata kunci: Kearifan Lokal piil pesenggiri dan adat hippun, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pendahuluan

Masyarakat adat Lampung memiliki kearifan lokal berupa *falsafah hidup fil pesenggiri*. Piil Pesenggiri mengandung pandangan hidup yang diyakini sebagai pedoman dalam tata pergaulan untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban. Kearifan lokal mengandung nilai-nilai moral (kebaikan) bagi kehidupan masyarakat, sehingga kemudian mentradisi dan melekat kuat dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari. Piil Pesenggiri yang kuat, berarti mempunyai perasaan penuh keyakinan, tanggungjawab, kompeten dan sanggup mengatasi berbagai masalah kehidupan masyarakat. Meskipun ada perbedaan karakter dan intensitas hubungan sosial budayanya, tapi dalam jangka waktu yang lama mereka terikat dalam persamaan visi dalam menciptakan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera bersama. Dengan bingkai kearifan lokal ini, antar individu, antar kelompok masyarakat saling melengkapi, bersatu dan berinteraksi dengan memelihara nilai dan norma sosial yang berlaku.

Piil pesenggiri didukung unsur-unsurnya, yaitu: Bejuluk-beadok, Nemui-nyimah, Nengah-nyappur, dan Sakai-samabayan. Bejuluk-beadok artinya mempunyai gelar adat; Nemui-nyimah, artinya ramah dan terbuka; Nengah-nyappur artinya sikap suka bergaul, suka bersahabat dan toleran antar sesama, dan tidak membedakan suku, agama,

tingkatan, asal usul dan golongan; sedangkan sakai-sambayan berarti suka mengamalkan kegiatan tolong menolong dan gotong royong.

Dengan prinsip Piil pesenggiri kehidupan sosial masyarakat Lampung *Sang Bumi Ruwa Jurai* dapat menjadi sebuah lingkungan sosial dengan komunitas yang hidup rukun, berdampingan dan bekerjasama. Setiap komunitas menjaga sikap toleransi, meningkatkan dan bersatu dalam rasa persaudaraan. Pemahaman Sang Bumi Ruwa Jurai sendiri merupakan simbol kesatuan hidup dua akar budaya yang berbeda dari masyarakat Lampung Asli, yaitu Masyarakat adat Lampung *Sebatin dan Pepadun*. Dengan hadirnya etnis dan budaya luar, diharapkan dapat berdampingan atau bergabung terhadap kedua jurai budaya pribumi tersebut.

Untuk menghargai nilai-nilai luhur kearifan lokal, maka segenap warga harus mampu menggali, memelihara, menjiwai dan mengamalkan nilai-nilai Piil Pesenggiri dalam kehidupan sehari-hari. Unsur-unsur Piil Pesenggiri mengandung nilai-nilai budaya yang luhur yang perlu di dipahami dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang yang memiliki harga diri akan lebih bersemangat, lebih mandiri, lebih mampu dan berdaya, sanggup menerima tantangan, lebih percaya diri, tidak mudah menyerah dan putus asa, mudah memikul tanggung jawab, mampu menghadapi kehidupan dengan lebih baik, dan merasa sejajar dengan orang lain (Abdul Syani , 2013).

Nilai-nilai kearifan lokal piil pesenggiri itu tumbuh dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat Lampung pada umumnya, baik dalam penataan kehidupan sosial masyarakat yang multi etnis internal, multi etnis eksternal (terdiri penduduk asli dan pendatang), maupun dalam upaya pemeliharaan lingkungan sosial dengan komunitas yang hidup rukun, berdampingan dan bekerjasama. Akan tetapi dalam kenyataan perkembangannya kekuatan nilai-nilai kearifan lokal justeru belum mampu membangun kehidupan yang harmonis bahkan nyaris terancam. Banyak komunitas yang belum mampu menjaga sikap toleransi, meningkatkan dan bersatu dalam rasa persaudaraan. Pemahaman Sang Bumi Ruwa Jurai sendiri banyak yang tidak memahami simbol kesatuan hidup dua akar budaya yang berbeda dari masyarakat Lampung Asli, yaitu Masyarakat adat Lampung *Sebatin dan Pepadun*. Begitu juga dengan hadirnya etnis dan budaya luar, ternyata belum dapat (bahkan tidak) berdampingan atau bergabung terhadap kedua jurai budaya pribumi yang telah ada, sehingga seringkali menimbulkan perselisihan/konflik.

Dari segi kenyataan pengamalannya, banyak pihak yang menganggap piil pesenggiri sekedar tradisi yang tidak mempunyai potensi untuk membangun kesejahteraan ekonomi. Ada yang menganggap piil pesenggiri sebagai kehormatan untuk diri sendiri dan mengagungkan orang yang dianggap lebih unggul. Sikap ini cenderung mendorong perilaku terbuka untuk mengorbankan orang lain untuk membahagiakan diri sendiri dan golongannya. Pihak generasi muda justeru keliru dalam menapsirkan dan menerapkan nilai-nilai piil pesenggiri. Harga diri dan kehormatan dinilai sebagai kesombongan dan penuh dengan sifat dendam dan tidak mau mengalah; bukan diterapkan sebagai unsur semangat kemandirian, tidak mampu menerima tantangan, tidak percaya diri, mudah putus asa, tidak mampu memikul tanggung jawab, dan merasa lebih tinggi dari orang lain.

Pada sisi lain, masyarakat adat Lampung memiliki bentuk kearifan lokal yang disebut HIPPUN. HIPPUN diartikan sebagai kegiatan kumpul, mengumpulkan, menghimpun (pendapat), atau menjaring aspirasi warga. BUHIPUN artinya melakukan kegiatan musyawarah untuk mencapai kesamaan pendapat atau kata sepakat (supaya mencapai kesepakatan, kesepakatan) terhadap rencana, kegiatan, peristiwa, atau cara pemecahan masalah tertentu. BUHIPUN merupakan anonim dari suatu upaya untuk mencapai atau mencari kesepakatan; maksudnya usaha menghimpun pendapat khalayak agar suatu rencana dan keputusan yang diambil bersama lebih aspiratif dan mewakili semua lapisan sosial. Secara ringkas, BUHIPUN dapat diartikan sebagai kegiatan musyawarah untuk mencapai mupakat. Istilah ini umumnya digunakan masyarakat adat

Saibatin lima marga Kalianda dan sekitar utk menyebut kegiatan musyawarah (Abdul Syani, 2013).

Dalam dialek bahasa yang berbeda, hippun adat disebut juga "*Peppung adat*", yaitu kegiatan musyawarah. Istilah peppung umumnya digunakan masyarakat adat Pepadun Abung siwo mego, Megow Pak Tulang Bawang, dan sebagian Pubian dalam menyebut kegiatan musyawarah. Peppung adat secara umum dapat artinya kegiatan berkumpul bersama antara penyimbang adat untuk mencapai kesepakatan tentang kepentingan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah adat, revitalisasi hukum-hukum adat atau untuk mengembangkan rasionalisasi adat istiadat demi kerukunan dan kesejahteraan masyarakat adat setempat.

Relatif sama dengan pengertian istilah buhippun, *Peppung* berarti melakukan kegiatan musyawarah untuk mencapai kesepakatan, kesepahaman atau kesamaan pendapat terhadap rencana, kegiatan, atau langkah-langkah tertentu untuk kepentingan bersama. Peppung pada dasarnya menunjuk pada suatu usaha menghimpun aspirasi publik sebagai bahan pertimbangan dalam mencari keputusan bersama tentang solusi atas suatu perkara atau strategi progres tentang rencana tertentu. Secara umum, peppung dipahami sebagai aktivitas musyawarah untuk mencapai kesamaan pendapat.

Warisan budaya dan nilai-nilai tradisional itu mengandung banyak kearifan lokal yang masih sangat relevan dengan kondisi saat ini, dan seharusnya dilestarikan, diadaptasi atau bahkan dikembangkan agar nilai-nilai kearifan lokal tetap relevan dengan kemajuan jaman. Diharapkan para tokoh / penyimbang adat lebih arif dalam bertahan terhadap derasnya tekanan budaya asing, mampu mengakomodasi dan mengintegrasikan unsur-unsur budaya asing yang relevan ke dalam budaya lokal, mampu mengendalikan dan memberi arah pada pengayaan budaya lokal.

Dalam kenyataannya banyak pihak yang belum mampu memahami makna, fungsi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kearifan lokal adat hippun cenderung diartikan sebagai kegiatan kumpul atau sekedar mengumpulkan teman-teman, dan bukan upaya menghimpun (pendapat), atau menjaring aspirasi warga untuk program pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Bhippun tidak diartikan sebagai kegiatan musyawarah untuk mufakat demi kepentingan bersama untuk membangun kesejahteraan, melainkan untuk mengambil manfaat pribadi dari keputusan musyawarah itu. Acara buhippun diartikan melakukan kegiatan musyawarah untuk adu pendapat dengan berusaha menjatuhkan pihak lain, siapa yang kuat dialah pemenangnya dan orang lain harus tunduk dengan keputusannya. Hippun dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencari dukungan, bukan untuk mencapai kesamaan pendapat atau kata sepakat (supaya mencapai kesepakatan, kesepahaman), baik dalam upaya penguatan strategi dan pendekatan terhadap upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, maupun usaha penanganan masalah perselisihan antar warga.

Konsekuensi dari kenyataan itu, buhippun seringkali menimbulkan masalah baru, seringkali menimbulkan ketegangan antar peserta hippun, lantaran masing-masing egois dan sukar mengakui pendapat peserta yang lain. Akibatnya usaha menghimpun pendapat khalayak agar suatu rencana dan keputusan yang diambil bersama cenderung mengalami kegagalan, dan tidak mampu menjaring aspirasi masyarakat pada umumnya.

Kegagalan yang seringkali dialami dalam mencari kesepakatan untuk penguatan strategi dan pendekatan nilai kearifan lokal adat hippun tersebut karena adanya hambatan kultur itu sendiri, yaitu:

1. Erosi nilai budaya, ketimpangan sosial dan pelanggaran norma sosial dan hukum,
2. Gelaja kemiskinan, prustasi, apatisme, kenakalan remaja, pelacuran, pengangguran dan kejahatan,
3. Ketidakmampuan menyerap dan menguasai kemajuan teknologi,
4. Rendahnya kemampuan masyarakat untuk menciptakan teknologi yang berakar dari budaya sendiri,

5. Anomie, yaitu suatu keadaan dimana nilai lama sudah ditinggalkan tapi nilai-nilai baru belum tumbuh secara kuat,
6. Tumbuh pola kehidupan yang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok,
7. Pembagian kerja yang heterogen, berbelit-belit dan fungsi yang beraneka ragam
8. Kompleksitas kepentingan berangsur meninggalkan prinsip norma hukum adat,
9. Agen pembangunan tidak mapan dalam beradaptasi dan kurang memperhitungkan institusi tradisional kehidupan masyarakat adat. Akibatnya program pembangunan ekonomi kerakyatan sering kurang mendapat dukungan masyarakat,
10. Dilema, disatu pihak masyarakat adat terkait pada hukum, sementara dipihak lain mereka dihadapkan dengan cara kerja yang rumit dan asing, kendatipun mereka mempunyai keinginan untuk meningkatkan kualitas hidupnya (Abdulsyani, seminar interaktif Hukum dan politik pertanahan dengan makalah: Hak ulayat dan strategi pembedayaan masyarakat adat, diselenggarakan di Graha parahita marcopolo hotel Bandar Lampung).

Searah dengan hambatan kultural itu, kearifan lokal adat hippun sebagai warisan budaya dan nilai-nilai tradisional itu dalam kenyataannya dianggap tidak relevan lagi dengan kemajuan dan kondisi saat ini. Upaya untuk pelestariannya makin rendah, bahkan upaya pengembangannya pun dianggap sebagai kegiatan pemborosan. Kepeloporan para tokoh / penyimbang adat juga makin sulit diharapkan; jika ada pun kearifan lokal hippun cenderung dimanfaatkan untuk menghimpun dukungan politik. Kenyataan lain kearifan lokal adat hippun jesteru larut dalam derasnya tekanan budaya asing, upaya memberi arah pada pengayaan budaya lokal tidak tercapai, bahkan tidak mampu mengendalikan fungsi nilai kearifan hippun itu untuk kepentingan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Suatu realitas perkembangan kehidupan masyarakat yang tidak dapat dipungkiri adalah gejala tantangan pluralistik etnis dan tekanan ekonomi kian mengedepan. Hal ini akhirnya berpengaruh pada terciptanya stratifikasi dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu dalam upaya pemberdayaan masyarakat adat harus dapat menempatkan peran individu ke dalam pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Dengan memberikan tanggungjawab kemandirian kepada masyarakat berdasarkan pengalaman sendiri dapat mendorong kearah terciptanya hasil kerja dan hasil guna yang tinggi. Masyarakat diarahkan pada kehidupan empiris dengan perjuangan dan kerja keras sesuai dengan tuntunan nilai-nilai luhur budaya daerah yang tertuang dalam pandangan hidupnya.

Atas dasar kenyataan itu, maka dalam penulisan makalah ini perlu pengkajian ilmiah, khususnya tentang strategi dan pendekatan nilai kearifan lokal Lampung dalam pemeliharaan keterteaman dan ketertiban Masyarakat desa.

Merujuk pada paparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam makalah ini, yaitu: Bagaimana trategi dan pendekatan nilai kearifan lokal Lampung piil pesenggiri dan hippun dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa?

Sedangkan tujuannya adalah untuk menjelaskan trategi dan pendekatan nilai kearifan lokal Lampung piil pesenggiri dan hippun dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.

Metode Penulisan

Metode penulisan makalah ini adalah studi pustaka, dengan pertimbangan bahwa metode ini dianggap efektif digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam aplikasi metode pustaka ini digunakan untuk menjaring data berupa materi, data, dan informasi yang diperoleh dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, buletin, jurnal imiah edisi cetak maupun

edisi online, artikel ilmiah yang bersumber dari internet, kertas kerja, hasil penelitian, makalah bahan seminar yang relevan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam makalah ini.

Data yang dianggap relevan tersebut adalah data tentang makna dan fungsi nilai-nilai kearifan lokal Lampung, khususnya piil pesenggiri dan unsur-unsurnya. Juga masalah-masalah terkini yang berkaitan dengan penerapan unsur-unsur piil pesenggiri dan adat hippun pemekonan yang bersumber dari studi pustaka. Kecuali itu dikumpulkan juga data dan informasi yang berkaitan dengan upaya masyarakat desa dalam upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum

Pembahasan

Secara umum kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil pemikiran, rasa dan hasil karya manusia sebagai wujud dari interaksi adat istiadat masyarakat. Ada juga yang mengartikan kebudayaan secara luas, yaitu total dan pikiran, karya dan hasil karya manusia yang dicetuskan sesudah adanya suatu proses interaksi. Konsep ini tentu sangat luas karena meliputi seluruh aktivitas manusia dalam kehidupannya. Kata kebudayaan merupakan pengertian yang meliputi unsur hubungan/interaksi antara satu atau lebih manusia dalam suatu kelompok masyarakat, yang dalam pola dan tingkah laku interaksinya didasarkan pada unsur kebiasaan dalam masyarakat yang berlaku, atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai interaksi sosial yang berlandaskan pada lingkungannya. Sedangkan kata budaya, yaitu merupakan pengembangan dari kata majemuk budi-daya, yang daya dan budi atau kekuatan dan akal.

Dengan pendekatan kebudayaannya yang struktural dan fungsional, van Peursen menyajikan suatu model kebudayaan yang bertahap tiga (mitologis, ontologis, dan fungsional), tapi yang serentak bersifat progresif dan integral antara ketiganya. Peursen juga menandakan bahwa kebudayaan itu terus menerus nampak sebagai suatu strategi (atau rencana) yang harus dibuat guna membebaskan manusia dari penjara yang dibuat manusia sendiri melalui kreativitas etis dan pembaharuan yang invensif (van Peursen, 1989).

Dalam perspektif Peursen, pembangunan sebuah bangsa yang bercirikan fluralisme kebudayaan dengan pola pendekatan fungsional kebudayaan akan menunjang kebudayaan-kebudayaan lokal untuk secara sadar “berada” (eksis) dan berperan (partisipatif) dalam proses kristalisasi kebudayaan nasional dan pembangunan bangsa. Menurut Peursen mengutip pendapat filsuf Jerman Immanuel Kant, bahwa ciri khas kebudayaan terdapat dalam kemampuan manusia untuk mengajar dirinya sendiri. Kebudayaan merupakan semacam sekolah di mana manusia dapat terus menerus belajar.

Pengertian kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan atau nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat atau (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Secara etimologis, kearifan (*wisdom*) berarti kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya untuk menyikapi sesuatu kejadian, obyek atau situasi. Sedangkan lokal, menunjukkan ruang interaksi di mana peristiwa atau situasi tersebut terjadi. Filosofis kearifan lokal sebagai sistem pengetahuan masyarakat lokal/pribumi (*indigenous knowledge systems*) yang bersifat empirik dan pragmatis. Bersifat empirik karena hasil olahan masyarakat secara lokal berangkat dari fakta-fakta yang terjadi di sekeliling kehidupan mereka. Bertujuan pragmatis karena seluruh konsep yang terbangun sebagai hasil olah pikir dalam sistem pengetahuan itu bertujuan untuk pemecahan masalah sehari-hari (*daily problem solving*).

Ada 5 (lima) saran strategis pengembangan relasi budaya dan agama sebagaimana dikemukakan oleh Philipus Tule, berdasarkan hasil kajiannya terhadap kebudayaan masyarakat Flores NTT. (sesuai juga dengan sistem penguatan kekerabatan dalam budaya masyarakat Lampung), yaitu:

- 1) Pelanggungan, pengembangan dan perayaan budaya lokal (daerah) yang unik dan terancam punah;
- 2) Prioritas investasi demi proteksi, pengembangan dan promosi aset budaya lokal yang memiliki nilai positif dan progresif;
- 3) Penciptaan kesempatan bagi individu dan masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam aktivitas perayaan budaya;
- 4) Promosi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan lewat sektor pariwisata berbasis kebudayaan lokal dan pelbagai industri kreatif; dan
- 5) Penghargaan dan pendanaan oleh pemerintah untuk pelbagai kegiatan penelitian dan publikasi akademis oleh pakar dan lembaga penelitian lokal (daerah) serta usaha pelestarian lewat museum budaya daerah.

Menurut Robert Sibarani (2013), kearifan lokal itu adalah nilai dan norma budaya yang berlaku dalam menata kehidupan masyarakat. Nilai dan norma yang diyakini kebenarannya menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari masyarakat setempat. Kearifan lokal adalah pengetahuan asli (*indigineous knowledge*) atau kecerdasan lokal (*local genius*) suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai kemajuan komunitas baik dalam penciptaan kedamaian maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kearifan lokal itu mungkin berupa pengetahuan lokal, keterampilan lokal, kecerdasan lokal, sumber daya lokal, proses sosial lokal, norma-etika lokal, dan adat-istiadat lokal. Oleh karena itu, sangat beralasan jika Geertz mengatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Hal itu berarti kearifan lokal yang di dalamnya berisi nilai dan norma budaya untuk kedamaian dan kesejahteraan dapat digunakan sebagai dasar dalam pembangunan masyarakat. <http://www.museum.pusaka-nias.org/2013/02/pembentukan-karakter-berbasis-kearifan.html>

Sedangkan Philipus Tule (2008), menyatakan bahwa bertolak dari pengalaman global, mencoba menilai pelbagai kebijakan dan realitas pembangunan bangsa Indonesia yang berbasis budaya. Tanpa pretensi melabelkan budaya Indonesia (dan aneka budaya lokal) sebagai yang putih dan hitam, yang progresif atau yang statis, diyakini bahwa terdapat sejumlah besar nilai-nilai budaya lokal yang positif dan progresif. Salah satu nilai budaya yang positif adalah kekerabatan yang berbasis rumah sebagai wahana toleransi dan penunjang pembangunan. Dalam studi antropologi tentang “rumah asal” telah menjadi fokus penting, di samping studi mengenai “silsilah leluhur asal” (*geneology*) dan “tempat asal” (*topogeny*). Rumah dalam konteks ini tidak saja dipahami sebagai suatu konstruksi (bangunan) fisik dan tempat diam dari sekelompok manusia. Rumah juga memiliki makna simbolis yang mengejawantahkan leluhur sekaligus merupakan terminologi untuk unit sosial. Sebagai konsekuensi dari masyarakat berbasis rumah itu, suatu sistem kekerabatan dibangun dan dihayati penuh keselarasan dan keseimbangan (harmoni) antara anggotanya: Muslim, Krinten dan penganut agama asli. Lebih jauh dari itu, kekerabatan bukan saja dihayati secara terbatas pada asas hubungan darah (*consanguinal*) ataupun hubungan perkawinan. Kekerabatan juga dikonstruksi oleh masyarakat adat menjadi lebih luas jangkauannya lewat “proses inkorporasi para pendatang” (entah orang Jawa, Cina dan Arab) yang bisa mengubah status “orang luar” jadi “orang dalam” dengan seperangkat kewajiban sosial yang harus dipeluhinya selama mereka masih menghuni kawasan tanah ulayat dari etnis itu.

Nilai kearifan lokal Lampung yang dapat dipertimbangkan sebagai strategi sosial budaya dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, yaitu “*Falsafah hidup Piil Pesenggiri dan adat hippun*”. Menurut kitab Kuntara Raja Niti, orang Lampung memiliki sifat malu melakukan pekerjaan hina menurut agama serta memiliki harga diri yang terhormat. Ke-dua nilai kearifan lokal ulun Lampung ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Piil Pesenggiri

Piil Pesenggiri mempunyai nilai-nilai budaya yang luhur yang perlu di dipahami dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karakteristik orang yang memiliki harga diri yang tinggi adalah kepribadian yang memiliki kesadaran untuk dapat membangkitkan nilai-nilai positif kehormatan diri sendiri dan orang lain, yaitu sanggup menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Hidup dengan penuh kesadaran berarti mampu membangkitkan kondisi pikiran yang sesuai kenyataan yang dihadapi, bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan yang dilakukan. Arogansi dan berlebihan dalam mengagungkan kemampuan diri sendiri merupakan gambaran tentang rendahnya harga diri atau runtuhnya kehormatan seseorang (Abdul Syani, 2010: <http://blog.unila.ac.id/abdulsyani/>).

Piil pesenggiri juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut harga diri, sikap dan perilaku yang dapat menjaga dan menegakkan nama baik serta martabat secara pribadi maupun secara kelompok senantiasa dipertahankan.

Secara ringkas pengamalan dari prinsip-prinsip Piil Pesenggiri itu dalam kehidupan sehari-hari dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.1 Juluk-Adek

Secara etimologis Juluk-adek dapat diartikan gelar adat, yang terdiri dari kata juluk dan adek, yang masing-masing mempunyai makna; Juluk adalah nama panggilan keluarga seorang pria/wanita yang diberikan pada waktu mereka masih muda atau remaja yang belum menikah, dan adek bermakna gelar/nama panggilan adat seorang pria/wanita yang sudah menikah melalui prosesi pemberian gelar adat. Penobatan juluk-adek dilakukan dalam suatu upacara adat sebagai media peresmian.

Karena juluk-adek melekat pada pribadi, maka seyogyanya anggota masyarakat Lampung harus memelihara nama tersebut dengan sebaik-baiknya dalam wujud perilaku pergaulan kemasyarakatan sehari-hari. Juluk-adek merupakan asas identitas dan sebagai sumber motivasi bagi anggota masyarakat Lampung untuk dapat menempatkan hak dan kewajibannya, kata dan perbuatannya dalam setiap perilaku dan karyanya.

1.2 Nemui-Nyimah

Nemui berasal dari kata benda *temui* yang berarti tamu, kemudian menjadi kata kerja *nemui* yang berarti mertamu atau mengunjungi/silaturahmi. *Nyimah* berasal dari kata benda "*simah*", kemudian menjadi kata kerja "*nyimah*" yang berarti suka memberi (pemurah). Sedangkan secara harfiah *nemui-nyimah* diartikan sebagai sikap santun, pemurah, terbuka tangan, suka memberi dan menerima dalam arti material sesuai dengan kemampuan. *Nemui-nyimah* merupakan ungkapan asas kekeluargaan untuk menciptakan suatu sikap keakraban dan kerukunan serta silaturahmi. *Nemui-nyimah* merupakan kewajiban bagi suatu keluarga dari masyarakat Lampung umumnya untuk tetap menjaga silaturahmi, dimana ikatan keluarga secara genealogis selalu terpelihara dengan prinsip keterbukaan, kepantasan dan kewajaran.

Bentuk konkrit *nemui nyimah* dalam konteks kehidupan masyarakat dewasa ini lebih tepat diterjemahkan sebagai sikap kepedulian sosial dan rasa setiakawan. Suatu keluarga yang memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan, tentunya berpandangan luas ke depan dengan motivasi kerja keras, jujur dan tidak merugikan orang lain. Secara ringkas *nemui-nyimah* dapat diartikan ramah dan terbuka, yaitu suka saling mengunjungi untuk bersilaturahmi dan ramah dalam menerima tamu.

1.3 Nengah-Nyappur

Nengah berasal dari kata benda, kemudian berubah menjadi kata kerja yang berarti berada di tengah. Sedangkan *nyappur* berasal dari kata benda *cappur* menjadi kata kerja *nyappur* yang berarti baur atau berbaur. Secara harfiah dapat diartikan sebagai sikap suka bergaul, suka bersahabat dan toleran antar sesama. *Nengah-nyappur* menggambarkan bahwa anggota masyarakat Lampung mengutamakan rasa kekeluargaan

dan didukung dengan sikap suka bergaul dan bersahabat dengan siapa saja, tidak membedakan suku, agama, tingkatan, asal usul dan golongan. Sikap suka bergaul dan bersahabat menumbuhkan semangat suka bekerjasama dan tenggang rasa (toleransi) yang tinggi antar sesamanya. Sikap toleransi akan menumbuhkan sikap ingin tahu, mau mendengarkan nasehat orang lain, memacu semangat kreativitas dan tanggap terhadap perkembangan gejala-gejala sosial. Oleh sebab itu dapat diambil suatu konklusi bahwa sikap nengah-nyappur menunjuk kepada nilai musyawarah untuk mufakat. Sikap nengah nyappur melambangkan sikap nalar yang baik, tertib dan seklaigus merupakan embrio dari kesungguhan untuk meningkatkan pengetahuan serta sikap adaptif terhadap perubahan. Melihat kondisi kehidupan masyarakat Lampung yang pluralistik, maka dapat dipahami bahwa penduduk daerah ini telah menjalankan prinsip hidup nengah-nyappur secara wajar dan positif.

Sikap nengah-nyappur juga menunjukkan sikap ingin tahu yang tinggi, sehingga menumbuhkan sikap kepeloporan. Pandangan atau pemikiran demikian menggabarkan bahwa anggota masyarakat Lampung merupakan bentuk kehidupan yang memiliki jiwa dan semangat kerja keras dan gigih untuk mencapai tujuan masa depannya dalam berbagai bidang kehidupan.

Nengah-nyappur merupakan pencerminan dari asas musyawarah untuk mufakat. Sebagai modal untuk bermusyawarah tentunya seseorang harus mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas, sikap toleransi yang tinggi dan melaksanakan segala keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Dengan demikian berarti masyarakat Lampung pada umumnya dituntut kemampuannya untuk dapat menempatkan diri pada posisi yang wajar, yaitu dalam arti sopan dalam sikap perbuatan dan santun dalam tutur kata. Makna yang lebih dalam adalah harus siap mendengarkan, menganalisis, dan harus siap menyampaikan informasi dengan tertib dan bermakna. Secara ringkas nemui-nyimah dapat diartikan suka bergaul, suka dan aktif berbaur dengan kegiatan masyarakat (tidak individualis).

1.4 Sakai-Sambaiyan

Sakai bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk benda dan jasa yang bernilai ekonomis yang dalam prakteknya cenderung menghendaki saling berbalas. Sedangkan sambaiyan bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang, sekelompok orang atau untuk kepentingan umum secara sosial berbentuk benda dan jasa tanpa mengharapkan balasan.

Sakai sambaiyan berarti tolong menolong dan gotong royong, artinya memahami makna kebersamaan atau guyub. Sakai-sambayan pada hakekatnya adalah menunjukkan rasa partisipasi serta solidaritas yang tinggi terhadap berbagai kegiatan pribadi dan sosial kemasyarakatan pada umumnya.

Sebagai masyarakat Lampung akan merasa kurang terpandang bila ia tidak mampu berpartisipasi dalam suatu kegiatan kemasyarakatan. Perilaku ini menggambarkan sikap toleransi kebersamaan, sehingga seseorang akan memberikan apa saja secara suka rela apabila pemberian itu memiliki nilai manfaat bagi orang atau anggota masyarakat lain yang membutuhkan. Sakai sembayan senantiasa menjaga sikap kebersamaan, termasuk di dalamnya sikap saling tolong menolong, terutama terhadap kaum yang lemah dalam pengertian menyeluruh, baik lahir maupun batin. Secara ringkas sakai-sambayan dapat diartikan suka saling tolong menolong terhadap anggota masyarakat dan suka bergotong royong untuk tujuan kepentingan bersama

Sifat-sifat ulun Lampung itu seringkali diungkapkan dalam adi-adi (pantun), yaitu:

1. Tandani hulun Lampung, wat piil-pusangiri
(*tandanya orang Lampung, memiliki kehormatan*)
2. Mulia hina sehitung, wat malu rega diri
(*mulia atau hina diperhitungkan, ada rasa malu dan harga diri*)

3. Juluk-adok ram pegung, nemui-nyimah muwari
(*gelar adat dipegang teguh, ramah tamah dan bersaudara*)
4. Nengah-nyampur mak ngungkung, sakai-sambaian gawi
(*bergaul tidak terbatas, saling mambantu dan bergotong royong*)

2. Adat HIPPUN

Adat hippun adalah suatu kebiasaan bermusyawarah dalam setiap perencanaan, kegiatan ataupun dalam penyelesaian masalah yg berlaku bagi masyarakat adat. Bagi warga yang tidak mendukung, menghindar atau menghambat acara hippun, seringkali ia disebut "*mak ngidok piil*" (tidak punya malu). Adat hippun secara ideal dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Seluruh tahapan yang dilalui memiliki makna tersendiri, sehingga dalam pelaksanaannya tidak bisa sembarangan. Adapun tahapan prosesi hippun secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. *Hippun wakhi pelambanan* (musyawarah antar anggota keluarga, keluarga besar, kerabat dekat)
2. *Hippun suku* (musyawarah antara kepala-kepala suku yang mewakili pihak-pihak keluarga-keluarga yang melaksanakan upacara adat muwakhi).
3. Hippun tiyuh/pekon (antar penyimbang tiyuh dari masing-masing pihak calon angkon muakhi)
4. *Hippun Marga* (musyawarah antar kepala/perwatin marga)
5. *Hippun Lamban Balak* (persiapan penentuan gelar adat calon wakhi, undangan *Tuha Khaja* dan perangkat pemerintahan adatnya, penyusunan naskah *cawa tetangguh*/pidato/wejangan/pesan tuha khaja tentang hak dan kewajiban penyimbang wakhi, dan penyusunan janji sumpah atau katam)
6. Persiapan *pakaian adat* masing penyimbang/tuha khaja, keluarga, dan pihak-pihak calon angkon muakhi (sigokh/siger/mahkota adat, baju/beskap/jas, sarung tupal, disesuaikan), payung adat, jejalan handak, kebung, lamat/kursi/dan lain-lain.
7. Persiapan *lokasi* prosesi pelaksanaan hippun
8. Pembacaan *susunan acara* oleh Penglaku tuha (petugas/panitia penyelenggara adat tetap yang senior)
9. Penetapan dan pembuatan *keputusan* hippun
10. Acara *petutup* dengan doa (petugas).

Dari tahapan tersebut dapat diketahui bahwa prosesi *hippun* (pemekon) yang dilaksanakan oleh Masyarakat Adat Lampung sangat penting, terutama untuk memelihara silaturahmi antar warga, menjaga kerukunan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu acara hippun perlu dilestarikan, meskipun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman dan rasional. Adat hippun merupakan wujud semangat kearifan lokal masyarakat Lampung dalam upaya mencapai kesepakatan bersama. Dengan hippun diperoleh kesepakatan yang mengikat keberbersama warga atas usaha pemeliharaan ketenteraman dan keamanan masyarakat tersebut. Artinya, nilai kearifan lokal hippun ini dapat dijadikan sebagai strategi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, khususnya masyarakat Desa. Kecuali itu adat hippun dapat dijadikan strategi dan pendekatan ampuh dalam penyelesaian perselisihan/konflik.

Dalam tahapan prosesi adat hippun tersebut, seperti hippun penyelesaian perselisihan warga, lazim juga disertai dengan perjanjian formal adat lokal. Perjanjian ini memiliki daya ikat yang kuat untuk memelihara perdamaian antar pihak, sehingga jauh dari ancaman konflik. Perjanjian dalam adat hippun biasanya berupa pernyataan perjanjian atas nama Allah SWT untuk selalu saling menjaga kesepakatan, saling percaya, selalu menjaga ketenteraman dan ketertiban warga. Apabila terjadi pelanggaran, maka sanksinya adalah cidera dan tercela secara sosial budaya, dikucilkan dari kegiatan adat dengan batas waktu tertentu, dan membayar denda adat.

Daya ikat dari perjanjian dalam adat hippun itu sangat kuat, melekat pada setiap diri dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Oleh karena itu upaya pemeliharaan dan implementasi nilai-nilai adat hippun memiliki potensi strategis dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa. Di samping dapat digunakan sebagai strategi menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat secara arif dan bijaksana. Melalui pendekatan kearifan lokal budaya, konflik dapat diselesaikan dengan cara yang bermoral, tanpa menimbulkan kerugian dari pihak manapun.

Pendekatan sosial secara interaktif dapat dilakukan penyederhanaan kondisi sosial, yaitu merujuk pada spesifikasi budaya dlm menentukan prioritas pengembangan potensi masyarakat. Sasarannya adalah revitalisasi kekuatan partisipasi masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) melibatkan masyarakat dlm setiap perencanaan & pengambilan keputusan program pembangunan sebagai wujud demokrasi sosial,
- 2) program yang dilegitimasi dapat menjamin prioritas hak-hak masyarakat, dan pemerataan (kesempatan usaha),
- 3) memberdayakan independensi peranserta masyarakat,
- 4) membangun kemitraan dengan pemerintah, kaum intelektual, dan lembaga-lembaga terkait,
- 5) mengangkat dan memberdayakan nilai-nilai gotong royong dan aspirasi masyarakat, agar tupoksi dpt menyentuh kepentingan masyarakat, setidaknya dapat mencerminkan cara hidup yang terarah dengan contoh-contoh perilaku dan perlakuan yang nyata dan simpatik. Kalau ingin memberantas minuman keras jangan demon terhadap botol minuman, melarang merokok tapi kalau merokok katanya MACHO (Abdulsyani, 2010. makalah seminar budaya tentang pendekatan sosial budaya).

Dalam rangka penanganan perselisihan yang selama ini mengalami kebuntuan akibat dari berbagai campurtangan dan pola pendekatan yang tidak relevan dengan kearifan lokal masyarakat adat setempat. Pada akhirnya seringkali menimbulkan masalah baru, yaitu konflik laten, kecemasan berkepanjangan, dan keragaman faktor pemicu konflik terbuka yang sulit diprediksi. Ada beberapa alasan pentingnya memelihara dan implementasi kearifan lokal adat hippun tersebut, yaitu:

1. Nilai-nilai kearifan lokal hippun merupakan tradisi /pedoman yg dianggap ampuh/efektif dalam membuat keputusan tentang perencanaan pembangunan desa, khususnya dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
2. Nilai-nilai kearifan lokal hippun merupakan tradisi /pedoman yg dianggap ampuh/efektif dalam membuat keputusan tentang penyelesaian konflik, yaitu adat kemuarian (kemuakhian/mewarei adat/angke(o)n muakhi)
3. Mekanisme resolusi konflik dg tradisi adat hippun kemuarian tertuang dlm bentuk upacara perdamaian pihak2 yg berkonflik, bermusyawarah secara kekeluargaan yg difasilitasi oleh lembaga peradilan adat atau formal menurut hukum pemerintahan adat (akan lebih baik formal secara kenegaraan)
4. Landasan adat hippun adalah falsafah hidup Piil Pesenggiri khususnya elemen nemui nyimah, negah nyappur, sakai sambayan, maka masyarakat adat Lampung termasuk kelompok masyarakat yg dinamis dg berpegang pd norma kesusilaan dan sosial yg mengedepankan musyawarah utk mufakat.
5. Acara hippun ditetapkan atas dasar hasil musyawarah (pepung/hippun) dan diputuskan berdasarkan hukum adat yg memiliki daya ikat sangat kuat dan bersanksi jika dilanggar.
6. Jika telah ditetapkan keputusan bersama tentang rencana tertentu, khususnya upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat setempat, maka konsekuensinya siapapun, dari manapun, seperti apapun bentuk, rupa asal usul, mereka tetap saling menghormati, menghargai, toleransi, terbuka, saling membela,

melindungi, dan tolong menolong sebagaimana prinsip hidup piil pesengiri. Keputusan hippun disadari oleh berbagai pihak yang terlibat secara arif, baik emosional maupun rasional.

7. Bagi pihak-pihak yang terlibat dalam hippun, senantiasa akan terikat kuat dengan ikrar/janji) yg telah disepakati bersama sebagai keputusan sakral. Oleh karena itu masyarakat adat Lampung pada umumnya menjadikan tradisi lokal adat hippun sebagai pedoman strategis, khususnya dalam upaya dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, di samping upaya penyelesaian konflik.

Sesuai dengan falsafah pemersatu Lampung yang mengajarkan bahwa: "*mabulat khupa iyuk, malukhus khupa sepuk*"; bulat seperti bambu peniup api, lurus seperti jalannya panah, Artinya sikap mental seiya-sekata (persatuan dan kesatuan) antarwarga sepatutnya memang dimiliki demi mencukupi kepentingan bersama suatu lingkungan, komunitas atau negara.

Atas dasar pembahasan di atas, maka nilai kearifan lokal prinsip "*piil pesengiri*" dan "*adat hippun*" dapat direkomendasikan sebagai strategi dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, di samping upaya penyelesaian konflik. Perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat adat tanpa memandang perbedaan latar belakang sosial budaya. Pendekatan ini menyentuh kesadaran hati, empati, terbuka, pengampunan, rekonsiliasi, kebenaran, keadilan restorative (pemulihan hubungan yang sudah retak), dan kerjasama, melalui keteladanan. Praktik fungsi-fungsi sosial ini perlu dilakukan secara berkesinambungan sampai membentuk karakter kebajikan pribadi yang memiliki kekuatan mengikat. Kondisi ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya masyarakat yang memiliki wawasan keinginan untuk membangun perdamaian, searah dengan kesepakatan bersama untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, dapat dilakukan melalui upaya melaksanakan peningkatan dan pengembangan seluruh potensi dan sumber daya manusia sebagai potensi untuk menunjang sistem pertahanan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan secara terpadu, yaitu mencakup:

- 1) Upaya penguatan dan memberikan peranan kepada organisasi kemasyarakatan sebagai potensi lokal maupun nasional dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara.
- 2) Upaya membangun jaringan informasi pemberdayaan masyarakat yang dapat menumbuhkan dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya guna mendorong kemampuan masyarakat untuk berdialog mengatasi konflik dalam kerangka wawasan kebangsaan dan bela negara.
- 3) Upaya penguatan masyarakat dan kelembagaannya untuk mampu membangun dan melaksanakan fungsi mediasi yang mampu menghubungkan visi kebangsaan dan bela negar serta aspirasi masyarakat.
- 4) Upaya penguatan masyarakat dan kelembagaannya untuk mendorong proses kaderisasi kepemimpinan masyarakat yang di samping memiliki kemampuan manajerial, juga memiliki visi kebangsaan dan bela negara.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada dua nilai kearifan lokal Lampung yang dapat dipertimbangkan sebagai strategi dan pendekatan sosial budaya dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, yaitu Falsafah hidup Piil Pesengiri dan adat hippun.

Kearifan lokal piil pesengiri menyangkut prinsip harga diri, sikap dan perilaku yg dpt menjaga dan menegakkan nama baik serta martabat (kehormatan) pribadi dan kelompok. Konsekuensi orang yg memiliki karakteristik mengagungkan harga diri dan kehormatan pribadi dan kelompoknya adalah harus memiliki semangat yg tinggi dlm

memelihara dan memperjuangkannya dengan kerja keras, lebih mandiri, lebih mampu dan berdaya, sanggup menerima tantangan, lebih percaya diri, tidak mudah menyerah dan putus asa, mudah memikul tanggung jawab, dan mampu merubah kualitas kehidupan menjadi lebih baik. Sebaliknya menghindari perbuatan memalukan, hina, arogansi, amoral dan perbuatan kejahatan lainnya, krn perbuatan ini merupakan gambaran rendahnya harga diri atau runtuhnya kehormatan seseorang. Dalam karakteristik itu terdapat prinsip *malu* jika tidak mampu memelihara kehormatannya, malu jika tidak berhasil mengejar berprestasi.

Secara umum nilai kearifan lokal "*piil pesenggiri dan hippun*" dapat direkomendasikan sebagai strategi dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, di samping upaya penyelesaian konflik. Perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat adat tanpa memandang perbedaan latar belakang sosial budaya. Pendekatan ini menyentuh kesadaran hati, empati, erbuca, pengampunan, rekonsiliasi, kebenaran, keadilan restorative (pemulihan hubungan yang sudah retak), dan kerjasama, melalui keteladanan. Praktik fungsi-fungsi sosial ini perlu dilakukan secara berkesinambungan sampai membentuk karakter kebajikan pribadi yang memiliki kekuatan mengikat. Kondisi ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya masyarakat yang memiliki wawasan keinginan untuk membangun perdamaian, searah dengan kesepakatan bersama untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.

Langkah-langkah untuk membangun kearifan lokal, diharapkan para pemuka adat, masyarakat, dan tokoh agama secara simultan melakukan sosialisasi ke setiap kelompok warga masyarakat adat untuk memberikan pencerahan dan menciptakan kerukunan bersama. Kecuali itu agar masyarakat tidak terseret pada pemikiran sempit yang memanfaatkan nilai kearifan lokal untuk kepentingan pribadi dan golongan. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat baru kearifan lokal dalam memelihara dan membangun kerukunan masyarakat meski dalam suasana multikultural dan multietnis.

Daftar Pustaka

- Abdulsyani, 2012. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- , 2013. Makalah: Kearifan Lokal Sebagai Aset Budaya Bangsa Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Masyarakat (*di sampaikan pada seminar/lokakarya pada kegiatan Diklat Bidik Misi Di Universitas Lampung, tanggal 24 Januari 2013*).
- , 2010. (<http://blog.unila.ac.id/abdulsyani/>).
- , 2013. Makalah: Multikulturalisme Lampung: Penghargaan Atas Kearifan Lokal Untuk Menciptakan Stabilitas Daerah (*Disampaikan pada kegiatan Orientasi Kewaspadaan Nasional bagi Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Elemen masyarakat di Provinsi Lampung oleh Badan Kesbangpol dengan tema "Meningkatkan Kewaspadaan nasional melalui deteksi dini, cegah dini, dan kewaspadaan dini demi tercapainya suawana kondusif di Provinsi Lampung, di Hotel Andalas Permai Jl.S.Parman, Bandar Lampung pada tanggal 25 Juni 2013*).
- , Seminar interaktif Hukum dan politik pertanahan dengan makalah: *Hak ulayat dan strategi pembedayaan masyarakat adat*, diselenggarakan di Graha parahita marcopolo hotel Bandar Lampung).
- , 2010. *makalah seminar budaya tentang pendekatan sosial budaya*.
- Robert Sibarani, 2013. (<http://www.museum.pusaka-nias.org/2013/02/pembentukan-karakter-berbasis-kearifan.html>)
- Philipus Tule, SVD., 2008. *Strategi Kebudayaan Lokal Keo, Flores NTT: Wahana Harmonisasi Masyarakat melalui Pembangunan dan Kesejahteraan*. Editor: Kenedi Nurhan, Penerbit: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI Bekerjasama dengan Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia (BPKKI).
- Van Peursen, 1989. *Strategi Kebudayaan*. Penerbit: Kanisus, edisi kedua. Yogyakarta.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INKLUSIF: MELALUI PERSPEKTIF MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA SEKITAR PERTAMBANGAN BATUBARA DI DESA MANDUIN KECAMATANMUARA HARUS KABUPATEN TABALONG PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

Angraeni Primawati¹, Yoyok Hendarso²

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional¹

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya²

Email: angkyprima@yahoo.com¹, yoyok_hendarso60@yahoo.com²

Abstrak

Tanggung jawab utama dalam program pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan dan kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerja sama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama dengan kemandirian masyarakat. Terkait dengan program pembangunan, bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membentuk individu dan masyarakat mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Keberdayaan masyarakat yang ditandai adanya kemandirian dapat dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat inklusif merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Isu-isu kemiskinanpun senantiasa cocok diselesaikan, akar masalahnya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat inklusif. Oleh Karena itu Corporate Social Responsibility (CSR) mandiri pedesaan yang didapatkan dari Perusahaan Pertambangan Batubara hadir untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja. Masyarakat miskin secara mandiri sebagai prioritas yang mendesak bisa memberikan kesejahteraan masyarakat miskin, khususnya terhadap masyarakat pedesaan. CSR sebagai penanggulangan kemiskinan di pedesaan harus lebih mengutamakan pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya dengan mendudukkan masyarakat sebagai pelaku utamanya melalui partisipasi aktif. Melalui partisipasi aktif dari masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran tidak hanya berkedudukan menjadi objek program tetapi masyarakat juga sebagai subyek program.

Partisipasi masyarakat menjadi perspektif masyarakat yang sangat penting mengingat kompleksitas masalah kemiskinan yang ada. Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat inklusif mandiri pedesaan baik pada tahap sosialisasi dan perencanaan maupun tahap pelaksanaan dan pengawasan programnya, dalam hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan peran aktif masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Program ini juga dapat dikatakan membawa perubahan yang positif baik segi lingkungan, pembangunan manusia, dan perihal pemberdayaan masyarakat. Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumber daya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat inklusif adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Secara sosial, masyarakat sekitar pertambangan batubara desa Manduin Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan sampai saat ini tetap teridentifikasi sebagai masyarakat marginal dan tidak memiliki daya, kekuatan dan kemampuan yang dapat diandalkan serta tidak memiliki modal yang memadai untuk bersaing dengan masyarakat kapitalis atau masyarakat pengusaha yang secara sosial dan politik memiliki daya, kekuatan, dan kemampuan yang memadai.

Kata Kunci: Pemberdayaan masyarakat inklusif, perspektif masyarakat dan pembangunan masyarakat desa

Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan Masyarakat Inklusif merujuk pada pengertian perluasan kebebasan memilih dan bertindak. Bagi masyarakat miskin, kebebasan ini sangat terbatas karena ketidakmampuan bersuara (*voicelessness*) dan ketidak berdayaan (*powerlessness*) dalam hubungannya dengan negara dan pasar. Karena kemiskinan adalah multi dimensi, masyarakat miskin membutuhkan kemampuan pada tingkat individu (seperti kesehatan, pendidikan dan perumahan dan lain-lain) dan pada tingkat kolektif (seperti bertindak bersama untuk mengatasi masalah). Memberdayakan masyarakat miskin dan terbelakang menuntut upaya menghilangkan penyebab ketidakmampuan mereka meningkatkan kualitas hidupnya.

Unsur-unsur pemberdayaan masyarakat pada umumnya adalah (1) Inklusi dan partisipasi (2) Akses pada informasi (3) Kapasitas organisasi lokal (4) Profesionalitas pelaku pemberdaya. Keempat elemen ini terkait satu sama lain dan saling mendukung.

Inklusi berfokus pada pertanyaan siapa yang diberdayakan? Sedangkan partisipasi perspektif masyarakat berfokus pada bagaimana mereka diberdayakan dan peran apa yang mereka mainkan setelah mereka menjadi bagian dari kelompok yang diberdayakan? Menyediakan ruang partisipasi masyarakat miskin dalam menetapkan prioritas pembangunan pada tingkat daerah maupun nasional diperlukan guna menjamin bahwa sumber daya pembanguann (dana, prasarana/sarana, tenaga ahli dan lain-lain) yang terbatas secara nasional maupun pada tingkat lokal/daerah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat miskin tersebut.

Partisipasi yang keliru adalah melibatkan masyarakat dalam pembangunan hanya untuk didengar suaranya tanpa betul-betul memberi peluang bagi mereka untuk ikut mengambil keputusan. Pengambilan keputusan yang partisipasif tidak selalu harmonis dan seringkali ada banyak prioritas yang harus dipilih, oleh sebab itu mekanisme resolusi konflik kepentingan harus dikuasai oleh pemerintah guna mengelola ketidak sepakatan. Ada beberapa bentuk partisipasi yaitu (a) Secara langsung. (b) Dengan perwakilan (yaitu memilih wakil dari kelompok-kelompok masyarakat), (c) Secara politis (yaitu pemilihan terhadap mereka yang mencalonkan diri untuk mewakili mereka) (d) Berbasis informasi (yaitu dengan data yang diolah dan dilaporkan kepada pengambil keputusan). (e) Berbasis mekanisme pasar yang kompetitif (misalnya dengan pembayaran terhadap jasa yang diterima).

Pertama, partisipasi secara langsung oleh masing-masing anggota masyarakat adalah tidak realistis, kecuali pada masyarakat yang jumlah penduduknya sedikit, atau untuk mengambil keputusan-keputusan yang mendasar melalui *referendum*. Yang umum dilakukan adalah partisipasi secara tidak langsung, oleh wakil-wakil masyarakat atau berdasarkan informasi dan mekanisme pasar. Organisasi berbasis masyarakat seperti lembaga riset, LSM, organisasi keagamaan dan lain-lain mempunyai peran yang penting dalam membawa suara masyarakat miskin untuk didengar oleh pengambil keputusan tingkat daerah dan nasional.

Walaupun keterwakilan sudah dilakukan dengan benar, proses partisipasi masih belum benar jika penyelenggarannya dilakukan secara tidak sungguh-sungguh. Upaya yang dilandasi niat jujur untuk menampung pendapat masyarakat terhadap kebijakan yang menyangkut ruang hidup mereka dapat menjadi tidak berhasil. Jika pendapat wakil-wakil masyarakat yang diharapkan mewakili kepentingan semua unsur masyarakat itu kemudian hanya diproses sekedarnya saja, tanpa upaya memahami pertimbangan apa dibalik pendapat yang diutarakan wakil-wakil tersebut.

Partisipasi semu seperti itu menambah ongkos pembangunan, tanpa ada mafaat yang jelas bagi peserta yang diajak berpartisipasi. Upaya melibatkan masyarakat dalam pengertian yang benar adalah memberi masyarakat kewenangan untuk memutuskan sendiri apa-apa yang menurut mereka penting dalam kehidupan mereka.

Unsur kedua, akses pada informasi, adalah aliran informasi yang tidak tersumbat antara masyarakat dengan masyarakat lain dan antara masyarakat dengan pemerintah, antara masyarakat dengan organisasi lokal. Informasi meliputi ilmu pengetahuan, program dan kinerja pemerintah, hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, ketentuan tentang pelayanan umum, perkembangan permintaan, penawaran masyarakat dan sebagainya. Masyarakat pedesaan terpencil tidak mempunyai akses terhadap semua informasi tersebut, karena hambatan bahasa, budaya, dan jarak fisik. Masyarakat yang *informed* mempunyai posisi yang baik untuk memperoleh manfaat dari peluang yang ada, memanfaatkan akses terhadap pelayanan umum, menggunakan hak-haknya, dan membuat pemerintah dan pihak-pihak lain yang terlibat bersikap akuntabel atas kebijakan dan tindakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Kapasitas lokal adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, mengorganisasikan perorangan dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya, memobilisasi sumber-sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah bersama. Masyarakat yang *organisezed*, lebih mampu membuat suaranya terdengar dan kebutuhannya terpenuhi.

Profesionalitas pelaku pemberdaya adalah kemampuan pelaku pemberdaya baik aparat pemerintah, perusahaan, LSM untuk mendengarkan, memahami mendampingi dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk melayani kepentingan masyarakat, Pelaku pemberdaya juga harus mampu mmpertanggungjawabkan kebijakan dan tindakannya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat inklusif merupakan bagian strategi dan program pembangunan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk kemampuan orang, sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan (*freedom*), bukan saja bebas kelaparan, bebas kebodohan, bebas kesakitan, bebas segalanya. (b) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan dan (c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses dan cara-cara pemberdayaan. Pemberdayaan bertujuan meningkatkan kekuasaan orang-orang yang dan tidak beruntung (Ife, 1995). Pemberdayaan Masyarakat inklusif adalah suatu proses di mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat inkusif menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain menjadi perhatiannya. Pemberdayaan masyarakat inklusif menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Pemberdayaan adalah suatu cara dimana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa) atas kehidupannya.

CSR Berbentuk Pemberdayaan Masyarakat (*Community Development*)

Salah satu implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) adalah melalui *Corporate Citizenship*, *Corporate Citizenship* merupakan suatu cara pandang perusahaan dalam bersikap dan berperilaku ketika berhadapan dengan pihak lain, misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya. Tujuan *Good Corporate Citizenship* (GCC) adalah sebagai salah satu keunggulan kompetitif dan membantu memperbaiki kualitas hidup manusia.

Corporate Citizenship juga terkait dengan masalah pembangunan masyarakat, perlindungan dan pelestarian lingkungan. Selain itu, GCC bertujuan memberikan akses dalam pemberdayaan masyarakat (*community development*) dan terkait langsung dengan

proses usaha perusahaan maupun upaya memajukan dunia pendidikan, kesehatan, sarana prasarana dan lain sebagainya misalnya. *Community Development* (CD) merupakan komponen utama dari *Corporate Citizenship*. *Corporate Citizenship* secara terminologi diartikan sebagai perusahaan warga. Hal ini mengandung makna, jika program *community development* dilaksanakan oleh perusahaan dengan sebaik-baiknya, maka akan terjalin hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat disekitarnya. Pada tahap inilah perusahaan bisa disebut perusahaan warga (*Corporate Citizenship*). Masyarakat merasa diuntungkan dengan adanya perusahaan yang beroperasi di lingkungannya. Perusahaan yang memenuhi standar *Good Corporate Governance* (GCC). Mereka merasa ikut memiliki perusahaan dan ikut menjaga keberlanjutan produksi dari perusahaan itu.

Community Development merupakan pembangunan dari bawah (*bottom up*) sebagai lawan dari pendekatan *Social Planning* yang *top down*, konsep *Community Development* (CD) tidak semata-mata masalah atas-bawah. Satu hal yang penting adalah terjadinya redistribusi tanggung jawab dan otoritas, serta penggantian kekuasaan (*shift in power*) konsep ini merupakan kritik dari pendekatan pembangunan yang menggarap manusia secara individu demi individu.

CSR berbentuk pemberdayaan masyarakat (*community development*) motivasinya pencerahan diri dan rekonsiliasi dengan ketertiban sosial, misinya memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pengelolaannya terinternalisasi dalam kebijakan perusahaan. Pengorganisasiannya keterlibatan baik dana maupun sumber daya yang lain. Penerima manfaat adalah masyarakat luas dan perusahaan. Kontribusinya adalah hibah (sosial maupun pembangunan dan keterlibatan sosial (masyarakat). Dalam perkembangannya istilah *community development* lalu difokuskan kepada aspek-aspek tertentu. Karena itu dikenal "*Community Economic Development (CED)*", dengan tekanan pada lebih kepada aktifitas ekonomi. CED bertolak dari kondisi dan bekerja untuk komunitas setempat (*citizen-led*) didedikasikan kepada peningkatan kehidupan melalui distribusi kesejahteraan (*wealth distribution*), pengurangan kemiskinan (*poverty reduction*) dan penciptaan lapangan kerja (*jobcreation*).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang mengkaji dan mengeksplorasi secara mendalam dengan melibatkan berbagai sumber informasi secara kontekstual. Penjelasan bahwa dengan studi kasus juga merupakan penjelasan ilmiah karena peneliti tertarik pada kasus-kasus baik keunikan maupun cerita langsung dari mereka termasuk bagaimana mereka berpendapat tentang sesuatu yang mereka hadapi dan lakukan. Dengan demikian, studi kasus kolektif mengkaji beberapa kasus dengan tujuan mendalami fenomena sentralnya (Creswell, 2003; Denzin, 2009; Stake, 2006).

Penentuan Kasus: Untuk mendapatkan perspektif kolektif pengkajian dalam analisis penelitian ini menerapkan strategi sebagai berikut: masyarakat sekitar industri pertambangan dikelompokkan menurut kelompok usahanya. Dengan demikian, terdapat beberapa kelompok usaha tergantung dari hasil identifikasi yang akan berpartisipasi dalam studi ini. Tiap kelompok dapat diwakili oleh laki-laki maupun perempuan, masing-masing kelompok terdiri dari 4 – 5 orang. Semua anggota kelompok penerima bantuan atau dana CSR

Pengumpulan Data: Kelompok yang diteliti akan ditentukan berdasarkan informasi yang berasal dari Dinas Sosial, Pemerintah Desa Manduin, Kecamatan Muara Harus sebagai *gatekeeper*. Dalam penelitian kualitatif *gatekeeper* diperlukan untuk membantu peneliti dalam mendapatkan akses dan mengembangkan kepercayaan terhadap obyek studi (kelompok usaha penerima bantuan CSR. *Gatekeeper* akan melakukan atau kontak dengan masing-masing orang kelompok untuk meminta persetujuan apakah mereka bersedia turut berpartisipasi dalam studi ini. Apabila mereka setuju baru ditentukan

jadwal dan dijelaskan maksud dan tujuan studi ini. Sebisa mungkin *gatekeeper* hadir pada saat pengumpulan data dilakukan. Untuk penelitian ini data akan dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi partisipasi, dan pendokumentasian kegiatan kelompok usaha.

Interview: Partisipan/informan dari kelompok berbeda akan di *interview* secara terpisah. Wawancara pada masing-masing informan akan dilaksanakan selama 1-2 jam di tempat yang dianggap mereka nyaman. Dalam setiap wawancara akan dilakukan perekaman selain peneliti juga akan melakukan pencatatan. Selain itu, merahasiakan identitas juga dapat ditawarkan kepada informan/partisipan apabila mereka merasa harus dirahasiakan identitas mereka.

Observasi non partisipasi: Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh tambahan informasi tentang realisasi kegiatan kelompok dalam pemanfaatan dana CSR. Observasi juga akan mendokumentasikan dinamika kelompok usaha dalam mengelola dan memanfaatkan dana bantuan/CSR. Observasi partisipasi akan dilaksanakan di tempat usaha/kegiatan kelompok dan tempat tinggal mereka. Observasi dilakukan selama peneliti berada di lokasi penelitian.

Dokumentasi: Dokumen yang dikumpulkan dalam studi ini termasuk semua dokumen yang berkaitan dengan SK pembentukan kelompok dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam studi ini. Untuk analisa dokumen akan *dicopy* dengan menghilangkan identitas informan sementara original dokumen akan dikembalikan kepada informan.

Catatan lapangan: Catatan lapangan akan digunakan sebagai data tambahan untuk kepentingan analisis.

Analisa Data: Sebelum data dianalisa, peneliti akan melakukan transkrip terhadap semua hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan catatan lapangan. Peneliti akan menggunakan *meaning of analysis contexts* sebagai unit analisis dalam deskripsinya. Dengan demikian data tidak akan dikode per kalimat tetapi akan dikode per *meaning*. Penelitian ini akan mengikuti prosedur dan *desain* studi kasus kolektif dimana data dianalisa kasus demi kasus melalui analisa tematik dan selanjutnya *cross case analysis* (Cresswell, 2006). Dengan demikian, hasil wawancara, observasi, dokumen dan catatan lapangan akan dianalisis tiap kasus selanjutnya semua tema akan digunakan dalam *cross case analysis*. Peneliti akan menggunakan *guidelines* yang memungkinkan fleksibilitas metode analisa kualitatif diantaranya adalah (1) Membiasakan dengan data (2) Mengembangkan koding tematik (3) Membaca dan membiasakan dengan transkrip (4) Melakukan *review* tema (5) Mendefinisikan tema dan (6) Membuat laporan. (Denzim, 1984)

Strategi Validasi: Penelitian kualitatif menggunakan banyak strategi validasi untuk mendapatkan hasil penelitian yang kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan (Creswell dan Miller, 2000). Untuk penelitian ini agar di peroleh kredibilitasnya digunakan strategi validasi triangulasi, deskripsi mendalam dan *peer debriefing*. Data akan di triangulasikan dengan berbagai bentuk data lain yang diperoleh dari studi ini (wawancara, observasi, dokumen dan catatan lapangan). Menggunakan juga *creative checklist* dari Cresswell (2006) yaitu kriteria untuk melihat kualitas laporan studi kasus:

1. Apakah laporan mudah dibaca
2. Apakah tiap kalimat berkontribusi terhadap keseluruhan
3. Apakah laporan mempunyai struktur konseptual (misalnya tema atau isu)
4. Apakah isu yang dikembangkan benar-benar serius
5. Apakah kasus sudah tepat didefinisikan
6. Apakah presentasi cerita masuk akal
7. Apakah pembaca mempunyai pengalaman yang bervariasi
8. Apakah *quotations* sudah digunakan secara efektif
9. Apakah perhatian telah diberikan pada berbagai konteks
10. Bagaimana kecukupan data yang tersedia

11. Apakah sumber data telah dipilih dengan tepat dengan tepat dan cukup jumlahnya
12. Apakah observasi dan interpretasi telah di trianggulasi
13. Apakah pendapat peneliti telah terlihat dengan baik (diungkapkan secara baik)

Lokasi Penelitian

Kabupaten Tabalong dengan ibukotanya Tanjung yang terletak paling utara dari propinsi Kalimantan Selatan mempunyai luas wilayah 3.946 Km² atau sebesar 10,61 % dari luas Propinsi Kalimantan Selatan. Secara umum Kabupaten Tabalong terletak antara 1.180 LS 2,250 LS dan 115,9 BT 115,47 BT. Batas-batas wilayah Kabupaten Tabalong adalah: Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Timur. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan (Propinsi Kalimantan Tengah). Sebelah Utara berbatasan dengan Kalimantan Timur. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan. Letak Kabupaten Tabalong sangat strategis, berada pada jalur segitiga emas atau segitiga pertumbuhan diantara lintas Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Posisinya memberikan letak yang menjanjikan sebagai muara mengalirnya pengembangan aspek ekonomi dan sosial budaya ketiga propinsi tersebut.

Kabupaten Tabalong memiliki 122 Desa dan 9 Kelurahan dari 12 Kecamatan diantaranya: Kecamatan Banua Lawas, Kecamatan Pugaan, Kecamatan Kelua, Kecamatan Muara Harus, Kecamatan Tanta, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Murung Pundak, Kecamatan Hanuai, Kecamatan Bintang Ara, Kecamatan Upau, Kecamatan Muara Uya dan Kecamatan Jaro. Komoditi unggulan kabupaten Tabalong yaitu sektor pertanian dan jasa. Sektor pertanian komoditi unggulannya adalah sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi karet, kelapa sawit, kakao, kopi, cengkeh, jambu mete dan kelapa. Sub sektor pertanian komoditi yang diunggulkan berupa jagung dan ubi kayu, sub sektor jasa pariwisatanya yaitu wisata alam dan budaya. Sebagai penunjang kegiatan perekonomian, di wilayah ini tersedia satu Bandar udara yaitu Bandara Warukin.

Kabupaten Tabalong terletak paling utara dari Propinsi Kalimantan Selatan yang berjarak sekitar 254 km (Banjarmasin). Di Kabupaten Tabalong ada industri pertambangan batubara yang dikelola PT ADARO. Berbagai fasilitas untuk memenuhi harkat dan martabat manusia dirasakan masih belum mencukupi, bisa dikatakan bahwa desa Manduin Kecamatan Muara Harus di Kabupaten Tabalong dilihat dari struktur organisasi pemerintahan desa merupakan desa yang masih sederhana. Fasilitas kesehatan dalam kerangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat difasilitasi dengan Polindes dan Bidan praktek. Puskesmas Pembantu dengan jarak 3 km dari desa. Puskesmas Kecamatan berjarak 5 Km dari desa Manduin. Fasilitas pendidikan dalam kerangka pengembangan sumber daya manusia, merupakan salah satu faktor yang berpengaruh besar masih kurang, satu bangunan Sekolah Dasar Negeri yang dibangun oleh PT ADARO. Kalau masyarakat mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mereka harus ke luar desa. Di wilayah Kecamatan Muara Harus baru terbangun dua SMP Negeri dan MTs. Pendidikan masyarakatnya hanya sampai tamatan Sekolah Dasar dan bahkan ada yang tidak tamat Sekolah Dasar. Rendahnya pendidikan keluarga ini juga tercermin dari jumlah anggota keluarga yang masih buta huruf. Kondisi ini tercermin dari daftar hadir Peserta Buta Aksara Dasar di desa Manduin yang diselenggarakan oleh Koramil 1008 – 05. Dalam daftar hadir tersebut, bukti kehadiran mereka tidak berbentuk tanda tangan tetapi cap jempol. Jika kondisi ini tetap berjalan secara terus menerus, maka masyarakat akan banyak kesulitan dalam peningkatan kemampuan untuk peningkatan keberdayaannya. Kondisi prasarana transportasi jalan desa baru dikeraskan (belum beraspal) kecuali jalan milik perusahaan yang membelah desa Manduin (*hauling road*). Fasilitas mobilitas penduduk dari desa ke ibukota Kabupaten maupun daerah belum difasilitasi dengan angkutan umum. Fasilitas umum yang dipergunakan untuk interaksi sosial keluar daerah masyarakat menggunakan jasa ojek. Persoalannya adalah mengapa

kemiskinan di desa Manduin persentasinya cukup tinggi. Dari 181 KK yang ada di desa dikategorikan sebagai keluarga miskin mencapai 47 KK (25,96%). Menurut Kepala Desa, jumlah keluarga miskin ini ditentukan berdasarkan penerima beras miskin (Raskin). Jika ditelusuri, permasalahan kemiskinan di desa Manduin pada dasarnya sudah ada sejak sebelum dilakukan penambangan batubara di Tabalong dan atau daerah tersebut dikategorikan sebagai wilayah Ring I. Sebagian besar masyarakat desa Manduin bekerja sebagai petani. Mereka yang bekerja sebagai buruh penderes (penyadap) karet rata-rata hanya bekerja rata-rata dua jam sehari. Wilayah ini merupakan konsentrasi untuk pengembangan pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian khususnya padi dari wilayah ini diharapkan mempunyai fungsi *support* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Tabalong. Namun kondisi persawahan di Manduin belum didukung oleh teknologi irigasi. Musim tanam tergantung dari curah hujan (sawah tadah hujan). Kondisi persawahan hanya bisa ditanami sekali dalam satu tahun itupun kalau ada hujan.

Prospek CSR dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pada tahap awal perkembangan CSR memasuki dunia usaha pro dan kontra selalu terjadi. Di satu sisi CSR dilaksanakan sebagai bagian dari strategi bisnis, pelaksanaan CSR bertujuan agar perusahaan dapat melakukan kegiatan bisnisnya dengan baik dan meminimalisasi resiko yang muncul dari komunitas sekitar maupun dari lingkungan tempat melakukan bisnisnya. Dunia usaha diminta untuk memberi kontribusi secara langsung kepada kesejahteraan sosial (*public well being*). Di sisi lain terjadi penolakan karena CSR dipandang sebagai beban perusahaan. Penolakan ini muncul dari pelaku bisnis dan ekonomi beraliran liberal. Dengan asumsi adanya pembagian peran antara dunia usaha dan negara, mereka menolak pandangan yang menyatakan dunia usaha memiliki tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) karena sudah membayar pajak, sehingga tanggung jawab sosial adalah tugas negara.

Sesuai dengan perkembangannya CSR dunia usaha sudah tidak dipandang lagi sebagai tanggung jawab moral, tetapi sudah dijadikan sebagai kewajiban. Kewajiban menyangkut tiga aspek dikenal dengan istilah 3P; yakni *Profit*, *People*, dan *Planet*. *Profit* artinya sebagai badan hukum memiliki fungsi ekonomis, perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggungjawab sosialnya tetapi juga mempunyai hak untuk melakukan kegiatan usaha dan mendapatkan keuntungan. *People*: kegiatan usaha yang dijalankan harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Planet*: akibat eksploitasi bisnisnya harus ikut memperbaiki lingkungan. Begitu luasnya ruang lingkup CSR tidak berarti perusahaan memiliki tanggung jawab yang tak terbatas. Dengan dalil pelaksanaan CSR tidak berarti perusahaan dibebani dengan setumpuk kewajiban dengan alasan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut dunia usaha, CSR merupakan bagian dari strategi bisnis dan identitas perusahaan dan bukan kegiatan *philanthropy*. Menurut *Stakeholders* CSR PT. Adaro, bahwa dana yang dipergunakan untuk realisasi CSR sebagai tanggung jawab sosial perusahaan telah dijadikan sebagai bagian dari biaya produksi.

Menurut Ginanjar Kartasasmita(2005) Ada tiga tingkat kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR), yakni:

1. Pelaksana program CSR semata-mata sebagai kegiatan *public relations* yang dianggap mampu menampilkan citrapositif.
2. Menjalankan CSR sebagai seluruh strategi defensif. Aktivitas perusahaan yang mengarah kepada munculnya bencana *public relations* yang dapat menyebabkan pelanggan, pemegang saham dan karyawan pergi.
3. Menjalankan CSR sebagai sebuah keinginan tulus untuk melakukan kegiatan yang baik yang benar-benar berasal dari visi perusahaan itu.

CSR merupakan sebuah konsep dengan ruang lingkup yang sangat luas dan tidak ada bentuk baku dari CSR. Perusahaan berhak menentukan sendiri bentuk CSR yang akan dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya, dengan tetap memperhatikan hal yang telah disepakati secara umum. *Corporate Social Responsibility* sebagai khususnya perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan telah dipandang sebagai kekuatan yang besar dalam pengembangan masyarakat. Dari uraian ini, maka langkah awal dalam kerangka penyusunan sebuah konsep model pemberdayaan yang diperlukan adalah bagaimana refleksi kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat (peran kegiatan 3 kelompok pemberdayaan masyarakat yaitu kelompok pemuda pembibitan karet, kelompok masyarakat pembuatan gorong-gorong dan kelompok perempuan produktif peningkatan pendapatan keluarga dengan menanam sayuran dengan *polibag*), apakah dana program bina desa CSR PT. Adaro pada tahun 2011 mampu menstimuli kegiatan usaha ekonomi produktif secara berkelanjutan.

CSR dengan tegas tertuang dalam Undang-undang Perseroan terbatas No. 40 Tahun 2007 bahwa Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan usaha (mengeksplorasi di bidang atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial lingkungan (pasal 74 ayat 1). Undang-undang ini tidak menyebutkan secara rinci berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR serta sanksi bagi yang melanggar namun telah menjadi indikasi bagus tentang urgensi CSR. Pada ayat 2, 3 dan 4 disebutkan CSR dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Peraturan lain yang memperkuat urgensi implementasi CSR adalah Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial. Bahkan pelaksanaan CSR bagi perusahaan milik negara (BUMN) pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Kepmen BUMN berisikan kewajiban BUMN menjalankan CSR untuk membantu usaha kecil dan membina kelestarian lingkungan, mengharuskan seluruh BUMN menyisihkan sebagian labanya untuk pemberdayaan masyarakat dikenal dengan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL), implementasinya ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri BUMN, No. 433/MBU/2003 merupakan petunjuk pelaksanaan dari Keputusan Menteri BUMN tersebut di atas.

CSR sebagai salah bentuk pemberdayaan masyarakat harus dipahami sebagai variabel yang menentukan keberlanjutan perusahaan jangka panjang. Konsep CSR apabila diaplikasikan dengan benar, menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dan korporasi. Dukungan masyarakat terhadap aktivitas perusahaan seiring manfaat yang didapat dari implementasi CSR yang benar. Dukungan masyarakat aset berharga sebagai salah satu syarat keberlangsungan sebuah perusahaan. Pemahaman CSR ini biasanya direncanakan secara matang dan dipastikan menjadi solusi pembangunan, termasuk pembangunan di daerah.

CSR didefinisikan sebagai bentuk kegiatan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan kemampuan manusia sebagai individu beradaptasi dengan keadaan sosial yang ada, menikmati, memanfaatkan dan memelihara lingkungan hidup yang ada. Pemerintah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di sekitar pertambangan batubara tahun anggaran 2011, membentuk Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat berkaitan dengan pengelolaan pertambangan. Tim terdiri dari Perumus, Pelaksana dan Pengawas serta Penerapan Penggunaan Anggaran dari program CSR PT Adaro Indonesia dan Partner tertuang dalam Keputusan Bupati Tabalong No. 188.45/291/2011 tanggal 6 Juni 2011. Pelaksanaan alokasi dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sebagai kegiatan CSR dibebankan pada PT Adaro dan Partner pada tahun 2011 adalah 15 milyar lebih pada tahun 2011, tahun anggaran 2012 ada peningkatan dana CSR menjadi 17, 2 milyar. Wilayah sasaran pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

(PPM) atau *Community Development* (CD) merupakan desa-desa wilayah Kabupaten yang menjadi prioritas sasaran:

1. Prioritas pertama desa-desa/masyarakat yang bersentuhan atau akan bersentuhan dengan dampak operasional (selanjutnya disebut sebagai wilayah *hauling road* Ring I).
2. Prioritas kedua desa/masyarakat rentan dengan berbagai kebutuhan berkaitan dengan operasional PT Adaro (selanjutnya disebut sebagai wilayah Ring 2)
3. Prioritas ketiga desa-desa/masyarakat yang berada dalam wilayah Kabupaten yang bersangkutan dan memiliki kepentingan (selanjutnya disebut sebagai wilayah Ring 3)
4. Prioritas program CSR PT Adaro Indonesia dalam konsep pemberdayaan masyarakat pengembangan pendidikan, kesehatan dan usaha bina desa sebagai usaha ekonomi produktif masyarakat. Kebutuhan penelitian yang menjadi konsentrasi pada kegiatan bagaimana penyelenggaraan dana CSR yang telah digelar pada tahun 2011 untuk kegiatan kelompok usaha di desa Manduin Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan. Alokasi dana pemberdayaan masyarakat adalah Program Bina Desa wilayahnya bersinggungan dengan wilayah operasional industri pertambangan yang besaran anggarannya sebagai berikut:
 - a. Dana untuk desa Ring I sebesar Rp.75.000.000,-
 - b. Dana untuk desa Ring II sebesar Rp.50.000.000,-
 - c. Dana untuk desa Ring III sebesar Rp.25.000.000,-

Visi CSR PT Adaro menjadi Perusahaan yang dapat tumbuh berkembang bersama masyarakat, misinya sebagai berikut:

1. Menumbuhkan usaha-usaha masyarakat yang dapat dijadikan sebagai tumpuan keluarga
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dilihat dari tingkat pendidikan dan mutu pendidikannya.
3. Menyediakan layanan kesehatan sehingga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
4. Meningkatkan akses masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya dalam bidang keagamaan, olah raga, kesenian dan kebudayaan
5. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mempercepat berkembangnya perekonomian, pendidikan, kesehatan, sosial dan keagamaan.
6. Melembagakan program *community development* dalam kehidupan masyarakat sehingga berkesinambungan (*sustainability*) yang ingin dicapai PT Adaro Indonesia terciptanya masyarakat pasca tambang yang mandiri dalam kemandirian ekonomi, kemandirian intelektual dan kemandirian manajemen, sasarannya sebagai berikut:
 - a. Tumbuhnya usaha-usaha masyarakat yang dijadikan sebagai tumpuan keluarga
 - b. Meningkatnya kualitas SDM dilihat dari tingkat pendidikan dan mutu pendidikannya.
 - c. Tersedianya layanan kesehatan sehingga meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
 - d. Masyarakat memiliki kesempatan mengaktualisasikan dirinya dalam bidang keagamaan, olah raga, kesenian dan kebudayaan
 - e. Tersedianya sara prasarana mempercepat berkembangnya perekonomian, pendidikan, kesehatan dan sosial keagamaan.
 - f. Melembaganya program *Community Development* (CD) dalam kehidupan masyarakat sehingga berkesinambungan (*sustainable*).

Salah satu komitmen dan *Goodwill* PT Adaro Indonesia selama ini memajukan masyarakat dan merawat lingkungan di wilayah operasionalnya. Visi PT Adaro Indonesia menjadi perusahaan energi dan tambang terkemuka di dunia. Mewujudkan visi itu. PT Adaro Indonesia mendirikan Yayasan nirlaba dengan nama Yayasan AdaroBangun

Negeri (YABN) pada bulan Februari tahun 2009. YABN dibentuk memperkuat program Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) PT Adaro Indonesia sesuai amanat Undang-undang dengan program-program “*Goodwill*” PT Adaro Indonesia, berdampak jangka panjang bagi pemberdayaan masyarakat dan lestariannya lingkungan di wilayah operasi PT adaro Indonesia (Majalah Adaro Bangun negeri, 2011)

Faktor yang berpengaruh dalam Pelaksanaan Penelitian

1. Dalam kerangka pemberdayaan yang holistik di tingkat Kabupaten telah terbentuk tim Perumus, Pelaksana dan Pengawas, serta Penetapan Penganggaran dan Program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) PT Adaro Indonesia dan Partner tahun 2011 di Kabupaten Tabalong. Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah dan Dunia usaha dalam realisasi kebijakan tersebut cukup tinggi.
2. Dalam susunan tim penyelenggaraan CSR, telah melibatkan instansi sektoral, namun instansi sosial (Dinas Sosial dan Pariwisata di Kabupaten Tabalong) yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat sebagai belum menjadi bagian dalam tim.
3. Program dan *budget* yang diusulkan oleh CSR PT Adaro Indonesia dan Partner tahun 2011 disetujui Pemerintah Kabupaten Tabalong. Sebesar 15,8 miliar rupiah pada tanggal 16 Juni 2011.
4. Dalam kerangka mempercepat realisasi program PT Adaro Indonesia dan Partner telah membentuk lembaga sosial yakni Yayasan Adaro Bangun Negeri
5. Komitmen dan keterbukaan CSR PT Adaro Indonesia dan Partner terhadap pelaksana penelitian dan pengembangan cukup tinggi.
6. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu yang relatif singkat, padahal untuk penelitian terapan membutuhkan waktu yang relatif lama. Menurut Pimpinan CSR PT Adaro Indonesia dan Partner idealnya adalah dilaksanakan selama 3 tahun. (Drs. Gunawan dkk. 2011:81-92).

Konsep CSR Dan Prospek CSR

CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembang ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya. CSR merupakan elemen penting dalam kerangka keberlanjutan usaha suatu industri yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. CSR sebagai tabungan masa depan bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh bukan sekedar bentuk finansial melainkan rasa kepercayaan dari masyarakat sekitar dan *stakeholders* lainnya terhadap perusahaan. Kepercayaan inilah yang sebenarnya menjadi modal dasar agar perusahaan dapat terus melakukan aktivitasnya. Perusahaan yang memperlakukan *stakeholders* mereka dengan baik akan meningkatkan kelompok mereka sebagai suatu bentuk manajemen yang berkualitas. *Stakeholders* bukan hanya masyarakat dalam arti sempit yaitu masyarakat yang tinggal disekitar lokasi perusahaan melainkan masyarakat dalam arti luas, misalnya pemerintah, investor, elit politik dan lain sebagainya. Bentuk kerjasama yang dibentuk antara perusahaan dan *stakeholders* hendaknya juga merupakan kerjasama yang dapat saling memberikan kesempatan untuk sama-sama maju dan berkembang. Program-program CSR yang dibuat untuk kesejahteraan masyarakat pada akhirnya akan berbalik arah yaitu memberikan keuntungan kembali bagi perusahaan tersebut. Sebagai contoh hubungan dengan pekerja misalnya, dengan tidak menggunakan pekerja dibawah umur, memperhatikan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya, mendukung Serikat Pekerja dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan ketidakadilan pada pekerja sehingga dapat meningkatkan hubungan antara pekerja dan perusahaan. Dalam hal ini pekerja akan merasa lebih dihargai, nyaman dan hubungannya tidak sekedar bekerja menerima upah

tetapi dapat menimbulkan loyalitas terhadap perusahaan. Hal meningkatkan kinerja dan produktivitas pekerja yang tentu saja akan meningkatkan produktivitas perusahaan. (Rappaport, 1995).

Konsep dan praktek CSR dalam arti sempit merupakan kegiatan donasi yang dilakukan perusahaan (*corporate philanthropy*), umumnya aktivitas tanggung jawab sosial yang diperlihatkan dan dilaksanakan organisasi perusahaan hanya dalam bentuk atau berupa pemberian bantuan, hadiah (*charity, philanthropy*) atau pemberdayaan masyarakat (*communitydevelopment*). Pandangan umum atas konsep CSR pada dasarnya menuntut perusahaan atau suatu entitas bisnis harus bertanggung jawab kepada *stakeholders*. Pengertian CSR *The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)* yang mengemukakan bahwa CSR adalah “*A mechanism for organizations to voluntarily integrate social and environmental concerns into their operations and their interactions with their stakeholders, which are over and above the organisation’s legal responsibilities*”. *European Commission* menyatakan bahwa CSR merupakan “*a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and their interaction with their stakeholders on a voluntary basis*”. CSR memiliki tiga dimensi yang tidak boleh luput dari perhatian para praktisi atau pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas operasional yaitu 1. Dimensi lingkungan. 2. Dimensi sosial. 3. Dimensi ekonomi. Sementara Carroll (1991; 1979) membagi ke dalam empat kategori: “*Economics, legal, ethical dan discretionary (or philanthropic)*”. (Dr. H. Harry Suharman, SE. MA, AK.2011. Two Days Conference CSR. Jakarta).

Kelompok Kerja Program Berbasis Pemberdayaan

1. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat miskin karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Pendekatan pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang dimiliki.
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah tahap lanjut dalam proses penanggulangan kemiskinan. Pada tahap ini, masyarakat miskin menyadari kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk keluar dari kemiskinan. Pendekatan pemberdayaan kemiskinan sebagai instrumen dari program ini dimaksudkan tidak hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin tentang potensi dan sumberdaya yang dimiliki, akan tetapi juga mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses pembangunan di daerah.

Strategi Pendekatan Kelompok Kerja Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Strategi program pada kelompok kerja program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah melalui pendekatan:

1. Strategi pendekatan partisipasif: pendekatan partisipasif tidak hanya tentang keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program, meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantapan pelaksanaan program, bahkan sampai tahapan proses pelestarian dari program tersebut. (Lukman Sutrisno, 1997)
2. Strategi penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat: kelompok kerja program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat menitik beratkan

pada penguatan aspek kelembagaan masyarakat guna meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, sehingga masyarakat mampu secara mandiri untuk pengembangan pembangunan yang diinginkan. Penguatan kapasitas kelembagaan tidak hanya pada tahap pengorganisasian masyarakat untuk mendapatkan hak dasarnya, akan tetapi juga memperkuat fungsi kelembagaan sosial masyarakat yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan. (Suharto, 2007)

3. Strategi pelaksanaan berkelompok kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok: kelompok kerja program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat harus menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat miskin untuk selalu membuka kesempatan masyarakat dalam berswakelola dan berkelompok, dengan mengembangkan potensi yang ada pada mereka sendiri guna mendorong potensi mereka untuk berkembang secara mandiri.
4. Strategi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan: perencanaan program kerja dilakukan secara terbuka dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat dan hasilnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan. Proses ini menumbuhkan koordinasi dalam melakukan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan program yang jelas antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan tersebut. (Soetomo, 2011).

Tujuan Yang Ingin Dicapai

Tujuan yang ingin dicapai kelompok kerja program berbasis pemberdayaan masyarakat adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.
2. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan (difabel) dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel. (Sunyoto Usman, 2010)
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*). (Gunawan Sumodiningrat, 1997)
5. Meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
6. Meningkatkan keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
7. Meningkatkan modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal (Clark, John. 1995)
8. Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Proses Pemberdayaan Masyarakat Dilakukan Melalui Komponen Kelompok Kerja Program:

1. Pengembangan Masyarakat: komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumber daya, pemantauan dan

pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya. (Nasikun, 1995)

2. Bantuan Langsung Masyarakat: komponen bantuan langsung masyarakat adalah dan stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin. Bisa dari PT Adaro, Dana Ristek dan organisasi sosial, organisasi masyarakat dan sebagainya.
3. Peningkatan kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal: komponen peningkatan pemerintah dan pelaku lokal adalah serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin/kelompok rentan (difabel) dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini diantaranya seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif dan sebagainya. (Meliarto, 1996)
4. Bantuan pengelolaan dan pengembangan program: komponen ini meliputi kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi dan pengembangan program. (Rustriani, 1996)

Kesimpulan

Untuk ini perlu diperhatikan beberapa hal penting dalam memajukan masyarakat desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Manduin Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan yaitu:

1. Memfasilitasi untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat desa melalui kegiatan forum rembuk musyawarah diskusi reguler yang dilakukan secara keliling antar desa (*rural rountable discussion*) dengan pemahaman belajar dari pengalaman untuk menjadikan dasar program pemberdayaan.
2. Memfasilitasi pemetaan partisipatif oleh masyarakat desa sebagai dasar penggalian kebutuhan, permasalahan, potensi sumber daya alam, dan masyarakat desa.
3. Memfasilitasi penggalangan dan penggunaan sumber dana untuk skala kebutuhan prioritas dan perekonomian desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa (PerDes) dan APBDes baik dari pemerintah maupun pihak-pihak lain.
4. Memfasilitasi pemahaman dan kemitraan pemerintah desa, BPD dan masyarakat adalah mitra dan sekaligus agen perubahan yang mampu menyusun dan merencanakan APBDes yang akan dituangkan dalam Alokasi Dana Desa (ADD).
5. Memfasilitasi untuk menumbuhkan desa itu sebagai agen perubahan dan memotivasi karakteristik desa untuk menemukan pola ekonominya sendiri.
6. Memfasilitasi kaum perempuan/pemuda/kelompok rentan (difabel) untuk lebih terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan dan perkembangan pedesaan.
7. Membuat warga desa melakukan akuntabilitas dan transparansi dalam kegiatan dan penggunaan anggaran desa.
8. Memanfaatkan sumber potensi desa, mengelola secara berkesinambungan dan ramah lingkungan
9. Dengan demikian, walaupun keberdayaan masyarakat desa belum sepenuhnya dikatakan berhasil, namun arah menuju keberhasilan dan perubahan sudah jelas dan menjadi kapital sosial yang akan membangkitkan kembali nilai-nilai yang mampu mensejahterakan dan memanusiakan manusia dalam pembangunan wilayah pedesaan.

Daftar Pustaka

- Clark, Jhon. 1995. *NGO dan Pembangunan Demokrasi*. Judul Asli: *Democratizing Development The Role of Voluntary Organization*: Godril Dibyو Yuono. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Cresswell. Jhon. W. 2003. *Research Design. Qualitative and Mixed Methods Approaches*. Second Edition. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Denzin, Norman K and Ynonna, Lincoln (Ed). 1994. *Handbook of Qualitative Research*. Sage Publications.
- Gunawan dan Sri Rahayu Isye. 2006. *Penelitian Pengembangan Pemberdayaan Model Keluarga Miskin di Sekitar Kawasan Industri*. Puslitbang UKS. Balatbangsos. Depsos RI.
- Ife, Jim. 1995. *Community Development: Creating Community Alternative, Vision, Analysis and Practice*. Australia: Longman.
- Kartasasmita. Ginanjar. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Jakarta. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mujiadi.B. dan Gunawan. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Suatu Kajian terhadap Masyarakat Sekitar Kawasan Industri)* dalam Informasi Vol. 5 No. 1 Januari 2000. Balitbang Depsos RI Jakarta.
- Nasikun. 1995. *Kemiskinan di Indonesia Menurun*. Dalam *Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasannya*. Bagong Suyanto, ed. Airlangga University Press.
- Rappaport. J. 1984. *Studies in Empowerment: Introduction to The Issues*. Prevention in Human Issue. USA.
- Rustriani. F. 1996. *Masihkah Ekonomi Rakyat Boleh Berharap*. Dalam Frida Rustiani ed. 1996 *Dialog Nasional dan Loka Karya Pengembangan Ekonomi Rakyat Dalam Era Globalisasi: Masalah, Peluang, dan Strategi Praktis*. Akatiga. Bandung.
- Soetrisno, Loekman, 1997. *Menuju Masyarakat Partisipasif*. Kanisius Yogyakarta
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya?* Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Suharman, Harry 2011. *Two Days Coference CSR*. Jakarta
- Suharto, Edi, dkk .2007. *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia*. STKS Bandung Press.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bina Rena Pariwara. Jakarta. Cetakan ke 2.
- Tjokrominoto, Moeljarto. 1996. *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Usman, Sunyoto. 2010. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

WIRUSAHA SOSIAL MUDA DESA: PERAN STRATEGIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Dewi Cahyani Puspitasari

Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada
Email: dewi.cp@ugm.ac.id

Abstrak

Dinamika kepemudaan di Indonesia terus berkembang dan mengalami transformasi seiring dengan perubahan yang terjadi dalam tataran nasional maupun global. Dalam hal ini pemuda menempati posisi sentral dalam dinamika perjalanan bangsa Indonesia termasuk menjadi bagian dari agen yang secara kreatif dan inovatif mampu memanfaatkan berbagai macam peluang ekonomi yang kemudian mereka dikenal sebagai wirausaha muda. Konsep kewirausahaan senantiasa mengalami perkembangan yaitu tidak hanya membahas aspek mentalitas, kreativitas dan inovasi tetapi mengalami perubahan paradigma untuk merespon kemajuan perubahan dan adaptasi terhadap lingkungan. Karenanya saat ini mulai populer istilah kewirausahaan sosial yang dianggap dapat menjadi solusi inovatif dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Aspek menariknya adalah salah satu peran dari wirausaha sosial muda yang muncul di pedesaan memiliki peluang strategis dalam mempercepat proses pembangunan desa.

Penelitian ini fokus pada menjawab rumusan masalah yaitu pertama, Bagaimana eksistensi dan peran strategis pemuda dalam praktik kewirausahaan sosial desa? dan Kedua, Bagaimana implikasi sosial ekonomi dari praktik wirausaha sosial muda desa?. Riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa aspek yaitu Pertama, karakteristik dan 'working ethics' dari wirausaha sosial muda desa dalam praktik bisnis desa wisata. Kedua, menganalisis bentuk modal sosial khususnya jaringan sosial dari peran wirausaha sosial muda dalam pemberdayaan sosial masyarakat khususnya di pedesaan. Ketiga, menganalisis implikasi sosial ekonomi di pedesaan dari praktik bisnis desa wisata. Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif dengan metode studi kasus. Sumber data primer diperoleh dari penelitian lapangan meliputi observasi, wawancara, FGD dan dokumentasi lapangan. Untuk sumber data sekunder diperoleh dari dokumen dan catatan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Penelitian ini menggunakan analisis sosiologis. Pendekatan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep kewirausahaan sosial, modal sosial dan partisipasi pemuda. Temuan penelitian menunjukkan adanya ragam pola dan mekanisme yang secara bertahap memiliki peran dalam upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan pemuda dan keluarga (masyarakat). Dalam hal ini, partisipasi pemuda dalam pembangunan desa dapat dilihat sebagai bentuk tindakan kolektif wirausaha sosial muda desa dan masyarakat untuk meningkatkan kehidupan berkelanjutan. Nilai saling percaya, solidaritas dan kebersamaan menjadi unsur dasar modal sosial yang terjalinkan dalam hubungan pemuda dan masyarakat melalui aktivitas pengembangan desa wisata. Dengan demikian, pemuda mempunyai posisi strategis untuk mendorong program kemajuan desa termasuk tujuan besar pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci: Pemuda, kewirausahaan sosial, partisipasi, modal sosial, pemberdayaan.

Pendahuluan

Potret desa di Indonesia memiliki beragam kondisi, karakteristik sosial ekonomi dan tingkat perkembangannya. Secara mayoritas, wilayah desa ini dihuni oleh para petani kecil yang berpendapatan rendah sampai miskin. Meski demikian, kawasan pedesaan menurut Rustiadi dan Sugimin (2007) memiliki peran penting berkenaan dengan

peningkatan kesejahteraan yaitu *Pertama*, daerah perdesaan menjadi tempat tumpuan mata pencaharian penduduk perdesaan dan perkotaan utamanya bagi mereka yang tidak mempunyai kesempatan menjadi bagian dari usaha ekonomi formal di perkotaan; *Kedua*, daerah perdesaan adalah tempat konservasi lingkungan dan sumberdaya alam seperti sumber mata air, *bio energy* dan keanekaragaman hayati; *Ketiga*, daerah perdesaan adalah tempat produksi pangan (beras, jagung, kedelai dan sebagainya) dan *Keempat*, sumberdaya alam perdesaan merupakan aset berharga dan strategis untuk menjamin kelestarian mata pencaharian masyarakat perdesaan yang pada gilirannya akan meningkatkan kehidupan ekonomi. Dari pendapat ini menunjukkan urgensi pembangunan kawasan perdesaan yang mutlak dibutuhkan untuk menstimulasi daerah perdesaan meningkatkan produktivitas ekonomi terlebih lagi daerah desa miskin memerlukan inovasi pemecahan berbagai masalah yang ada.

Salah satu bentuk upaya peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat perdesaan adalah adanya pengembangan desa wisata yang berbasis masyarakat. Pengembangan wisata perdesaan yang berbasis masyarakat ini merupakan wisata yang tumbuh dari kearifan lokal. Konsep ini ada pada perspektif wisata masyarakat yang bersifat *bottom up* sebagai model alternatif pembangunan dan pengelolaan wisata yang mampu memberikan *output* maupun *outcome* positif bagi masyarakat. Hal ini mengacu pada penjelasan dari Pimrawe Rocharungsat (dalam Moscardo, 2008) bahwa secara umum basis dari adanya pariwisata berbasis masyarakat yaitu pada kesadaran responsif terhadap wisata dengan penekanan aspek partisipasi demokratis dalam penentuan kebijakan wisata oleh masyarakat lokal. Dalam pengertian yang sama, Argyo Dermatoto (Dermatoto dkk, 2009) menjelaskan bahwa pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism - CBT*) merupakan wisata yang dibangun dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Proses implementasi yang dilalui dalam sistem wisata berbasis masyarakat tersebut meliputi perencanaan investasi, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi. Meski demikian, peran pemerintah atau swasta juga diperlukan, bukan untuk mendominasi melainkan sekedar memberikan dukungan.

Aspek penting dalam proses pembangunan desa salah satunya adalah menggerakkan kaum muda (pemuda) dalam agenda desa yang dapat mengundang peran aktif dan partisipasi pemuda. Pemuda dalam ini memiliki hak atas apa sesungguhnya yang mereka harapkan dapat tersampaikan sehingga memberikan kontribusi riil terhadap pembangunan desa. Pendapat Sen (1993 dalam Azca 2011) menyebutkan bahwa pembangunan individu yaitu kaum muda memerlukan pertimbangan bagaimana meningkatkan kualitas hidupnya, mengeluarkannya dari jerat kemiskinan dan ketidakberdayaan dengan cara memperhatikan potensi, asset, kemampuan dan kekuatannya. Selanjutnya bagaimana pemuda menggunakan asset yang dimilikinya dan memanfaatkan kesempatan yang tersedia untuk berpartisipasi dalam suatu wadah dan memiliki kebebasan untuk memilih tanpa paksaan. Partisipasi dalam bentuk *civic engagement* memberi kesempatan dan kebebasan individu untuk menentukan apa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepentingannya. Dengan demikian kaum muda dapat berkembang, berkarya, bergaul, meningkatkan potensi diri, dan kepercayaan diri dengan suka cita dan mandiri.

Dalam pembahasan naskah ini, penulis bermaksud melakukan kajian awal terhadap praktik pemuda desa yang mampu menggerakkan sumber daya lokal desa baik fisik maupun non-fisik melalui kegiatan pengelolaan Desa Wisata Nglanggeran. Adanya figur muda yang memiliki kapasitas inovasi sosial ini lazim disebut sebagai wirausaha sosial (aktor kewirausahaan sosial). Secara konsep, kewirausahaan sosial hadir dengan memberikan paradigma baru bahwa kewirausahaan sebagai sarana atau cara untuk mengatasi masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan akses, dan sebagainya (Perrini dan Vurro dalam Mair dkk, 2006). Kajian dari penelitian ini fokus pada menjawab rumusan masalah yaitu *Pertama*, Bagaimana eksistensi dan peran strategis pemuda dalam praktik kewirausahaan sosial

desa? dan Kedua, Bagaimana implikasi sosial ekonomi dari praktik wirausaha sosial muda desa?. Riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa aspek yaitu Pertama, karakteristik dan 'working ethics' dari wirausaha sosial muda desa dalam praktik bisnis desa wisata. Kedua, menganalisis bentuk modal sosial khususnya jaringan sosial dari peran wirausaha sosial muda dalam pemberdayaan sosial masyarakat khususnya di pedesaan. Ketiga, menganalisis implikasi sosial ekonomi di pedesaan dari praktik bisnis desa wisata. Pendekatan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep kewirausahaan sosial, modal sosial dan partisipasi pemuda.

Konsep kewirausahaan sosial yang ditunjukkan oleh Praszkiec dan Nowak (2012) meliputi lima dimensi yaitu misi sosial, inovasi sosial, perubahan sosial, semangat kewirausahaan dan kepribadian (kreativitas dan keterampilan kewirausahaan). Fokus yang sebenarnya ada dalam kewirausahaan sosial adalah pengambilan resiko, melawan rintangan dan hambatan, dan menciptakan perubahan sosial. Beberapa penulis menyebutkan bahwa kewirausahaan sosial berarti terus mencari cara baru untuk menciptakan solusi dengan mengambil apa yang kurang dimanfaatkan, termasuk sumber daya yang dibuang, bersedia mengambil resiko serta mempertahankan misi.

Bila ditinjau dari prosesnya, kewirausahaan sosial memiliki beberapa keunikan yang membedakannya dari kewirausahaan bisnis (*business entrepreneurship*) (Wibowo dan Soni, 2015). Penggerak atau penyebab (*antecedent*) merupakan keunikan strategis dalam kewirausahaan sosial. Penggerak tersebut meliputi motivasi/misi sosial, identifikasi peluang, akses permodalan, dan pihak-pihak terkait/berkepentingan. Capaian dalam kewirausahaan meliputi nilai sosial, usaha pemuasan berbagai *stakeholder*, dan kesinambungan solusi. *Outcomes* kewirausahaan sosial menjadi keunikan yang tidak dimiliki model kewirausahaan yang lain. Smallbone (Nicholls, 2008, dalam Wibowo dan Soni, 2015) mengelompokkan *outcomes* kewirausahaan sosial menjadi beberapa sektor:

1. Menyediakan jasa dan produk dimana pasar atau sektor publik tidak bersedia menyediakan atau tidak mampu menyediakan;
2. Membangun keterampilan;
3. Menciptakan lapangan kerja;
4. Membangun jalan untuk menghubungkan orang-orang yang terpisah secara sosial.

Dari penjelasan tersebut memberikan pemahaman bahwa wirausahawan sosial merupakan pelopor inovasi (inisiator) yang dilihat dari kualitas dalam merancang ide kewirausahaan, kecerdasan membangun kapasitas dan kemampuannya dalam mendemonstrasikan secara konkret kualitas ide dan prakiraan dampak sosial atas upaya kewirausahaan yang dilakukan. Pada konteks ini, wirausahawan sosial sekaligus berperan dalam membentuk *mindset* baru kepada masyarakat yang dimobilisasi bahwa pada dasarnya manusia memiliki kapasitas atau kompetensi kendati dari kacamata *mainstream* dipandang tidak kompeten atau berdaya (Bornstein, 2010: 76).

Kajian ini mendayagunakan konsep modal sosial sebagai bagian dari sumber daya masyarakat. Secara khusus, sumber daya pada konteks pariwisata adalah atraksi wisata sendiri yang perlu dikelola dengan kapasitas lokal (termasuk modal sosial) untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial ini berbeda dengan modal fisik dan modal lainnya (*human capital*) yang terukur dan konkret. Sifat dari modal sosial yang *less tangible* dan sulit diukur seperti kepercayaan, relasi dan lainnya ini ada dan tumbuh di masyarakat dalam waktu yang relatif lama yang terkadang tidak disadari oleh masyarakat. Definisi dari Putnam (dalam Dasgupta dan Serageldin, 2000) bahwa modal sosial berkaitan dengan adanya relasi atau hubungan yang secara tidak otomatis dilakukan setiap manusia sebagai makhluk sosial dan hal itu tidak disadari sebagai modal. Sementara itu penjelasan dari Coleman (dalam Field, 2010) menekankan pada aspek modal sosial yang bukan entitas tunggal tetapi sebagai susunan entitas yang terdiri dari beberapa entitas yang mampu menjadi sarana bagi tindakan produktif baik secara individual maupun kelompok. Karena itu, modal sosial merupakan sumber daya melibatkan beberapa bentuk seperti

kepercayaan (*trust*), resiprokal, jaringan-jaringan (*network*), serta norma dan nilai (*norms and value*). Kepercayaan menjadi fondasi untuk mencapai tujuan sosial, sebab seperti pelumas yang dapat ‘melicinkan’ kerja sistem sosial dan menciptakan sebuah efisiensi, serta menghadapi berbagai kendala yang mendistorsi (Fukuyama, 2002: 36-37). Nilai dan norma hadir melalui proses sosial maupun kultural yang memiliki peran sebagai pedoman dalam berperilaku, baik yang sifatnya individual maupun kolektif. Menurut Hasbullah (2006), jaringan yang terbentuk melalui hubungan relasional memiliki kapasitas atau dampak positif bagi kemajuan serta pembangunan masyarakat. Manfaat positifnya bukan hanya sebagai perekat sosial antar aktor yang terikat di dalamnya melainkan juga mampu memberikan kemudahan akses modal maupun informasi.

Pemahaman mengenai partisipasi kaum muda dapat dijelaskan melalui 3 (tiga) lensa pendekatan (dalam Erlina 2011). Pertama, hal dasar yang perlu dipahami adalah merubah cara pandang sosial tentang kaum muda. Penjelasan ini menempatkan pemuda sebagai sesuatu yang menjadi perhatian dan diperlukan sebagai subjek agen, aktor dan asset dalam *social engagement*. Kedua, berbaur dengan kaum muda dalam setiap perencanaan program dan kebijakan pembangunan dengan tidak membedakan struktur atau status sosial. Kaum muda penyandang *difabel*, pemuda miskin, beda ras, beda agama, maupun beda suku perlu mendapat perhatian dalam pembangunan. Ketiga, kolaborasi dengan kaum muda, mendukung kepemimpinan kaum muda dalam inisiasi yang dibuat kaum muda tanpa adanya dominasi kaum dewasa. Justru kaum dewasa harus memberikan penghargaan ataupun apresiasi terhadap langkah yang dilakukan pemuda. Sehingga pada akhirnya terbentuk proses pembangunan dan penguatan kaum muda dalam program sosial dan pekerjaan yang dilakukan bersama kaum muda untuk kaum muda.

Metode

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif (*qualitative research*). Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong (1990), metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin mendapatkan realita di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Sehingga penelitian kualitatif sebagian alat buktinya tidak berupa data numerik yang dianalisis dengan uji statistik, namun berupa data (kata-kata), tindakan, dan dokumen.

Tipe penelitian yang digunakan selama penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dengan penelitian deskriptif, peneliti dapat menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemuda melalui pendekatan kewirausahaan sosial dalam pengelolaan wisata lokal di salah satu wilayah Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I Yogyakarta.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua. Pertama, sumber data primer. Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan dari sumber utama (*first-hand information*) termasuk observasi lapangan, hasil wawancara terhadap informan dan dokumentasi lapangan. Keuntungan menggunakan data primer yaitu sesuai dengan tujuan penelitian dan dikumpulkan dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan dan dikontrol oleh peneliti (Silalahi, 2010). Kedua, sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan (Silalahi, 2010). Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumen tersebut antara lain data monografi desa, profil komunitas, jurnal, buku referensi, publikasi media massa, media internet dan dokumen-dokumen yang mendukung data penelitian.

Untuk analisis data dilakukan menurut Miles dan Huberman meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Silalahi, 2010). Penjelasan dari tahapan tersebut: (1) Reduksi data. Reduksi data

merupakan proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan yang dilakukan secara terus-menerus selama pengumpulan data. Dalam proses reduksi, peneliti dapat membuang data yang dianggap tidak relevan dengan penelitian ini. (2) Penyajian Data. Penyajian data sebagai proses menampilkan sekumpulan informasi yang tersusun sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan oleh peneliti. (3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Kesimpulan mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada kualitas catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan dan kecakapan peneliti mencari data. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji validitasnya sehingga tujuan penelitian dapat benar-benar tercapai.

Teknik pemeriksaan keabsahan data sesuai dengan pendapat Creswell (2010) meliputi: *Pertama*, Triangulasi data akan dilakukan melalui triangulasi metode dengan cara menggunakan lintas metode pengumpulan data dan triangulasi sumber data melalui memilih berbagai sumber data yang sesuai. *Kedua*, Konfirmabilitas akan dilakukan melalui observasi yang mendalam melalui kunjungan lapangan berulang kali. *Ketiga*, Referensi untuk mencegah hasil kajian yang dangkal. Peneliti akan memanfaatkan referensi-referensi yang sesuai dengan topik penelitian. *Keempat*, Diskusi yang akan melibatkan teman sejawat yang tidak ikut melakukan penelitian untuk berdiskusi dan memberikan masukan.

Pembahasan

A. Desa Wisata dan Peluangnya Memotong Mata Rantai Kemiskinan

Kondisi kemiskinan yang ada di wilayah Desa Nglangeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul terjadi karena adanya keterbatasan sumber daya alam dan infrastruktur sehingga menyebabkan desa ini termasuk ke dalam wilayah terisolir. Selain itu dari sisi ketersediaan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan ekonomi warga juga terbatas karena terdiri dari bukit karst kapur dan tanah litosol yang tidak optimal untuk lahan pertanian. Pada saat musim kemarau, ketersediaan air sangat terbatas, warganya hanya bisa memanfaatkan pengairan dari mata air yang mengalir di lereng gunung purba, itupun dengan kapasitas debit air yang tidak begitu besar yang mengakibatkan produksi pertanian yang dihasilkan mayoritas petani Desa Nglangeran tidak optimal. Berdasarkan hasil survei penduduk miskin (Ekora, 2009) menunjukkan pertanian menjadi pekerjaan utama sebesar 71%, dan buruh tani 7%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun usaha pertanian tidak memberikan pengaruh besar kepada pendapatan keluarga, namun usaha di bidang ini tetap dilakukan karena memang tidak ada pilihan yang lain.

Kondisi yang terjadi di Desa Nglangeran menjadi fenomena umum pertaniandi Indonesiadi mana produksi sepenuhnya hanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan keluarga (subsisten). Survei Ekora (2009) menunjukkan bahwa kaitannya dengan kinerja ekonomi penduduk Nglangeran adalah produk yang dihasilkan berupa bahan mentah yang langsung dijual ke pasar. Dengan menjual produk mentah ke pasar maka nilai tambah atau keuntungan ekonomi yang dihasilkan petani dalam memproduksi barang menjadi relatif kecil. Di lain pihak, masyarakat pada umumnya membeli produk baik berupa makanan maupun barang olahan lain yang diproduksi di tempat lain, yang sebenarnya dapat diproduksi sendiri oleh keluarga atau oleh salah satu warga desa yang mau dan jeli melihat peluang pasar di wilayahnya. Kondisi ini senada dengan kajian dari Mafruhah (2009) menunjukkan adanya ketidakmenarikan sektor pertanian (*vicious cycle*) dari pertanian yaitu hasil pertanian tidak memadai bagi petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terutama untuk pengembangan pendidikan dan keterampilan. Hal ini mengakibatkan sektor pertanian dipandang tidak menarik dengan sektor lain. Namun karena kurang pendidikan dan adanya kesenjangan dalam pemahaman teknologi yang

disebabkan oleh kultur yang masih tradisional maka para petani dan generasinya sulit memperoleh kesempatan untuk memasuki sektor lain.

Kondisi penghidupan masyarakat Nglanggeran mulai ada indikasi kegiatan pertanian yang ditinggalkan sekitar tahun 1998. Masyarakat mulai melihat potensi sektor pariwisata sebagai salahsatu strategipembangunan desa. Dari dokumentasi sejarah pengelolaan Nglanggeran (2016), masyarakat Desa Nglaggeran memasuki tahun 1999 mulai mengembangkan ekowisata Gunung Api Purba. Pada awalnya pengembanganKawasan Ekowisata Gunung Api Purba ini dilakukan oleh Kelompok Pemuda Karang Taruna desa Nglanggeran sejak tahun 1999, dengan adanya kesadaran peduli lingkungan bersama masyarakat menanam pohon-pohon di area gunung yang merupakan gunung yang gundul/gersang diantara bongkahan-bongkahan batu pencakar langit. Dengan berbagai kegiatan aktif dilakukan oleh kelompok pemuda dan masyarakat selanjutnya pemerintah Desa Nglanggeran mempercayakan pengelolaan lahan seluas 48 Ha untuk dikelola pemuda (Karang Taruna Bukit Putra Mandiri) yang tertuang dalam SK Kepala Desa Nglanggeran No.05/KPTS/1999 tertanggal Desa 12 Mei 1999. Keberadaan lahan seluas 48 Ha mulai dilakukan penghijauan oleh warga masyarakat dan juga pemuda karang taruna. Setelah kondisi lingkungan mulai hijau, semakin nyaman dan memiliki daya tarik wisata, mendapatkan dukungan dari Dinas Budpar Gunungkidul melalui promosi (FAM Tour) ditahun 2007. Seiring dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemuda Nglanggeran yang melakukan studi dan juga mengenal teknologi, promosi menggunakan media teknologi informasi sangat mendukung dalam pengenalan Gunung Api Purba menjadi kawasan wisata.

Dari gambaran di atas menunjukkan adanya upaya pengembangan potensi lokal desa yang dilakukan oleh komponen masyarakat Desa Nglanggeran. Sektor pariwisata dianggap mampu menjadi bagian dari strategi penganggulangan kemiskinan yang di desain berdasarkan realitas kehidupan masyarakat yang impelementasinya sinergis dengan unsur *stakeholders* termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat. Hal ini secara konsep dijelaskan oleh Argyo Demartoto (Argyo Demartoto, dkk, 2009) adanya implementasi konsep pembangunan pariwisata berbasis masyarakat diarahkan pada upaya memberikan manfaat sosial ekonomi pada kelompok masyarakat miskin sehingga dapat menjadi bentuk pengurangan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan yang kemudian dikenal dengan *Pro-Poor Tourism (PPT)*. Dalam konsep ini *Pro-Poor Tourism* bukan suatu produk wisata namun merupakan suatu pendekatan dalam upaya pengembangan dan pengelolaan pariwisata. Pendekatan ini berupaya menciptakan dan meningkatkan hubungan baik antara pengusaha jasa pariwisata dengan kelompok masyarakat miskin sehingga dapat membantu upaya pengentasan dan penanggulangan kemiskinan.

Strategi pengembangan pariwisata untuk kelompok masyarakat miskin secara khusus berhubungan dengan dampaknya kepada *'the poor'* meskipun kelompok masyarakat lainnya juga dapat menikmati dampak positifnya. *Pro-Poor Tourism* tidak terbatas pada industri atau usaha jasa yang dimiliki masyarakat setempat melainkan dapat melibatkan berbagai pelaku usaha dari wilayah lain yang dapat membangkitkan iklim usaha bagi daerah setempat serta memberikan keuntungan dan manfaat dalam berbagai dimensi masyarakat setempat (Argyo Demartoto, dkk, 2009). Pendapat tersebut dalam konteks Nglanggeran menjadi menarik karena adanya unsur inovator muda yang menggulirkan gagasan kewirausahaan sosial berbasis komunitas oleh Sugeng Handoko. Melalui gagasan tersebut dapat memberikan peluang bagi masyarakat Desa Nglanggeran dalam membuka akses dan ruang partisipasi pemuda dan masyarakat dalam pembangunan desa khususnya pengelolaan desa wisata. Dengan menciptakan konsep pasar bagi kegiatan kepariwisataan di Desa Nglanggeran, lambat laun tingkat kesejahteraan penduduk di sektor ekonomi telah mengalami kenaikan. Penduduk Nglanggeran yang dahulu hanya bisa bekerja di sektor pertanian setelah adanya inisiatif pemuda dapat bekerja sebagai penyedia jasa layanan wisata.

Dari sumber dokumentasi sejarah pengelolaan (2016) terjadi dinamika dalam pengelolaan wisata. Sebelum 2007 terjadi kevakuman pengelolaan saat setelah terjadi gempa 26 Mei 2006 hingga ditahun 2007, dan karang taruna mulai lagi muncul kepermukaan untuk melakukan pengelolaan kawasan wisata dengan pendampingan dari dinas Budpar Gunungkidul sejak tahun 2007. Dibuatlah sebuah lembaga BPDW (Badan Pengelola Desa Wisata) yang melibatkan dari seluruh komponen masyarakat dari Ibu PKK, Kelompok Tani, Pemerintah Desa dan juga pemuda karang taruna. Setelah terbentuk BPDW disepakati dan ditetapkan untuk pengelola teknis lapangan adalah pemuda-pemudi karang taruna selaku pengelola Kawasan Ekowisata Gunung Api Purba. Dengan mendapatkan beberapa pelatihan dari Dinas Budpar Gunungkidul dan Dinas Pariwisata DIY serta adanya beberapa SDM dari pengurus yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi maka perkembangan wisata di Desa Nglanggeran bisa dikatakan memiliki perkembangan positif yang signifikan.

Pembahasan di atas menunjukkan adanya relasi produktif tersebut terutama dilihat pada proses pembentukan lembaga pengelolaan wisata, aktualisasi kewirausahaan sosial, pemanfaatan wisata melalui perintisan usaha kolektif yang dapat dilakukan sinergis oleh pemuda, masyarakat dan *stakeholders* setempat. Relasi produktif sering diasosiasikan dengan modal sosial. Respon insiator terhadap krisis sosial ekonomi berupa kemiskinan mampu mendorongpelibatan masyarakat secara kolektif dalam mekanisme kewirausahaan sosial dan didukung dengan modal sosial memiliki peluang strategis yang mengarah pada tujuan untuk memberikan manfaat sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Nglanggeran.

B. Peran Mbangun Ndeso (Membangun Desa) Wirausaha Sosial Muda

Deskripsi sebelumnya telah mengantarkan pada pemahaman bahwa ada potensi modal kewirausahaan yang dimiliki oleh pemuda sehingga mampu menumbuhkan dengan baik rasa saling percaya, mendukung dan membantu untuk pengelolaan desa wisata Nglanggeran. Meskipun terdapat dinamika yang muncul selama proses pengelolaan tersebut diantara masyarakat telah mampu menjadi daya tarik bagi pemuda untuk tetap tinggal di desa dengan melakukan aktivitas produktif. Kondisi ini menjadi menarik karena tidak terjadi pemindahan modal keahlian dari lokal ke tempat luar daerah. Sebagai contoh di desa terdapat anggota masyarakat yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan hingga tingkat sarjana tetapi tidak bersedia kembali ke daerahnya. Fenomena ini banyak terjadi di banyak daerah perdesaan. Akan tetapi bila anggota masyarakat tersebut khususnya pemuda berminat mengembangkan ekonomi setempat maka potensinya terbuka luas bahkan dapat menjangkau wilayah desa terdekat untuk berkolaborasi mengembangkan wirausaha sosial berbasis potensi lokal.

Peran pemuda Nglanggeran dalam penciptaan misi sosial bila ditinjau dari konsep Dees (dalam Praszkiec dan Nowak,2012) mengatakan bahwa seorang pengusaha sosial akan menjadi agen perubahan sosial di lingkungannya, salah satunya melalui pengadopsian misi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai sosial (bukan hanya nilai pribadi). Misi sosial disini berkaitan dengan tujuan apa yang akan dicapai dengan menggunakan konsep kewirausahaan sosial ini. Dari tataran prosesnya, pengembangan konsep kewirausahaan sosial pada tahap awal dilakukandengan optimalisasi kapasitas pemuda dan masyarakat yaitu dengan mengadakan pelatihan tentang teknik pemasaran, pengembangan organisasi dan pelatihan *skill* menjadi pemandu wisata atau *tour guide*. Setelah konsep ini terlaksan dengan baik proses selanjutnya ada pada upaya mendorong masyarakat melakukan diversifikasi jenis wisata dengan menciptakan paket wisata baru yaitu kegiatan *outbond*, perkemahan, fasilitasi kegiatan makrab mahasiswa, wisata pertanian dan penyediaan tempat penginapan (*home stay*) bagi wisatawan. Peningkatan peran pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Bukit Putra Mandiri didorong untuk membuat pemasaran *online* melalui media *website* yang memberikan informasi pada publik tentang wisata Desa Nglanggeran.

Bentuk kemanfaatan sosial ekonomi dari usaha kewirausahaan sosial wisata yang dilakukan oleh pemuda Nglanggeran ternyata sangat signifikan dalam meningkatkan minat jumlah kunjungan pariwisata di Nglanggeran. Menurut data yang didapat dari pengelola Gunung Api Purba Nglanggeran (2016) sejak tahun 2001 hingga 2014, jumlah peningkatan wisata secara drastis dimulai sejak tahun 2010 yaitu mencapai 7000 pengunjung pertahun. Jumlah pengunjung tersebut terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan aktualisasi dari konsep kewirausahaan sosial yang digagas oleh Sugeng Handoko juga berdampak pada meningkatnya bisnis kewirausahaan sosial masyarakat Nglanggeran. Sebagai gambaran, pada tahun 2013 jumlah pendapatan yang diterima dari pengelolaan wisata ini mencapai 424 juta rupiah dan mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar 1,4 miliar rupiah. Kondisi ini salah satunya disebabkan adanya pemasaran wisata Gunung Api Purba Nglanggeran tidak hanya mencakup pasar lokal tetapi telah mencapai global (internasional).

Kiprah dan peran strategis dari Sugeng Handoko dan para pemuda Nglanggeran mampu melakukan serangkaian aktivitas yang memadukan konsep kewirausahaan sosial dengan unsur pengembangan ekonomi lokal. Hal positifnya adalah peran ini kemudian juga sinergis dengan para pihak yaitu dengan adanya pelibatan semua unsur sumber daya lokal baik fisik maupun non fisik menjadi sebuah jalan bagi pemecahan masalah penuntasan kemiskinan yang selama ini terkadang belum optimal terjawab melalui program pemerintah. Selain itu adanya kemampuan inovasi dari pemuda yang difokuskan pada peran otonomi institusi lokal untuk mempromosikan transfer pengetahuan dan teknologi untuk memelihara keberlanjutan organisasi wisata. Inovasi sosial yang dimaksudkan merupakan sebuah usaha kreatif yang dilakukan oleh pemuda khususnya penggerak ide dan gagasan yaitu Sugeng Handoko untuk mendorong pemuda lainnya serta masyarakat agar tertarik dalam mengikuti suatu kegiatan. Dalam pembahasan ini, inovasi sosial memang berasal dari individu atau aktor yang bergerak didalamnya namun atas persetujuan bersama. Dalam kewirausahaan sosial, inovasi yang akan muncul berupa usaha yang digunakan untuk memecahkan dan menekan masalah sosial yang ada. Sehingga proses penyebaran ide dan sasarannya ditujukan kepada masyarakat yang dalam konteks Nglanggeran aspek inovasi sosial juga muncul dalam mewujudkan tujuan kelompok atau pengelola Desa Wisata Nglanggeran.

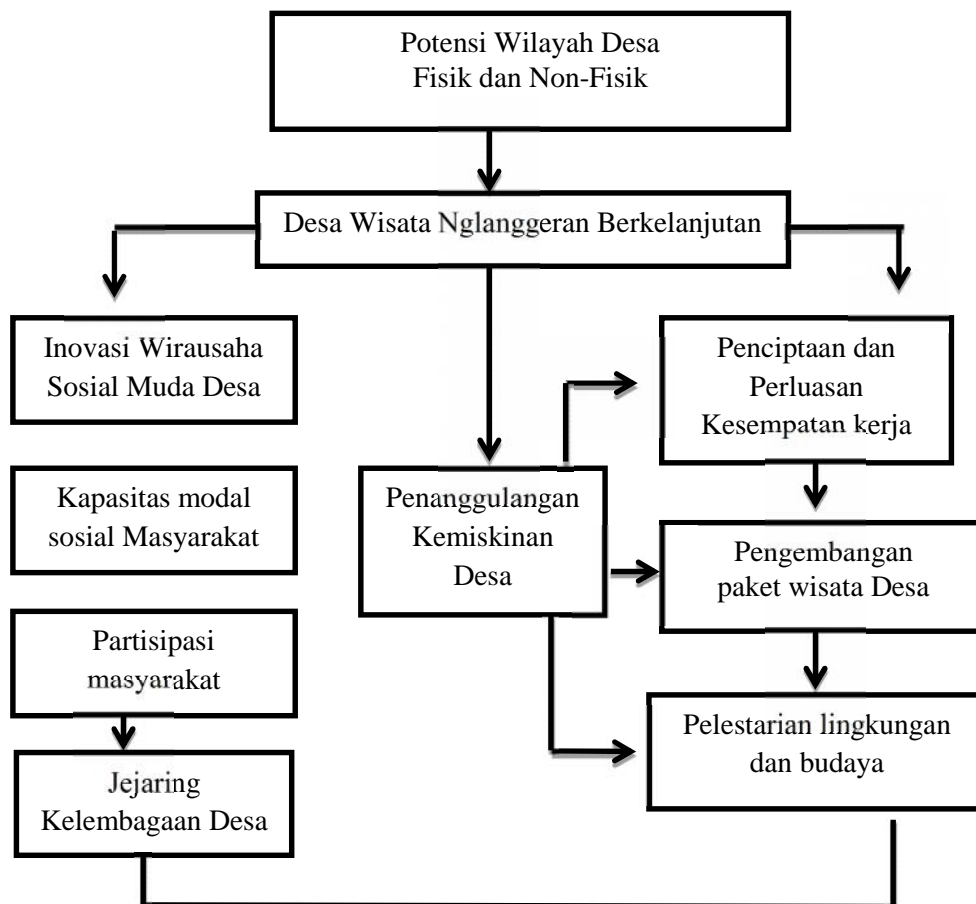
Tinjauan konsep modal sosial dari kerangka Putnam (dalam Field, 2010) yaitu modal sosial terbagi atas 2 (dua) tipe yaitu modal sosial yang mengikat (*bonding social capital*) dan modal sosial yang menjembatani (*bridging social capital*). Tipe *bonding* berada pada ranah yang sifatnya eksklusif seperti rukun warga dan teman akrab, sehingga homogenitas begitu kentara. Karena cenderung eksklusif maka pola hubungannya lebih berorientasi ke dalam (*inward looking*), sehingga perluasan jaringan yang produktif sulit tercipta. Namun, modal sosial *bonding* mampu menopang resiprositas spesifik, mobilisasi solidaritas, dan menjadi perekat sosial. Sementara itu, *bridging social capital* adalah tipe modal sosial yang menyatukan orang dari ranah sosial yang beragam. Modal sosial ini terbentuk dalam kelompok yang memiliki pandangan terbuka (*outward looking*) dan mandiri. Oleh karena itu, jaringan produktif yang terbentuk dapat semakin meluas. *Bridging social capital* mampu menghubungkan aset eksternal, persebaran informasi, membangun identitas, dan hubungan timbal balik yang lebih luas (Field, 2010).

Untuk konteks Nglanggeran dari sisi modal sosial menunjukkan bahwa peran besar dari adanya kekuatan atau fondasi yang diperlukan dalam upaya merealisasikan wisata lokal adalah kepercayaan. Kepercayaan ini merupakan 'pelumas' untuk mewujudkan tujuan atau kepentingan (Fukuyama, 2002). Pada konteks ini kepercayaan mampu menciptakan suatu kerja sama antara inisiator pemuda (Sugeng Handoko) yang membangun kepercayaan 'ke dalam' komunitas Karang Taruna dengan tokoh masyarakat dan komponen kelembagaan lokal masyarakat. Kerja sama tersebut terpelihara dalam rangka merealisasikan pengelolaan wisata dan entas dari krisis sehingga melalui wisata

masyarakat dapat memperoleh pendapatan. Proses kepercayaan ini tidak muncul seketika melainkan tumbuh melalui relasi personal yang terbentuk dalam ruang interaksi sosial yang dinamis melalui kegiatan desa.

Tinjauan konsep partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan wisata Nglanggeran menunjukkan peran penting dari organisasi sosial pengelola wisata yang melibatkan semua elemen anggota masyarakat. Partisipasi yang ditunjukkan dapat berupa menjadi pelaku aktif dalam pengelolaan desa wisata serta mengikuti beragam kegiatan yang muncul dari interaksi kegiatan sosial bisnis wisata Nglanggeran. Komponen partisipasi ini menjadi bagian *inherent* yang mendukung suksesnya implementasi kewirausahaan sosial dalam pengelolaan wisata Nglanggeran. Sifat pemberdayaan yang diinisiasi oleh unsur pemuda lokal dapat menggerakkan secara *bottom up* kapasitas warga masyarakat untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan bersama. Namun dalam hal ini bukan berarti wujud eksploitasi, justru diharapkan sikap sukarela masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa aktor yang menginisiasi kegiatan pengelolaan wisata adalah warga, dilakukan oleh warga dan untuk kepentingan bersama. Karena itu, kewirausahaan sosial disini tidak mengambil profit untuk kepentingan perorangan namun berusaha untuk memenuhi kebutuhan bersama dengan solusi bersama. Hal ini selaras dengan pendapat dari Praszkiar dan Nowak(2012) bahwa kewirausahaan sosial juga harus mampu memotivasi dan mempengaruhi pola pikir masyarakat agar menghasilkan dampak besar serta solusi baru yang berguna pada ranah sosial. Secara singkat dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:

Gambar 1. Konseptualisasi Pembahasan



Sumber: Puspitasari,2016.

Dengan demikian, elemen kelima dimensi kewirausahaan sosial diatas dapat digunakan dalam menjelaskan praktik wirausaha sosial pemuda diintegrasikan dengan modal sosial serta partisipasi masyarakat. Kewirausahaan sosial yang diterapkan telah mampu memberikan peluang baru dan solusi bagi problem kemiskinan desa melalui penciptaan inovasi baru, menumbuhkan semangat kewirausahaan serta menciptakan perubahan sosial khususnya bagi masyarakat Desa Nglanggeran.

Kesimpulan

Eksistensi masyarakat Nglanggeran memiliki dinamika menarik dalam upaya inisiasi keluar dari kondisi kemiskinan. Keterbatasan kondisi geografis mampu menjadi 'daya ungkit' perubahan dengan munculnya peran strategis dari pemuda yang mengupayakan pengembangan wisata lokal desa. Implementasi konsep kewirausahaan sosial yang dipadukan dengan pengembangan wisata berbasis masyarakat menjadi kekuatan unsur pengembangan ekonomi lokal. Selain itu adanya upaya untuk melibatkan segala unsur secara holistik berupa modal sosial masyarakat yaitu jaringan sosial yang kuat, rasa saling percaya dan solidaritas yang tinggi antar warga yang disertai dengan pembangunan ketersediaan pasar wisata, serta kemampuan pengelolaan yang baik ternyata mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Nglanggeran. Sisi lain juga adanya ruang partisipasi bagi pemuda melalui perkumpulan pemuda merupakan sarana yang penting untuk menyalurkan aspirasi dan bentuk partisipasi pemuda dalam perkembangan desa.

Beberapa penulis menyebutkan bahwa kewirausahaan sosial berarti terus mencari cara baru untuk menciptakan solusi dengan mengambil apa yang kurang dimanfaatkan, termasuk sumber daya yang dibuang, bersedia mengambil resiko serta mempertahankan misi. Jadi, kepribadian disini berkaitan dengan sifat individu dalam mengambil keputusan, mengambil resiko dalam menghadapi hambatan dan mempertahankan organisasi demi kepentingan bersama. Lima elemen kewirausahaan sosial yang meliputi tujuan sosial, inovasi sosial, perubahan sosial, semangat kewirausahaan dan kepribadian merupakan elemen penting yang saling berhubungan satu sama lain. Berhasilnya kegiatan pengelolaan wisata berbasis kewirausahaan masyarakat ini salah satunya berasal dari terpenuhinya kelima elemen tersebut. Untuk saat ini, kegiatan pengelolaan desa wisata Nglanggeran oleh pemuda masih harus didukung oleh semangat kewirausahaan yang tinggi dan kepribadian sebagai pendorong agar tercapai hasil optimal bagi kesejahteraan warga masyarakat. Dengan demikian, kelima elemen tersebut dapat berkesinambungan satu sama lain, sehingga akan menghasilkan pengelolaan desa wisata berbasis kewirausahaan sosial yang berkelanjutan dengan peran partisipasi aktif dari pemuda.

Selain itu, aspek sumber daya manusia dalam sebuah organisasi menjadi penting mengingat aktor penggerak kegiatan dipegang oleh sekelompok individu yang mempunyai komitmen didalamnya. Dalam konteks Nglanggeran terdapat unsur pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk memperbaiki tingkat kehidupan (kesejahteraan) masyarakat yang melibatkan investasi dari para pihak termasuk juga melibatkan hubungan interdependensi antara kegiatan manusia dengan sesamanya yang terlibat di dalamnya melalui suatu pola pemanfaatan sumber daya. Sinergi mutualis dari berbagai pihak mampu memberikan daya dukung dan menggerakkan sumberdaya lokal desa yang positif bagi pembangunan desa. Hasilnya adalah adanya aktivitas kolektif yang dapat meningkatkan nilai tambah atau manfaat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat di masa mendatang maupun masa yang akan datang secara berkelanjutan (*sustainability*). Harapannya kondisi yang telah ada pada bentuk kemajuan di Desa Nglanggeran ini dapat berjalan kontinyu dan berkelanjutan dengan mensinergikan potensi lokal desa dengan penguatan jejaring eksternal baik dari dalam negeri maupun internasional. Pada akhirnya cita kolektif berupa kesejahteraan berkelanjutan tidak hanya menjadi utopia semata melainkan riil terjadi dalam kehidupan masyarakat khususnya pemuda dan warga masyarakat Desa Nglanggeran.

Daftar Pustaka

- Argyo Demartoto, dkk. 2009. *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Surakarta: UNS Press.
- Azca, M.N., Margono S.B., & Wildan, L. (Ed.). (2011). *PEMUDA PASCA ORBA: Potret Kontemporer Pemuda Indonesia*. Yogyakarta : YouSure (Youth Studies Center) Fisipol UGM.
- Bornstein, David dan Susan Davis. 2010. *Social Entrepreneurship (What Everyone Needs To Know*. New York: Oxford University Press.
- Creswell, John W.2010.*Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dasgupta, Partha dan Ismail Serageldin (ed). 2000. *Social Capital: A Multifaced Perspective*. Washington DC: The World Bank.
- Field, John. 2010. *Modal Sosial*. Terjemahan Nurhadi. Bantul: Kreasi Wacana.
- Fukuyama, Francis. 2002. *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Qalam.
- Johanna Mair,dkk (Ed). 2006.*Social Entrepreneurship*. New York: Palgrave Macmillan.
- Moleong, Lexy J, 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moscardo, Gianna (Ed). 2008. *Building Community Capacity For Tourism Development*. UK: CAB International.
- Mafruhah,Izza.2009.*Multidimensi Kemiskinan*.Surakarta:Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press).
- Praszkier, Ryszard dan Andrzej Nowak, 2012, *Social Entrepreneurship: Theory and Practice*, Cambridge University Press, New York.
- Rustiadi,Ernan dan Sugimin Pranoto.2007.*Agropolitan dan Membangun Ekonomi Perdesaan*.Bogor:Crestpent Press.
- Silalahi, Ulber.2010.*Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung.
- Survei Pusat Studi Ekonomi Rakyat.2009.Fakultas Ekonomi UGM diunduh melalui www. <http://xa.yimg.com/kq/groups/24835083/1521289249/name/BAB> pada bulan September 2016.
- Wibowo, Heri & Soni A. Nulhaqim.2015.*Kewirausahaan Sosial Merevolusi Pola Pikir Menginisiasi Mitra Pembangunan*. Bandung: UNPAD Press.
- Dokumentasi sejarah pengelolaan Nglanggeran diakses melalui www.gunungapipurba.com pada bulan September 2016.

PARTISIPASI KOMUNITAS LOKAL DALAM PEMBANGUNAN DESA MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Susetyo, Benjamin

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

Email: susetyo.1958@fisip.unila.ac.id, benjamin@fisip.unila.ac.id

Abstrak

Salah satu gambaran yang diperoleh di dalam struktur masyarakat perdesaan tertinggal terdapat indikasi komunitas lokal belum terjangkau oleh pemerintah dalam menerima pembangunan, termasuk pengorganisasian masyarakat dalam proses revitalisasi pembangunan infrastruktur. Metode berdasarkan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dengan teknik purposive. Data dan informasi dikumpulkan dengan cara: a. Wawancara mendalam, b. Observasi, c. Studi dokumentasi. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif melalui proses: a. Reduksi data, b. Penyajian Data, c. Menarik Kesimpulan. Lokasi penelitian di dua desa, Desa Babakan Loa dan Desa Kubu Batu di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Kesimpulan partisipasi komunitas lokal dari kelima informan menyatakan bahwa dalam pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat atau lebih tepatnya peran aktif dalam pengambilan keputusan dengan jumlah kehadiran cukup tinggi pada saat pelaksanaan rebug desa. Di dalam pelaksanaan pengerjaan usulan pembangunan desa, warga sadar secara standar dan kualitas pekerjaan, sehingga dalam penghitungan pengerjaan lebih menggunakan tenaga warga masyarakat desa sendiri. Hal yang paling menonjol, partisipasi dan tanggungjawab masyarakat dalam pemeliharaan sarana, di mana warga masyarakat membentuk kelompok untuk pemanfaat dan pemelihara sarana yang sudah terbangun dengan swadaya masyarakat sendiri.

Kata kunci: Partisipasi masyarakat, komunitas lokal, dan pemberdayaan masyarakat

Pendahuluan

Sehubungan dengan penguatan partisipasi komunitas lokal dalam pelaksanaan pembangunan desa, tentunya terlebih dahulu dimusyawarahkan melalui musyawarah desa atau rebug desa. Rebug desa sendiri merupakan wadah untuk membicarakan penyusunan rencana pembangunan atau tempat musyawarah perencanaan pembangunan. Lebih jauh, peranan rebug desa bagi masyarakat desa, diantaranya dapat berupa: a. menemukan masalah atau kebutuhan, b. sumber daya pembangunan, dan c. merumuskan alternatif tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi masalah atau mewujudkan kebutuhan, yang selanjutnya juga merumuskan rencana pembangunan dengan rencana pembangunan jangka pendek (tahunan), dan memandang desanya pada masa yang akan datang di setiap tahapan pembangunan secara partisipatif.

Berkaitan dengan partisipasi komunitas lokal di dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat berupa perbaikan infrastruktur perdesaan melalui swadaya dan pemberdayaan masyarakat lokal yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Selanjutnya pembangunan wilayah perdesaan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan fokus pembangunan infrastruktur, di mana potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat perdesaan khususnya kawasan desa tertinggal dengan karakteristik masyarakat perlu pengokohan kelembagaan masyarakat. Keberdayaan kelembagaan masyarakat dibutuhkan dalam rangka membangun organisasi masyarakat sebagai wadah bagi masyarakat perdesaan yang mandiri, berkelanjutan dalam menyuarkan aspirasi, kebutuhan dan mampu yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan berkaitan dengan kebijakan umum di tingkat lokal, baik aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan.

Penguatan kelembagaan masyarakat yang dimaksud dititikberatkan pada upaya penguatan peran sebagai motor penggerak dalam “melembagakan” dan “membudayakan” nilai-nilai kemanusiaan serta kemasyarakatan (nilai-nilai dan prinsip-prinsip pemberdayaan manusia). Dengan melalui kelembagaan masyarakat diharapkan tidak ada lagi kelompok-kelompok dalam masyarakat yang terjebak pada lingkaran kemiskinan, dan juga diharapkan dapat tercipta lingkungan perdesaan dengan perumahan yang layak huni di dalam suatu permukiman. Kelembagaan masyarakat yang dibangun pun oleh dan untuk masyarakat, selanjutnya dipercaya dapat mengelola anggaran secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dana yang ada dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan, yang diputuskan oleh masyarakat melalui rembug desa, misalkan perbaikan prasarana dan sarana maupun perumahan dan permukiman.

Adapun lokasi yang diambil dalam penulisan ini, yaitu duadesa di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Lampung yang pernah menerima program PNPM Mandiri. Pendekatan pengamatan pada permasalahan desa tertinggal dan kemiskinan, fokus penulisan ini sebagai salah satu gambaran yang diperoleh, dimana dalam struktur masyarakat perdesaan tertinggal terdapat indikasi komunitas lokal belum terjangkau oleh pemerintah dalam menerima pembangunan, termasuk pengorganisasian masyarakat dalam proses revitalisasi pembangunan infrastruktur (perencanaan, musyawarah desa, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan).

Permasalahan yang dihadapi masyarakat perdesaan tertinggal dalam peningkatan ekonomi lokal adalah kondisi ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai. Hal tersebut terlihat dari sebagian besar penduduk di desa harus menempuh jarak sejauh 6-10 km ke pusat pemasaran (pusat kecamatan). Bahkan di desa lain warga desa harus menempuh jarak lebih dari 10 km dengan kondisi jalan yang memprihatinkan. Pelayanan air minum perpipaan perdesaan masih sangat rendah, atau masih ada yang mengambil langsung dari sumber air yang belum terlindungi. Sementara itu, para petani yang memiliki luas lahan dan sarana perairan belum memadai, sehingga meningkatkan produktivitas pertanian belum maksimal. Selain itu, penyerapan tenaga kerja perdesaan dengan potensi yang dimiliki sebagian besar berusia produktif dan berpendidikan rendah semakin sempit. Dengan melalui revitalisasi pembangunan infrastruktur perdesaan diharapkan dapat membuka lapangan kerja, dan kemudahan akses untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Adapun yang menjadi fokus penulisan lebih menekankan pada partisipasi komunitas lokal dalam pelaksanaan pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat.

Metode

Untuk mengetahui partisipasi komunitas lokal dalam penulisan ini secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran atau penjelasan dari variabel yang dibicarakan. Menurut Miles dan Huberman (2007:20), bahwa analisis interaktif terdiri dari beberapa komponen, yaitu : 1). Pengumpulan Data, 2). Reduksi Data, 3). Penyajian Data, 4). Verifikasi Data. Dalam penulisan ini, secara implisit fokus yang dapat dipergunakan dalam mengukur variabel partisipatif masyarakat dengan keberpihakan kepada yang miskin (penerima manfaat), dengan melihat seberapa jauh orientasi proses pelaksanaan kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan, hasil ditujukan kepada penduduk miskin di lokasi tersebut. Selanjutnya sehubungan dengan pelaksanaan program tentang pemberdayaan masyarakat, di mana seluruh proses implementasi kegiatan dari Program RIS PNPM Mandiri yang terletak di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Adapun proses revitalisasi pembangunan desa dari 2 lokasi desa dalam pelaksanaan program RIS-PNPM mandiri (hanya 2 desa yang dipaparkan dalam penulisan ini) dengan melihat seberapa jauh proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui : 1. Tahap perencanaan meliputi, diantaranya:

a. Identifikasi Masalah / Penggaliaan gagasan Masyarakat, b. Prioritas Masalah, c. Verifikasi Usulan Masyarakat, d. Identifikasi Penerima Manfaat, 2. Tahap Pelaksanaan Program: a. Menyusun Kelompok kerja masyarakat, b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan, c. Pembentukan KPP, d. Penyusunan Laporan Kegiatan Masyarakat, 3. Operasi Pemakaian dan Pemeliharaan.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian desa tertinggal merupakan kawasan perdesaan yang ketersediaan sarana dan prasarana dasar wilayahnya kurang atau tidak memadai (tertinggal), sehingga menghambat pertumbuhan atau perkembangan kehidupan masyarakat di bidang ekonomi (kemiskinan) dan di bidang pendidikan (keterbelakangan). Adapun kriteria desa tertinggal dalam penulisan paper ini, yaitu : a. Kawasan permukiman (unit administratif desa), b. Prasarana dasar wilayah kurang atau tidak (seperti air bersih, listrik, irigasi), c. Sarana wilayah kurang atau tidak ada, d. Sarana ekonomi (seperti pasar, pertokoan, dan industri masyarakat), e. Sarana transportasi (seperti kondisi jalan yang masih belum memadai, tertutupnya akses transportasi), f. Perekonomian masyarakat rendah (miskin/prasejahtera), g. Tingkat pendidikan rendah (terbelakang atau kurang dari program wajib belajar 9 tahun), h. Produktivitas masyarakat rendah (pengangguran usia produktif), i. Pengelompokan masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang (adanya kelompok mayoritas dan minoritas).

Selanjutnya partisipasi masyarakat¹ sendiri merupakan keberpihakan kepada warga masyarakat perdesaan tertinggal yang miskin sebagai penerima manfaat, atau melihat orientasi proses pelaksanaan kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan dan hasil ditujukan bagi warga miskin. Partisipasi dalam membantu menyusun rencana pembangunan dan memfasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan. Partisipasi keterlibatan masyarakat dimaknai sebagai sebuah proses dimana para *stakeholder* saling mempengaruhi dan berbagi kontrol atas inisiatif pembangunan, keputusan, dan sumber daya yang mempengaruhi mereka (World Bank, 1996:3), sedangkan menurut Sj. Sumarto (2003:15), partisipasi warga merupakan proses ketika warga, baik sebagai individu, kelompok sosial dan organisasi mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat (Plumer dalam Suryawan (2004:27), diantaranya : a. Pengetahuan dan keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat. Hal mana membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap faktor-faktor dan bentuk dari partisipasi yang ada; b. Pekerjaan masyarakat. Umumnya orang dengan tingkat tertentu dapat meluangkan atau tidak meluangkan waktu untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar, bahwa ada pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi; c. Tingkat pendidikan dan buta huruf pun, sangat berpengaruh pada keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami, melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi; d. Jenis kelamin, sebagian masyarakat masih menganggap faktor tersebut dapat mempengaruhi keinginan maupun kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, karena beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi atau pandangan yang berbeda terhadap suatu pokok permasalahan; e.

¹Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan merupakan keikutsertaan warga dalam proses merencanakan pembangunan, memikul beban pembangunan (swadaya); melaksanakan pembangunan; menerima, memanfaatkan dan memelihara hasil dari pembangunan; menilai dan mengkritik proses pembangunan, menurut oleh Yuda Setiawan pada Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa 12 Nopember 2016.

Kepercayaan terhadap budaya tertentu masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi dan metodologi yang digunakan. Sehubungan dengan partisipasi, Cohen dan Uphoff dalam Siti Irine Astuti D (2009:39-40) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan kemanfaatan dan keempat, partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut bila dilakukan bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial.

Sehubungan dengan pelaksanaan proyek fisik yang dapat diintegrasikan dengan program-program pembangunan desa secara partisipatif dengan kebersamaan setiap kelompok masyarakat desa melalui :

- Memfasilitasi pertemuan-pertemuan musyawarah dusun dan desa,
- Memfasilitasi masyarakat untuk menggunakan berbagai metode perencanaan partisipatif dalam menggali gagasan berdasarkan potensi dan masalah di masyarakat dan desa dalam upaya meningkatkan kapasitas diri dan kesejahteraan,
- Mencatat dan menginventarisir gagasan masyarakat pada waktu penggalan gagasan, sebagai bahan untuk pembahasan di rembug desa, dan
- Melakukan survei dan mengumpulkan data pendukung usulan kegiatan masyarakat, termasuk kesediaan swadaya, perkiraan jumlah penerima manfaat, perkiraan besarnya biaya kegiatan.

Dalam proses pelaksanaan partisipasi masyarakat dilihat kecenderungan peran aktif di dalam mengikuti sebagian besar jalannya pengerjaan proyek pembangunan desa, keterlibatan masyarakat diantaranya seperti, ikut bersama-sama dalam pekerjaan memecahkan batu sebagai bahan material pembuatan onderlagh jalan. Sebagian besar tentang spesifikasi pekerjaan pembuatan onderlagh jalan secara teknis tidak memerlukan pekerjaan yang terlalu sulit, seperti yang diutarakan oleh informan I, bahwa “kami tidak kesulitan dalam pemasangan batu pasangan, bisa mengambil tenaga masyarakat sebanyak-banyaknya dan harus menyiapkan batu pasangannya. Warga desa tinggal menyusun sesuai dengan penempatan yang sudah diatur. Beda dengan pembuatan siring, talud ataupun jembatan yang memerlukan tenaga terlatih, dengan pengeluaran semakin banyak dan keikutsertaan masyarakat semakin sedikit”.

Demikian halnya yang terjadi di Desa Kubu Batu, seperti yang dijelaskan oleh informan IV, bahwa “keikutsertaan warga cukup baik, ibu-ibu selalu membantu menyiapkan makanan untuk para pekerja, dan cukup jarang terjadi hal-hal demikian untuk saat ini. Kami sangat mengharapkan untuk menyelesaikan pekerjaan dan dapat menikmatinya guna meningkatkan kehidupan warga disini”. Selanjutnya dari beberapa informan menuturkan di dalam hasil musyawarah yang dicapai dijelaskan oleh informan V, bahwa “inti musyawarah - mendapatkan suatu keputusan bersama untuk melaksanakan kegiatan. Permasalahan kebutuhan masyarakat desa berbagai macam dan kesemuanya tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat. Maka masyarakat diharapkan dapat memutuskan kebutuhan yang mendesak, mengingat bantuan dana yang terbatas. Maka perlu rencana matang dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat miskin”.

Pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan pada masyarakat pedesaan masih relatif tinggi. Namun masih ada refleksi, di mana kepentingan gender terlupakan. Perempuan dalam implementasi kegiatan bukan semata-mata sebagai salah satu bagian dari syarat pelaksanaan. Namun perempuan pun memiliki peranan dalam semua pencapaian tersebut. Keterlibatan gender, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Keterlibatan perempuan hanya sekedar memenuhi jumlah minimal (kuantitas) di dalam indikator capaian kinerja lapangan.

Prinsip perencanaan secara partisipatif untuk melihat partisipasi masyarakat di dalam hal pelaksanaan pembangunan dengan melihat keikutsertaan di dalam rembug desa, lihat tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi kehadiran dalam rembug desa

No	Desa	Keikutsertaan Masyarakat desa							
		Rembug Ds I		Rembug Ds II		Rembug Ds III		Rembug Ds IV	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Babakan Loa	40	20	45	38	34	40	34	45
2.	Kubu Batu	34	45	48	35	46	41	34	45

Sumber: Data Lapangan, 2009

Proses pengambilan keputusan dapat dilihat dengan partisipasi melalui tahapan kegiatan rembug desa, bahwa “didalam pelaksanaan Rembug desa I, masyarakat diminta untuk mengambil keputusan dalam proses pemilihan keanggotaan OMS (Organisasi Masyarakat Setempat). Di dalam pelaksanaan Rembug desa II masyarakat diminta untuk mengambil keputusan prioritas pekerjaan yang akan dilaksanakan. Pada Rembug desa III, penetapan keanggotaan KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara) dan operasi pemeliharaan, selanjutnya terakhir Rembug desa IV serah terima fisik dengan masyarakat”. Kematangan di dalam pengambilan keputusan sangatlah tergantung pada proses terjadinya musyawarah, keputusan yang diambil rata-rata diambil dari berbagai alternatif usulan yang diajukan.

Partisipasi Masyarakat Desa Babakan Loa

Di dalam proses perencanaan di Desa Babakan Loa diawali dengan penggalian gagasan di setiap RW. dengan melalui media rembug desa untuk kelompok campuran dengan difasilitasi oleh FM pemberdayaan masyarakat, dan menggunakan pertemuan rembug desa untuk kelompok perempuan dengan difasilitasi oleh FD pemberdayaan. Pada proses tersebut, masyarakat memperoleh pengalaman mengenai tahapan perumusan usulan kegiatan. Kegiatan yang diusulkan seharusnya mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya permasalahan kemiskinan. Mendasarkan pada tahapan tersebut, usulan kegiatan tiap-tiap RW dan kelompok perempuan merupakan upaya pemecahan masalah mereka yang diperoleh dari penggalian gagasan secara partisipatif dan dilakukan bersama. Selanjutnya, usulan kegiatan tersebut dimusyawarahkan di tingkat desa melalui forum Rembug desa yang menghasilkan usulan kegiatan Desa Babakan Loa.

Namun, proses musyawarah melalui forum rembug desa, akhirnya gagal mencapai mufakat, karena masing-masing RW berusaha mempertahankan dan menganggap bahwa usulannya yang perlu diprioritaskan dan menyangkut kepentingan warga RW. Masyarakat menganggap dana PPK yang cukup besar akan mampu membiayai kebutuhan RW yang selama ini sulit untuk direalisasikan melalui swadaya. Selain itu, persaingan diantara 2 organisasi keagamaan juga turut mewarnai proses MD. Dengan demikian, keberadaan wakil RW dan organisasi keagamaan yang sangat menentukan proses pengambilan keputusan pada forum MD. Pada akhirnya, pemilihan usulan kegiatan PPK Desa ditentukan melalui voting. Perwakilan RW yang hadir dalam MD dipersilahkan memilih usulan kegiatan yang memenuhi kriteria mendesak dan perlu diprioritaskan.

Partisipasi Masyarakat Desa Kubu Batu

Awalnya, kebanyakan warga kurang tertarik terhadap kegiatan pembangunan di desanya, baik kegiatan di bidang prasarana/ sarana, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Dalam kegiatan ekonomi, khususnya pinjaman bergulir, masih banyak warga berpendapat bantuan program merupakan hibah dan tidak perlu dikembalikan. Namun, setelah

dijelaskan dengan baik oleh fasilitator dan pelaku program, warga pun menyadari untuk memenuhi tanggung jawabnya, seperti yang dijelaskan informan III, bahwa “Seorang OMS(Organisasi Masyarakat Setempat) menceritakan bagaimana pada awalnya warga desa menuduhnya telah “memakan” uang dana bantuan,tetapi setelah memberikan penyadaran oleh kader desa berhasil mengembalikan pinjaman, lalu dana pengembalian itu benar-benar dipinjamkan kembali (digulirkan) kepada kelompok masyarakat lain yang juga membutuhkan, warga pun meyakini dan mendukungnya”.

Di samping itu, OMS juga mendorong warga untuk turut menjaga sarana air bersih dan listrik desa, serta mengajak warga membayar iuran pemakaian air dan listrik tepat waktu. Di beberapa lokasi, para OMS memang bercerita bagaimana sulitnya merubah pola pikir warga dan aparat desa. Kembali lagi, pendekatan personal “dari hati ke hati” sangat berperan di dalamnya. Seperti di desa Kubu Batu, berkat pendekatan OMS dan fasilitator program, kini warga mulai mengetahui kedudukannya dalam pembangunan. Warga kini mulai bertanya-tanya bila ada kegiatan yang dilakukan “sendiri” tanpa melibatkan mereka, baik sebagai pekerja maupun pesertamusyawarah, dimana “Awalnya warga mempertanyakan kapan dana akan dikucur. Kenapa mereka hanya diajak musyawarah dan musyawarah. Bahkan banyak warga yang menganggap fasilitator hanya mengumbar janji-janji. Namun kini, warga justru memprotes bila mereka tidak diajak musyawarah atau tidak dilibatkan dalam kegiatan yang akan dilakukan di desanya,” seperti yang diutarakan oleh Informan IV.

Pendekatan dan penjelasan melalui media sosialisasi untuk lebih menekankan pada tujuan yang dicapai di dalam program menjadikan tolak ukur keberhasilan di dalam pelaksanaan kebersamaan menjadi ciri yang mendekatkan tingkat kepercayaan bersama di tengah masyarakat sudah terbentuk.

Dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat² sebagai strategi pembangunan desa yang bertumpu pada pemihakan dan pemberdayaan merupakan suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat sebagai komunitas lokal. Kekuatan sosial yang tidak berimbang menyebabkan kegagalan pasar untuk mewujudkan harapan seperti yang diutarakan oleh Brown (1995). Maka dari itu, diperlukan intervensi yang tepat, agar kebijaksanaan pada tingkat makro mendukung upaya mengatasi kesenjangan dengan kegiatan yang bersifat mikro dan langsung ditujukan pada lapisan masyarakat terbawah dari wilayah desa tertinggal.

Strategi pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan, diantaranya: **Pertama**, terarah (*targetted*) dengan pemihakan langsung kepada masyarakat bawah, terencana dalam mengatasi masalah dan sesuai kebutuhan. **Kedua**, program yang terencana dengan mengikutsertakan dan dilaksanakan oleh masyarakat bawah yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat bawah dengan tujuan, supaya lebih efektif sesuai dengan kehendak, kemampuan dan kebutuhan, serta terjadi peningkatan keberdayaan (*empowering*) masyarakat melalui pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri di bidang ekonomi. **Ketiga**, dengan kerja bentukkelompok pada masyarakat miskin dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi lebih efektif dan efisien, di samping itu kemitraan usaha antarkelompok agar lebih maju terus-menerus dibina dan dipelihara.

Selanjutnya untuk kepentingan analisis, pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dengan pendekatan komprehensif rasional dengan diperlukan perencanaan berjangka, penerahan sumber daya yang tersedia dan pengembangan potensi yang ada secara

²Definisi konsep pemberdayaan masyarakat adalah merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa, disampaikan oleh Yuda Setiawan pada Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa 12 Nopember 2016.

rasional mencakup seluruh masyarakat. Dalam upaya tersebut dilibatkan semua lapisan masyarakat, baik pemerintah desamaupun dunia usaha, lembaga-lembagasosial dan kemasyarakatan, tokoh-tokoh lokal dan individu-individu yang mempunyai kemampuan untuk bekerja sama.

Disamping itu, dengan pendekatan advokasi menekankan keberadaan pendamping bagi setiap kelompok yang terbentuk dan membantu untuk membuka akses kepada pelaku-pelaku pembangunan, membantu pengorganisasian diri, menggalang dan memobilisasi sumber daya untuk memiliki kemampuan dalam posisi tawar (*bargaining position*). Pendekatan tersebut didasarkan pada pertimbangan, bahwa dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dan sistem nilai yang berbeda. Apalagi masyarakat majemuk, di mana kekuasaan tidak terdistribusi secara merata dan akses keberbagai sumber daya tidak sama, menurut Catanese and Snyder (1986).

Selanjutnya untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat telah berhasil, maka diperlukan pemantauan, penetapan sasaran, dan diukur untuk dapat dibandingkan. Pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi sasaran utamanya adalah kemandirian masyarakat. Pengukuran, antara lain dengan *indeks gini* jumlah orang yang hidup dibawah garis kemiskinan, jumlah desa miskin, peranan industri kecil, nilai tukar pertanian, upah minimum dan sebagainya. Pembangunan manusia berkualitas bukan hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek pendidikan dan kesehatan. Di bidang tersebut, ukuran dikembangkan antara lain dengan persentase penduduk yang buta aksara, angka partisipasi sekolah untuk SD, SLTP, SLTA dan perguruan tinggi, angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup, persentase penduduk yang kurang gizi, dan rata-rata umur harapan hidup. Adapun yang dikembangkan oleh Bappenas bersama BPS semacam angka indeks kesejahteraan rakyat yang menggabungkan indikator ekonomi, kesehatan, dan pendidikan ke dalam suatu angka indeks.

Indeks kesejahteraan juga telah dikembangkan oleh UNDP yang dikenal dengan Human Development Index (HDI). Individu mempersiapkan diri untuk kehidupan abadi melalui pembangunan spiritual, sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat, dalam rangka membangun masyarakat berakhlak. Terkait dengan itu pembangunan budaya, untuk menciptakan, menjadi jati diri, sikap budaya kerja keras, disiplin, kreatif, ingin maju, menghargai prestasi dan siap bersaing. Dalam pembangunan budaya dikembangkan orientasi kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemberdayaan teknologi, merupakan jawaban berjangkauan ke depan, berkesinambungan dalam membangun masyarakat mandiri dan sejahtera. Pemberdayaan masyarakat membangkitkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat.

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata "*power*" (kekuasaan atau keberdayaan). Maka dari itu, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan berkaitan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pemberdayaan masyarakat merupakan tindakan sosial bagi penduduk suatu komunitas lokal untuk mengorganisirkan diri, membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Dalam kenyataannya, proses tersebut tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau pekerja sosial. Masyarakat perdesaan yang miskin cenderung sebagai kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dalam diri maupun tekanan eksternal dari lingkungan. Maka dari itu, dalam penulisan paper ini menekankan tiga proses, diantaranya reorientasi menemukan visi baru, restrukturisasi menata ulang organisasi kemasyarakatan dan sumberdaya lokal yang belum berkembang karena keterbatasan dan ketidakjangkauan masyarakat.

Seperti dikemukakan di atas, mekanisme pemberdayaan masyarakat perlu melibatkan segenap potensi yang ada di dalam masyarakat. Beberapa aspek di antaranya

dapat dikemukakan: **Pertama**, peranan pemerintah amat penting. Birokrasi pemerintah agar dapat menyesuaikan dengan misi tersebut. Maka terdapat beberapa upaya agar dilakukan, diantaranya: a. Birokrasi pemerintah perlu memahami aspirasi rakyat dan peka terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat, b. Birokrasi pemerintah perlu membangun partisipasi rakyat. Maksudnya, memberikan sebanyak mungkin kepercayaan pada rakyat untuk memperbaiki diri sendiri. Aparat pemerintah membantu memecahkan masalah yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat sendiri, c. Birokrasi pemerintah perlu menyiapkan masyarakat dengan sebaik-baiknya, melalui pengetahuan dan cara bekerja, agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat efektif. Ini merupakan bagian dari upaya pendidikan sosial untuk memungkinkan rakyat membangun kemandirian masyarakat, d. Birokrasi pemerintah perlu membuka dialog dengan masyarakat. Keterbukaan dan konsultasi perlu untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) masyarakat, agar aparat dapat segera membantu jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh rakyat, e. Birokrasi pemerintah perlu membuka jalur informasi dan akses yang dibutuhkan oleh masyarakat, f. Birokrasi pemerintah perlu menciptakan instrumen peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat lemah. Dengan demikian untuk dapat menjalankan misi tersebut, maka birokrasi pemerintah perlu, diantaranya: (1) ditingkatkan kewenangan sampai pada lapisan terendah, (2) ditingkatkan kualitas, agar benar-benar mampu memberikan bimbingan dan pemberdayaan masyarakat. Terutama titik berat perlu diberikan kepada aparat pada tingkat yang langsung berhadapan dengan masyarakat, secara hirarkis seperti aparat desa, kecamatan, maupun fungsional seperti PPL, guru, dokter, dan dansa.

Kedua, organisasi-organisasi kemasyarakatan dari luar masyarakat setempat yang memiliki potensi seperti lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), di samping organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional dan lokal. LSM dapat berfungsi sebagai pelaksana program pemerintah (mewakili pemerintah), dapat menjadi pembantu (konsultan) pemerintah, tetapi dapat juga menjadi pembantu rakyat dalam program pemerintah. Sebaliknya LSM sesuai dengan namanya, dapat pula mengembangkan programnya sendiri. Dalam rangka tersebut, aparat setempat harus menjalin kerjasama erat dengan LSM, agar program LSM dapat bersinergi dengan program pemerintah, atau sekurang-kurangnya tidak terjadi kesimpangsiuran yang dapat mengakibatkan benturan yang akan merugikan rakyat. LSM diperlakukan sebagai mitra pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Tentunya yang dimaksud LSM yang murni dan bukan kepanjangan tangan dari kepentingan politik yang hanya menggunakan rakyat sebagai alat politik.

Ketiga, lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan di dalam masyarakat, atau sering disebut sebagai *local community organization*. Lembaga tersebut seperti LKMD, PKK atau Karang Taruna, atau yang benar-benar tumbuh dari masyarakat sendiri seperti kelompok arisan, kelompok sinoman, kelompok paketan dan sebagainya.

Dalam rangka revitalisasi pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan desa tertinggal sangat diperlukan pembangkitan kembali fungsi kelembagaan dalam masyarakat yang dikembangkan oleh masyarakat sendiri, sebagai bagian dari mekanisme, yaitu seperti halnya kelompok-kelompok masyarakat (pokmas) yang setiap kelompok bisa terdiri dari 10 sampai 30 kepala keluarga. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut bisa efektif dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Kalau secara sendiri-sendiri, mereka sulit untuk dapat mengatasi hambatan yang menyebabkan kemiskinan. Kalau secara bersama-sama, mereka dapat saling bahu-membahu memperkuat dan saling menutupi kelemahan. Dinamika peranan kelompok dan sinergi diharapkan dapat menghasilkan nilai dari upaya individual dalam kelompok.

Keempat, pendamping. Warga masyarakat pedesaan tertinggal yang miskin umumnya mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan diri. Oleh karena itu, diperlukan pendamping untuk membimbing mereka dalam upaya memperbaiki

kesejahteraan. Pendamping bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat sebagai fasilitator, komunikator, ataupun dinamisator.

Lingkup pembinaan yang dilakukan oleh pendamping meliputi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, kualitas para anggota maupun pengurus setiap kelompok dan peningkatan kemampuan usaha. Maka, pendamping perlu mengenal dan mengadakan komunikasi yang intensif dengan setiap kelompok, sedangkan pendamping yang paling efektif berasal dari anggota masyarakat itu sendiri atau merupakan anggota masyarakat yang telah berhasil dan sejahtera dalam kehidupannya.

Selain itu, dapat pula perekrutan sarjana-sarjana sebagai pendamping purna waktu, dan beberapa sarjana yang sesuai dengan keahlian dibidangnya, dapat pula pendamping diambil dari petugas lapangan dari tingkat kecamatan dan desa, dapat pula melalui berbagai departemen dan lembaga kemasyarakatan, antara lain dari Departemen Dalam Negeri (Latihan Pembangunan Desa Terpadu atau LPDT), Departemen Pertanian (Penyuluh Pertanian Lapangan atau PPL dan Penyuluh Pertanian Spesialis atau PPS), Departemen Sosial (Petugas Sosial Kecamatan atau PSK dan Karang Taruna), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (Petugas Lapangan KB atau PLKB), Kantor Menteri Pemuda dan Olahraga (Pemuda Pelopor), Departemen Tenaga Kerja (Tenaga Kerja Mandiri Profesional atau TKST), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan atau SP3), para dokter, bidan desa, guru, serta para petugas lainnya yang ada di desa yang hidup di tengah-tengah masyarakat desa. Disamping itu, secara swadaya dan sukarela perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya, seperti LSM, dapat pula ikut serta sebagai pendamping. Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, pendamping harus siap bekerja setiap waktu, menghadiri pertemuan kelompok, mengorganisasikan program latihan, dan membantu kelompok memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan.

Kelima, pemberdayaan masyarakat merupakan cerminan proses perencanaan pembangunan nasional, sebagai aliran dari bawah ke atas. Dewasa ini upaya tersebut telah dilakukan mulai dari tingkat desa dengan musyawarah pembangunan desa (LKMD), forum diskusi UDKP di tingkat kecamatan, sampai ke Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah Tingkat II, Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah Tingkat I, Rapat Konsultasi Regional Pembangunan, dan Rapat Konsultasi Nasional Pembangunan. Mulai dari Dati II, kelembagaan perencanaan sudah cukup kuat, karena telah ada Bappeda. Di tingkat kecamatan telah ada pula pejabat teknis seperti PPL, mantri statistik, juru penerang, dokter puskesmas, yang dapat membantu kegiatan perencanaan meskipun pada taraf sederhana, yang masih lemah dan harus diperkuat dalam proses perencanaan adalah kemampuan perencanaan pada tingkat desa. Upaya tersebut meliputi penyempurnaan kelembagaan desa, penguatan sumber daya manusia serta pengembangan budaya masyarakat desa yang tanggap pada perubahan atau dapat disebut modernisasi masyarakat desa.

Keenam, keikutsertaan masyarakat yang lebih mampu dalam dunia usaha dan swasta. Pemberdayaan masyarakat dapat lebih optimal jika terjadi keterkaitan dalam kemitraan usaha diantara yang telah mampu dengan yang masih tertinggal terutama melalui penyediaan modal usaha untuk pengembangan usaha penduduk miskin. Model seperti sedang dikembangkan melalui gerakan nasional tabungan keluarga sejahtera (Takesra) dan kredit usaha keluarga sejahtera (Kukesra). Dalam Takesra dan Kukesra, penduduk miskin yang termasuk dalam kategori keluarga prasejahtera dan sejahtera I mendapatkan bantuan suntikan tabungan dengan maksud untuk membiasakan menabung dan mengelola keuangan dengan baik. Bagi penduduk miskin yang telah mampu menabung dapat mengajukan bantuan modal berupa kredit Kukesra dengan menyampaikan rencana kegiatan produktif. Bantuan modal yang diberikan kepada penduduk miskin tersebut berasal dari masyarakat yang telah lebih mampu.

Upaya tersebut yang prakarsanya diambil oleh pemerintah dapat diperluas, dalam berbagai bentuk pola kemitraan langsung terutama antara usaha swasta dengan usaha ekonomi rakyat. Potensi dunia usaha dan masyarakat yang mampu untuk turut memberdayakan masyarakat cukup besar dan perlu dikembangkan, untuk memperkuat perekonomian nasional, juga akan mempertebal persatuan dan kesatuan bangsa, karena kuatnya solidaritas sosial perlu disadari seringkali nilai luhur dan kearifan lokal masih perlu digali.

Adapun hasil perbaikan infrastruktur yang dilaksanakan didapatkan tujuan pemberdayaan - memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya ditindas - struktur sosial - tidak adil). Adapun pengkategorian nya, sebagai berikut : 1. Kelompok lemah karena struktural, secara kelas, gender, maupun etnis, 2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, kaum wanita, dan anak-anak, 3. Kelompok yang lemah secara personal, termarginal karena kondisi ekonomi keluarga ataupun permasalahan keluarga.

Selanjutnya beberapa kelompok masyarakat yang selama ini kurang diikutsertakan selama program ini berlangsung mengalami diskriminasi, seperti halnya yang dituturkan oleh informan Damiri mengungkapkan ada sejumlah warga yang mungkin tidak ikut dalam musyawarah, sebagai syarat berlangsungnya Rembug desaseperti yang diungkapkan diatas bahwasanya masyarakat yang selama ini kurang bergaul ditengah masyarakat karena adanya kesenjangan diantara warga masyarakat atau pun kesibukan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan prespektif tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa kelompok lemah mengekspresikan aspirasi dan menunjukkan kemampuannya terhadap lingkungan sosialnya menjadi tertutup dan cenderung semakin melemah, menurut Sennet dan Cabb (1972) dan Conway (1979) menyatakan salah satu penyebab ketidakberdayaan disebabkan oleh beberapa faktor seperti : ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan jaminan sosial, kesehatan, ketiadaan pengalaman politik, ketiadaan dukungan finansial, ketiadaan pelatihan-pelatihan, dan adanya ketegangan fisik maupun emosional (dalam Suharto, 2009). Secara teoritis sekelompok masyarakat ketidakberdayaan merupakan internalisasi yang dihasilkan dari interaksi mereka dengan masyarakat, mereka lebih cenderung beranggapan memang dirinya lemah dan tidak berdaya.

Dalam pemikiran Leanner menjelaskan bahwa ada seperangkat pikiran emosional, intelektual dan spiritual yang mencegahnya dari pengaktualisasian diri kemungkinan-kemungkinan sederhana (takut mengambil resiko dengan pemikiran sederhana). Misalnya saja ada persepsi diantara warga masyarakat sehubungan bantuan program RIS-PNPM dengan dibangunnya MCK umum di depan rumah, ada yang tidak peduli karena lebih memilih pergi ke sungai dan ada pemikiran kesadaran keuntungan apa yang akan diperoleh, aktualisasi diri tidak dapat diperoleh dengan waktu yang singkat. Bimbingan dan pola pendampingan merupakan cara yang efektif untuk melakukan pendekatan secara mendalam.

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Maka dari itu, ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dicurahkan pada aspek-aspek yang menjadi perubahan, seperti di dalam pendekatan perbaikan pembangunan infrastruktur desa. Sasaran perubahan tersebut dapat dioptimalkan sebagai suatu awal untuk memulai dari kesadaran masyarakat. Hal mana sejalan dengan pendapat Parson (Suharto, 2009), di mana proses pemberdayaan dilakukan secara kolektif. Selanjutnya menurut beliau, bahwa tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi suatu relasi satu lawan satu antara fasilitator dan OMS. Meskipun pemberdayaan tersebut dapat meningkatkan rasa percaya diri warga masyarakat dan kemampuan diri dari OMS. Hal mana bukanlah merupakan strategi utama dari pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilaksanakan secara kolektivitas.

Pemberdayaan (sosialisasi program) masyarakat merupakan pendekatan pembangunan (berkelanjutan) dengan tujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menjalankan proses pembangunan *dari, oleh dan untuk* masyarakat, bahkan dengandukung berbagai kalangan atau pemangku kepentingan lainnya. Pelaku utama pembangunan itu sendiri adalah warga masyarakat yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan, penyediaan pendampingan serta pendanaan stimulant, yang akan mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam menjalankan upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan dalam menjalankan upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan sumber daya manusia, lihat tabel 2.

Tabel 2. Indikator keberdayaan

Jenis hubungan kekuasaan	Kemampuan Ekonomi	Kemampuan Mengakses manfaat kesejahteraan	Kemampuan kultural dan politis
Kekuasaan di dalam : Meningkatkan kesadaran dan keinginan berubah	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi terhadap kontribusi ekonomi dirinya • Keinginan memiliki kesempatan ekonomi yang setara • Keinginan memiliki kesamaan hak terhadap sumber yang ada pada rumah tangga dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepercayaan diri dan kebahagiaan • Keinginan memiliki kesejahteraan yang setara • Keinginan membuat keputusan mengenai diri dan orang lain • Keinginan untuk mengontrol jumlah anak 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Assertiveness</i> dan otonomi • Keinginan untuk menghadapi subordinasi gender termasuk tradisi budaya diskriminasi hukum dan pengucilan politik • Keinginan terlibat dalam proses-proses budaya, hukum dan politik
Kekuasaan untuk : Meningkatkan kemampuan individu untuk berubah; meningkatkan kesempatan kesempatan untuk memperoleh akses	<ul style="list-style-type: none"> • Akses terhadap pelayanan keuangan mikro • Akses terhadap pendapatan • Akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan rumah tangga • Akses terhadap pasar • Penurunan beban dalam pekerjaan domestik, termasuk perawatan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterampilan, termasuk kemelekan huruf • Status kesehatan dan gizi • Kesadaran mengenai akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi • Ketersediaan pelayanan kesejahteraan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilitas dan akses terhadap dunia di luar rumah • Pengetahuan mengenai proses hukum. Politik dan kebudayaan • Kemampuan menghilangkan hambatan formal yang merintang akses terhadap proses hukum, dan politik
Kekuasaan atas : Perubahan pada hambatan-	Kontrol atas penggunaan pinjaman dan	Kontrol atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai	Aksi individu dalam menghadapi dan mengubah persepsi

hambatan sumber kekuasaan pada tingkat rumah tangga masyarakat dari makro kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut	tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya Kontrol atas pendapatan aktivitas produktif keluarga yang lainnya Kontrol atas aset produktif dan kepemilikan keluarga Kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga Tindakan individu menghadapi diskriminasi atas akses terhadap sumber dan pasar	lainnya dari pembuatan keputusan keluarga termasuk keputusan keluarga berencana Aksi individu untuk mempertahankan diri dari kekerasan keluarga dan masyarakat.	budaya kapasitas dan hak wanita pada tingkat keluarga dan masyarakat Keterlibatan individu dan pengambilan peran dalam proses budaya hukum dan politik
Kekuasaan dengan meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro	Bertindak sebagai model peranan bagi orang lain terutama dalam pekerjaan publik dan modern Mampu memberi gaji terhadap orang lain Tindakan bersama menghadapi diskriminasi pada akses terhadap sumber (termasuk hak atas tanah), pasar dan diskriminasi gender pada konteks ekonomi makro	Penghargaan tinggi terhadap dan peningkatan pengeluaran untuk anggota keluarga Tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan politik	Peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat kritis Tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam masyarakat Partisipasi dalam gerakan-gerakan menghadapi subordinasi gender yang bersifat kultural, politis, hukum pada tingkat masyarakat makro

Sumber : Data hasil penelitian 2009

Simpulan dan Saran

Partisipasi komunitas lokal dari kelima informan menyatakan bahwa dalam pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat atau lebih tepatnya peran aktif dalam pengambilan keputusan dengan jumlah kehadiran cukup tinggi pada saat pelaksanaan rembug desa. Di dalam pelaksanaan pengerjaan usulan pembangunan desa, warga sadar secara standar dan kualitas pekerjaan, sehingga dalam penghitungan pengerjaan lebih menggunakan tenaga warga masyarakat desa sendiri. Hal yang paling menonjol, partisipasi dan tanggungjawab masyarakat dalam pemeliharaan sarana, di mana warga masyarakat membentuk kelompok untuk pemanfaat dan pemelihara sarana yang sudah terbangun dengan swadaya masyarakat sendiri.

Daftar Pustaka

- Anonim. 1994. *Panduan Program Inpres Desa Tertinggal*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional - Departemen Dalam Negeri.
- 1995. *Pembinaan Program dan Pendampingan Pokmas IDT*; Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional - Departemen Dalam Negeri.
- 1995. *Kaji Tindak Program Inpres Desa Tertinggal Tahun Pertama*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Arndt, Heinz W. 1987. *Economic Development: The History of An Idea*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Baran, P.A. 1957. *The Political Economy of Growth*. New York: Monthly Review Press.
- Bauzon, Kenneth E (ed). 1992. *Development and Democratization in the Third World: Myths, Hopes and Realities*. Washington: Crane Russak.
- Becker, Gary S. 1964. *Human Capital: A Theoretical Approach and Empirical Analysis with Special Reference to Education*. New York: Columbia University Press.
- Beebe, James. 1995. "Basic Concepts and Techniques of Rapid Appraisal". Human Organization, vol. 54, No. 1, Spring.
- Brautigam, Deborah. 1995. "Reducing Poverty: Lesson from Taiwan". Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds.), *People: From Impoverishment to Empowerment*. New York: New York University Press.
- Brown, Donald. 1995. "Poverty-Growth Dichotomy". Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds.), *People: From Impoverishment to Empowerment*. New York: New York University Press.
- Buchori, Mochtar. 1993. "Pengantar". Walter Fernandes dan Rajesh Tandon (eds.) *Riset Partisipatoris- Riset Pembebasan*. Penyunting: Wardaya dan Hardiman. Gramedia Pustaka Umum.
- Cariola, C. dan Sunkel O. *Un Siglo de Historia Economica de Chile, 1830-1930*. Madrid: Ediciones Cultura Hispanica, juga dalam R. Cortez Conde and S.J. Hunt (eds) *The Latin American*

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI PERAN WANITA DALAM PENGEMBANGAN UMKM BERBASIS DESA DI KOTA SUNGAI PENUH

Yolla Ramadani

STIE Sakti Alam Kerinci

Email: yolla_ramadani@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini ditulis untuk menjelaskan strategi pemberdayaan masyarakat desa dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan penyebaran kuisioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Dari 865 UMKM sebagai populasi yang berada di Kota Sungai Penuh, penulis mengambil 75 sampel dari UMKM yang ada. Berdasarkan analisis data yang ditemukan bahwa wanita pada umumnya menjadi aktor utama dalam setiap UMKM yang ada di masyarakat. Sebagian besar wanita pada wilayah pedesaan memiliki tingkat pendidikan yang masih relatif rendah. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempersiapkan UMKM-UMKM yang ada untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah dengan mengoptimalkan peran wanita dengan memberikan beberapa pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan agar mampu bersaing di kancah internasional. Setelah dilaksanakannya pelatihan perencanaan dan pemasaran produk, dapat dilihat terdapat beberapa kemajuan dalam proses pengemasan serta pemasaran setiap produk UMKM dengan nilai jual yang lebih menguntungkan.

Kata kunci: Pemberdayaan, UMKM, wanita.

Pendahuluan

Saat ini Bangsa Indonesia sedang dalam persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC). Melalui MEA yang diawali tahun 2016 terjadi memberlakukan perdagangan bebas di kawasan ASEAN. MEA ini dirancang untuk mewujudkan wawasan ASEAN 2020. MEA merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah Indonesia. Krisis ekonomi di Indonesia yang tidak kunjung selesai membuat usaha-usaha besar gulung tikar dan membuat beban bagi bangsa dan negara makin berat karena dengan usaha yang gulung tikar maka semakin banyaknya pengangguran. Tiap media setiap hari selalu menceritakan kondisi ekonomi di Indonesia yang tidak kunjung membaik, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah seolah-olah tidak ada hasilnya, PHK dan pengangguran semakin bertambah, ditambah lagi bulan Mei 2008 BBM naik lagi, semakin komplekslah masalah perekonomian di Indonesia. Namun biladicermati secara lebih mendalam, ternyata usaha kecil yang kadang dianggap remeh justru usaha tersebut dapat bertahan dan bahkan semakin berkembang. Melihat fenomena ini kiranya perlu usaha-usaha untuk mendukung daya pertumbuhannya. Pengidentifikasi masalah yang terjadi pada sektor usaha kecil perlu dilakukan pemantauan terus-menerus agar mampu meningkatkan pertumbuhan dan daya saing.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2000 penduduk Indonesia berjumlah 209 juta merupakan jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia. Dari jumlah tersebut 105 juta (50,24%) adalah wanita dan 104 juta (49,76%) pria. Separuh jumlah penduduk tersebut tinggal di kota, persentase penduduk wanita dan pria di kota dan di desa tidak jauh berbeda, yaitu di kota : 50,1% wanita dan 49,9% pria, sedang di desa: 49,7% wanita dan 50,3% pria. Dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan

penduduk Indonesia yang berusia 10 tahun keatas, pendidikan yang ditamatkan wanita masih lebih rendah dari pria di semua jenjang pendidikan terlebih lagi pada tingkat perguruan tinggi. Di kota: 27% wanita tidak tamat SD, 28 % tamat SD, 18% tamat SLTP, 22% tamat SMU/SMK, dan hanya 5% tamat perguruan Tinggi, sedang pria pendidikan tertingginya 19% tidak tamat SD, 26% tamat SD, 20% tamat SLTP, 28% tamat SMU/SMK, dan 7% tamat perguruan tinggi. Di desa : 48% wanita tidak tamat SD, 34% tamat SD, 11% tamat SLTP, 6% tamat SMU/SMK, dan hanya 1% tamat perguruan Tinggi, sedang pria pendidikan tertingginya 38% tidak tamat SD, 36% tamat SD, 14% tamat SLTP, 10% tamat SMU/SMK, dan 1% tamat perguruan tinggi.

Dalam beberapatahun belakangan ini, terutama sejak terjadinya krisis ekonomi di tahun 1997 perhatian terhadap pemberdayaan wanita dalam kegiatan berwirausaha pun mulai bermunculan. Perhatian tersebut tidak hanya muncul dari dunia akademisi tetapi juga dari para pengambil kebijakan praktisi, dan lembaga-lembaga masyarakat non pemerintahan. Di pedesaan pun sangat membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Oleh karena itu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan suatu mobilitas bagi wanita dalam mengembangkan usahanya, selain itu UMKM merupakan sebagai tempat pengujian dan pengembangan kemampuan kewirausahaan wanita.

Kota Sungai Penuh memiliki 865 UMKM yang tersebar di beberapa kecamatan, baik yang aktif maupun yang tidak aktif. Rata-rata UMKM tersebut dikelola oleh wanita-wanita ibu rumah tangga di daerah pedesaan.

Tingkat pendidikan wanita yang rendah menjadi ancaman besar UMKM saat ini dalam rangka menghadapi MEA. Hal ini dikarenakan ekonomi MEA sangat menuntut produk-produk yang sangat berkualitas yang mampu bersaing dikancah internasional. Untuk itu perlu kiranya diberikan pelatihan dan sosialisasi bagi para wanita-wanita yang bergelut di sektor UMKM untuk dapat mampu menghadapi persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).

Metode

Jenis penelitian yang dilakukan berdasarkan jenisnya termasuk dalam penelitian survei, jadi pengambilan kesimpulan dilakukan melalui analisa kuesioner yang di dapat dari responden. Obyek penelitian ini adalah Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Sungai Penuh, dengan mengambil sampel pekerja wanita. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan (1) Kuesioner, yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan berstruktur yang disampaikan kepada responden untuk memperoleh jawaban secara terperinci diantaranya pertanyaan mengenai teknologi informasi, peran serta dan kebutuhan untuk berkembang, (2) Wawancara, Wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara lebih detail mengenai obyek penelitian, dan untuk membantu penjelasan analisa data. Wawancara dilakukan dengan pemilik UMKM di Kota Sungai Penuh.

Sumber data yang digunakan yaitu (1) Data primer, Pengumpulan data primer diperoleh secara langsung dari Usaha Mikro Kecil Menengah melalui pengisian kuesioner yang dibagikan ke usaha kecil menengah Pekalongan yang dituju, (2) Data sekunder, Pengumpulan data sekunder diperoleh dari penelusuran buku literatur dan download jurnal dari internet sehubungan dengan peran serta wanita di dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah.

Penetapan sampel usaha kecil menengah dengan pelaku usaha wanita yang diambil dengan teknik purposive sampling method, dimana pengambilan sampel tiap usaha kecil menengah ditentukan secara sengaja dengan memilih pimpinan UMKM wanita. Populasi unit usaha mikro kecil menengah (UMKM) di bidang produk olahan makanan utamanya di wilayah kota Kota Sungai Penuh sudah mencapai 300 buah (sumber: Disperindag kota Sungai Penuh, tahun 2015).

Berdasarkan populasi UMKM tersebut, populasi UMKM produk olahan makanan yang dipimpin atau dimiliki oleh seorang wanita berjumlah sekitar 45%, yaitu sekitar 500 buah. Adapun sampel yang di peroleh dari penelitian ini dihitung dengan menggunakan Slovin dan didapat

N

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

500

$$n = \frac{500}{1 + 500 (5\%)^2}$$

$$n = 222,222$$

Dibulatkan menjadi 222

Hasil Penelitian

Kegiatan identifikasi kebutuhan pada UMKM sasaran diambil para wanita yang telah mempunyai kelompok UMKM . Pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada UMKM dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan para wanita di UMKM yang berbeda. UMKM dipisahkan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan. Hal ini dilakukan karena setiap UMKM tingkat perkembangannya berbeda-beda. Ada beberapa UMKM yang sudah menggunakan sistem informasi dan pengolahan komputer dengan baik dan masih ada yang tidak. Pelatihan diberikan oleh pihak-pihak yang dianggap profesional di bidangnya. Peneliti bekerjasama dengan disperindag kota Sungai Penuh dalam menentukan intruktur-instruktur yang akan memberikan pelatihan sehingga pelatihan ini benar-benar tepat sasaran.

Pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan ini akan meningkatkan minat dan semangat peserta pelatihan untuk ikut dalam kegiatan pelatihan. Begitu pula pengembangan pelatihan yang dilaksanakan ini untuk pengadaan sarana dan prasarana serta dana sangatlah menunjang, sebab didukung oleh dana desa vokasi dari Disperindag Kota Sungai Penuh. Untuk materi dan bahan belajar disesuaikan dengan kebutuhan peserta pelatihan.

Kebutuhan juga menjadi pendorong seseorang untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dengan baik. Kebutuhan itu merupakan kesenjangan keadaan yang diinginkan dengan keadaan yang ada, yang dirasakan maupun yang dinyatakan menyangkut masa kini maupun masa yang akan datang. Sekarang yang diperlukan adalah bagaimana membantu orang dewasa belajar menyadari atau merasa bahwa kebutuhan belajar nyata yang mereka miliki akan memotivasi mereka untuk terus belajar. Karena kebutuhan itu merupakan suatu kekurangan, maka ada dorongan untuk memenuhinya. Program pelatihan yang tidak didasarkan pada kebutuhan pelatihan yang tepat tidak akan mendorong orang dewasa sebagai warga belajar untuk berpartisipasi. Apalagi kalau kebutuhan itu ternyata bukan kebutuhan pelatihan karena tidak semua kebutuhan harus dipenuhi dengan pelatihan. Hanya kebutuhan yang menyangkut kekurangan pengetahuan, ketrampilan dan sikap saja yang pemenuhannya salah satunya melalui pelatihan.

Selama mengikuti proses pelatihan pemasaran dan pengembangan produk yang berkualitas pada umumnya para peserta pelatihan memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas, dibuktikan dengan keaktifan dalam mengikuti pelatihan tersebut. Setelah selesai pelatihan mereka bisa mempraktikannya dengan baik dan dapat menghasilkan produk yang berkualitas sehingga bisa dijual dan mendapatkan penghasilan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Pelaksanaan pelatihan termasuk pelatihan packing itu merupakan perubahan

disposisi atau kemampuan seseorang yang dapat dicapai melalui upaya orang itu, dan perubahan itu bukan diperoleh secara langsung dari proses pertumbuhan dirinya secara ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian, didalam menjawab pertanyaankuesioner, responden dapat menjawab pertanyaan lebih dari satu jawaban, sehingga total hasil olahan data ini tidak samajumlahnya.

1. Pemakaian Teknologi Informasi

Sistem informasi yang maju sangat mempengaruhi proses pembukuan maupun sarana yang mendukung pemasaran produk bagi masyarakat. Hasil penelitian tentang pemakaian teknologi informasi yang telah dijalankan oleh UMKM di Kota Sungai Penuh terlihat pada tabel 1 berikut ini :

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	3	1.9	1.9	1.9
2	2	1.3	1.3	3.2
3	19	12.1	12.1	15.3
4	55	35.0	35.0	50.3
5	78	49.7	49.7	100.0
Total	157	100.0	100.0	

Tabel 1. Pemakaian teknologi Informasi

Berdasarkan tabel 1 tersebut terlihat 78 orang (49.7%) telah menggunakan komputer, namun sebatas program pengolah kata dan data atau Ms Word dan Ms Excell. Sedangkan 55 orang (35%) telah menggunakan internet dalam menjalankan usahanya. Ada 19 orang (12.1%) yang telah menggunakan software (perangkat lunak) didalam menjalankan usahanya. Namun ada 2 orang (23.44%) yang hanya menggunakan komputer untuk mengetik dan 3 orang yang belum menggunakan komputer sama sekali. Disini terlihat bahwa UMKM di Kota Sungai Penuh belum menggunakan komputer secara maksimal.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi sangat bermanfaat dalam pengembangan usaha, baik peningkatan kualitas maupun kuantitas karena dengan memanfaatkan teknologi, pekerjaan akan berjalan secara otomatis sehingga tentunya akan menyingkat waktu, dan bahkan biaya-biaya dapat ditekan. Hasil penelitian tentang pemanfaatan teknologi informasi yang telah dijalankan oleh UMKM di Kota Sungai Penuh terlihat pada tabel 2 berikut ini:

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	2	1.3	1.3	1.3
2	4	2.5	2.5	3.8
3	6	3.8	3.8	7.6
4	57	36.3	36.3	43.9
5	88	56.1	56.1	100.0
Total	157	100.0	100.0	

Tabel 2. Pemanfaatan teknologi Informasi

Berdasarkan tabel 2 tersebut terlihat 88 orang (56.1%) memanfaatkan alat bantu teknologi informasi untuk keperluan alat bantu administrasi, 57 orang (36.3%) telah memanfaatkan teknologi informasi untuk keperluan pengolahan data, 6 orang (3.8%) memanfaatkan teknologi informasi untuk keperluan pemasaran, 4 orang (2.5%) memanfaatkan teknologi informasi untuk keperluan lain dan 2 orang (1.3%) belum memakai teknologi informasi sama sekali atau manual.

3. Peran Serta Wanita dalam Pengembangan UKM

Hasil penelitian tentang peran serta perempuan dalam pengembangan UMKM terlihat pada tabel 3 berikut ini:

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	9	5.7	5.7	5.7
2	12	7.6	7.6	13.4
3	32	20.4	20.4	33.8
4	52	33.1	33.1	66.9
5	52	33.1	33.1	100.0
Total	157	100.0	100.0	

Tabel 3. Peran serta perempuan

Berdasarkan hasil penelitian di tabel 3 tersebut sebagian besar wanita menyatakan bahwa mereka ingin mengurangi beban keluarga yaitu sebesar 52 orang (33.1%), wanita yang menyatakan bahwa mereka berusaha untuk mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia sebesar 52 orang (33.1%), mengubah nasib sebesar 32 orang (20,4%) dan lainnya sebesar 12 orang (7.6%). Dari tabel tersebut terlihat jelas sebagian besar pengelola UMKM yang berkembang di Kota Sungai Penuh adalah wanita dengan tujuan untuk membantu perekonomian keluarga dan mengurangi pengangguran.

4. Kebutuhan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan

Tingkat pendidikan wanita yang bergabung di UMKM desa masih rerata tamatan SMA, diperkirakan masih sangat membutuhkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk agar mampu menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) yang akan datang. Hasil penelitian tentang kebutuhan peningkatan pengetahuan dan keterampilan terlihat pada tabel 4 berikut ini :

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	2	1.3	1.3	1.3
2	5	3.2	3.2	4.5
3	27	17.2	17.2	21.7
4	55	35.0	35.0	56.7
5	68	43.3	43.3	100.0
Total	157	100.0	100.0	

Tabel 4. Kebutuhan peningkatan pengetahuan dan keterampilan

Dalam hal peningkatan pengetahuan dan keterampilan, materi yang paling diminati pelaku usaha wanita adalah pemasaran dan packing yaitu 68 orang (43.3%), laporan keuangan yaitu sebanyak 55 orang (35%), Perilaku konsumen yaitu sebanyak 27 orang (17,2%), manajemen bisnis yaitu sebanyak 5 orang (3,2%) dan lainnya sebanyak 4 orang (3.03%). Dalam hal ini terlihat pelaku usahawanita ingin belajar banyak bagaimana memasarkan produk mereka agar berhasil dan bagaimana menjalankan bisnisnya.

Pembahasan

Upaya peningkatan kecakapan hidup (*life Skill*), merupakan bagian penting dari program pemberdayaan wanita. Pemberdayaan wanita secara simultan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan (*capability*), dan kualitas hidupnya, keluarga dan masyarakat, karena dengan pemberdayaan wanita dapat meningkatkan produktivitas wanita yang akhirnya bermuara pada peningkatan pendapatan keluarga dan masyarakat. Peningkatan produktivitas wanita dapat dilihat dari indikator-indikator yang antara lain adanya perubahan sikap yang lebih positif dan maju, meningkatnya kemampuan kecakapan hidup (*life skills*), serta hasil karya baik berupa barang dan jasa untuk keperluan diri dan masyarakat.

Merujuk pada hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan kemandirian usaha mikro kecil menengah dengan melaksanakan beberapa pelatihan untuk menambah pengetahuan para wanita pekerja UMKM di bidang produk olahan makanan sudah berhasil terlaksana dengan baik berkenaan para wanita sudah mampu mengimplementasikan beberapa hasil keterampilan yang diperolehnya di dalam pelatihan ke usaha yang mereka kelola.

Sistem informasi yang telah mereka gunakan sangat mendukung proses pemasaran produk yang mereka kelola dan pembukuan usaha yang mereka miliki. Sistem informasi yang sudah kian berkembang maju membuat UMKM yang berkembang mampu mempromosikan produk-produk mereka secara online sehingga pemasarannya tidak hanya di tingkat nasional tapi sudah menyentuh tingkat internasional. Manfaat dari program pelatihan pengemasan dan pemasaran produk sangat besar bagi masyarakat khususnya wanita karena mereka mampu meningkatkan harga dengan kualitas produk yang jauh lebih baik dan mampu bersaing ditingkat internasional.

Dengan demikian kita dapat memutuskan mata rantai ketidakberdayaan masyarakat dan bisa mengurangi angka pengangguran wanita pada khususnya. Dengan demikian wanita mampu menyetarakan perannya dengan kaum laki-laki dan masalah-masalah yang sering muncul dalam rumah tangga yang berkenaan dengan pemenuhan ekonomi dapat teratasi dengan baik. Indikator keberhasilan dari program pelatihan ini dapat dilihat dari pencapaian belajarnya antara lain: (a) Wanita belajar mampu mengimplementasikan keterampilan yang didapatnya dalam usaha UMKM yang dikelolanya. (b). Warga belajar lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada pemerintah. (c). Warga belajar siap bersaing dan lebih percaya diri dalam menempuh dunia kerja. (d) produk yang dihasilkan sudah dipastikan mampu bersaing dalam menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa salah satu strategi pemberdayaan masyarakat desa adalah dengan mengoptimalkan peran wanita dalam sektor pengembangan UMKM-UMKM di desa. Tingkat pendidikan wanita yang masih rendah dapat ditingkatkan dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang dan meningkatkan kualitas usaha masyarakat. Terdapat beberapa langkah yang perlu dilaksanakan dalam pemberdayaan wanita melalui pelatihan pemasaran dan bisnis, antara lain: (a) Mensurvei seberapa besar peran wanita

dalam UMKM, (2) melihat potensi UMKM dalam penggunaan sistem informasi, (3) memberikan pelatihan-pelatihan bidang pembkuan keuangan, packing, dan lain sebagainya untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

Daftar Pustaka

- Anonim. 1994. *Usaha Bersaing Untuk Wanita dan Pemuda, Ide Usaha Kecil dan Madya*, Cakrawala Cinta. Jakarta.
- Anwar. 2007. *Manajemen pemberdayaan perempuan, perubahan sosial melalui pembelajaran vocational skills pada keluarga nelayan*. Bandung: Alfabeta.
- Basri H. 2000. *Strategi Pengembangan Sikap Kemandirian*. Jakarta: Rajawali Press.
- B.S. Kusmuljono. 2007. *Peran Keuangan Mikro dalam Mendukung Produktivitas Ekonomi Wanita*, makalah disampaikan pada Rakor Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Wanita di Jakarta tanggal 28 Maret 2007.
- Direktorat Jendral Perumahan dan Permukiman. *Pemberdayaan Perempuan melalui SIWU: penyiapan lapangan kerja bagi perempuan tidak terampil*.
- Sumantri, S. 2000. *Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Bandung: Fakultas Psikologi Unpad.
- Suryana. 2003. *Kewirausahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumodiningrat, G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

KENDALA DAN TANTANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA UJUNGJAYA MENUJU DESA MANDIRI

Yanti Setianti, Iriana Bakti, Aat Ruchiat Nugraha
Program Studi Hubungan Masyarakat, Fikom, Unpad
Email: yantisetianti@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala dan tantangan pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri di Ujung Jaya Kabupaten Sumedang . Pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan , pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya , memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi , maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi , mempunyai mata pencaharian , berpartisipasi dalam kegiatan sosial , dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.. Metode yang digunakan ialah metode Deskriptif dengan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan masih banyak kendala dan tantangan pemberdayaan masyarakat di Ujung Jaya diantaranya masih kurangnya rasa kebersamaan, masih kurangnya komunikasi diantara masyarakat dan aparatur desa dan masih kurangnya informasi yang update tentang langkah-langkah yang harus dilaksanakan bila ingin menjadi desa yang mandiri. Penulis menyarankan agar sering dilaksanakan pelatihan – pelatihan kewirausahaan yang bisa membuat masyarakat menjadi berdaya

Kata Kunci: Pemberdayaan, masyarakat, hambatan, tantangan, kemakmuran

Pendahuluan

Masyarakat Adat Ujungjaya meramal bahwa wilayah kecamatan Ujungjaya akan menjadi kota metropolitan khusus. Bahkan ramalan itu, kini sudah tergambar dengan adanya pembangunan sejumlah megaprojek, seperti tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan), Bandara Internasional Kertajati di Majalengka yang dekat dengan Ujungjaya, Waduk Jatigede, dan pembangunan jalan rel kereta api Bandung-Cirebon.

Menyinggung hal itu, Bupati Sumedang H. Ade Irawan mengatakan, Pemkab Sumedang menyambut baik maksud, cita-cita dan dukungan Masyarakat Adat Ujungjaya tersebut. Seiring dengan ramalan Ujungjaya akan menjadi kota metropolitan khusus, Masyarakat Adat Ujungjaya harus siap dengan segala risiko dan tantangan yang akan dihadapi nanti. “Tantangan ini harus dijalani dengan mengedepankan dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan para leluhur,” katanya.¹

Untuk menghadapi tantangan menjadi kota metropolitan maka harus dikembangkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Daerah (LPMD) hampir sama dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). LPMD diciptakan atas dasar keputusan desa. Berbeda dengan BPD yang dibentuk berdasarkan keputusan pemerintah kabupaten, jumlah anggota LPMD tidak dibatasi. Tugas LPMD adalah membantu kepala desa didalam pembangunan fisik dan non fisik. Oleh karena itu anggotanya harus mampu untuk bekerja sama dan aktif dalam kelancaran pembangunan desa.

¹ Pikiran Rakyat Online, 16 Februari 2015

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa harus bisa berperan aktif untuk membina masyarakat desa menjadi masyarakat yang berdaya dan bisa menciptakan usaha mandiri sehingga bisa memajukan desa tempat tinggalnya dan perwujudan menjadi desa mandiri dapat tercapai.

Pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility*.

Corporate Social Responsibility menurut *World Business Council on Sustainable Development* (WBCSD) adalah suatu komitmen dari perusahaan untuk berperilaku etis (*behavioral ethics*) dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic development*). Komitmen lainnya adalah meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal serta masyarakat luas. (Suharto, 2010; 12)

Pemberdayaan masyarakat lebih darisekedar penguatan ekonomi masyarakat, ia mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam ranah politik dan penguatan kapasitas masyarakat untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan apresiasi, kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Agar *Corporate Social Responsibility* mampu memberdayakan masyarakat, maka perlu diketahui elemen-elemen keberdayaan.

Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif karena peneliti berusaha mengemukakan suatu gejala atau keadaan sebagaimana adanya. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. wawancara yakni dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (penulis) kepada orang-orang yang dianggap mempunyai hubungan dengan penulisan ini, dalam hal ini disebut sebagai *keyinforman*. Wawancara dilakukan secara mendalam, sering disebut juga sebagai wawancara tidak berstruktur, dimana wawancara bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata – kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara. Pertanyaan yang diajukan juga berkaitan dengan permasalahan penulisan dan jawaban – jawabannya dicatat atau direkam. Wawancara dilakukan dengan teknik berikut:

- 1) Tak berstruktur, artinya peneliti akan bebas dan leluasa menanyakan hal yang berkaitan dengan fokus penelitian.
- 2) Tidak langsung, artinya dalam mengumpulkan data, kadang-kadang dilakukan wawancara pada *key informan* dalam situasi non formal, tetapi peneliti menangkap inti pembicaraan yang berkaitan dengan fokus penelitian.
- 3) Peneliti menempatkan *key informan* sebagai teman sejawat, artinya sejak awal peneliti berterus terang dan menjelaskan maksud penelitian yang sedang dilakukan.

Deddy Mulyana (2001:183) mengatakan bahwa, “dalam wawancara mendalam, peneliti berupaya mengambil peran pihak yang diteliti (*Taking the Role of the other*), secara intim menyelam ke dalam dunia psikologis dan sosial mereka. Agar mencapai tujuannya, pewawancara harus mendorong pihak yang akan diwawancarai dengan berbagai cara untuk mengemukakan semua gagasan dan perasaannya dengan bebas dan

nyaman. Untuk itu bahasa yang digunakan pewawancara seyogianya adalah bahasa yang akrab dan informal”.

2. Observasi yakni dengan melakukan pengamatan langsung menggunakan indera penglihatan terhadap kondisi, situasi, proses kegiatan yang terjadi di tempat penelitian berlangsung, selain itu juga melakukan pengamatan dengan panca indera, dimana penulis melihat, merasakan dan mendengarkan secara cermat mungkin

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan sejak tahap pengumpulan data dengan penggunaan multisumber bukti. Pengembangan kerangka analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan dan analisis data.

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu (Moleong, 2007:330).

Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber. Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2007:29). Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

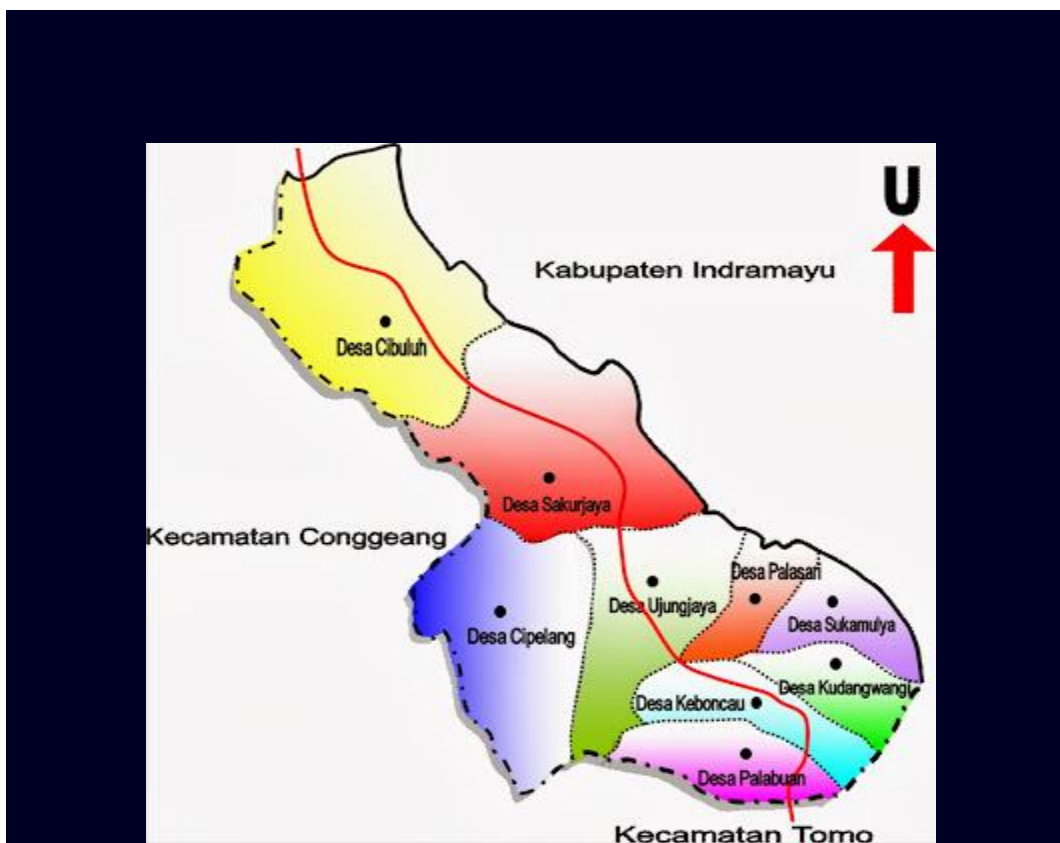
Hasil dan Pembahasan

Ujungjaya adalah sebuah kecamatan di bagian utara Kabupaten Sumedang. Letaknya berbatasan dengan wilayah Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu. Sebagian penduduknya bermatapencaharian sebagai petani, kemungkinannya akan beralih profesi menjadi tenaga kerja di Pabrik Industri. Kecamatan Ujungjaya terbagi menjadi 9 desa yaitu Desa : Ujungjaya, Palasari, Sukamulya, Kudangwangi, Kebon Cau, Pelabuhan, Cipelang, Sakurjaya, Cibuluh

Penduduk Kecamatan Ujungjaya mencapai lebih kurang 10.000 kepala keluarga. dengan seluruh warganya beragama Islam

Peta Ujungjaya





“Ramalan ujung jaya menjadi kota metropolis merupakan hasil daya cipta para leluhur kami sejak ratusan tahun lalu yang menyebutkan ‘Uga Ujungjaya Bakal Jadi Nagara’ . Ramalan ini mengandung arti bahwa Ujungjaya akan menjadi kota metropolis khusus. Hasil daya cipta berupa ramalan ini, harus senantiasa dijaga dan dilestarikan karena bagian dari warisan budaya para leluhur secara turun temurun,” kata Ketua Majelis Ujung Luhur Masyarakat Adat Ujungjaya, Dasiman Juhaeni di sela “Kunjungan Pengurus Masyarakat Adat Ujungjaya” di Gedung Negara Pemkab Sumedang Jalan Prabu Geusan Ulun Sumedang.

Menurut Dasiman, ramalan itu menyimpan makna dan isyarat yang luas bahwa di wilayah Ujungjaya akan terjadi pembangunan strategis yang luar biasa. Bahkan pembangunan strategis itu sudah tergambar jelas dengan pembangunan sejumlah proyek besar yang kini sedang berlangsung, seperti tol Cisumdawu, Bandara Internasional Kertajati di Majelangka, Waduk Jatigede dan jalan rel kereta api jalur Bandung-Cirebon. Beberapa proyek besar itu, berdekatan bahkan sebagian melintasi wilayah Ujungjaya.

Seiring dengan ramalan Ujungjaya akan menjadi kota metropolis khusus, Masyarakat Adat Ujungjaya harus siap dengan segala risiko dan tantangan yang akan dihadapi nanti. “Tantangan ini harus dijalani dengan mengedepankan dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan para leluhur,” katanya.³

Tantangan dan kendala pemberdayaan masyarakat di Ujungjaya diantaranya masih kurangnya rasa kebersamaan, masih kurangnya komunikasi diantara masyarakat dan aparatur desa dan masih kurangnya informasi yang update tentang langkah-langkah yang harus dilaksanakan bila ingin menjadi desa yang mandiri . Sebenarnya jika ada perusahaan yang mau melakukan kegiatan CSR di Desa Ujungjaya akan bisa membantu menjadikan Desa ujung jaya menjadi Desa yang mandiri.

²<http://ujungjayaonline.blogspot.co.id/p/ekonomi.html> 5/11/2016

³Pikiran Rakyat Online, 16 Februari 2015

Harmonisasi antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya dapat tercapai apabila terdapat komitmen penuh dari top management perusahaan terhadap penerapan CSR sebagai akuntabilitas publik. Dalam era reformasi yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya keterbukaan, seharusnya kepedulian perusahaan terhadap lingkungannya semakin meningkat. Perusahaan yang tidak memiliki kepedulian sosial dengan lingkungan sekitarnya akan banyak menemui berbagai kendala, misalnya sering didemo oleh masyarakat, bahkan ada perusahaan yang terpaksa ditutup oleh pihak yang berwenang.

Terdapat dua hal yang dapat mendorong perusahaan menerapkan CSR, yaitu bersifat dari luar perusahaan (*external drivers*) dan dari dalam perusahaan (*internal drivers*). Termasuk kategori pendorong dari luar, misalnya adanya regulasi, hukum, dan diwajibkannya analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah memberlakukan audit Proper (Program penilaian peningkatan kinerja perusahaan). Pendorong dari dalam perusahaan terutama bersumber dari perilaku manajemen dan pemilik perusahaan, termasuk tingkat kepedulian/tanggung jawab perusahaan untuk membangun masyarakat sekitar (*community development responsibility*).

Ada empat manfaat yang diperoleh bagi perusahaan dengan mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra (*image*) yang positif dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal. Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (*critical decision making*) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*).

Perkembangan CSR tidak bisa terlepas dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*), definisi pembangunan berkelanjutan menurut *The World Commission On Environment and Development* yang lebih dikenal dengan *The Brundtland Commission*, bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka (Solihin: 2009).

The Brundtland Commission dibentuk untuk menanggapi keprihatinan yang semakin meningkat dari para pemimpin dunia terutama menyangkut peningkatan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang semakin cepat. Selain itu komisi ini juga dibentuk untuk mencermati dampak kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam terhadap ekonomi dan pembangunan sosial. Oleh karenanya, konsep *sustainability development* dibangun diatas tiga pilar yang berhubungan dan saling mendukung satu dengan lainnya, Ketiga pilar tersebut adalah sosial, ekonomi, dan lingkungan, sebagaimana ditegaskan kembali dalam *The United Nation 2005 World Summit Outcome Document* (Solihin: 2009).

Pengenalan konsep *Sustainability development* memberikan dampak kepada perkembangan definisi dan konsep CSR selanjutnya. Sebagai contoh *The Organization for economic cooperation and Development* (OECD) merumuskan CSR sebagai “Kontribusi bisnis bagi pembangunan berkelanjutan serta adanya perilaku korporasi yang tidak semata-mata menjamin adanya pengembalian bagi pemegang saham, upah bagi para karyawan, dan pembuatan produk serta jasa bagi para pelanggan, melainkan perusahaan bisnis juga harus memberi perhatian terhadap berbagai hal yang dianggap penting serta nilai-nilai masyarakat”.

Lembaga lain yang memberikan rumusan CSR sejalan dengan konsep *sustainability development* adalah *The World Business Council for Sustainability Development*. Menurut organisasi ini CSR adalah komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis untuk berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, sementara pada saat yang sama meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja

dan keluarganya demikian pula masyarakat lokal dan masyarakat secara luas (Solihin: 2009).

Ujung Jaya merupakan lokasi strategis di masa yang akan datang karena berdekatan dengan Bandara Internasional Kertajati Majalengka dan Waduk Jati Gede. Suasana ujung jaya akan menjadi ramai ketika jalan tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) telah selesai di bangun. Ujun jaya pada saat ini merupakan daerah agraris karena banyak sekali persawahan diperkirakan nantinya akan berubah menjadi kawasan industri.

Teguh Sugiyama sebagai ketua Adat Ujung jaya mengatakan

“Ujungjaya akan menjadi kota metropolis sehingga percepatan pembangunannya lebih banyak dibandingkan daerah lain, hanya ironis daya beli dan kesehatannya menempati urutan kedua terendah se Kabupaten Sumedang. Sekarang lahan pertanian sudah banyak yang berpindah ke tangan investor yang akan membangun daerah industri, sedangkan penduduk kebanyakan bermatapencarian sebagai Buruh Tani, Saya khawatir kalau tidak segera diberdayakan masyarakatnya akan terjadi kenaikan tingkat kemiskinan di Desa Ujungjaya.

Tantangan Desa Ujungjaya untuk menjadi Desa yang Mandiri harus bisa memanfaatkan Dana Corporate Social Responsibility dari perusahaan-perusahaan yang ada di Ujungjaya yang bisa bermanfaat bagi pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan suatu desa bukan hanya tanggung jawab aparat desa dan pengurus Adat saja, setiap insan manusia dan perusahaan berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan pertimbangan pula faktor lingkungan hidup. Kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*single bottom line*), melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan biasa disebut *triple bottom line*. Sinergi dari tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Berkenaan dengan hal tersebut, muncul *triple bottom line model*, yang terdiri dari *profit, people & planet* (3 P). Laporan suatu perusahaan yang menggunakan model *triple bottom line*, selain melaporkan aspek keuangan juga melaporkan aspek kepedulian sosial dan upaya pelestarian lingkungan hidup.

Penutup

Simpulan

1. Kendala pemberdayaan masyarakat di Desa Ujungjaya adalah masih kurangnya rasa kebersamaan, masih kurangnya komunikasi diantara masyarakat dan aparat desa ,kurangnya informasi yang akurat tentang langkah-langkah yang harus dilaksanakan bila ingin menjadi desa yang mandiri.
2. Tantangan Desa Ujungjaya untuk menjadi Desa yang Mandiri harus bisa memanfaatkan Dana Corporate Social Responsibility dari perusahaan-perusahaan yang ada di Ujungjaya yang bisa bermanfaat bagi pemberdayaan Masyarakat

Saran

1. Penulis menyarankan agar sering dilaksanakan pelatihan – pelatihan kewirausahaan oleh semua pihak terkaityang bisa membuat masyarakat Desa Ujungjaya menjadi berdaya
2. Pemerintah lebih memperhatikan Pembangunan infrastruktur yang bagus sehingga masyarakat Desa bisa memasarkan hasil usahanya dengan lancar

Daftar Pustaka

- Basrowi & Sukidin. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif;perspektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendikia
- Creswell, John.1998. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. USA: Sage Publications
- Effendy, Onong U.1993. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Moleong J, Lexy. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rakesarasin.
- Mulyana, Deddy. 2000. *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- , 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya
- Poloma.2000. *Sosiologi kontemporer*. Jakarta : Grafindo Persada
- Rusdianto, Ujang. 2013.CSR Communications A Framework For PR Practitioners. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Solihin, Ismail. 2009. Corporate Social Responsibility From Charity To Sustainability. Jakarta : Salemba Empat
- Suharto, Edi. 2010. CSR & COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan Di Era Globalisasi. Bandung: Alfabeta

STRATEGI PERENCANAAN PARTISIPATIF KELOMPOK WANITA TANI USAHA PENGOLAHAN PRODUK PANGAN BERBASIS SINGKONG

Henita Astuti, Joko Ari Wibowo

Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung

Email: henitaastuti@gmail.com

Abstrak

Kelompok wani tani Siti Hawa ikut mendukung tercapainya pelaksanaan pembangunan pertanian melalui program *diversifikasi pangan*, berupa pengembangan kegiatan pengolahan produk pangan berbasis singkong. Perencanaan partisipatif kelompok wanita tani merupakan perencanaan yang melibatkan semua anggota dan pengurus dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi. Permasalahan yang terjadi perencanaan kegiatan masih didasari pola *top up*, yaitu kelompok hanya mengadopsi program yang sudah disusun. belum mempertimbangkan apa sebetulnya yang menjadi permasalahan di lapangan demi memenuhi kebutuhan yang mendesak, yang mestinya didasari dengan pola *bottom up*. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi perencanaan kelompok wanita tani Siti Hawa dalam mempersiapkan rencana kerja organisasi; mengetahui pendekatan metode dalam menentukan rumusan perencanaan kegiatan kelompok, dan menjelaskan alternatif strategi perencanaan partisipatif kelompok wanita tani. Penelitian dilakukan sejak bulan April - September 2016, di lokasi pelaku usaha produk berbasis singkong yaitu kelompok wanita tani Siti Hawa Desa Lebung Nala Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang digunakan berdasarkan *deskriptif kualitatif*, yaitu wawancara mendalam dengan instrumen observasi, dokumentasi dan wawancara. Alternatif strategi bagi Pemerintah, perlu melakukan pemetaan pembanfaatan bahan baku, menyusun standarisasi produk berdasarkan mutu dan keamanan pangan, memberikan fasilitasi pelatihan bagi peningkatan kompetensi sumber daya manusia kelompok, memperbaiki infrastruktur dan memfasilitasi pengadaan sarana prasarana alat mesin untuk mempercepat proses produksi. Sedangkan bagi kelompok wanita tani (KWT) perlu melakukan perencanaan partisipatif melalui rapat anggota untuk menyusun RDK dan RDKK KWT, mengolah produk sesuai keinginan konsumen dan harga yang kompetitif, memperluas jaringan pemasaran.

Kata kunci: Strategi perencanaan partisipatif, kelompok wanita tani, diversifikasi pangan

Pendahuluan

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data dan fakta, yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (*material*) maupun non fisik (*mental/spiritual*), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Perencanaan dari program pembangunan bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, untuk diimplementasikan di daerah mulai dari kabupaten, kecamatan sampai desa, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui instansi- instansi vertikal di daerah, maupun pemerintah daerah itu sendiri.

Salah satu program pemerintah yaitu pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya dan melalui wadah kelompok, difasilitasi pemerintah yang berfungsi sebagai *regulator*, namun tumbuh dari keinginan dan kesadaran anggotanya untuk secara bersama-sama mencapai tujuan akhir yaitu peningkatan pendapatan.

Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Hal yang mendasar dan dibutuhkan yaitu kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat dalam menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan. Selain itu, diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan.

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan (Ripai, 2013).

Pelaksanaan pembangunan di Desa Lebung Nala Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, dimana partisipasi masyarakat yang merupakan keanggotaan dalam kelompok wani tani (KWT) Siti Hawa ikut mendukung tercapainya pelaksanaan pembangunan pertanian melalui program *diversifikasi pangan*, berupa pengembangan kegiatan pengolahan produk pangan berbasis *singkong* yang digeluti sampai saat ini, dimana kegiatan ini diawali dari prakarsa dan swadaya serta gotong royong dari anggota. Atas dasar inilah tumbuh kesadaran dari masyarakat untuk membentuk suatu unit usaha dengan memberdayakan anggota (ibu rumah tangga) yang ingin memperoleh pendapatan tambahan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya.

Pembangunan sektor pertanian identik dengan pembangunan ekonomi secara nasional, terutama pada sistem agribisnis, dengan lima dasar pertimbangan strategi, yaitu 1) membangun perekonomian yang berdaya saing berdasarkan *comparative advantage* sebagai negara agraris yang merupakan bagian dari benua maritim, 2) penyumbang terbesar dalam pendapatan domestik bruto (PDB), kesempatan kerja dan berusaha serta meningkatkan devisa ekspor, 3) sistem agribisnis sebagai penunjang utama dalam mendukung perekonomian daerah, 4) membangun agribisnis sekaligus dapat membangun sistem ketahanan pangan, dan 5) pembangunan agribisnis dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup (Pasaribu, 2012).

Dalam pembangunan pertanian, KWT merupakan bagian dari kelompok tani atau poktan, merupakan kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya; kesamaan komoditas; dan menjalin hubungan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Pendekatan KWT dalam perencanaan partisipatif perlu didasari dengan penguatan kelembagaan, memiliki kemampuan manajerial, berjiwa wirausaha dan berorientasi bisnis, diharapkan mereka mampu membangun usaha tani berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan posisi tawarnya.

Perencanaan partisipatif KWT merupakan perencanaan yang melibatkan semua anggota dan pengurus dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi, yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang diinginkan, dalam tujuan dan prosesnya melibatkan pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai satu kesatuan, (Usman, 1993 dalam Achmad *et al*, 2007). Suatu tujuan untuk kepentingan anggota dan bila dirumuskan tanpa melibatkan anggota, maka akan sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada anggota. Perencanaan partisipatif

sebagai usaha yang dilakukan anggota KWT untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat secara mandiri (Handoyo, 1999 dalam Achmad *et al.*, 2007).

Perencanaan partisipatif yang intinya perencanaan “*bottom up* atau dari bawah” dapat mencerminkan dengan tepat keinginan, harapan dan kepentingan yang sesungguhnya dari anggota yang terlibat dalam kegiatan kehidupan sosial di lingkungan KWT (Friedman, 1981 dalam Achmad *et al.*, 2007).

Perencanaan partisipatif dalam model siklus perencanaan pembangunan pertanian, terikat pula dengan faktor lingkungan internal, yaitu SDM, permodalan dan pola manajemen usaha, sedangkan faktor eksternal meliputi ekonomi, sosial dan teknologi, yang keduanya diorientasikan kepada pemenuhan kebutuhan anggota KWT dan isu-isu permasalahan kritis yang dihadapi, sinergis dengan program pemerintah mendukung program diversifikasi pangan demi mendukung gerakan percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal di daerah.

Rapat anggota kelompok wanita tani menjadi langkah awal bagi pelibatan anggota KWT Siti Hawa untuk menyalurkan aspirasi anggotanya, menjadi sarana bagi anggota dan pengurus untuk mengemukakan keluhan, masalah atau hambatan yang dihadapi dalam aktivitas sehari-hari, menjadi momentum untuk mengemukakan ide pemikiran dan solusi ke depan bagi kemajuan pembangunan kelompok. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa rapat anggota menjadi basis bagi pengambilan keputusan untuk menyusun perencanaan pembangunan organisasi KWT dalam bentuk perencanaan partisipatif.

Pada umumnya kegiatan perumusan perencanaan kegiatan masih didasari pola *top up*, yaitu KWT hanya mengadopsi program yang sudah disusun baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten, belum mempertimbangkan apa sebetulnya yang menjadi permasalahan di lapangan demi memenuhi kebutuhan yang mendesak, yang mestinya didasari dengan pola *bottom up*.

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi perencanaan KWT Siti Hawa dalam mempersiapkan rencana kerja organisasi; mengetahui pendekatan metode dalam menentukan rumusan perencanaan kegiatan KWT, dan menjelaskan alternatif strategi perencanaan partisipatif kelompok wanita tani (KWT) Siti Hawa yang diperlukan untuk menyusun rencana kerja kegiatan kelompok dalam pengembangan usaha berbasis singkong.

Bahan dan Metode

Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilakukan sejak bulan April - September 2016, di lokasi pelaku usaha *Beras Siger* yaitu KWT Siti Hawa Desa Lebung Nala Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.

Jenis dan Sumber Data

Data primer untuk mendapatkan informasi umum meliputi karakteristik sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha didukung hasil wawancara mendalam kepada informan atau narasumber dalam bentuk keterangan/narasi berbentuk pernyataan, informan yang dipilih seperti pengurus dan anggota KWT, petugas Badan Ketahanan Pangan Kabupaten dan Provinsi, serta petani/masyarakat sekitar sebagai penyedia bahan baku maupun pemanfaat produk.

Data sekunder yang berkaitan dengan rencana strategis gerakan percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal, diperoleh dari data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Lampung Tahun 2015 (survey palawija) dan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 (diolah).

Analisis Data

Sampel diambil secara *purposive sampling* pada pengurus dan anggota KWT Siti Hawa, petani sekitar dan pembina/pelaksana program kegiatan diversifikasi pangan yang terlibat dari SKPD.

Metode yang digunakan berdasarkan *deskriptif kualitatif*, yaitu wawancara mendalam dengan instrumen observasi, dokumentasi dan wawancara, untuk mengetahui bagaimana strategi perencanaan partisipatif KWT dalam mengembangkan usaha.

Analisis data penelitian kualitatif dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam masing-masing faktor, melakukan identifikasi, mencari dan merumuskan alternatif strategi perencanaan partisipatif KWT menggunakan matriks SWOT (David, 2004).

Matriks SWOT dapat menggambarkan secara jelas hubungan antara faktor internal strategis yaitu aspek penerapan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 09/Permentan/OT.140/I/2014; tentang Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani. Sedangkan faktor eksternal seperti aspek ekonomi, sosial, peran pemerintah dan teknologi; yang dihadapi pengurus KWT dan selanjutnya masalah diselesaikan dengan mengidentifikasi hubungan antara faktor-faktor tersebut dan merumuskan alternative strategi perencanaan partisipatif KWT (Rangkuti, 2006) dapat dilihat pada Tabel 1.

Matrik SWOT merupakan perangkat pencocokan penting yang membantu manajer mengembangkan 4 (empat) tipe strategi yaitu strategi SO (*Strenght-Opportunities*), strategi WO (*Weakness-Opportunities*), strategi ST (*Strenght-Threats*) dan strategi WT (*Weakness-Threats*). Tujuan dari setiap perangkat kecocokan untuk menghasilkan strategi alternatif perencanaan partisipatif KWT dalam menampung dan mendiskusikan aspirasi anggotanya demi pengembangan usaha.

Tabel 1. Matriks SWOT

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Peluang (O)	Strategi SO Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO Atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang
Ancaman (T)	Strategi ST Gunakan kekuatan untuk menghindari ancaman	Strategi WT Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber : David (2004)

Pembahasan

Prinsip kerja dari pembangunan melalui partisipasi masyarakat/organisasi adalah: (1) program kerja disampaikan secara terbuka kepada anggota dengan melakukan komunikasi partisipatif agar mendapat dukungan, (2) program kerja dilaksanakan melalui kerjasama dan kerja bersama anggota dan pengurus kelompok, dengan melibatkan pejabat desa, penyuluh dan petani pelaku utama yang mengusahakan singkong baik dalam skala kecil di lahan atau memanfaatkan pekarangan rumah, dalam rangka memperkecil masalah ketersediaan bahan baku, (3) program kerja tidak mengarah pada golongan tertentu di masyarakat atau kelompok agar tidak menimbulkan perpecahan, (4) selama program berjalan, koordinasi selalu dilakukan secara vertikal maupun horizontal dengan pihak-

pihak terkait, (5) tidak perlu bersikap superior atau “merasa paling tahu” dalam setiap kesempatan pelaksanaan program kerja, (6) tidak perlu memberikan janji kepada siapapun tetapi kesungguhan kerja dalam konteks program kerja yang sudah ditentukan.

Community Development dengan segala kegiatannya dalam pembangunan sebaiknya menghindari metode kerja "*doing for the community*", tetapi mengadopsi metode kerja "*doing with the community*". Metode kerja *doing for*, akan menjadikan anggota menjadi pasif, kurang kreatif dan tidak berdaya, bahkan mendidik masyarakat untuk bergantung pada bantuan pemerintah atau organisasi-organisasi sukarela pemberi bantuan. Sebaliknya, metode kerja *doing with*, merangsang anggota KWT dan masyarakat sekitar menjadi aktif dan dinamis serta mampu mengidentifikasi mana kebutuhan yang sifatnya *real needs, felt needs dan expected need*. Metode kerja *doing with*, sangat sesuai dengan gagasan besar KI Hajar Dewantara tentang kepemimpinan pendidikan di Indonesia - *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso dan tut wuri handayani* - yang berfokus akan perlunya kemandirian yang partisipatif di dalam proses pembangunan (Tampubolon, 2006 dalam Achmad *et al.*, 2007).

Faktor Internal

Formulasi perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal strategis dan faktor lingkungan eksternal strategis. Faktor lingkungan internal strategis berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 09/Permentan/OT.140/I/2014 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, pemangku kepentingan dari lingkup pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, maupun organisasi KWT dalam melaksanakan kegiatan, perencanaan dan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan penganggaran, berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Daerah, dan pengaturan kegiatan dijabakan dalam rencana bisnis penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal sebagai bagian integral dari rencana pembangunan daerah. Namun pada kenyataannya, perencanaan program khususnya kegiatan produksi dan konsumsi pangan masih terkendala dengan bahan baku singkong, standarisasi produk yang sehat dan aman, serta minimnya fasilitasi pelatihan demi meningkatkan kompetensi SDM pengelola usaha (Tabel 2), walaupun Kabupaten Lampung Selatan merupakan sentra singkong di Provinsi Lampung dengan luas areal 10.398 hektar dengan jumlah produksi 248.978 ton per tahun (Harsa *et al.*, 2016).

Sasaran program adalah kelompok wanita tani yang mengembangkan usaha pengolahan singkong yang menjadi komoditas unggulan daerah, formulasi perencanaan kegiatan KWT didasari pada Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, yang berisi pedoman penyusunan rencana definitif kelompok (RDK) dan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Realisasi yang terjadi di lapangan adalah perencanaan program penyusunan rencana kerja khususnya pengusulan RDK dan RDKK untuk peningkatan kemampuan anggota KWT dalam pengembangan agribisnis belum terorganisir dan terfasilitasi dengan baik. RDK merupakan rencana kerja usahatani dari KWT untuk satu periode/tahun beris rincian kegiatan tentang sumber daya dan potensi wilayah, sasaran produktivitas, pengorganisasian dan pembagian kerja, serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani. Sedangkan RDKK merupakan alat perumusan untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi dan alat mesin pengolahan, baik yang berdasarkan kredit/permodalan usahatani bagi anggota maupun dari swadana KWT.

Tabel 2. Karakteristik Responden KWT Siti Hawa

Karakteristik	KWT Siti Hawa
Jumlah anggota KWT	20 orang
Jumlah pelaku usaha	10 orang
Umur (tahun)	
15 – 25	-
26 – 40	4 orang
41 - 60	6 orang
Pendidikan	
Tidak sekoah	-
SD	7 orang
SMP	3 orang
SMA	-
D3/S1	-
Pekerjaan	
Petani	6 orang
Ibu Rumah Tangga	4 orang
Pedagang	-
Varietas ubi kayu	Cassesat/Thailand
Pengalaman menjadi pelaku	2013
Kapasitas produksi/bulan	125 kg
Harga BB/ubi kayu (Rp)	700 per kg
Harga Beras Siger (Rp)	12.000 per 800 g
Sarpras Pengolahan	Granulator
Kemitraan	
Akademisi	-
Swasta	-
Pemerintah	BKPD
Pasar Tradisioanl/online	Online
Kualitas	
Warna	Hitam
Rasa	Hambar
Bentuk	Bulat kecil/tidak beraturan

Sumber: Rekapitulasi Responden, 2016.

Dalam meningkatkan kualitas hidup organisasi KWT , maka pihak pemerintah memiliki peranan yang sangat penting untuk mensukseskan berbagai program pembangunan. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Provinsi Lampung dengan memfasilitasi yang dimulai pada tahun 2009, merupakan strategi untuk memajukan program diversifikasi pangan. Gerakan ini ialah suatu usaha untuk menarik komitmen dan daya usaha KWT melalui proses pemberdayaan dan pembinaan KWT dengan tujuan untuk menjadikan KWT lebih maju, berkembang dan usahanya menguntungkan (Wahyudi, 2010).

Faktor Eksternal

Hal-hal yang mempengaruhi *faktor eksternal* meliputi *aspek ekonomi* yaitu kegiatan agribisnis yang dikelola KWT mempengaruhi pendapatan keluarga anggota KWT dan berdampak petani penyedia bahan baku, namun jika saat harga bahan baku melimpah dan turun, dan KWT tidak mau menurunkan atau memberi potongan harga produk, hal ini dapat berakibat terhambatnya usaha atau menurunnya pendapatan karena

kompetitor/pelaku usaha lainnya akan berusaha memberikan penawaran untuk menarik konsumen agar beralih.

Tabel 3. Identifikasi faktor internal dan eksternal

Faktor internal	Kekuatan (strength)	Kelemahan (weakness)
Permentan RI Nomor 09/Permentan/OT.140/I/2014 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pedoman pelaksanaan kegiatan disusun berdasarkan perencanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan penganggaran, oleh pemangku kepentingan (pemerintah dan KWT) selalu berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Daerah	Perencanaan khususnya program konsumsi pangan masih terkendala oleh ketersediaan bahan baku, standardisasi produk yang sehat dan aman, serta minimnya dukungan pelatihan bagi SDM KWT.
Permentan RI Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani	Meliputi pedoman penumbuhan dan pengembangan KWT; penyusunan rencana definitif kelompok wanita tani (RD-KWT) dan rencana definitif kebutuhan kelompok wanita tani (RDK-KWT)	Perencanaan program penyusunan rencana kerja khususnya untuk pengembangan usaha KWT demi peningkatan agribisnis belum difasilitasi.
Faktor eksternal	Peluang (opportunities)	Ancaman (Threat)
Ekonomi	Kegiatan agribisnis yang dikelola KWT mempengaruhi pendapatan keluarga anggota KWT dan petani penyedia bahan baku	Saat harga bahan baku turun, pengelola usaha (KWT) enggan menyesuaikan harga produk
Sosial	Partisipasi keanggotaan KWT ikut menyerap dan mengkonsumsi produk.	Kurangnya keterlibatan anggota dalam menyusun perencanaan kegiatan KWT, hanya didominasi oleh pengurus sebagai pengambil keputusan
Pemerintah Provinsi/Kabupaten	Memperbaiki infrastruktur, memfasilitasi kegiatan mendukung keberlangsungan produk	Belum mengarah pada kegiatan pengembangan yang berorientasi agribisnis yang langsung dikelola oleh KWT
Teknologi	Pengadaan alat mesin untuk membantu percepatan dalam proses produksi	Proses pengolahan yang masih sederhana

Sumber : Acuan Rangkuti (2006)

Aspek Sosial, dengan memberi motivasi untuk mengonsumsi makanan sehat (produk berbasis singkong) dari KWT akan mempengaruhi tingkat penyerapan terutama di kalangan anggota kelompok, namun saat penyusunan perencanaan kelompok yang seharusnya secara partisipatif oleh anggota, dari anggota dan untuk anggota yang ternyata kurang dilibatkan, dimana pengambilan keputusan didominasi oleh pengurus KWT, sehingga dapat mengakibatkan kurang kepercayaan pada personil KWT.

Peran Pemerintah sebagai regulasi teknis dalam mendukung program Gerakan Percepatan Penganekaragaman Pangan sangat dibutuhkan dengan mengedepankan manfaat produk, melalui fasilitasi sarana prasarana pelatihan cara produksi yang baik, penyusunan pelaporan keuangan, kemitraan bidang pemasaran, serta pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.

Aspek teknologi pengolahan hasil dan pengembangan di bidang hilir sangat mempengaruhi mutu produk yang dihasilkan (Rubiyo dan Siswanto, 2012). Teknologi pengolahan modern menjadi pilihan saat ini, modifikasi mesin *granulator* menjadi *ekstruder* dan pengeringan dengan *oven*/semi permanen, jauh lebih baik daripada menggunakan pengeringan langsung sinar matahari yang suhunya tidak menentu atau menggunakan alat manual (tampah).

Alternatif Strategi Peningkatan Produksi Beras Siger

Perumusan alternatif strategi perencanaan partisipatif dipertimbangkan berdasarkan identifikasi faktor internal dan eksternal yang didapat dari hasil pengumpulan dan pengolahan data. Kombinasi perpaduan antara faktor internal dan eksternal tersebut, diperoleh beberapa alternatif strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan usaha KWT yang telah dianalisis menggunakan matriks SWOT, dengan mengutamakan strategi *Weaknes-Opportunities* (WO) yang disebut *strategi putar haluan*, merupakan strategi meminimalkan kelemahan internal untuk dapat memanfaatkan peluang eksternal. Alternatif strategi bagi pemerintah maupun KWT berupa :

1. Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten
 - a. Melakukan pemetaan pemanfaatan bahan baku
 - b. Melakukan standarisasi produk berdasarkan mutu dan keamanan pangan
 - c. Memberikan fasilitasi pelatihan bagi peningkatan kompetensi SDM KWT
 - d. Memperbaiki infrastruktur dan memfasilitasi pengadaan sarana prasarana alat mesin untuk mempercepat proses produksi.
2. Kelompok Wanita Tani (KWT)
 - e. Melakukan perencanaan partisipatif melalui rapat anggota untuk menyusun RDK dan RDKK KWT,
 - f. Mengolah produk sesuai keinginan konsumen dan harga yang kompetitif,
 - g. Memperluas jaringan pemasaran, tidak hanya dilingkungan internal KWT tapi menjalin hubungan kerjasama dengan pihak pengguna, khususnya yang memanfaatkan produk sebagai pengendali kesehatan.

Kesimpulan

Beberapa alternatif strategi perencanaan partisipatif kelompok wanita tani (KWT) Siti Hawa agar dapat meningkatkan agribisnis demi pengembangan usaha pengolahan produk berbasis singkong mendukung program diversifikasi pangan, antara lain :

- a. Strategi perencanaan pendidikan (*Education Strategic*), strategi ini lebih memusatkan pada peningkatan kemampuan peserta secara individu melalui program pelatihan.
- b. Strategi kemitraan (*Cooperation Strategic*), bentuk lain dari partisipasi anggota KWT adalah melibatkan anggota dalam organisasi untuk mengantisipasi kendala yang ada, seperti bagian pengadaan bahan baku, tenaga kerja dan petugas pemasaran.

- c. Strategi pengambilan keputusan (*Decision Maker Strategic*), organisasi yang beranggotakan masyarakat seperti anggota KWT dapat memberikan masukan kepada ketua dan pengurus KWT sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Daftar Pustaka

- David., F.R. 2004. *Manajemen Strategis Konsep-Konsep*. Jakarta (Indonesia). Gramedia.
- Friedman. 1981. *dalam Achmad, M.A., Alwi., dan Achmad Badu. 2007. Strategi Perencanaan Partisipatif Musrenbang Kota Makasar. Jurnal Online*. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Program Studi Administrasi Pembangunan. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Pemerintahan. Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Handoyo. 1999 *dalam Achmad, M.A., Alwi., dan Achmad Badu. 2007. Strategi Perencanaan Partisipatif Musrenbang Kota Makasar. Jurnal Online*. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Program Studi Administrasi Pembangunan. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Pemerintahan. Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Harsa., D., Ali, M.N., dan Rochayati. 2016. *Survey Pertanian Produksi Tanaman Palawija Provinsi Lampung 2011-2015*. Katalog BPS : 5203006.18. Kerjasama Badan Pusat Statistik dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
- Rangkuti., F. 2006. *Analisis SWOT, Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta (Indonesia). Gramedia Pustaka Utama.
- Ripai., A. 2013. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar. Skripsi*. Program Kerjasama Fisip Universitas Hasanuddin dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri. Program Studi Konsentrasi Ilmu Pemerintahan Daerah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin. Makasar. 2013.
- Rubiyo dan Siswanto . 2012. Peningkatan Produksi dan Pengembangan Kakao (*Theobroma cacao L.*) di Indonesia. *Jurnal Tanaman Industri dan Penyegar*. Volume: 3, Issue: 1, Pages: 33-48. ISSN: 2356-1297.
- Tampubolon.2006. *dalam Achmad, M.A., Alwi., dan Achmad Badu. 2007. Strategi Perencanaan Partisipatif Musrenbang Kota Makasar. Jurnal Online*. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Program Studi Administrasi Pembangunan. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Pemerintahan. Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Usman, Sunyoto. 1993. *dalam Achmad, M.A., Alwi., dan Achmad Badu. 2007. Strategi Perencanaan Partisipatif Musrenbang Kota Makasar. Jurnal Online*. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Program Studi Administrasi Pembangunan. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Pemerintahan. Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Wahyudi, Rodi. 2010. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pembangunan. Jurnal Online*. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau.

**PENYULUHAN HAK AZASI ANAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PEKERJA ANAK KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT DAN APARAT
PEMERINTAH DESA TARAHAH KECAMATAN KETIBUNG KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

Yuni Ratnasari¹, Dwi Wahyu Handayani²

Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Lampung¹

Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung²

Email: yuni.ratnasari@fisip.unila.ac.id¹, dutacen@gmail.com²

Abstrak

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) merilis jumlah pekerja anak di Lampung sampai tahun 2012 mencapai 4 ribuan. Jumlah pekerja anak terbanyak di Lampung Selatan sebanyak 1.740 dan Lampung Tengah berjumlah 2.791. Wilayah di Lampung Selatan dengan jumlah pekerja anak tertinggi, salah satunya adalah di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan terkait pemenuhan hak asasi anak, sebagai berikut: Pertama, ada pelanggaran hak azasi anak di wilayah Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan, yaitu orangtua memperkerjakan anak di bawah usia. Kedua, masyarakat Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan masih mempertimbangkan nilai ekonomi anak sehingga merelakan anak bekerja dibandingkan mengenyam pendidikan, meskipun sebenarnya berasal dari keluarga ekonomi mampu.

Realisasi pemecahan masalah dalam kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan cara: pertama, Forum Discussion Group (FGD) dengan perwakilan aparat pemerintah dan warga nelayan telah dilaksanakan pada Sabtu, 19 September 2015. Kegiatan ini untuk mengetahui persoalan dasar terkait pekerja anak di lingkungan nelayan Desa Tarahan. Kedua, penyuluhan kepada perwakilan aparat pemerintah dan warga nelayan telah dilaksanakan pada hari Sabtu, 19 September 2015. Penyuluhan berkaitan dengan hak asasi anak, aturan hukum tentang identitas penduduk terkait pekerja anak, dan upaya penguatan keluarga.

Hasil pengabdian ini sebagai berikut: pertama, peserta penyuluhan hak azasi anak dapat memahami tiga hal, yaitu: konsep hak azasi anak yang tercantum dalam *Convention on the Right of the Child*, UU Perlindungan Perempuan dan Anak, Perda Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung. Kedua, penguatan kerjasama masyarakat dan aparat pemerintahan mengenai kepatuhan hukum pada pembuatan identitas penduduk. Peserta memahami jenis pelanggaran dan sanksinya terkait masalah identitas penduduk para pekerja anak. Ketiga, upaya penguatan keluarga sehingga tidak memperkerjakan anak. Keempat, kegiatan penyuluhan hak azasi anak ini sebagai upaya menimbulkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak azasi anak, agar kualitas hidup anak lebih baik.

Kata kunci: Penyuluhan, Hak Azasi Anak, Pekerja Anak, Kelompok Masyarakat, Aparat Pemerintah

Pendahuluan

Perlindungan anak dilakukan berdasarkan hak azasinya untuk memiliki kebebasan dalam menjalani proses perkembangannya, secara fisik, psikis, spiritual, intelektual dan keterampilan hidup. Namun, berbagai faktor telah menjadi penyebab pelibatan anak pada aktivitas yang merenggut hak azasi tersebut, misalnya memperkerjakan anak di berbagai sektor yang berpotensi secara ekonomi. Lampung,

salah satu provinsi dengan jumlah pekerja anak tinggi, yaitu kedua di Sumatera setelah Provinsi Sumatera Utara.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) merilis jumlah pekerja anak di Lampung sampai tahun 2012 mencapai 4 ribuan. Data TNP2K, bahwa jumlah pekerja anak terbanyak di Lampung Selatan sebanyak 1.740 dan Lampung Tengah berjumlah 2.791 (Tingkat Pekerja Anak di Lampung Masih Tinggi, Tribun Lampung, 18 Februari 2013, <http://www.sapa.or.id/b1/99-k2/1185-tingkat-pekerja-anak-di-lampung-masih-tinggi>, akses 17 Maret 2014).

Wilayah di Lampung Selatan dengan jumlah pekerja anak tertinggi, salah satunya adalah di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung. Deskripsi tersebut berdasarkan penelitian Kamariatul Kiptiah berjudul “*Mobilitas Sosial Nelayan di Daerah Pariwisata Pantai (Strategi Rumah Tangga Nelayan terhadap Upaya Peningkatan Taraf Hidup di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung)*” tahun 1999 (<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/21926>, akses 18 Maret 2015). Semula sebagian besar masyarakatnya ada nelayan. Namun, seiring dengan berkembangnya kegiatan kepariwisataan pantai membuka kesempatan kerja dan memberikan kemudahan bagi rumah tangga (RT) nelayan miskin/kecil dalam melakukan strategi diversifikasi pekerjaan. Sebagian besar (59,1%) telah meninggalkan usahanya sebagai nelayan (pariwisata bekas nelayan) dan hanya sedikit (40,9%) yang masih mempertahankan usahanya sebagai nelayan (nelayan pariwisata). Usaha pariwisata nelayan tersebut, melibatkan semua unsur keluarga, tidak hanya suami tetapi isteri dan anak.

Fenomena pekerja anak belum sejalan dengan upaya perlindungan hukum pemerintah Indonesia terhadap anak. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang Batasan Usia Minimum untuk Bekerja dengan menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 1999. Ratifikasi lain yang dilakukan adalah, Konvensi ILO Nomor 182 tentang Penghapusan Bentuk Terburuk Pekerjaan Anak melalui penerbitan UU Nomor 1 Tahun 2000.

Konvensi-konvensi tersebut mengamanatkan penghapusan pekerja anak, termasuk PRTA. Sayangnya, realisasi atas konvensi tersebut belum sepenuhnya berjalan di lapangan. PRTA yang berusia di bawah 18 tahun masih ditemukan. Bahkan, 25 persen dari temuan ILO pada 2012, PRTA berusia di bawah 15 tahun.

Dengan melihat fenomena tersebut, maka upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak perlu terus-menerus dilakukan dan didukung oleh semua pihak. Seluruh elemen masyarakat di Provinsi Lampung perlu ikut serta dalam upaya tersebut. Oleh karena itu, penyuluhan terhadap masyarakat tentang HAM, terutama hak asasi anak, berbagai peraturan serta program pemerintah yang terkait perlu terus-menerus dilakukan. Dalam konteks inilah pengabdian masyarakat dilaksanakan, khususnya ditujukan kepada anggota masyarakat di wilayah Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan terkait pemenuhan hak asasi anak, sebagai berikut:

- a. Ada pelanggaran hak azasi anak di wilayah Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan, yaitu orangtua mempekerjakan anak di bawah usia.
- b. Kurangnya pemahaman aparatur pemerintahan dan para orangtua di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan tentang hak azasi anak.
- c. Masyarakat Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan masih mempertimbangkan nilai ekonomi anak sehingga merelakan anak bekerja dibandingkan mengenyam pendidikan, meskipun sebenarnya berasal dari keluarga ekonomi mampu.

Tinjauan Pustaka

A. Hak Azasi Anak

Konsep tentang hak asasi manusia dalam konteks modern dilatarbelakangi oleh pembacaan yang lebih manusiawi tersebut, sehingga konsep HAM diartikan sebagai berikut:

“Human rights could generally be defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings”

Dengan pemahaman seperti itu, konsep hak asasi manusia disifatkan sebagai suatu *common standard of achievement for all people and all nations*, yaitu sebagai tolok ukur bersama tentang prestasi kemanusiaan yang perlu dicapai oleh seluruh masyarakat dan negara di dunia.

Konsep HAM menurut UU. No. 39 tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). Hak anak adalah setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Konvensi Hak-Hak Anak di Jenewa (Convention On The Right of The Child)

- a. Setiap anak berhak mendapat jaminan perlindungan dan perawatan yang dibutuhkan untuk kesejahteraan anak;
- b. Setiap anak memiliki hak yang merupakan kodrat hidup;
- c. Negara menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak;
- d. Bagi anak yang terpisah dari orangtuanya, berhak mempertahankan hubungan pribadi dan kontak langsung secara tetap;
- e. Setiap anak berhak mengembangkan diri, menyatakan pendapatnya secara bebas, kemerdekaan berpikir dan beragama;
- f. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, perlakuan salah, termasuk penyalahgunaan seksual;
- g. Setiap anak berhak mendapat pelayanan kesehatan, perawatan dan pemulihan kesehatan, dengan sarana yang sebaik-baiknya;
- h. Setiap anak berhak mendapat pendidikan dasar secara Cuma-cuma, yang dilanjutkan pendidikan menengah, umum, kejuruan, pendidikan tinggi sesuai sarana dan kemampuan,
- i. Setiap anak berhak mendapat pemeliharaan, perlindungan atau perawatan kesehatan rohani dan jasmani secara berkala dan semaksimal mungkin;
- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan bersantai, bermain dan turut serta dalam rekreasi yang sesuai dengan usia anak.

B. Penguatan Kelembagaan Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Masyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar kebijakan penanggulangan kemiskinan terpenting.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat dianggap resep mujarab karena hasilnya dapat berlangsung lama. Isu-isu kemiskinan pun senantiasa cocok diselesaikan akar masalahnya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Harjanto (2008) mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari konsep umum pemberdayaan masyarakat. Untuk dapat memahami konsep pemberdayaan masyarakat kita perlu memahami coraknya. Beberapa corak pemberdayaan menurut Taruna (2001) (1) Human dignity, mengembangkan martabat, potensi dan energi manusia (2) Empowerment, memberdayakan baik perseorangan maupun kelompok (3) Partisipatoris dan (4) Adil.

Dari corak pemberdayaan di atas, maka yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah peran dari suatu program dapat menggali potensi dari masyarakat, mengangkat martabat masyarakat serta memberdayakan masyarakat dengan ikut berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosialnya secara adil dan berimbang.

Pengembangan kapasitas kelembagaan menurut Milen (2004: 21) bahwa merupakan pengembangan kapasitas tradisional dan penguatan organisasi memfokuskan pada sumber daya pengembangan hampir seluruhnya mengenai permasalahan sumber daya manusia, proses dan struktur organisasi. Pendekatan modern menguji semua dimensi kapasitas di semua tingkat (misi strategi, kebudayaan, gaya manajemen, struktur, sumber daya manusia, keuangan, asset informasi, infrastruktur) termasuk interaksi dalam sistem yang lebih luas terutama dengan kesatuan lain yang ada, pemegang saham dan para pelanggan. Adanya banyak pendapat dalam pengembangan kapasitas kelembagaan dilihat dari teori di atas bahwa dimensi yang menyangkut penguatan organisasi yaitu strategi, kebudayaan, gaya manajemen, struktur, sumber daya manusia, keuangan, asset informasi dan infrastruktur.

Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan agar peserta penyuluhan hak azasi anak dapat memahami tiga hal, yaitu:

- a. Konsep hak azasi anak yang tercantum dalam *Convention on the Right of the Child*, UU Perlindungan Perempuan dan Anak, Perda Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung.
- b. Kepatuhan hukum pada pembuatan identitas penduduk, jenis pelanggaran dan sanksinya terkait masalah identitas penduduk para pekerja anak.
- c. Upaya penguatan keluarga sehingga tidak mempekerjakan anak.

Manfaat Kegiatan

Kegiatan penyuluhan hak azasi anak ini sebagai upaya menimbulkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak azasi anak, agar kualitas hidup anak lebih baik.

Khalayak Sasaran

Penyuluhan hak azasi anak ini diikuti perwakilan kelompok yang ada di masyarakat Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan dan aparat pemerintah desanya. Jumlah peserta 50 orang, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Perwakilan desa tersebut terdiri atas unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Perwakilan Masyarakat (LPM), ketua RT, anggota PKK, tokoh masyarakat dan warga nelayan. Kegiatan ini diprioritaskan bagi wilayah nelayan

meliputi Dusun Sebalang, Cintamaya, SR Banjar, Gerabak dan Gubuk Garam, diharapkan adalah orang yang mampu menyampaikan kembali informasi maupun pengetahuan yang diperoleh dari penyuluhan HAM tersebut. Tujuannya pengetahuan tentang hak asasi anak dapat disebarluaskan kepada seluruh masyarakat, sehingga pada akhirnya membentuk masyarakat yang berkesadaran HAM. Dengan demikian, jumlah anak di bawah umur yang dipekerjakan orangtuanya dapat diminimalisir.

Metode Pengabdian

A. Kerangka Pemecahan masalah

Untuk memecahkan permasalahan dan mencapai tujuan seperti yang telah ditetapkan pada bagian permasalahan dan tujuan kegiatan, maka kerangka pemecahan masalah dalam kegiatan ini seperti terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Kerangka Pemecahan Masalah

NO	Kondisi Saat Ini	<i>Threatment</i> (Perlakuan)	Kondisi yang Diharapkan
1	Peserta belum memahami konsep HAM serta hak asasi anak dalam Konvensi Anak ILO, UU Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Perda tentang anak	Memberikan pendidikan tentang HAM serta hak asasi dan anak dalam Konvensi Anak ILO, UU Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Perda tentang anak	Peserta memahami konsep HAM serta hak asasi dan anak dalam Konvensi Anak ILO, UU Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Perda tentang anak
2	Peserta belum memahami tentang bentuk pelanggaran dan aturan hukum terhadap identitas kependudukan terkait pekerja anak	Memberi penyuluhan tentang bentuk pelanggaran dan aturan hukum terhadap identitas kependudukan terkait pekerja anak	Peserta memahami bentuk pelanggaran dan aturan hukum terhadap identitas kependudukan terkait pekerja anak
3	Peserta belum memahami perlunya penguatan keluarga untuk mencegah orangtua mempekerjakan anak di bawah usia	Memberikan penyuluhan tentang perlunya penguatan keluarga untuk mencegah orangtua mempekerjakan anak di bawah usia	Peserta memahami perlunya penguatan keluarga untuk mencegah orangtua mempekerjakan anak di bawah usia

Selain pemetaan persoalan yang ditunjukkan pada tabel tersebut, tim pengabdian sebelum mengadakan kegiatan penyuluhan terlebih dahulu melakukan focus group discussion (FGD). FGD bertujuan agar lebih memahami konteks persoalan pekerja anak di Desa Tarahan. Hasil dari FGD dapat menjadi bahan penguatan materi penyuluhan. Selain itu FGD dan penyuluhan menghasilkan beberapa rekomendasi keberlanjutan kegiatan. FGD melibatkan semua unsur aparatur pemerintahan desa dan warga, dengan jumlah 10 orang perwakilan.

Selanjutnya, untuk menjamin tercapainya tujuan (kondisi yang diharapkan) penyampaian materi penyuluhan telah dilaksanakan tidak hanya bersifat monologis, akan tetapi lebih bersifat dialogis dan memberikan simulasi yang berkenaan dengan perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak.

Realisasi pemecahan masalah dalam kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan cara:

- a. Penjajagan pengetahuan dan pemahaman peserta penyuluhan dengan menggunakan evaluasi awal. Cara ini digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta tentang konsep HAM serta hak asasi anak, aturan hukum tentang identitas penduduk terkait pekerja anak, dan upaya penguatan keluarga.
- b. Memberikan materi pendidikan berupa makalah, presentasi dan simulasi yang berkaitan dengan hak asasi anak, , aturan hukum tentang identitas penduduk terkait pekerja anak, dan upaya penguatan keluarga.
- c. Evaluasi akhir dan diskusi atas masalah-masalah yang belum dipahami berkaitan dengan materi yang disampaikan.

B. Metode Kegiatan

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah dan diskusi tentang hak azasi anak, aturan hukum identitas penduduk terkait pekerja anak, dan upaya penguatan keluarga.

Rancangan Evaluasi

Dalam penyuluhan hak azasi anak ini, dilakukan pre test dan post test. Tujuan pre test yang dilakukan sebelum proses penyuluhan dimulai adalah untuk mengetahui kualitas pemahaman peserta tentang HAM dan hak azasi anak. Sedangkan post test yang diberikan setelah proses penyuluhan selesai, bertujuan untuk mengetahui perubahan kualitas pemahaman yang diperoleh peserta tentang hak azasi anak, setelah mereka mendapatkan penyuluhan tersebut.

Kriteria kualitas pemahaman sebelum dan sesudah proses pendidikan berlangsung adalah dengan indikator sebagai berikut:

- a. Pemahaman tentang Hak Azasi Manusia dan Hak Azasi Anak
- b. Pemahaman tentang pengertian pekerja anak
- c. Peraturan hukum mengenai pekerja anak
- d. Pemahaman tentang aturan hukum identitas penduduk
- e. Pemahaman tentang upaya penguatan keluarga untuk perlindungan terhadap anak

Jadwal Pelaksanaan

Rangkaian kegiatan pengabdian ini telah terlaksana, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koordinasi tim pengabdian dengan aparatur Desa Tarahan, dilaksanakan pada hari Kamis 10 September 2015. Kegiatan ini membahas tentang pelaksanaan FGD dan penyuluhan.
- b. Forum Discussion Group (FGD) dengan perwakilan aparatur pemerintah dan warga nelayan telah dilaksanakan pada Sabtu, 19 September 2015. Kegiatan ini untuk mengetahui persoalan dasar terkait pekerja anak di lingkungan nelayan Desa Tarahan.
- c. Penyuluhan kepada perwakilan aparatur pemerintahan dan warga nelayan telah dilaksanakan pada hari Sabtu, 19 September 2015. Kegiatan ini merupakan inti dari pengabdian.
- d. Evaluasi kegiatan yang dilakukan untuk melihat perubahan dan peningkatan pengetahuan mengenai hak azasi anak dan persoalan pekerja anak, dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan penyuluhan.
- e. Kegiatan ini merumuskan beberapa rekomendasi berupa keberlanjutan kegiatan, yang dapat dikembangkan pada kegiatan riset dan pengabdian di masa mendatang. Rekomendasi tercantum pada laporan, yang telah dirumuskan oleh tim pengabdian.

Hasil Kegiatan

A. Hasil FGD

Forum Discussion Group (FGD) semakin memperjelas kondisi Desa Tarahan terutama persoalan pekerja anak. Potret pekerja anak di desa tersebut terangkum dari FGD. Persoalan Desa Tarahan mengenai pekerja anak dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Banyak terdapat anak putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar. Sebagian besar karena tidak ada kemauan anak untuk sekolah dan lingkungan yang memengaruhi anak bekerja mencari uang untuk kesenangannya. Anak yang tidak mencapai pendidikan SMA pada akhirnya kesulitan mencari pekerjaan dengan penghasilan sesuai UMK. Namun ada juga anak putus sekolah karena ekonomi keluarga, meskipun ada BOS namun masyarakat masih terbebani dengan ongkos sekolah dan biaya buku.
- b. Lampung Selatan tumbuh sebagai kawasan industri, namun kondisi masyarakat tidak mendukung terutama di Desa Tarahan yang sebagian besar masih berpendidikan rendah, sehingga tidak banyak yang terserap menjadi tenaga kerja di perusahaan swasta setempat.
- c. Belum ada BLK yang siap memberikan pelatihan keterampilan buat anak putus sekolah.
- d. Ada tindakan pemalsuan identitas di ijazah, yaitu dengan menambahkan usia agar dapat diterima bekerja.
- e. Desa Tarahan tidak memiliki data lengkap mengenai kondisi pendidikan warganya, termasuk jumlah anak putus sekolah dan jumlah anak bekerja.

B. Hasil Penyuluhan

Sebelum penyuluhan peserta diberikan pertanyaan yang berjumlah 6 pertanyaan. Tiga pertanyaan dengan jawaban tertutup dan 3 pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka yaitu:

- a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui yang dimaksud hak azasi anak?
- b. Apakah Bapak/Ibu mengetahui yang dimaksud pekerja anak?
- c. Apakah Bapak/Ibu mengetahui jika ada peraturan hukum pemerintah yang melarang anak bekerja?

Pertanyaan tertutup adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui yang dimaksud hak azasi anak?
- b. Apakah Bapak/Ibu mengetahui yang dimaksud pekerja anak?
- c. Apakah Bapak/Ibu mengetahui jika ada peraturan hukum pemerintah yang melarang anak bekerja?

Hasil jawaban pertanyaan terbuka menunjukkan tingkat pemahaman peserta sebelum dilakukan penyuluhan mengenai persoalan pekerja anak. Esensi persoalan, peserta sudah memahami bahwa kategori usia anak berhak terhadap aktifitas pendidikan, sehingga bekerja dengan tujuan apapun tidak diwajibkan.

Hasil pre test awal yang dilakukan pada sampel 20 orang dari 50 peserta terlihat, secara umum, peserta kurang memahami atau belum memiliki aspek kognitif makna hak azasi anak, pekerja anak dan pengetahuan tentang peraturan hukum mengenai pekerja anak. Hasil post test secara umum setelah diadakan penyuluhan peserta sangat memahami dan memiliki aspek kognitif makna hak azasi anak, pekerja anak dan pengetahuan tentang peraturan hukum mengenai pekerja anak.

C. Hasil Pembahasan

Dari rangkaian kegiatan pengabdian berupa FGD dan penyuluhan tim pengabdian semakin mengetahui detail persoalan di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung, sehingga menghasilkan beberapa rekomendasi keberlanjutan kegiatan. Bagi masyarakat, kegiatan pengabdian ini bermanfaat dari aspek pengetahuan, perubahan perspektif dan rancangan

tindakan. Selain itu, terbentuk itikad untuk melakukan penguatan kelembagaan di masyarakat dan pemerintahan agar dapat peduli terhadap persoalan pekerja anak di lingkungannya. Berikut adalah rincian manfaat kegiatan yang diperoleh masing-masing pihak termasuk analisisnya.

a. Perspektif Masyarakat

Desa Tarahan Kecamatan Ketibung dari sisi ekonomi keluarga terdiri dari rumah tangga nelayan, buruh dan wiraswasta. Masyarakat di pesisir pantai wilayah Desa Tarahan sebagian besar adalah nelayan. Tingkat perekonomian masyarakatnya beragam, khususnya di wilayah pesisir sebagian besar merupakan rumah tangga miskin yang menerima bantuan pemerintah. Tingkat pendidikan sebagian besar tidak selesai SMA. Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan sebelumnya sangat rendah, dan terbentuk lingkungan yang cenderung abai terhadap kondisi anak putus sekolah di desa tersebut.

Dari hasil FGD diketahui bahwa anak putus sekolah bukan karena faktor ekonomi tetapi kemauan yang rendah dari anak. Faktor ekonomi bukan satu-satunya penyebab adanya anak putus sekolah tetapi karena faktor lain, terlebih setelah adanya program Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang membebaskan anak dari biaya SPP untuk pendidikan dasar hingga menengah. Lingkungan anak kurang membentuk semangat anak untuk giat sekolah. Mereka terbiasa melihat teman-temannya bekerja, membantu orangtua sebagai nelayan atau pekerjaan serabutan lainnya. Dengan demikian, anak memiliki uang sendiri yang dihabiskan bukan untuk menopang ekonomi keluarga tetapi lebih pada uang saku jajan, kebutuhan sosial media dan sebagainya.

Kesadaran pentingnya pendidikan tergugah ketika saat ini Kabupaten Lampung Selatan menjadi wilayah kawasan industri yang banyak membutuhkan tenaga kerja minimal berpendidikan SMA dan memiliki keterampilan. Pengabdian ini, semakin menguatkan kembali pemahaman peserta sebagai orangtua untuk memberikan hak azasi anak, diantaranya pendidikan, kebebasan pengembangan diri, selain sandang pangan dan kehidupan yang nyaman buat anak.

Masyarakat memahami bahwa faktor penyebab pekerja anak bukan saja ekonomi, tetapi faktor budaya yang selama ini terbentuk di masyarakat. Masyarakat memahami tentang substansi aturan hukum di Indonesia tentang pekerja anak, dan program pemerintah mengenai larangan anak bekerja. Lembaga masyarakat desa yang diwakili oleh tokoh masyarakat, PKK, Lembaga Permusyawaratan Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD) mensepakati untuk peduli terhadap persoalan anak putus sekolah.

b. Perspektif Aparatur Pemerintah

Pemerintah masih menanggapi bahwa persoalan pekerja anak adalah wilayah privasi keluarga, sehingga tidak dapat banyak berbuat terhadap angka putus sekolah. Pemerintah desa juga menghadapi dilematis, ketika beberapa warganya menyiasati data identitas diri dengan menambah usia agar dapat diterima bekerja. Pemerintah mengetahui konsekuensi hukum pemalsuan identitas kependudukan, namun aparat pemerintah menyadari bahwa alasan warga memalsukan identitas karena membutuhkan pekerjaan untuk menopang kebutuhan hidup.

c. Perspektif Tim Pengabdian

Dalam hal menilai keberhasilan pengabdian, tim mengukur tingkat pemahaman setelah diadakan penyuluhan dengan cara berdiskusi. Peserta memahami tentang hak azasi anak, pekerja anak dan aturan hukum pekerja anak. Selain itu, juga perlu ada keberlanjutan kegiatan sehingga mendukung pencapaian tujuan. Tindak lanjut kegiatan adalah:

- 1) Peningkatan kesadaran kepada remaja Desa Tarahan Kecamatan Ketibung tentang pentingnya pendidikan.
- 2) Pengadaan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai alternatif lembaga pendidikan non formal bagi anak putus sekolah.
- 3) Advokasi pentingnya pembangunan SMK di Kabupaten Lampung Selatan.

- 4) Pelatihan data base desa yang menjelaskan kondisi akurat tentang kondisi masyarakat desa, dari semua aspek, termasuk pendidikan.
- 5) Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa, agar memiliki kepedulian terhadap anak putus sekolah, dan tegas terhadap tindakan pemalsuan identitas usia anak.

Simpulan dan Saran

Ada 2 kesimpulan dari pengabdian ini yaitu berkaitan dengan kegiatan yang manfaatnya diperoleh peserta dan pemahaman tim pengabdian secara mendetail tentang persoalan pekerja anak di Desa Tarahan. Bagi tim pengabdian, memahami penyebab anak bekerja bukan karena faktor ekonomi maupun orangtua yang menganggap anak memiliki nilai ekonomi sehingga dapat diperkerjakan, tapi lebih kepada rendahnya kemauan anak untuk melanjutkan sekolah. Hal itu dipengaruhi oleh lingkungan setempat yang sudah terbiasa dengan anak bekerja untuk uang saku dan memenuhi kebutuhan sendiri. Anak bekerja menjadi penyebab angkat putus sekolah relatif tinggi, pada akhirnya saat mereka ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik misal bekerja di perusahaan terkendala dengan pendidikan yang rendah atau tidak memenuhi syarat minimal pendidikan tingkat SMA.

Bagi peserta kegiatan ini memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Peserta penyuluhan hak azasi anak dapat memahami tiga hal, yaitu: konsep hak azasi anak yang tercantum dalam *Convention on the Right of the Child*, UU Perlindungan Perempuan dan Anak, Perda Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung.
- b. Penguatan kerjasama masyarakat dan aparat pemerintah mengenai kepatuhan hukum pada pembuatan identitas penduduk. Peserta memahami jenis pelanggaran dan sanksinya terkait masalah identitas penduduk para pekerja anak.
- c. Upaya penguatan keluarga sehingga tidak memperkerjakan anak.
- d. Kegiatan penyuluhan hak azasi anak ini sebagai upaya menimbulkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak azasi anak, agar kualitas hidup anak lebih baik.

Dari kesimpulan atas kegiatan pengabdian ini, maka tim pengabdian memberikan saran sebagai berikut:

- a. Kegiatan penyadaran pentingnya pendidikan juga patut diberikan untuk remaja Desa Tarahan Kecamatan Ketibung.
- b. Pengembangan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan finansial untuk membuat usaha mandiri pengolahan hasil tangkapan nelayan.
- c. Perlu adanya lembaga non formal sebagai alternatif pendidikan untuk remaja yang membekali mereka dengan keterampilan, sehingga mudah terserap lapangan pekerjaan.
- d. Penguatan keluarga, masyarakat dan aparat pemerintah untuk peduli persoalan anak putus sekolah, memberikan sosialisasi antarmasyarakat tentang pentingnya pendidikan, penegakan hukum atas tindakan menyalahi hukum yaitu pemalsuan identitas anak diantaranya penambahan usia agar dia dapat diterima bekerja.

Daftar Pustaka

- Fithriani, Rizqa. 2013. *Pekerja Anak, Kemiskinan dan Nilai Ekonomi Anak*. Studi Kasus Provinsi Lampung Tahun 2011. BPS Lampung, Indonesia Child Poverty and Social Protection Conference 10–11 September 2013).
- Harjanto. 2008. *Perencanaan Pengajaran*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Kiptiah, Kamariatul. 1999. *Mobilitas Sosial Nelayan Daerah Pariwisata Pantai (Strategi Rumah Tangga Nelayan terhadap Upaya Peningkatan Taraf Hidup di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi*

- Lampung). (<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/21926>, akses 18 Maret 2015).
- Milen, Anelli. 2004. *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Diterjemahkan secara bebas. Yogyakarta : Pondok Pustaka Jogja.
- Sastriyani, Siti Hariti (editor). 2009. *Gender and Politics*. Yogyakarta: PSW UGM bekerja sama dengan Tiara Wacana.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru. Rajawali Pers Jakarta
- Soeprapto, H. R. Riyadi. 2003. *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance*. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi Pembangunan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Taruna, JC Tukiman. 2001. *Pendidikan Nonformal Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat*. Makalah disampaikan pada pertemuan tahunan IV SPPM, Solo, 25-28 September 2001. Dapat dilacak pada www.balaidesa.or.id/tukiman.htm.
- Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. *Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- _____. 2014. *Tingkat Pekerja Anak di Lampung Masih Tinggi*, *Tribun Lampung*, 18 Februari 2013, <http://www.sapa.or.id/b1/99-k2/1185-tingkat-pekerja-anak-di-lampung-masih-tinggi>, akses 17 Maret 2014).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Undang-Undang No. 26 th 2000 tentang pengadilan HAM
- _____. 2001. *Women, Law and Development*, Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah Demi Langkah, terjemahan dan terbitan LBH APIK, Jakarta.

TAHAP PRAKONFLIK DAN KONFRONTASI PADA KONFLIK ANTARWARGA DESA AGOM DENGAN DESA BALINURAGA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Benjamin

Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung
Email: bensosunila@gmail.com

Abstrak

Kejadian insiden konflik antarwarga di Desa Balinuraga Lampung Oktober 2012, dipicu oleh isu pelecehan seksual. Metode berdasarkan studi kasus kualitatif. Pengumpulan data dengan teknik purposive. Data dan informasi dikumpulkan dengan cara: a. Wawancara mendalam, b. Observasi, c. Studi dokumentasi. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif melalui proses: a. Reduksi data, b. Penyajian Data, c. Menarik Kesimpulan). Lokasi penelitian di Desa Agom dan Desa Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan. Kesimpulan, a. Tahap prakonflik dengan insiden-insiden persinggungan mulai terjadi pada hari Sabtu sore dan malamnya ada usaha dialog antara kedua kades, wakil dari orang tua korban dan orang tua pelaku penggoda. Hasil dialog nonkomunikatif, nonintensif dan nonkonsensus berkaitan dengan ganti rugi. Tanpa disadari pengelolaan perseteruan oleh Kades Balinuraga melemah termasuk dalam menangani, mencegah dan meredakan konflik, yang kemudian terjadi eskalasi konflik. Akhirnya, terjadi serangan besar-besaran, tahap konfrontasi merupakan tumpuan untuk menuju puncak konflik, b. Berdasarkan persinggungan dalam bentuk insiden konflik disertai kekerasan dan permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, warga Desa Balinuraga dan warga Bali Lampung Selatan selalu melakukan tindakan premanisme terhadap warga-warga sekitarnya dengan menyerang dan membakar beberapa rumah penduduk, serta tidak ada niatan saling meminta maaf dari keluarga pelaku kepada keluarga korban, sedangkan dari pihak kepolisian tidak cepat tanggap dan kurang merespon penanganan secara komprehensif dari setiap insiden yang terjadi.

Kata kunci: Tahap Prakonflik, Tahap Konfrontasi, Konflik Antarwarga dan Penanganan Konflik.

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural baik ditinjau dari segi agama, suku, adat istiadat maupun budaya. Pluralisme masyarakat Indonesia berpotensi konflik, baik konflik suku, agama, ras maupun kepentingan, dengan indikator perebutan lahan parkir, perebutan tanah pertanian, gaya berkomunikasi yang menyinggung perasaan orang lain (Wirawan, 2010:7-12). Apalagi konflik dipicu oleh faktor kecemburuan ekonomi dan respon kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, serta perasaan kecewa yang siap bergesekan dengan masalah-masalah yang bersumber pada perbedaan etnis dan agama (Burhanudin, dkk, 1998:28). Susan (2010) berpendapat, bahwa konflik dapat terjadi secara horizontal (antar masyarakat) maupun secara vertikal (antara masyarakat dan aparat).

Latar belakang penyebab konflik antarwarga yang muncul di Indonesia karena, diantaranya faktor kemiskinan, seperti pengangguran, persaingan sosial pada sumber daya ekonomi (masalah lahan parkir), kekerasan dan penganiayaan sampai jatuh korban dan tewas, sehingga muncul rasa dendam serta pelecehan seksual ((Wirawan (2010), Sihbudi (2001), Faturochman dan Nuraeni (2006), Umar (2011).

Kejadian-kejadian konflik antarwarga yang pernah terjadi di wilayah lokasi penelitian sebelum tahun 2008 dengan latar belakang penyebab konflik, seperti perbedaan agama, pemekaran wilayah desa dan perkelahian antar pemuda/siswa. Kejadian-kejadian konflik sebagai bentuk konflik antarwarga yang termasuk dalam kategori jenis konflik horizontal. Menurut Wirawan (2010:97), bahwa konflik antarwarga termasuk jenis konflik horizontal yang sering terjadi di desa-desa Indonesia yang berawal dari perkelahian seorang warga dengan seorang warga lainnya dengan penyebab konflik, seperti persaingan perebutan wanita, tersenggol pada saat joget dangdut organ tunggal di pesta pernikahan. Penyebab konflik dari kejadian-kejadian konflik akhir-akhir ini di wilayah lokasi penelitian, karena perkelahian antar siswa SMA, seorang pelajar SMP ditusuk di tempat joget dengan organ tunggal, masalah penarikan uang parkir di pasar dan pelecehan seksual.

Sehubungan dengan penulisan tentang konflik antarwarga, ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh mereka, diantaranya Umar (2011) mengkaitkan konflik dan tawuran yang menjadi budaya bagi warga di Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat serta banyak geng pemuda dan pengangguran. Penelitian yang sama dilakukan oleh Yara (2002) tentang konflik komunal antara warga kawasan Palmeriem dengan warga kawasan Berland Matraman Kecamatan Matraman Jakarta Timur. Kemudian penelitian Fanani (2001), di mana upaya penanggulangan konflik yang dilakukan oleh Polsek Matraman tidak efektif dan kurang memberikan dampak yang berarti bagi penyelesaian konflik tawuran warga Matraman. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tentang konflik antarwarga dapat diindikasikan yang melatarbelakangi konflik, diantaranya: akibat dinamika perubahan sosial ekonomi, pemicu konflik karena persaingan ekonomi dan pengangguran, adanya bentuk kekerasan dan lembaga yang kurang efektif dalam menangani konflik.

Berbicara tentang konflik antarwarga merupakan salah satu bentuk konflik sosial yang terjadi di Indonesia dari tahun 2005 – 2012 saja kurang lebih ada sekitar 22 kejadian konflik antarwarga, diantaranya kerusuhan yang terjadi di Bekasi, tawuran antarwarga Pasar Rumput dengan warga Menteng Tenggulun, tawuran antarwarga menggunakan petasan dan bom Molotov di Jakarta¹.

Sehubungan dengan konflik antarwarga, terdapat insiden-insiden konflik antarwarga yang masuk dalam kategori besar muncul di wilayah lokasi penelitian setelah tahun 2008, yaitu: a. Konflik antar warga Desa Bali Agung Kecamatan Palas dengan warga Desa Palas Pasemah Desember 2009, b. Konflik antar warga Sidomakmur Kecamatan Way Panji dengan warga Dusun Sukajaya Desa Margocatur Kecamatan Kalianda November 2011, c. Konflik antara warga Dusun Napal dengan warga Desa Kotadalam Januari 2012, d. Konflik antar warga Desa Agom dengan warga Desa Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan Oktober 2012². Kejadian-kejadian konflik tersebut di lokasi yang berbeda, namun masih dalam satu wilayah kabupaten. Apalagi, pemerintah dalam menangani konflik yang terjadi selalu dengan pendekatan keamanan atau militer. Pendekatan budaya dan mediasi sebagai wujud komunikasi para pihak yang berkonflik acapkali diabaikan (Hendrajaya dkk., 2010).

Kenyataannya memang demikian di dalam menangani konflik untuk mendukung terciptanya keberhasilan suatu kebijaksanaan dan strategi pertahanan, diantaranya dengan: a. Penyelesaian konflik yang bernuansa separatisme bersenjata harus diselesaikan dengan pendekatan militer terbatas dan profesional guna menghindari korban di

¹Klasifikasi Fenomena Konflik di Indonesia – sehubungan dengan Jenis konflik antar warga, antar desa, antar kelompok, konflik antar etnis dan Penyebab konflik, <http://balagu.com/node/6026>, <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=303409>, <http://penanggulangankrisis.depkes.go.id/article/view/6/1622/>, <http://www.tempo.co/read/news/2012/06/02/058407874/Warga-Kwamki-Lama-Perang-Panah>,

²Polres Lampung Selatan dan Kesbangpol Kalianda Lampung Selatan.

kalangan masyarakat dengan memperhatikan aspek ekonomi dan sosial budaya serta keadilan yang bersandar pada penegakan hukum, b. Penyelesaian konflik horizontal yang bernuansa SARA diatasi melalui pendekatan hukum dan HAM³. Penanganan konflik sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik.

Pencegahan konflik sendiri dilakukan dengan upaya, diantaranya untuk: a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat; b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai; c. meredam potensi konflik. Lebih jauh ditekankan dalam UU No 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial pada Bagian Keempat Pasal 9 ditekankan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi konflik dalam masyarakat, diantaranya dengan mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat. Hal mana sesuai dengan pernyataan Fisher (2001) yang menyatakan untuk penanganan konflik diperlukan diantaranya fasilitas dialog.

Dengan demikian, penulis tertarik menuliskan tahapan prakonflik dan konfrontasi pada konflik antarwarga Desa Agom dengan Desa Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan, diantaranya: a). Pengelolaan konflik konstruktif masih lemah dalam menangani, mencegah dan meredam konflik, b). Insiden-insiden konflik yang terjadi di wilayah lokasi kejadian karena kurangnya upaya penanganan yang komprehensif. Maka dari itu dalam penulisan tentang tahapan prakonflik dan konfrontasi pada konflik antarwarga Desa Agom dengan Desa Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan, maka pertanyaannya: a). Bagaimanakah sampai pengelolaan konflik konstruktif lemah dalam menangani, mencegah dan meredam konflik, b). Bagaimanakah sampai insiden-insiden konflik yang terjadi di wilayah lokasi kejadian cenderung kurang upaya penanganan yang komprehensif. Adapun tujuan penulisan ini hendak mendeskripsikan, dan menjelaskan tahapan prakonflik dan konfrontasi yang terjadi antar pihak-pihak yang berkonflik.

Metode

Penulisan artikel ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Studi kasus (Creswell, 2012:20) yang menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Pengumpulan data dengan teknik purposive melalui informan-informan yang mengetahui, terlibat dalam konflik dan atau yang menguasai informasi yang berhubungan dengan tahapan prakonflik dan konfrontasi pada konflik antarwarga Desa Agom dengan Desa Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan, yaitu para tokoh informal dari dua desa yang berkonflik, seperti tokoh pemuda, dan perwakilan dari pihak-pihak yang berkonflik mempunyai kedudukan secara struktural di masyarakat, seperti Kepala Desa, atau Perangkat Desa (Carik, kepala dukuh dan pembantu pamong).

Data dan informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan cara pengumpulan data, yaitu: a. Wawancara mendalam, b. Observasi, c. Studi dokumentasi. Selanjutnya, data diolah dan dianalisis dengan proses *reduction dan interpretations*. Data ditulis dalam bentuk transkripsi, dan dilakukan pengkategorian dengan mereduksi data dan menginterpretasikan data yang mengarah pada tujuan penelitian⁴. Lokasi kejadian konflik antarwarga Desa Agom dengan Desa Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan.

³Balitbang Dephan dan Depdiknas, <http://bpbpd.pinrangkab.go.id/index.php/2012-05-03-03-56-06/jenis-bencana/kerusakan-sosial>

⁴Berkaitan dengan proses analisis data kualitatif, Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992) menjelaskan melalui proses, sebagai berikut: a. Reduksi data (proses pemilahan data), b. Display (Penyajian Data), c. Verifikasi (Menarik Kesimpulan).

Hasil dan Pembahasan

Eskalasi konflik berdasarkan skala waktu tertentu dan urutan kejadian konflik dari tahap prakonflik dan konfrontasi dipaparkan sikap, perilaku dan situasi yang berkembang dalam kejadian konflik dengan disertai kekerasan. Pada tahap prakonflik terdapat suatu ketidaksesuaian antara kedua belah pihak yang bersitegang sampai terjadi konflik.

Persepsi dan penilaian penyebab konflik pada tahap prakonflik berkaitan dengan perbedaan kepentingan sebagai sumber-sumber terjadinya konflik, di mana kepentingan sebagai ungkapan perasaan individu atau sekelompok individu tentang apa yang diinginkan, bersifat netral berada pada alam pikiran yang membentuk sikap, tujuan dan niat individu atau sekelompok individu, seperti kebutuhan akan rasa aman, identitas kelompok, kebahagiaan dan kejelasan tentang dunianya.

Sehubungan dengan sikap dan kepentingan, aspirasi ketidakpuasan terhadap sikap pihak warga Desa Balinuraga, seperti kebal hukum dan mengabaikan persaudaraan. "Apalagi frekuensi silaturahmi dan kebersamaan dari warga masyarakat, para pemuda dan tokoh masyarakatnya dengan warga masyarakat desa-desa sekitar Desa Balinuraga cenderung kurang bahkan tidak pernah dilakukan", seperti yang dituturkan oleh informan dari Desa Agom. Arogansi warga Desa Balinuraga lah yang menyebabkan konflik terjadi pada tanggal 27 Oktober 2012, bukan hanya karena ulah pemuda-pemuda warga Desa Balinuraga terhadap dua gadis dari Desa Agom. Namun perilaku mereka warga Bali dan warga Balinuraga Lampung Selatan sudah sering berulah pada kejadian-kejadian sebelumnya. Perilaku pemuda-pemuda warga Desa Balinuraga yang kurang berlandaskan norma-norma dan hukum yang berlaku didukung oleh tindakan orang tua mereka yang selalu melindungi. Pada waktu para pemuda berbuat keonaran, orang tua mereka bukan memberikan teguran atau sanksi. Namun, justru memberikan dukungan dan menganggap tindakan yang dilakukan oleh generasi pemudanya bukanlah masalah yang perlu diselesaikan secara kekeluargaan, seperti yang dituturkan oleh I dari Desa Sidoreno.

Persepsi penyebab konflik Balinuraga dapat dinyatakan, bahwa respon pemerintah lamban dalam menangani permasalahan yang muncul, ada reaksi atas kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat, terdapat perbedaan kepercayaan dan adat istiadat, aspirasi kekurangsuksesan terhadap sikap pihak warga desa tertentu, seperti kebal hukum, frekuensi silaturahmi dan kebersamaan antarwarga desa tokoh masyarakat, dan para pemuda cenderung tidak pernah dilakukan pembinaan bagi generasi muda, serta provokasi terhadap sekelompok pemuda dalam menolong korban sehingga menyebar sebagai isu pelecehan seksual.

Awal isu pelecehan seksual dari kejadian tanggal 27 Oktober 2012 hari Sabtu sore sekitar pukul 18.00 WIB. Menurut informasi dari pihak Kepolisian Lampung Selatan, bahwa kronologi kejadiannya pada hari Sabtu sore tanggal 27 Oktober 2012 pukul 17.30 WIB telah terjadi kecelakaan lalu-lintas di Jalan Lintas Way Arong Desa Sidoharjo (Patok) Lampung Selatan, di mana sepeda ontel yang dikendarai oleh pemuda-pemuda Bali Balinuraga ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh ND 17 tahun warga Desa Agom Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan berboncengan dengan E 16 tahun sebagai keponakan warga Desa Negri Pandan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Melihat kejadian tersebut, sekelompok pemuda warga Desa Balinuraga langsung menolong mereka. Pada saat itulah, ada warga lainnya yang lewat dan memprovokasi, bahwa "*sekelompok pemuda warga Desa Balinuraga telah memegang-megang tubuh dari kedua gadis tersebut*".

Gadis-gadis korban isu pelecehan seksual, begitu sampai di rumah diantar oleh warga yang mengenali korban. Orang tua mereka tidak memberikan pertolongan, justru memarahinya dan menganggap "*anak-anak gadis tersebut tidak bisa diam bila melihat ada motor, tidak hati-hati dalam mengendarai motor*". Baru kemudian, mereka

ditanyai oleh orang tuanya, “*kok bisa jatuh dari motor dan dijawab kalau digoda oleh sekelompok pemuda warga Desa Balinuraga*”. Mendengar jawaban tersebut, orang tua mereka kembaliberang, karena dianggap anak-anak tersebut berkilah, mengada-ada dan menfitnah pemuda-pemuda warga Desa Balinuraga. Pada saat marahwarga yang mengantar dan menolong, berbicaradan menerangkan, bahwa “*kalau yang dikatakan putri-putrinya bahwa benar, danwarga penolong mengenalisekelompok pemuda warga Desa Balinuraga*”.

Pada prinsipnya pihak keluarga korban dapat menerima peristiwa kecelakaan tersebut, asalkan ada uang ganti rugi biaya berobat ke rumah sakit. Masyarakat umum sebagai warga tetangga desa-desa sekitar Desa Agom mendengar kabar berita tersebut, mereka dengan rasa empati yang tinggi atas kebersamaan dan persaudaraan bereaksi geram. Dipertegas oleh informan dari Kesbangpol, bahwa “adanya keinginan spontanitas dari masyarakat yang merasa sebatin dan tidak ada yang memimpin. Mereka tidak terima akan kejadian tersebut dan tidak dapat didiamkan karena kejadian tersebut menyangkut harga diri dan kebersamaan sebagai salah satu falsafah warga Lampung tentang *pil pasangiri*”.

Berita kejadian tentang isu pelecehan seksual menyebar luas sebagai tindakan amoral. Bagi pihak yang bersalah seharusnya mengakui perbuatannya dan bertanggungjawab atas kejadian tersebut. Beberapa orang yang mewakili pihak orang tua korban mendatangi kepala desa nya dan diantar ke rumah orang tua pelaku pemuda-pemuda penggoda. Pihak kepala desa dan orang tua pemuda-pemuda pelaku tidak mau berdamai dan tidak mau bertanggungjawab atas kejadian tersebut. Itu merupakan tindakan oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab dan perkara tersebut hendaknya diselesaikan dengan “kepala dingin”, lebih jelasnya lihat tabel 1.

Begitu sampai di Desa Balinuraga, oleh Kades Balinuraga diantarkan ke rumah orang tua pemuda-pemuda penggoda yang membuat dua anak gadis jatuh dari motor. Selanjutnya terjadilah dialog panjang antara Kades Agom dan Kades Balinuraga dengan orang tua pemuda-pemuda tersebut. Kades Agom menginginkan pertanggung-jawaban terhadap kedua anak gadis warganya sebagai korban ditanggung penuh. Namun, Kades Balinuraga tidak menyanggupi dan memberikan penawaran, kalau masalah tersebut ditanggung bersama di mana sebagian dari pihakBalinuraga dan sebagian dikembalikan kepada orang tua korban. Sebaliknya kemudian, Kades Agom menolak dan berdalih kalau korban dua anak gadis Lampung tersebut bukan terjatuh karena tabrakan, benturan, gesekan atau tersenggol kendaraan lain secara tidak disengaja. Mereka jatuh dari motor, karena kesengajaan digoda oleh sekelompok pemuda warga bapak yang melakukan tindakan tidak terpuji.

Tabel 1. Gambaran konflik pada tahap prakonflik

No.	Fokus	Deskripsi dari	
		Perangkat Desa Ds. Agom	Perangkat Desa Ds. Balinuraga
1	Jalan peristiwa kejadian pada Oktober 2012	Bermula dari sekelompok pemuda yg melakukan pelecehan terhadap dua cewek	Konflik antar pemuda
2	Perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh orang atau sekelompok orang	Sekelompok orang	Banyak oknum tidak bertanggung jawab
3	Kejadian kerusuhan karena adanya persepsi/tanggapan/	Kejadian yg karena sebelah pihak tidak terima atas pelecehan tsb	-

	pendapat yang berbeda		
4	Penyebab pertentangan kejadian kerusuhan	Tidak adanya nilai moral (perasaan kasihan)	-
5	Gambarkan kejadian konflik secara grafis	pihak lawan tidak mau berdamai & tidak bertanggung jawab	-
6	Keterlibatan pihak lain dalam konflik	Tidak ada pihak lain yang terlibat	-
7	Karakteristik/ciri khas konflik antarwarga	Kita adalah agama Islam dan kita adalah penduduk pribumi, sedangkan mereka pendatang	-
8	Durasi waktu (hari) terjadinya kerusuhan	Kejadian tsb hanya dua hari dan dua kali penyerangan	2 hari, hari ke-1 tiga kali serangan dan hari ke-2 satu kali serangan
9	Penerapan prinsip agar pertentangan/konflik yang terjadi ada jalan keluarnya	Pihak yang bersalah mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab	Diskusikan dengan kepala dingin

Sumber: Data Lapangan

Nampaknya dialog panjang yang ramai dan negosiasi tanpa hasil kesepakatan dan kesepahaman. Seandainya pada waktu itu terjadi dialog yang intensif antar pihak yang mewakili orang tua korban dan pihak pelaku penggoda serta terjadi kesepakatan tentang tuntutan ganti rugi, tentunya dapat meredam potensi konflik. Hal mana sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik pasal 9 Bagian Keempat Meredam Potensi Konflik, sehubungan dengan mengintensifkan dialog antar kelompok masyarakat. Berkaitan dengan pelaksanaan dialog tidak adanya kesepakatan tuntutan ganti rugi, dimana pertentangan dialog berubah menjadi konflik sebagai masalah baru dan konflik berubah dengan disertai kekerasan karena terjadi dialog yang nonintensif, apalagi ditambah dengan suara-suara ketidaksepakatan dan keluhan yang tidak didengar, seperti yang dijelaskan oleh Jamil (2007). Apalagi proses dialog dan negosiasi tersebut berlangsung secara terbuka dapat dilihat dan didengar oleh warga masyarakat Balinuraga. Selanjutnya Jamil mempertegas, bahwa negosiasi bukan berarti harus mengalah dan juga bukan berarti harus menang dengan mengalahkan pihak lain. Kemampuan bernegosiasilah sebagai bentuk suatu keterampilan yang dapat dipelajari dengan sikap positif atas dasar kesadaran dan kesediaan untuk berusaha mencari solusi penyelesaian masalah.

Apa lagi pada saat terjadi dialog di dalam rumah orang tua pemuda-pemuda dari warga Balinuraga tersebut, di luar rumah memang ramai dikerumuni oleh warga masyarakat dari Desa Balinuraga. Mereka berbisik-bisik dan mengatakan “*udah lah tak usah diurusin. Desa Agom aja kecil*”. Akibatnya dari bisikan dan ocehan tersebut, sehingga sampai mempengaruhi pikiran Kades Balinuraga. Beliau terpancing dan mengatakan “*ya sudahlah kalau tidak mau diurusin*”. Dengan demikian setelah itu, mereka para wakil orang tua korban dari Desa Agom langsung pergi balik meninggalkan Desa Balinuraga tanpa suatu hasil keputusan dari pertemuan tersebut.

Dalam proses dialog di kediaman orang tua pemuda-pemuda penggoda, di mana di luar rumah ramai dikerumuni warga Desa Balinuraga sambil mengoceh “*udah lah tausah diurusin. Desa Agom aja kecil*”. Akibatnya, Kades Balinuraga terpancing dan mengatakan “*ya sudahlah kalau tidak mau diurusin*”. Dalam dialog tersebut penulis menganalisis adanya perbedaan pendapat, dan sikap tentang objek pertentangan yang

diekspresikan dalam bentuk bahasa verbal. Perkataan, pendapat dan sikap tersebut sesuai dengan pemikiran Goffman, yang termasuk dalam front pribadi (*personal front*) yang mencakup bahasa verbal, bahasa tubuh pelaku dengan berbicara atau mengoceh, berbicara dengan intonasi dan ekspresi wajah tertentu dari Kades Balinuraga. Bahkan dengan perkataan “*udah lah tausah diurusin. Desa Agom aja kecil*”, dan Kades Balinuraga terpancing dan mengatakan “*ya sudahlah kalau tidak mau diurusin*”. Menurut penulis dapat dikategorikan dalam pemikiran Goffman termasuk pemberian stigma bagi warga Desa Agom yang dianggap remeh dan sebelah mata.

Setelah pulang dari Desa Balinuraga, kemudian tindakan Kades Agom dan warga Agom yang mewakili orang tua korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Pihak kepolisian selanjutnya menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi Desa Balinuraga untuk mencari para pelaku pelecehan seksual. Namun, warga Desa Balinuraga telah menyembunyikan mereka sebagai pelaku kejadian agar tidak ditangkap polisi. Dengan rasa berat dan kecewa warga Desa Agom mengetahui kejadian tersebut, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke ketua adat dari beberapa Marga Lampung di Lampung Selatan.

Awal mula kerusuhan terjadisekelompok pemuda warga tetangga desa diisukan melakukan pelecehan seksual. Namun disanggah, bahwa perbuatan menolong jatuh dari motor merupakan fitnah melakukan pelecehan seksual, bahkan terjadi kesalahpahaman dengan kejadian tersebut secara emosional. Kami lebih maju dan sebaliknya mereka yang cemburu sosial, untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.

Padahal malam itu sekitar pukul 22.30 an WIB, di mana Unsur Pimpinan Kecamatan (Uspika) Way Panji dengan dibantu sekitar 1 (satu) SSK Aparat Kepolisian dari Polsek Sidumulyo dan Polres Lampung Selatan berusaha melakukan pencegahan, seperti yang dijelaskan oleh informan dari Kesbangpol Kalianda. Menurut peneliti, bahwa usaha tindakan pencegahan konflik sebagai upaya meredam potensi konflik semacam itu sudah sesuai dengan pasal 6 Bagian Kesatu UmumdariUU Nomor 7 Tahun 2012tentang Penanganan Konflik,walaupun gagal dalam menghalau para penyerang warga Desa Agom.

Selanjutnya, malam 27 Oktober 2012 beberapa wakil dari warga masyarakat Desa Agom kembali datang ke Desa Balinuraga dengan tujuan mencari pelaku. Namun yang terjadi, mereka disambut oleh ratusan warga Desa Balinuraga yang siap dengan senjata senapan angin dan senjata tajam. Kejadian tersebut mengakibatkan dua orang warga Desa Agom luka-luka dan satu sepeda motor dibakar oleh warga Desa Balinuraga.

Serangan balasan esok hari Minggu 28 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 WIB mengakibatkan dua orang warga Desa Agom meninggal dunia di tempat kejadian dan satu lagi meninggal di Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek Bandar Lampung. Siang harinya sekitar pukul 13.00 WIB juga melakukan serangankembali terhadap warga Desa Balinuraga. Serangan kali ini pun, disambut dengan tembakan senjata api laras pendek oleh warga Desa Balinuraga, sehingga mengakibatkan satu orang tewas tertembak di bagian kepala dan langsung dihakimi, serta dua orang terkena luka tembak di bagian kaki.

Tabel 2. Urut-urutan kejadian konflik

No	Fokus	Deskripsi dari	
		Tokoh Pemuda Ds. Agom	Tokoh Pemuda Ds. Balinuraga
1.	Urutan terjadinya kerusuhan/ konflik	Pemuda (warga tetangga) yang melakukan pelecehan terhadap pemudi	Pemuda Bali menolong dua gadis Lampung yang jatuh dari sepeda motor, namun pihak keluarga gadis menuduh pemuda tsb melakukan pelecehan seksual

2.	Pihak yang terlibat dalam kerusuhan/konflik	Pihak yang berkonflik (dominan warga) yang pernah tersakiti	Dua kubu pemuda Lampung dengan Bali karena kesalahpahaman
3.	Latar yang menyebabkan para pihak terlibat dalam kerusuhan/konflik	Pihak yang konflik memiliki perbedaan perilaku, norma dan ideologi.	Adanya perbedaan pandangan diantara kedua belah pihak, hanya emosional saja dan tidak ada hubungan dengan etnis atau ras
5.	Pola perilaku yang ditunjukkan para pihak terlibat dalam kerusuhan/konflik	Tidak ada perilaku atau tindakan tertentu yang menggerakkan konflik	Pemuda Bali dituduh berperilaku pelecehan seksual pada 27 Oktober 2012
7.	Gambaran mengenai konflik sebatas mengalahkan/ rasa dendam	Tidak saling menghargai (tidak adanya toleransi)	28 Okt 2012 (10.00 WIB) warga Lampung menyerang Desa Balinuraga, dilanjutkan serangan kedua (13.00 WIB) dan serangan ketiga pada 29 Okt 2012
8.	Gambaran mengenai konflik karena sumber kehidupan yang terbatas	Perilaku yang berbeda (tidak adanya norma)	Warga Bali lebih maju baik segi materi dibanding warga Lampung
9.	Gambaran mengenai perbedaan pikiran yang menyebabkan adanya pertentangan	Perbedaan sudut pandang/ tidak memiliki nilai norma (egoisme)	Ada kecemburuan sosial dari pihak lain
10.	Penerapan prinsip dan cara guna mencapai jalan keluar	Duduk bersama dan hilangkan rasa ego masing-masing	-
11.	Situasi dan kondisi saat sekarang ini yang dihadapi	Sangat kondusif	-

Sumber: Data Lapangan

Dengan memperhatikan beberapa korbanberjatuhan, maka untuk sementara waktu penyerangan dihentikan, di samping itu strategi yang tidak tersusun secara rapi. Penyerangan dilanjutkan esok hari Senin tanggal 29 Oktober 2012, warga Desa Agom yang mendapatkan dukungan dengan kekuatan massa sekitar 20.000 orang dari berbagai daerah di Lampung. Pada pukul 09.00 WIB, mereka warga Desa Agom dan massa pendukung berkumpul di lapangan sepak bola, dengan tujuan untuk bersama-sama melakukan penyerangan besar-besaran terhadap warga Desa Balinuraga.

Seiring sejalan dengan perilaku konfrontasi, sebenarnya tragedi konflik Balinuraga beranjak dari berbagai permasalahan warga masyarakat yang sebatin dan sebagai pernyataan sikap dukungan warga masyarakat Lampung Selatan terhadap pihak warga Desa Agom yang pernah bersinggungan dengan warga Bali Balinuraga maupun dengan warga Bali desa-desa lain pada tahun-tahun sebelumnya, seperti yang dituturkan oleh informan dari Kesbangpol Kalianda, diantaranya tahun 1982 perselisihan sekelompok pemuda Desa Sandaran dan Desa Balinuraga dengan pemicu rebutan calo agen biro perjalanan angkutan umum; tahun 2005 masyarakat Bali Agung Kecamatan Palas membakar beberapa rumah penduduk Desa Palas Pasemah, pemicu pertikaian antarpemuda di acara organ tunggal; tahun 2009 masyarakat Bali di Kecamatan

Ketapang menyerang dan melempari masjid di Desa Ruguk Kecamatan Ketapang karena kesal dan terganggu suara adzan masjid; tahun 2009 masyarakat Bali Agung menyerang Desa Palas Pasemah dan membakar beberapa rumah penduduk, pemicu perkelahian antarpelajar SMA; tahun 2010 masyarakat Bali dari Kecamatan Ketapang menyerang Desa Tetaan Kecamatan Penengahan, pemicu perkelahian antarpemuda Bali dan pemuda desa setempat; akhir tahun 2011 masyarakat Bali menyerang Desa Marga Catur dengan melakukan pembakaran belasan rumah warga Lampung, pemicu saling senggolan saat berjoget acara pernikahan dan terjadi perkelahian antarpemuda sampai ada korban tewas; Januari 2012 masyarakat Bali melakukan tindakan premanisme terhadap pemuda dari Desa Kotadalam, dan masyarakat Dusun Napal melakukan penyerangan terhadap Desa Kotadalam Kecamatan Sidomulyo, pemicu perselisihan masalah parkir; malam takbiran Idul Fitri tahun 2012 para pemuda Desa Balinuraga melakukan kerusuhan dan keonaran di depan masjid Sidoharjo Way Panji pada saat takbiran. Belum lagi yang termasuk insiden-insiden kecil lainnya, para pemuda Bali selalu melakukan kerusuhan secara berkelompok di setiap hajatan warga Jawa, Palembang maupun warga Lampung.

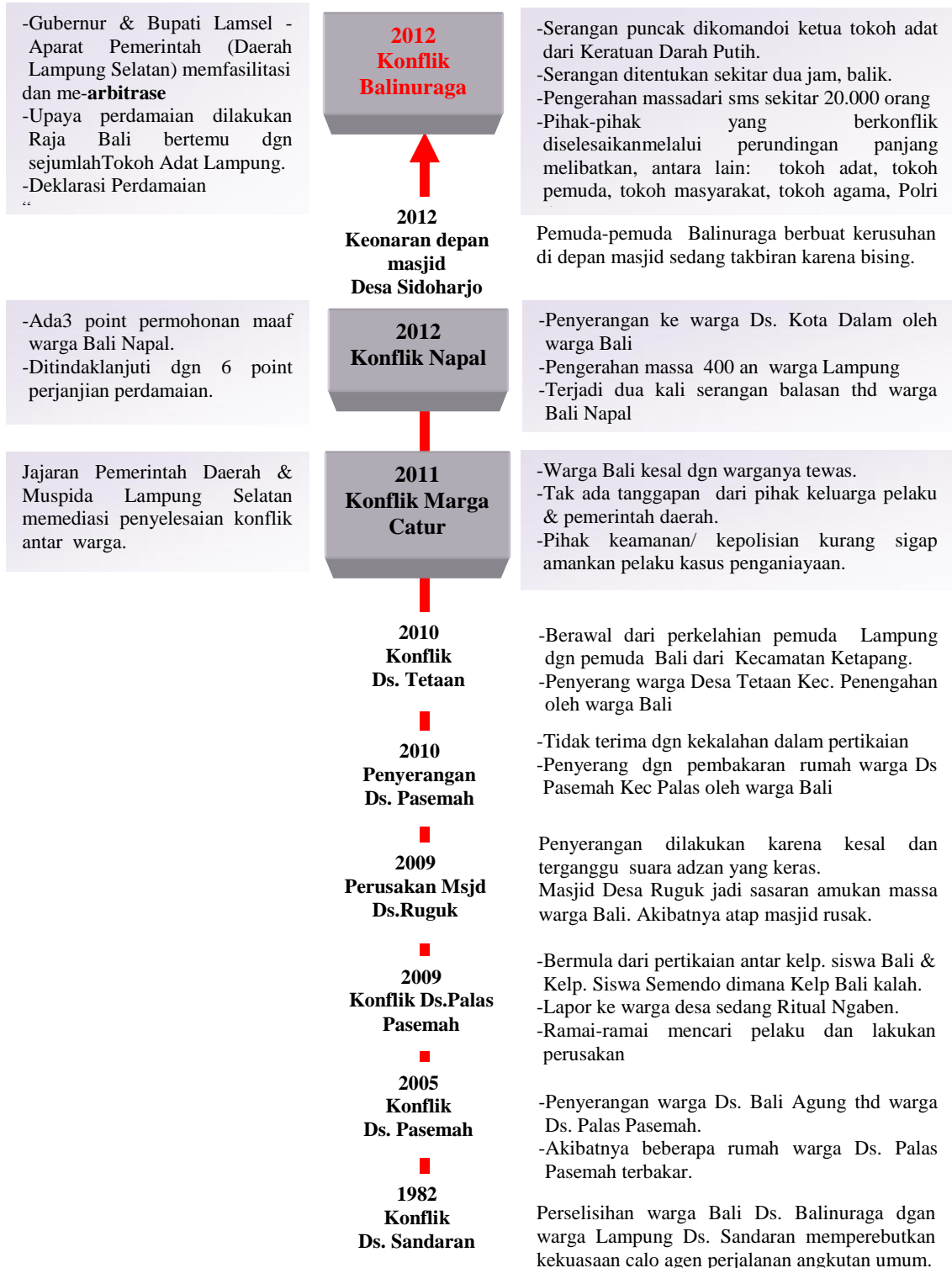
Selanjutnya, penulis berusaha memaparkan urut-urutan kejadian yang pernah bersinggungan dengan warga Bali Balinuraga maupun dengan warga Bali desa-desa lain pada tahun-tahun sebelumnya di Lampung Selatan, yang menunjukkan kejadian-kejadian berdasarkan tempat, waktu dan tahun kejadian, di mana urut-urutan kejadian tersebut merupakan daftar waktu dari tahun, bulan atau hari secara kronologis, dapat dilihat pada gambar 1 tentang Urut-Urutan Kejadian Persinggungan di Lampung Selatan.

Berdasarkan uraian tentang persinggungan atau konflik di masa lalu yang tidak pernah terselesaikan, maka dapat dikategorikan dalam insiden-insiden konflik kekerasan tergolong kecil selaras dengan pendapat Fisher (2001) dan dipertegas dengan adanya insiden-insiden konflik kekerasan tergolong besar, seperti konflik Desa Palas Pasemah tahun 2009, konflik Marga Catur tahun 2011, konflik Napal tahun 2012 dan konflik Balinuraga 2012. Berdasarkan persinggungan dalam bentuk insiden konflik dengan kekerasan yang tergolong kecil dan permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, di mana warga Desa Balinuraga dan warga Bali sekitarnya selalu melakukan tindakan premanisme terhadap warga-warga sekitarnya dengan menyerang dan membakar beberapa rumah penduduk.

Pada hal pada prinsipnya warga masyarakat Lampung Selatan bersikap menerima atas keberadaan mereka baik warga Bali maupun warga lainnya sebagai warga di wilayah Kabupaten Lampung Selatan asalkan dengan hidup berdampingan secara damai tanpa perselisihan, seperti yang dituturkan oleh informan dari Kesbangpol Kalianda. Namun, beranjak dari adanya insiden-insiden kekerasan tergolong kecil dan ditambah beberapa kali terjadi insiden konflik yang tergolong besar, maka meledaklah emosi warga Desa Agom dan warga masyarakat Lampung Selatan, sehingga terjadi tragedi konflik antarwarga Balinuraga. Berdasarkan kejadian konflik mulai dari kejadian-kejadian konflik sebelumnya dan "Tragedi Napal Januari 2012" di Sidomulyo Lampung Selatan, dimana warga Bali melakukan tindakan premanisme terhadap pemuda-pemuda Desa

Gambar 1. Urut-Urutan Kejadian Persinggungan di Lampung Selatan

Kejadian-kejadian penanganan oleh Pemerintah/Daerah Lampung Selatan Pihak-Pihak Yang Berkonflik



Kotadalam dengan menyerang dan membakar beberapa rumah penduduk Desa Kotadalam. Begitu pula dengan penyerangan yang dilakukan oleh warga Bali pada konflik Margacatur karena tidak ada niatan meminta maaf dari keluarga pelaku penusukan kepada keluarga korban, sedangkan dari pihak kepolisian tidak ada tanggapan dan kurang merespon kasus tersebut.

Beranjak dari kejadian baik insiden-insiden konflik yang tergolong kecil maupun besar tersebut, dan insiden gadis-gadis Agom jatuh dari motor dan diusuk terjadi pelecehan seksual oleh sekelompok pemuda Balinuraga sebagai pemicu konflik, membuat geram, emosi dan marah warga masyarakat Desa Agom khususnya warga masyarakat Lampung Selatan. Akhirnya pecahlah insiden konflik yang tergolong besar Konflik Balinuraga dengan beberapa kali penyerangan oleh warga Lampung Desa Agom dan dibantu oleh warga-warga yang pernah bersinggungan dengan warga Bali, bahkan dari luar Kabupaten Lampung Selatan.

Pada saat terjadi bentrokan konflik yang pertama, bentrokan konflik kedua dan seterusnya sampai pada tahap krisis, penulis menganalisis berdasarkan teori serta siapa saja yang berada di depan panggung saat bentrokan terjadi dan ada yang membuat skenario untuk melakukan bentrokan di balik panggung (*back stage*). Analisa Segitiga konflik dari Galtung dalam penulisan ini, bahwa suatu keadaan kontradiksi (K) dalam alam tak sadar bisa berupa frustrasi, pada saat suatu tujuan memperoleh rintangan yang mengarah pada sikap agresif (S) dan agresi sebagai perilaku (P), sehingga kekerasan melahirkan kekerasan. Masalahnya proses tersebut bisa jadi berawal dari (S) atau (P). Pada satu pihak warga Desa Balinuraga bisa jadi terdapat akumulasi sikap-sikap negatif (agresif) atau dengan kata lain ada kecenderungan perilaku negatif (kemampuan, kecenderungan selalu beragresi (P)), di mana mereka sebagai warga Bali Desa Balinuraga dan warga Bali Lampung Selatan dalam catatan kronologi kejadian pernah bersinggungan atau melakukan agresi sebagai perilaku (P) menentang atau konflik dengan warga desa-desa disekitarnya.

Selanjutnya, tanpa disadari oleh pihak warga Bali Desa Balinuraga dan warga Bali Lampung Selatan di saat bersikap agresi (S) dan melakukan agresi berperilaku (P) yang terjadi, baik S maupun P, sehingga muncul masalah baru. Apalagi sikap (S) dalam bentuk sikap agresif, disertai emosi permusuhan (sok arogan, tidak toleransi sok jagoan maunya menang sendiri) dan mendapat pengakuan negatif (dicap) oleh pihak lain sebagai lawannya (seperti warga Desa Agom), maka situasinya berubah menjadi energi konflik negatif yang terkait dengan kontradiksi, dan akibat akumulasi pengalaman di masa lalu yang getir, menyakitkan, kecewa dan dendam dari pihak warga Desa Agom dan massa simbolik dramaturgy Goffman di mana konflik yang terjadi diwakili oleh sikap dan perilaku dengan beberapa kali bentrokan bagaikan panggung sandiwara (*front stage*), pendukung yang sebatin sebagai warga Lampung Selatan, maka timbullah konflik.

Simpulan dan Saran

Kejadian dari tahap prakonflik yang mulai terjadi pada hari Sabtu dan malam harinya ada usaha dialog antara kedua kades dan orang tua pelaku penggoda. Namun dialog berlangsung nonkomunikatif, nonintensif dan nonkonsensus atas tuntutan ganti rugi yang dipimpin oleh Kades Balinuraga, sehingga dapat dikatakan tanpa disadari pengelolaan perseteruan melemah termasuk dalam menangani, mencegah dan meredakan konflik, yang kemudian menjadi konflik dan bahkan terjadi eskalasi konflik. Terjadi dua kali penyerangan pada hari Sabtu malam dan hari Minggu oleh pihak warga Desa Agom yang selalu kalah strategi dan kalah persenjataan, bila dibandingkan dengan warga Desa Balinuraga. Akhirnya hari Senin terjadilah serangan besar-besaran pada tahap krisis. Artinya, pada tahap konfrontasi seolah-olah hanya sebagai tumpuan endapan emosional

yang siap meledak untuk melangkah langsung ke tahap krisis tanpa fase yang lama, namun melalui penantian yang cukup panjang dengan berbagai insiden-insiden persinggungan konflik.

Berdasarkan persinggungan dalam bentuk insiden konflik dengan kekerasan dan permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, di mana warga Desa Balinuraga dan warga Bali sekitarnya selalu melakukan tindakan premanisme terhadap warga-warga sekitarnya dengan menyerang dan membakar beberapa rumah penduduk. Disamping itu, tidak ada niatan meminta maaf dari keluarga pelaku kepada keluarga korban, sedangkan dari pihak kepolisian tidak cepat tanggapan dan kurang merespon penanganan secara komprehensif dari setiap insiden yang terjadi.

Saran

Sebelum diakhiri dalam penulisan ini, diberikan beberapa saran untuk pengembangan dan kajian konflik antarwargadi suatu wilayah tertentu lebih lanjut dimasa yang akan datang sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dalam menangani insiden konflik janganlah bersifat insidental, yang suatu waktu dapat muncul kembali kejadian konflik. Maka dari itu, konflik hendaknya diselesaikan secara tuntas dengan menyerap berbagai aspirasi masyarakat yang berkonflik, bukannya bersifat *top-down*.
2. Lembaga Adat seharusnya sebagai penyeimbang adat lokal dan sebagai wadah pelestarian budaya, semestinya lebih berperan dalam menangani konflik-konflik yang sering muncul di Kabupaten Lampung Selatan. Dengan berfungsinya lembaga adat diharapkan dapat menjaga, meningkatkan, dan melestarikan budaya masing-masing pihak yang berkonflik.

Daftar Pustaka

- Burhanudin, dkk.(ed.). 1998. *Sistim Siaga Dini Untuk Kerusuhan Sosial*, Jakarta: Litbang Depag dan PPIM
- Creswell, John W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fanani, Yazid. 2001. *Penanggulangan konflik tawuran warga Matraman*, Tesis, Pascasarjana UI. Diakses melalui <<http://lib.ui.ac.id/opac/ui/>> tgl. 12 Januari 2015
- Faturochman dan Nuraeni. 2006. *Faktor Prasangka Sosial Dan Identitas Sosial Dalam Perilaku Agresi Pada Konflik Warga (Kasus Konflik Warga Bearland dan Warga Palmeriam Matraman Jakarta Timur)*, Sosiosains 2006, XIX(1)
- Fisher, Simon. 2001. *Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi untuk Bertindak* (edisi bahasa Indonesia), The British Council, Indonesia, Jakarta.
- Hartoyo. 2012. "Memutus Mata Rantai Konflik di Bumi Lampung" in Budiman, Budisantoso, dkk. *Merajut Jurnalisme Damai di Lampung* (Knitting Peace Journalism in Lampung). Penerbit Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung dan Indepth Publishing
- Hendrajaya, Lilik dkk. 2010. *Ragam Konflik di Indonesia: Corak Dasar dan Resolusinya*. Jakarta: Kementrian Pertahanan RI.
- Hasil Survey dari LSI 2012. Diakses melalui < <http://news.liputan6.com/read/473537/lsi-ini-5-kasus-kekerasan-paling-mengerikan-di-indonesia>> tgl. 21 Maret 2013.
- Jamil, M. Mukhsin. 2007. *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*, Walisongo Mediation Centre, Semarang.

- Lampung Post, Grafis, Lampung Post, Rabu 25 Januari 2012, No. 12330, Tahun XXXVII. Melalui, < <http://www.sicripps.ohio.edu/news/cmdd/artikelefhm>. diunduh tanggal 20 November 2009>
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael.1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Cet. 1, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Nasikun. 1984. *Sistem Sosial Indonesia*. Naskun, 1984. Sistem Sosial Indonesia. Rajawali Press. Jakarta
- Nuraeni, dan Faturochman. 2006. *Faktor Prasangka Sosial Dan Identitas Sosial Dalam Perilaku Agresi Pada Konflik Warga (Kasus Konflik Warga Bearland dan Warga Palmeriam Matraman Jakarta Timur)*,Jurnal Sosiosains 2006, XIX(1). Melalui <https://www.acrobat.com/en_us.html > tgl. 13 Juni 2012.
- Spencer, David & Brogan, Michael. 2006. *Mediation Law and Practice*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Susan, Novri. 2010. *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Tohari, Amien. dkk. 2011. *Dinamika Konflik dan Kekerasan di Indonesia*.Jakarta:Institut Titian Perdamaian
- Umar,Musni dan Erman Anom. 2011. “TAWURAN” di Johar Baru Jakarta Pusat, Juli-Agustus 2011.Laporan Penelitian. Melalui, <<http://musniumar.wordpress.com/2011/10/08/laporan-hasil-penelitian-tawuran-di-johar-baru/>>
- Undang Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2 012 tentang *Penanganan Konflik Sosial*. Melalui < https://www.acrobat.com/en_us.html> tgl. 11 Januari 2013.
- Wirawan. 2010. *Konflik Dan Manajemen Konflik*. Jakarta: Salemba Humanika
- Yara, Idawati H.M. 2002. *Konflik komunal di Jakarta : Studi kasus di kawasan Matraman, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur*, Tesis, Pascasarjana UI, 2002. Melalui <<http://lib.ui.ac.id/opac/ui/>> tgl. 12 Januari 2015
- Yulianto. 2011. *Membali di Lampung (Studi Kasus Identitas Kebalian di Desa Balinuraga Lampung Selatan)*, Widya Sari Press

PROSES DAN UPAYA MEMBANGUN PERDAMAIAN “MENCAPAI KESEPAKATAN UNTUK MEMBANGUN PERDAMAIAN SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PEMENUHAN HAK BERIBADAH”

Ikram

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
Email: ikram_badila@yahoo.com

Pada 8 September 2004, anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) bentrok dengan warga di Dusun Banjarrejo, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Bentrok terkait dengan perusakan/dirobohkannya masjid LDII. Pertengkarannya dengan senjata tajam menyebabkan seorang warga (non LDII) bernama Suhaimi (50 tahun) tewas dengan luka bacok di kepala, sedangkan 13 orang lainnya luka-luka.

Masalah dan Penyelesaian

Insiden berawal dari rencana pembangunan masjid dengan ukuran 17 x 17 meter di luar bangunan lama dengan alasan bangunan masjid yang ada (ukuran 7 x 12 meter) kurang dapat menampung seluruh jamaah LDII, di samping kondisi rusak serta landasan bangunan kurang memenuhi persyaratan teknis. Namun pada pertengahan pelaksanaannya terjadi kesalahpahaman/ miskomunikasi antara pihak pelaksana pembangunan masjid LDII Banjarrejo dengan pihak warga masyarakat non LDII setempat yang mengakibatkan konstruksi bangunan masjid pada saat persiapan pelaksanaan naik kap terjadi insiden hingga mengakibatkan robohnya konstruksi bangunan.

Warga protes terhadap LDII. Masyarakat mempertanyakan rencana pembangunan masjid yang hanya boleh digunakan anggota kelompok yang sealian dengan LDII. Padahal, kurang lebih 100 (seratus) meter dari lokasi rencana pembangunan masjid LDII sudah ada masjid yang selama ini biasa digunakan warga untuk beribadah. Warga khawatir, LDII bermaksud mengeksklusifkan diri dan tidak mau bergabung dengan jamaah Islam lainnya. Warga juga menuduh masjid LDII hanya boleh dipergunakan oleh kelompoknya.

Perang mulut antara warga dan pendukung aliran LDII berubah menjadi kontak fisik. Bahkan, para anggota LDII sudah menyiapkan golok dan senjata tajam lainnya. Personel Kepolisian Sektor Natar dan Komando Rayon Militer setempat gagal meredam pertengkarannya. Menurut Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan Ajun Komisaris Besar Polisi Budi Susanto, pertengkarannya warga non LDII dan LDII sudah muncul sejak 1998.

Sebanyak 68 warga yang terlibat bentrokan di Dusun Banjarrejo, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, ditangkap. Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan Budi Susanto mengatakan, warga yang ditahan sebagian besar pengikut LDII dari desa lain yang membantu umat LDII Desa Banjarrejo saat bentrokan. Selain itu, polisi juga menyita 28 kendaraan bermotor yang digunakan warga saat kerusuhan. Sementara warga Banjarrejo terus merazia rumah yang diduga milik pengikut LDII.

Dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) tahun setelah terjadi permasalahan tahun 2004 dan mengingat pihak LDII memerlukan pelaksanaan rehab/pelebaran bangunan masjid, maka pada tahun Maret 2006 pihak LDII kembali merencanakan dan melaksanakan pembangunan pondasi dan tiang pancang/cor dengan ukuran 14 x 14 meter dengan lokasi di tempat bangunan lama, namun dalam pertengahan perjalanan pelaksanaannya, pembangunan masjid terhenti dengan adanya perselisihan atau kesalahpahaman yang sama dengan pihak warga non LDII setempat. Kejadian ini oleh aparat keamanan, pada 18 Maret 2006, diupayakan penyelesaian antara warga LDII dan

non LDII terkait upaya rencana meneruskan pembangunan (perluasan) masjid LDII. Hal ini untuk menyikapi keresahan warga akan kejadian tahun 2004 terulang kembali. Pihak LDII bersikeras meneruskan pembangunan masjid dengan alasan mereka memiliki akidah yang berbeda dengan warga non LDII. Namun, rencana meneruskan pembangunan masjid tidak dapat dilanjutkan karena penolakan warga dengan alasan masjid yang rencana dibangun sangat berdekatan atau sudah ada masjid yang ada didekat rencana pembangunan masjid LDII.

Pada Mei 2007, rencana pembangunan masjid dimulai lagi oleh pihak LDII dengan membangun pondasi dan tiang pancang dengan ukuran 14 x 14 m dan menimbulkan keresahan berulang di masyarakat. Muncul perdebatan kedua belah pihak dan pada 12 Juni 2008 ada kesepakatan dari pihak LDII untuk menunda kelanjutan pembangunan masjid dan menunggu persetujuan dari pihak masyarakat non LDII. Selanjutnya, pada 13 Juni 2008 terjadi lagi perdebatan, warga non LDII diwakili oleh Kadus Banjarejo menyampaikan bahwa LDII bukannya rehab melainkan membangun masjid baru dengan ukuran 14 x 14 m. Pihak masyarakat non LDII selanjutnya memberikan kebijakan/kelonggaran kepada pihak LDII bila hanya melaksanakan Pelebaran Pembangunan Masjid maka masyarakat hanya menolerir pada kelebaran 1 atau 2 meter.

Dari uraian di atas, diperoleh pemahaman permasalahan konflik pembangunan masjid LDII, di antaranya: (1) Adanya perbedaan pemahaman tentang ajaran agama (keyakinan) di elit pengurus/pengasuh 2 kelompok (LDII dan Non LDII) yang menimbulkan perselisihan akan ide/gagasan membangun masjid; (2) didasari adanya perselisihan yang berkepanjangan dan timbul persaingan serta muncul ego masing-masing di tingkat pengasuh/pengurus serta kurang rasa saling menghormati; (3) pengurus kelembagaan yang ada kurang memahami dalam menerapkan manajemen kelembagaan sehingga dalam menjalankan kepengurusan menimbulkan ketidakpuasan pada pihak pamong yang ada (hal ini memperuncing ketidakpuasan/ketersinggungan pihak lain).

Proses dan Upaya Penyelesaian Kembali

Pada Selasa, 4 Januari 2011 atas inisiatif Camat Natar (Dra. Bayana, M.Si) diselenggarakan pertemuan USPIKA Natar bersama staf terkait yang dihadiri oleh Kepala Desa Merakbatin bertempat di Kantor Camat Natar. Dari hasil pertemuan antar USPIKA (04 Januari 2011) sepakat diperlukannya klarifikasi atas surat rencana meneruskan pembangunan masjid yang disampaikan pihak LDII karena maksud surat tersebut tidak jelas akan detail rencana pembangunan masjid. Pada hari yang sama (4 Januari 2011), pukul 14.00 WIB, Camat Natar mengadakan pertemuan dengan pihak LDII (Ketua PC. LDII dan sekretaris) untuk menyarankan agar surat dilengkapi dengan detail Rencana Pembangunan Masjid. Pertemuan dilaksanakan di kantor kecamatan dan dihadiri oleh Kapolsek, Danramil, dan KUA.

Pada 7 Januari 2011 pihak LDII (Ketua PC. LDII dan sekretaris) menghadap Camat Natar menyerahkan surat permohonan izin pembangunan masjid lengkap dengan detail perencanaan. Pada pertemuan tersebut pihak pengurus LDII – Kecamatan Natar menyampaikan permohonan maaf atas kelemahan dan kekurangan terkait dengan kepengurusan kelembagaan LDII di tingkat Kecamatan Natar. Menyadari atas kelemahan dan kekurangan manajemen kepengurusan terdahulu, pihak LDII melalui kepengurusan baru mohon maaf kepada warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Banjarejo. Di samping itu juga, pihak LDII menginformasikan bahwa kepengurusan LDII Kecamatan Natar telah dilakukan perubahan/pergantian. Perubahan ini dimaksud untuk membangun/pengembalian citra LDII agar lebih baik untuk waktu yang akan datang. Selanjutnya, pihak LDII menyatakan tidak akan melanjutkan pelaksanaan pembangunan masjid dan akan menunggu sampai adanya kesepakatan dari pihak warga.

Upaya lain yang dilakukan oleh pihak LDII untuk mempercepat penyelesaian, di antaranya menyatukan pemuda kedua belah pihak yang ada di Dusun Banjarejo untuk menjalin kebersamaan melalui peran serta dalam kegiatan olah raga (sepak bola). Pihak LDII menggagas untuk melakukan islah, demi untuk menciptakan suasana kondusif di Dusun Banjarejo menjadi aman dan damai, saling menghormati serta kerukunan umat tetap terjalin. Berbagai upaya dilakukan pihak LDII dengan harapan mudah-mudahan pihak warga masyarakat (Non LDII) dapat segera memberikan izin, mengingat jamaah LDII yang ada di Dusun Banjarejo sangat membutuhkan masjid, sebagai sarana/tempat ibadah.

Pada Rabu, 12 Januari 2011 diadakan pertemuan dengan tokoh warga masyarakat non LDII di ruang kantor Camat Natar dan hasil pertemuan, sebagai berikut: (1) warga masyarakat (Non LDII) secara umum menyampaikan ketidakpuasan pada pihak LDII di Dusun Banjarejo, Desa Merakbatin dengan menyampaikan: (a) pengurus LDII tingkat kecamatan maupun desa/dusun jarang melakukan komunikasi tentang kegiatan yang dilaksanakan dilingkungannya (merasa kurang menghargai terhadap institusi pemerintahan yang ada di desa/dusun); (b) warga masyarakat merasa dibohongi atas tindakan pihak LDII yang tidak mempertimbangkan apa yang menjadi harapan dan keinginan warga masyarakat banyak, misal: pada tahun 2008 diberi toleransi/kebijakan pelebaran 1 - 2 meter, kenyataannya mereka melaksanakan pembangunan 14 x 14 meter yang semula hanya 7 x 12 meter. (2). warga masyarakat tidak memberi izin pengurus LDII Kecamatan Natar melaksanakan pelebaran bangunan, dan tidak akan mempermasalahkan melaksanakan pembangunan pada areal/ukuran bangunan masjid lama bila rencana pembangunan dilebarkan pada koridor kelebaran 1 - 2 meter.

Warga masyarakat merasa jenuh untuk melakukan pertemuan-pertemuan terkait dengan permasalahan bangunan masjid LDII, hal ini disebabkan seringnya pertemuan sejak tahun 2006 namun kasus ini tidak selesai-selesai. Kepala desa, Kadus, RT dan warga yang hadir akan mencoba untuk melaksanakan pendekatan kepada warga masyarakat banyak tentang rencanan kelanjutan pembangunan masjid. Namun pelaksanaan jangan diminta terburu-buru, mengingat banyak warga masyarakat yang ada keterkaitan hubungan keluarga dengan pihak korban yang hingga saat ini memiliki rasa dendam atas terjadinya kasus tahun 2004. Di samping jenuh, berlarut-larutnya penyelesaian ini dikarenakan banyaknya hubungan keluarga yang berada pada dua pihak, sehingga proses penyelesaian tidak hanya semata-mata masalah pembangunan masjid, tapi perbedaan keyakinan yang perlu saling memahami dan memaklumi (perlu pembinaan pola pikir) yang mengarah pada hak, kewajiban, tanggung jawab dan perlu dijaga sama-sama.

Demi kepentingan jamaah LDII di Dusun Banjarejo dalam melaksanakan ibadah, masjid harus dibangun yang dalam pelaksanaannya memperhatikan apa yang menjadi aspirasi warga/masyarakat umum. Semua pihak dapat menyikapi permasalahan dengan bijak, perbedaan sudut pandang, persepsi, harapan dan keinginan merupakan dinamika dalam kehidupan, yang pada akhirnya semua pihak sepakat mengutamakan kepentingan bersama dan kebaikan bersama dalam menata serta menciptakan kondisi lingkungan yang aman, nyaman, tertib, terkendali, saling menghargai, memaklumi dan tenggang rasa untuk saling menghormati.

Hasil Kesepakatan Difasilitasi/mediasi oleh USPIKA (18 Januari 2011 dan 14 Maret 2011)

Pihak pengurus LDII – Tingkat Kabupaten Lampung Selatan dan Kecamatan Natar melalui unsur pelaksana pembangunan masjid LDII-Dusun Banjarejo-Desa Merakbatin menyatakan akan melaksanakan pembangunan masjid yang terletak di Dusun Banjarejo, sesuai dengan persetujuan (izin lingkungan) dari pihak warga masyarakat umum Dusun Banjarejo, Desa Merak batin. Pernyataannya sebagai berikut: Pihak

manajemen LDII akan melaksanakan pembangunan masjid LDII di Dusun Banjarejo dengan ukuran/luasannya 7 x 12 meter (bangunan lama), ditambah ruang teras tanpa dinding pada kelebaran kurang lebih 2 (dua) meter, dengan bangunan konstruksi tidak meningkat.

Pihak warga masyarakat umum, Dusun Banjarejo, Desa Merakbatin menyatakan telah memberikan persetujuan (izin lingkungan) kepada pihak manajemen pengurus LDII untuk melaksanakan pembangunan masjid LDII di Dusun Banjarejo, Desa Merakbatin. Adapun simpulan hasil musyawarah sebagai berikut:

1. Pihak Pengurus LDII Tingkat Kabupaten Lampung Selatan dan Kecamatan Natar melalui Unsur Pelaksana Pembangunan Masjid LDII Dusun Banjarrejo, Desa Merak Batin “Menyatakan akan Melaksanakan Pembangunan Masjid” sesuai dengan Persetujuan (Ijin Lingkungan) dari pihak warga masyarakat umum Dusun Banjarejo, Desa Merakbatin.
2. Pihak warga masyarakat umum Dusun Banjarejo, Desa Merakbatin “Menyatakan Telah Memberikan Persetujuan (Ijin Lingkungan) kepada pihak Pelaksana Pembangunan Masjid LDII Dusun Banjarrejo, Desa Merak Batin.
3. Isi pernyataan sebagai berikut: (a) pihak Pelaksana Pembangunan Masjid LDII akan melaksanakan pembangunan masjid LDII dengan ukuran/luasannya 7 x 12 meter (bangunan lama) ditambah Ruang Teras tanpa dinding pada kelebaran 2 meter dengan bangunan konstruksi tidak meningkat; (b) pihak Pelaksana Pembangunan Masjid LDII dan warga masyarakat umum Dusun Banjarrejo, Desa Merak Batin sepakat apabila ada perubahan atas apa yang telah disepakati semua pihak wajib melalui musyawarah untuk mendapatkan mufakat/kesepakatan bersama.
4. Pihak Pelaksana Pembangunan Masjid LDII dan warga masyarakat umum Dusun Banjarrejo, Desa Merak Batin sepakat untuk senantiasa menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dikemudian hari melalui musyawarah untuk mufakat melalui jalur mediasi pihak USPIDA Kabupaten Lampung Selatan dan USPIKA Kecamatan Natar beserta lembaga-lembaga terkait lainnya.
5. Pihak Pelaksana Pembangunan Masjid LDII manajemen LDII dan warga masyarakat umum Dusun Banjarrejo, Desa Merak Batin beserta seluruh pihak-pihak terkait yang menandatangani kesepakatan ini menyatakan bahwa pada saat pembuatan dan penandatanganan kesepakatan ini dalam keadaan sadar dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Kini, pembangunan masjid LDII Dusun Banjarrejo, Desa Merak Batin telah selesai dan diberi nama *Al-Bayyan* sebagai penghormatan atas upaya Camat Natar (Ibu Bayanah) melakukan resolusi dan rekonsiliasi bentrok warga LDII dan Non LDII. Selanjutnya, dalam rangka menjaga dan membangun perdamaian di wilayah-wilayah konflik di Kabupaten Lampung Selatan dibentuklah Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil (OMS), di antaranya Serikat Perempuan Lampung Selatan (Sepalas), Pemuda Cinta Budaya (PCB) Lampung Selatan, dan Pusat Konflik dan Konflik Resolusi (CCR) Provinsi Lampung. Upaya-upaya yang dilakukan OMS di antaranya pendidikan, pengorganisasian, dan advokasi untuk pemajuan, pemenuhan, dan penegakkan Hak Perdamaian dan Pembangunan – hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, hak beragama, hak berkumpul, hak berserikat, dan hak mendapatkan kedamaian. Bentuk – bentuk promosi nilai-nilai damai, salah satunya, dilakukan melalui karya media *on line* kerjasama CCR dan iPlural Indonesia yang dapat dilihat dalam Perempuan Lampung Berdamai (<https://www.youtube.com/watch?v=aAufn9jDgWE>), *Piil Pesenggiri* (https://www.youtube.com/watch?v=jSX1X5aGJ_Y), dan menyusun *Handbook iPlural: Internet, Peace, and Diversity* (<http://www.iplural.org/2016/05/handbook-iplural-internet-peace-and-diversity/>).

Kegiatan <i>Peace Building</i> Warga LDII dan Non LDII difasilitasi oleh:			
Nama	Uraian Tugas	Output	Keterangan
Drs. Ikram, M.Si	Fasilitator FGD	Terpandunya pelaksanaan FGD dengan partisipasi aktif peserta.	Dibantu oleh Camat Natar
Soegianto, S.Th	Notulensi Proses FGD	Tercatatnya hasil pelaksanaan FGD; Terselenggaranya Catatan Kronologis Konflik Penganut Agama di Kec. Natar	
Drs. Sigit K, M.Si	Koordinasi Administrasi Pelaksanaan dengan Kec. Natar dan Dokumentasi	Terdokumentasi administrasi pendukung sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan FGD; Terdokumentasi foto-foto atau bukti pelaksanaan kegiatan.	
Tujuan	Dalam rangka Focus Group Discussion dan <i>probing</i> (penggalian) informasi Kronologis Konflik antar Penganut Agama Islam (LDII dan Non LDII) di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka pemetaan konflik sosial di Lampung		
Peserta FGD	Peserta FGD sebanyak 25 orang (Tim FGD sebanyak 3 orang), Aparat Kecamatan dan Desa sebanyak sebanyak 4 orang, 1 orang Babinsa, 1 orang Babinkamtibmas, dan Korban Konflik (warga LDII dan Non LDII) sebanyak 16 orang.		
Hasil	Terlaksananya FGD dengan peserta FGD sebanyak 25 orang; Terumuskannya Kronologis Konflik Antar Penganut Agama (LDII dan Non LDII) di Kecamatan Natar yang diperoleh dari peserta FGD atau hasil FGD; Terpetakan anatomi konflik, proses penyelesaian, keberlangsungan proses penyelesaian, dan upaya-upaya menjaga perdamaian.		

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TERTINGGAL
MELALUI PEMANFAATAN LIMBAH ALAM
(STUDI KASUS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TANJUNG
KARYA MELALUI PEMANFAATAN LIMBAH ECENG GONDOK DI
KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT)**

Ilham Gemiharto

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Jatinangor 45363
Email: Ilham265@gmail.com

Abstrak

Masalah pemberdayaan desa tertinggal bukan lagi hanya menjadi masalah pemerintah setempat namun sudah menjadi masalah nasional. Oleh karenanya berbagai pihak terkait berupaya mengentaskan desa-desa tersebut dari ketertinggalannya. Upaya pemberdayaan desa seringkali identik dengan proyek pembangunan yang berbiaya besar. Namun ternyata upaya pemberdayaan juga dapat dilakukan nyaris tanpa biaya, yaitu melalui pemanfaatan limbah alami yang berlimpah di desa tersebut.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat desa tertinggal melalui pemanfaatan limbah alami. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen serta teknik analisis data deskriptif, dengan informan penelitian adalah para pemangku kepentingan, pemerintah lokal, dan anggota masyarakat desa tertinggal serta beberapa pihak terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat desa tertinggal dapat dilaksanakan bahkan dengan cara memanfaatkan limbah alami yang banyak terdapat di desa tersebut. Melalui proses pendampingan yang tepat, masyarakat desa tertinggal dapat dientaskan dari ketertinggalannya.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Desa Tertinggal, Limbah Alami, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Pendahuluan

Ketimpangan pembangunan antar wilayah telah menghasilkan suatu konsekuensi berupa pemusatan hasil pembangunan pada sebagian wilayah yang dapat berimplikasi pada terbentuknya daerah yang relatif tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lain. Pada sisi lain dari wilayah maju muncul pula apa yang disebut sebagai wilayah tertinggal. RPJMN 2015-2019 menyatakan terdapat 122 kabupaten tertinggal, dimana persebaran daerah tertinggal terkonsentrasi di kawasan Indonesia bagian timur, dimana 103 kabupaten atau 84,42 persen dari 122 jumlah daerah tertinggal terdapat di Kawasan Timur Indonesia.

Sejauh ini berbagai upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antardaerah baik secara langsung maupun tidak langsung, baik yang berbentuk kerangka regulasi maupun kerangka anggaran telah dilakukan. Beberapa kebijakan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah, antara lain melalui pelaksanaan transmigrasi, pengembangan pusat pertumbuhan (growth poles) secara tersebar, dan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan kesenjangan antara kota-desa. Karena tujuan dari lahirnya Undang-undang ini antara lain adalah untuk memajukan perekonomian masyarakat di pedesaan, mengatasi kesenjangan pembangunan kota dan

desa, memperkuat peran penduduk desa dalam pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hak dan wewenang diberikan kepada desa termasuk pendanaannya yang dialokasikan khusus dari APBN untuk Desa, disamping sumber pendapatan lainnya.

Kegiatan pengembangan masyarakat desa bertujuan untuk mengembangkan suatu kelompok tertentu di suatu daerah. Pengembangan masyarakat tersebut biasa dikenal dengan istilah pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat. Ada beberapa definisi mengenai konsep pemberdayaan. Menurut Ife (dalam Martono, 2011) mendefinisikan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai proses menyiapkan masyarakat dengan berbagai sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan memengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Sedangkan Kartasmita (1995), mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Intinya bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang mandiri dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Setiap daerah memiliki potensi yang apabila dimanfaatkan dengan baik akan membantu meningkatkan kualitas hidup mereka dan melepaskan diri dari keterbelakangan dan ketergantungan. Masyarakat memiliki peranan penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat tersebut, karena masyarakat merupakan subyek dari pemberdayaan. Jadi pemberdayaan masyarakat tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro, 2002). Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukan hanya obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (*agen* atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (*kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya*) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (*kewajiban*) negara secara *given*. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro, 2002).

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan ketertinggalan, kesenjangan, ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi atau layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (*kebijakan*) dan kultural (Sunyoto, 2004)

Komunikasi pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses komunikasi yang bertujuan menumbuhkan motivasi dan memberikan kesempatan pada masyarakat dengan jalan membuka saluran - saluran komunikasi sehingga masyarakat dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik melalui pemanfaatan dan peningkatan kemampuan yang mereka miliki dan sekaligus menempatkan mereka sebagai stakeholder aktif. Dalam proses

komunikasi tersebut perlu dilakukan pendekatan pemberdayaan masyarakat agar proses dan tujuan komunikasi yang direncanakan dapat tercapai, seperti pengembangan akses teknologi dan pengembangan solidaritas antar masyarakat atau stakeholder didalamnya.

Masalah pemberdayaan desa tertinggal bukan lagi hanya menjadi masalah pemerintah setempat namun sudah menjadi masalah nasional. Oleh karenanya berbagai pihak terkait berupaya mengentaskan desa-desa tersebut dari ketertinggalannya. Upaya pemberdayaan desa seringkali identik dengan proyek pembangunan yang berbiaya besar. Namun ternyata upaya pemberdayaan juga dapat dilakukan nyaris tanpa biaya, yaitu melalui pemanfaatan limbah alami yang berlimpah di desa tersebut.

Masyarakat desa Tanjungkarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat selama ini hidup dalam ketertinggalan dengan hanya mengandalkan pekerjaan sebagai buruh tani atau menangkap ikan di danau maupun sungai yang melintasi desa tersebut. Namun melalui upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan limbah eceng gondok yang berlimpah di desa tersebut, kini masyarakat desa tersebut dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomiannya.

Metode Penelitian

Penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat desa tertinggal melalui pemanfaatan limbah alam ini menggunakan metodologi kualitatif. Metode analisis penelitian ini yang digunakan adalah analisis studi kasus berdasarkan metode, data, dan triangulasi sumber. Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui penelitian dokumen dan penelitian lapangan berupa observasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan hasil observasi dan wawancara dengan 15 informan penelitian di lokasi penelitian, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari situs-situs berita online (website), jurnal-jurnal ilmiah, serta buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, penelitian ini secara praktis berusaha untuk mengkaji peristiwa kehidupan yang nyata yang dialami oleh subjek penelitian ini secara holistik dan bermakna. Dalam uraian yang lebih lugas, penelitian ini berusaha untuk memberikan deskripsi dan eksplanasi terhadap pemberdayaan masyarakat desa tertinggal melalui pemanfaatan limbah alami.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Miles & Huberman (2012: 20) yaitu *interactive model* yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu Reduksi data (*Data Reduction*), Penyajian data (*Display Data*), dan Pengujian Keabsahan Data (*Verifikasi*). Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut (Moleong, 2007: 330).

Lokasi penelitian ini mengambil lokasi di Desa Tanjungkarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut yang menjadi domisili informan penelitian. Di wilayah yang menjadi lokasi penelitian, peneliti mewawancarai para pemangku kepentingan, pemerintah lokal, dan anggota masyarakat desa tertinggal serta beberapa pihak terkait yang dipilih secara acak (*random*). Sehingga dalam penelitian ini terdapat 10 informan penelitian, yang terdiri dari 2 (orang) orang pemangku kepentingan, 2 (dua) orang pejabat pemerintahan lokal, 5 (lima) orang warga masyarakat, dan seorang pemuka agama.

Untuk melaksanakan tahapan Triangulasi tim peneliti mewawancarai seorang pakar dan praktisi bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang dinilai menguasai permasalahan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Kabupaten Garut terletak di Provinsi Jawa Barat bagian Tenggara pada koordinat 6°56'49 - 7°45'00 Lintang Selatan dan 107°25'8 - 108°7'30 Bujur Timur. Kabupaten Garut memiliki luas wilayah administratif sebesar 306.519 Ha (3.065,19 km²) dengan batas-batas sebagai berikut, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang, di Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya, di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.

Kabupaten Garut yang secara geografis berdekatan dengan Kota Bandung sebagai ibukota provinsi Jawa Barat, merupakan daerah penyangga dan hinterland bagi pengembangan wilayah Bandung Raya. Oleh karena itu, Kabupaten Garut mempunyai kedudukan strategis dalam memasok kebutuhan warga Kota dan Kabupaten Bandung, sekaligus berperan di dalam pengendalian keseimbangan lingkungan.

Secara umum iklim di wilayah Kabupaten Garut dapat dikategorikan sebagai daerah beriklim tropis basah (humid tropical climate) karena termasuk tipe Af sampai Am dari "klasifikasi iklim Koppen". Berdasarkan studi data sekunder, iklim dan cuaca di daerah Kabupaten Garut dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu pola sirkulasi angin musiman (monsoonal circulation pattern), topografi regional yang bergunung-gunung di bagian tengah Jawa Barat; dan elevasi topografi di Bandung. Curah hujan rata-rata tahunan di sekitar Garut berkisar antara 2.589 mm dengan bulan basah 9 bulan dan bulan kering 3 bulan, sedangkan di sekeliling daerah pegunungan mencapai 3500–4000 mm. Variasi temperatur bulanan berkisar antara 24 °C - 27 °C. Besaran angka penguap keringatan (evapotranspirasi) menurut Iwaco-Waseco (1991) adalah 1572 mm/tahun. Selama musim hujan, secara tetap bertiup angin dari Barat Laut yang membawa udara basah dari Laut Cina Selatan dan bagian barat Laut Jawa. Pada musim kemarau, bertiup angin kering bertemperatur relatif tinggi dari arah Australia yang terletak di tenggara.

Bentang alam Kabupaten Garut Bagian Utara terdiri dari atas dua aransemen bentang alam, yaitu: (1) dataran dan cekungan antar gunung berbentuk tapal kuda membuka ke arah utara, (2) rangkaian-rangkaian gunung api aktif yang mengelilingi dataran dan cekungan antar gunung, seperti komplek G. Guntur - G. Haruman - G. Kamojang di sebelah barat, G. Papandayan - G. Cikuray di sebelah selatan tenggara, dan G. Cikuray - G. Talagabodas - G. Galunggung di sebelah timur. Bentang alam di sebelah Selatan terdiri dari dataran dan hamparan pesisir pantai dengan garis pantai sepanjang 80 km.

Kabupaten Garut, merupakan salah satu kabupaten penting di Jawa Barat yang kaya akan sumber daya alam. Walaupun demikian, Kabupaten Garut dalam konteks pembangunan lebih dikenal sebagai salah satu daerah tertinggal di Provinsi Jawa Barat. Diperlukan strategi dan upaya pengembangan ekonomi daerah yang tepat agar kemakmuran bagi masyarakat Kabupaten Garut dapat segera diwujudkan melalui pengelolaan sumberdaya yang dimilikinya. Upaya untuk meningkatkan kemakmuran bagi masyarakatnya melalui pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Garut yang tentunya memerlukan kerjasama diantara pemangku kepentingan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya perkuatan ekonomi lokal yang dapat dilaksanakan di desa-desa yang masih tertinggal. Upaya ini tidak terlepas dari wilayah-wilayah di sekitar desa-desa tersebut. Diperlukan suatu kegiatan yang cukup inovatif tanpa biaya yang besar namun mampu memberikan dampak ekonomi yang luas.

Setelah melakukan survey potensi sumber daya alam di Desa Tanjungkarya Kecamatan Samarang, akhirnya masyarakat dan pemangku kepentingan menyepakati untuk memanfaatkan limbah eceng gondok yang banyak tersedia di desa tersebut. Bahkan

keberadaan eceng gondok ini sudah sampai taraf mengganggu karena menutupi danau-danau (situ) yang banyak terdapat di desa tersebut.

Selama ini Eceng Gondok (*Eichhorniae Crassipes*) dikenal sebagai gulma air yang tidak berguna. Namun di balik itu ternyata batang eceng gondok juga memiliki banyak manfaat yang tidak diketahui sebelumnya. Melalui pengolahan secara kreatif dan terampil, Eceng Gondok apabila diolah dengan benar dapat memberikan nilai tambah. Untuk menguasai keterampilan tersebut, masyarakat mengundang seorang ahli desain dengan berbahan eceng gondok dari Bogor. Melalui kegiatan pelatihan dan fasilitasi selama seminggu penuh, masyarakat desa Tanjung Karya akhirnya dapat menguasai keterampilan memanfaatkan limbah Eceng Gondok menjadi barang kerajinan yang bernilai ekonomis. Sekitar 20 orang warga masyarakat desa Tanjung Karya difasilitasi untuk membentuk kelompok Pengrajin Eceng Gondok yang diketuai oleh Bapak Usep Dedi (43 tahun), dan sebagian besar merupakan ibu rumah tangga.

Teknik pengolahan Eceng Gondok dimulai dengan mengangkatnya dari permukaan danau kemudian dikeringkan airnya. Setelah dipisahkan dari daunnya, batang Eceng Gondok dibelah tiga kemudian dijemur di bawah sinar matahari hingga kering selama tiga hari sampai dengan satu minggu. Daun Eceng Gondok sendiri bisa dijual di pasar atau dikonsumsi sebagai sayur atau tumis Eceng Gondok.

Eceng Gondok yang sudah kering kemudian dipilin menjadi tali yang kuat dan tidak mudah putus. Masing-masing anggota kelompok dapat mengolah Eceng Gondok menjadi tali sesuai kemampuannya. Setiap ikat yang terdiri dari 100 buah tali dihargai Rp. 4000,-/ikat oleh Rian, seorang Pengrajin Paper Bag dari Desa Sirnasari, Kecamatan Samarang.

Setiap anggota kelompok yang sebagian besar terdiri dari ibu rumah tangga dapat membuat sekitar 200 hingga 300 ikat tali eceng gondok per bulan. Sehingga dalam sebulan setiap anggota kelompok memiliki penghasilan dari membuat tali Eceng Gondok sebesar Rp. 800.000,- sd. Rp. 1.200.000,- per bulan.

Saat ini kelompok pengrajin eceng gondok anggotanya sudah berjumlah 50 orang. Kegiatan kelompok pun sudah berkembang tidak hanya memproduksi tali dari eceng gondok, tetapi sudah bisa mengimprovisasi produk untuk menghasilkan produk baru dengan bahan baku menggunakan tali eceng gondok, misalnya membuat pot, cendera mata, topi, tatakan, tas dan lain-lain. Meskipun teknik perekatan dalam pembuatan produk kerajinan masih kurang sempurna, namun produk kerajinan eceng gondok sudah mulai diminati oleh masyarakat dari desa sekitar.

Dengan bahan baku yang tersedia berlimpah di lingkungan sekitar mereka, melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Tanjungkarya dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Kini para ibu rumah tangga tidak khawatir lagi jika uang kiriman bulanan dari suami mereka yang merantau di Jakarta terlambat datang.

Mengingat potensi ekonomis yang tinggi dari Eceng Gondok ini, rencana selanjutnya masyarakat akan diberikan pelatihan pembuatan berbagai macam produk bernilai ekonomis dari limbah Eceng Gondok. Misalnya sebagai bahan pembuatan kertas, perabotan, kerajinan tangan, dan sebagai media pertumbuhan tanaman hias.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa Tanjung Karya menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat tidak selalu memerlukan biaya besar, namun cukup dengan memanfaatkan limbah alam yang ada di desa tersebut. Hasil yang baik ini dapat dicapai dengan adanya saling pengertian diantara pemangku kepentingan dan anggota masyarakat, kemudian fasilitator pemberdayaan masyarakat dapat beradaptasi dan memahami dengan jelas karakter-karakter masyarakat setempat. Dalam hal ini, pemerintah lokal berperan penting dalam mensosialisasikan maksud dan tujuan kegiatan pemberdayaan sehingga mendapat penerimaan terlebih dahulu dari masyarakatnya, baru kemudian dapat memahami karakter masyarakat. Selain itu aspek kekeluargaan harus lebih diutamakan sehingga dapat meraih kepercayaan dari masyarakat.

Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pemberdayaan masyarakat desa tertinggal merupakan salah satu kegiatan yang telah dicanangkan dalam RPJM Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tahun 2015-2019. Dalam kurun periode tersebut, dari 122 Daerah Tertinggal di Indonesia, Pemerintah menargetkan dapat mengentaskan paling tidak seperempat (25%) dari seluruh Daerah Tertinggal di Indonesia.

Kedua, Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa tertinggal tidak selalu membutuhkan biaya yang besar dan mahal. Namun dapat dimulai oleh semua pemangku kepentingan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada, termasuk diantaranya melalui pemanfaatan limbah eceng gondok.

Ketiga, Adanya saling pengertian diantara pemangku kepentingan dan anggota masyarakat, kemudian adanya fasilitator pemberdayaan masyarakat yang dapat beradaptasi dan memahami dengan jelas karakter-karakter masyarakat setempat merupakan modal yang penting dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Keempat, Faktor-faktor yang menghambat kegiatan pemberdayaan masyarakat desa tertinggal diantaranya adalah faktor budaya setempat yang mempertahankan pola hidup tradisional dan cenderung menolak perubahan.

Rekomendasi

Untuk menyebarluaskan informasi mengenai pemanfaatan limbah alam dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu melibatkan dan bekerjasama dengan berbagai unsur seperti lembaga pemerintahan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain-lain sehingga warga desa dengan potensi serupa dapat meniru keberhasilan yang telah dicapai oleh masyarakat desa Tanjung Karya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut.

Untuk mengembangkan usaha kerajinan berbahan dasar limbah eceng gondok diperlukan dukungan dari lembaga pemerintahan terkait seperti Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam meningkatkan kualitas produk, perizinan, maupun membuka pasar bagi produk yang dihasilkan.

Konsistensi para pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sangat diharapkan dalam upaya meningkatkan perekonomian lokal.

Daftar Pustaka

- Arifin, Anwar. 2005. *Ilmu Komunikasi*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Denzin, Norman K. dan Guba, Egon. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial; Pemikiran dan Penerapannya*, Penyunting: Agus Salim. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Effendy, Onong Uchyana. 1995. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Penerbit PT Remaja: Bandung.
- Kartasmita, Ginanjar. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat. Kumpulan Materi Community Development*: Pustaka Pribadi Alizar Isna.Msi.
- Martono, Nanang. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. Rajawali Press: Jakarta.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. 2012. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Rosda.
- Muhammad, A. 2014. *Komunikasi Organisasi*. Bumi Aksara: Jakarta.

- Pranaka, A.M.W., dan Onny S. Priyono. 2006. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. CSIS: Jakarta.
- Sunyoto, Usman. 2014. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pustaka Pelajar: Yogyakarta*.
- Sutami. 2009. *Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Prasarana Lingkungan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Ppmk) Di Kelurahan Marunda Jakarta Utara*. Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro: Semarang.
- Sutoro, Eko. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Desa. Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa*, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2012.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG WISATA UNTUK PROMOSI MUSEUM ADAT SAI BATIN SANGGI UNGGAK BANDAR NEGERI SEMOUNG BERBASISKAN TEKNOLOGI

Bartoven vivit Nurdin¹, Damayanti², Dadang Karya Bakti², Suprihatin Ali²

Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Lampung¹

Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, FISIP, Universitas Lampung²

Email: bartovenvivit@gmail.com¹, damayanti.1981@fisip.unila.ac.id²,

dadang.karya@fisip.unila.ac.id², suprihatin.ali@fisip.unila.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempromosikan museum adat Sai Batin Sanggi Unggak sebagai wisata adat berbasis teknologi pada Kampung Adat Bandar Negeri Semoung Kabupaten Tanggamus. Museum adat yang didirikan berkat bantuan dana CSR dari perusahaan Natara Mining di Tanggamus, sampai saat ini belum dipromosikan secara gencar dikarenakan sumber daya manusia yang belum optimal. Oleh karena penelitian ini sangat diperlukan untuk memaksimalkan potensi yang ada dengan cara melakukan kajian pemberdayaan masyarakat. Kajian pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan pengamatan terlibat. Wawancara mendalam dengan remaja sebanyak 20 orang. Dari hasil kajian diperoleh bahwa generasi muda memiliki potensi untuk mempromosikan wisata museum adat, namun terkendala oleh kurangnya motivasi, cara melihat peluang dan sarana prasarana.

Kata Kunci: Museum, kearifan lokal dan promosi wisata

Latar Belakang

Museum Adat Sanggi Unggak adalah museum yang dibangun di Pekon Sanggi Unggak Tanggamus, atas prakarsa kepala Pekon bapak Abu Sahlan. Beliau mendapatkan dana CSR dari PT. Natara Mining di Kabupaten Tanggamus untuk membangun museum Adat, dikarenakan beliau banyak memiliki banyak barang-barang peninggalan warisan dari keluarga besarnya. Pengembangan warisan budaya ini sangat penting sekali, apalagi perhatian dana CSR untuk merawat warisan budaya lokal.

Kisah pak Abu Sahlan ini sangat menarik, diawali dengan hobbinya mengumpulkan berbagai koleksi milik orang tuanya yang banyak. Kemudian dia memang menyukai kegiatan budaya dan seni. Sebagai Kepala Pekon dan juga punya sanggar tari beliau menekuni bidang seni dan budaya masyarakat Sanggi Unggak Tanggamus. Dimulai dengan kebingungan bahwa dimana barang-barang peninggalan itu akan diletakkan dan dirawat, kemudian beliau membuat proposal bantuan kepada Pemda dan lembaga lainnya untuk mengembangkan museum benda-benda peninggalan tersebut.

Akhirnya cita-citanya tercapai dengan mendapatkan bantuan dana CSR atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT Natara Mining, sebuah perusahaan tambang emas di Tanggamus. Bapak Abu Sahlan menyediakan tanah untuk dibangun museum oleh dana CSR tersebut. Tanah itu berada disamping rumahnya, atau lebih tepat dipekarangan rumahnya.

Setelah museum tersebut terbangun, beliau menghadapi tantangan untuk mempromosikan museum tersebut, karena sangat diperlukan tindak lanjut dari sebuah hal yang telah dimulai. Dikarenakan kalau tidak adanya promosi dan pemasaran akan museum tersebut maka ini akan menjadi sia-sia saja. Oleh karena itu perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam rangka promosi museum adat tersebut.

Dilain pihak, bisa dilihat bahwa dana CSR saat ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar perusahaan. CSR mestilah memberdayakan masyarakat sekitar dan bukan hanya sebagai sebuah bentuk bantuan sosial saja. CSR berbeda dengan bantuan sosial, karena CSR memiliki nilai kontinuitas atau tindak lanjut dari pemberdayaan masyarakat.

Bantuan dana CSR dewasa ini memang sudah menjadi peraturan bahwa setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat disekitarnya lebih diutamakan. Disamping itu dana CSR juga memberikan manfaat bagi perusahaan itu sendiri, dimana keberlanjutan dan eksistensi perusahaan juga bergantung dari CSR tersebut. Dimana dana CSR dapat menjadikan image yang positif bagi perusahaan tersebut. Disamping image yang positif juga adalah hubungan antara perusahaan dan masyarakat juga akan positif. Citra perusahaan juga akan terangkat dimana sebuah perusahaan dengan CSRnya akan membuat perusahaan itu terangkat citranya dan produk-produknya akan lebih laku dimasyarakat yang membelinya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Darwin bahwa dampak yang tak kalah pentingnya adalah citra perusahaan yang menjadi terangkat. Kecenderungan terakhir memperlihatkan bahwa perusahaan-perusahaan yang mampu melaksanakan CSR dengan baik, maka produk-produk mereka juga dapat diterima dengan lebih baik oleh masyarakat. Akhirnya penerapan CSR memberi jaminan terhadap kelangsungan hidup dan meningkatkan pendapatan hidup. (Darwin, 2007).

Dengan demikian perusahaan tidak hanya sekedar bertanggung jawab terhadap pemilik (*shareholder*) sebagaimana yang terjadi selama ini, namun bergeser menjadi lebih luas, yaitu sampai pada ranah sosial kemasyarakatan (*stakeholder*). (Hadi, 2011). Berdasarkan hal tersebut perusahaan tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungannya. Perusahaan perlu menjaga legitimasi *stakeholder* serta mendudukannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung dalam pencapaian tujuan perusahaan, yaitu stabilitas usaha dan jaminan *going concern* (Adam dalam Hadi, 2011).

CSR saat ini bukan lagi dilihat sebagai sebuah kerugian atau menambah beban bagi perusahaan, melainkan merupakan sebuah keuntungan positif bagi perusahaan dan dapat menjadikan perusahaan melainkan sarana mencari keuntungan yang lebih besar lagi karena dengan CSR akan diperoleh keberlanjutan pembangunan dalam masyarakat, dan perusahaan memperoleh keuntungan dari hal tersebut.

Perhatian dalam pelestarian budaya (kearifan lokal) ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah, akan tetapi perusahaan dengan program CSR-nya memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal pelestariannya. Program CSR harus memperhatikan potensi budaya lokal sebagai aset dan dasar dari pembangunan, sehingga diperlukan pemeliharaan yang baik untuk budaya lokal ini. Kearifan lokal merupakan bentuk konsep yang seringkali diabaikan dan dimarginalkan. Kearifan lokal disebut juga dengan pengetahuan lokal yang merupakan segenap pengetahuan yang dimiliki masyarakat sejak dahulunya dan nilai-nilai inilah yang membuat tatanan hidup masyarakat dapat kembali harmoni. Kearifan lokal sering kali dianggap sepele, padahal kearifan lokal sudah terbukti memiliki kemampuan secara ekonomi, sosial dan budaya untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada dalam masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian kegiatan yang memperkuat keberdayaan kelompok dalam masyarakat dengan tujuan melakukan perubahan sosial dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik bersifat fisik, ekonomi maupun sosial dan budaya. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mencakup penguatan pada ekonomi kemasyarakatan, tetapi mencakup juga mengenai peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang lainnya seperti pelestarian budaya yang ada dalam masyarakat tersebut. Dalam hal ini masyarakat dilibatkan dalam proses pelestarian kearifan lokal dalam budaya mereka. Diharapkan dengan program CSR, perusahaan lebih mampu

meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam melestarikan budaya/kearifan lokal masyarakat setempat.

Kabupaten Tanggamus yang masyarakat adatnya disebut dengan masyarakat Adat *Sai Batin* memiliki kebudayaan lokal yang sangat luas, salah satunya adalah masyarakat adat di Kampung Adat Bandar Negeri Semoung. Kampung Adat Bandar Negeri berada di *Pekon/Desa Sanggi Unggak* yang dipimpin oleh Bapak Abu Sahlan dengan gelar *Pangikhan Khatu Semaka*. Kampung adat ini memiliki beberapa benda-benda adat sejarah peninggalan tetua mereka, seperti kain *tappan*, gerabah, alat musik, payung agung, *gobekh*, dan masih banyak lainnya. Untuk melestarikan benda-benda adat ini mereka mendapat program CSR dari PT Natarang Mining. PT Natarang Mining merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan emas dan perak yang berlokasi di Kabupaten Tanggamus. Perusahaan ini memberikan dana CSR-nya kepada *Pekon Sanggi Unggak* dalam bentuk pembangunan Museum Adat pada *Pekon/desa* tersebut guna melestarikan budaya lokal masyarakat Adat *Sai Batin* Kabupaten Tanggamus, khususnya masyarakat adat *Pekon Sanggi Unggak*. Museum ini diresmikan pada bulan April 2015.

Berdasarkan uraian yang disajikan pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya minat dan motivasi masyarakat untuk mempromosikan museum adat sebagai pusat pengembangan budaya/kearifan lokal setempat.
2. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan bagaimana cara mempromosikan museum adat baik melalui media elektronik, digital, maupun event-event yang sudah diadakan sebelumnya seperti Festival Teluk Semaka.
3. Kurangnya memanfaatkan peluang kerjasama dengan pihak lain seperti dinas pariwisata dan dinas pendidikan.

Oleh karena itu perlu dilakukan sebuah kajian tentang pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah upaya dalam melestarikan budaya dan merawat budaya lokal.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara mendalam, pengamatan terlibat dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan-informan yang relevan, yakni pemilik museum dan generasi muda di *Pekon Sanggi Unggak* sebanyak 20 orang. Pengamatan terlibat juga dilakukan kepada para informan-informan tersebut.

Disamping itu juga dikembangkan kegiatan strategi pemberdayaan masyarakat, sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini. Untuk strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan peneliti adalah metode ceramah, merupakan metode yang diberikan kepada khalayak sasaran dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman-pemahaman pada khalayak sasaran. Ceramah yang diberikan berisi seputar pengembangan budaya lokal melalui berbagai metode pemasaran pariwisata dan diadakan pemberdayaan masyarakat khususnya generasi muda dalam mengembangkan promosi.

1. *Focus Group Discussion* (FGD)

Diskusi atau FGD merupakan metode yang bertujuan untuk menggali pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran secara lebih mendalam tentang potensi budaya lokal yang mereka miliki dan pemahaman mereka tentang pemasaran pariwisata.

2. Pendampingan

Dalam metode pendampingan, warga di dampingi oleh pelaksana untuk melestarikan budaya lokal setempat memasarkan potensi wisata budaya ke khalayak umum.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

Tabel. 1. Nama Informan

No	Nama Informan	Usia
1	Eka Safitri	18 tahun
2	Herda Aprilina	17 tahun
3	Merita Ulfa Agustia	19 tahun
4	Cantika Putri Sahlana	15 tahun
5	Sartika Sari	19 tahun
6	Yulyanti	23 tahun
7	Yuliza Putri	16 tahun
8	Yeni Oktavia	15 tahun
9	Mursadah	33 tahun
10	Ipi alias Suhaipi	23 tahun
11	Adiansyah	19 tahun
12	Robinson	20 tahun
13	Sukron	23 tahun
14	Erwansyah	23 tahun
15	Sarwono	22 tahun
16	Pirman	24 tahun
17	Dedy Zulkarnain	33 tahun
18	Rendy Yanuar	27 tahun
19	Sandrian	25 tahun
20	Herlan Heriza	27 tahun

Hasil dan Pembahasan

1. CSR, dan Kearifan Lokal

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa museum Sanggi Unggak yang telah dibangun dengan dana CSR masih banyak mengalami masalah, yakni sangat lambannya tindak lanjut dari keberlanjutan museum tersebut. Bahwa sebuah program CSR mestilah tidak hanya berhenti pada satu titik fisik saja melainkan juga harus memiliki kontinuitas yang terus menerus atau berkelanjutan. Pengembangan suatu warisan budaya, dengan cara merawat warisan itu telah dilakukan oleh seorang bernama Abu Sahlan. Namun ini tidak bisa hanya dilakukan oleh seseorang saja, melainkan harus ditopang oleh pihak-pihak lain yang berperan secara maksimal. Ada tiga pihak yang bertanggung jawab dalam memelihara dan merawat warisan budaya, sehingga menjadi kearifan lokal yang mampu mengembangkan pembangunan masyarakat adat, yakni masyarakat adat itu sendiri; pihak swasta dan pihak pemerintah.

Dari hasil penelitian dapat dikaji bahwa museum Sanggi Unggak masih kurang perhatian dari Pemerintah Daerah di tempat itu. Sementara itu dana CSR yang sudah digulirkan oleh pihak swasta, mestinya ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan tindak lanjut atau kontinuitas dari museum tersebut. Misalnya adalah dengan cara kegiatan promosi dan memberdayakan masyarakat sekitar untuk menjadikan museum itu sebagai salah satu tujuan atau destinasi wisata yang penting.

Cara-cara promosi seperti lewat media sosial, dan internet yang sudah semakin berkembang mestinya menjadi suatu pertimbangan bagi pihak masyarakat maupun pemerintah daerah. Memberdayakan generasi muda di Pekon tersebut adalah sangat direkomendasikan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pioner museum Sanggi Unggak bapak Abu Sahlan merupakan salah satu anggota masyarakat yang telah melakukan kegiatan merawat warisan budaya. Salah satu kegiatan dan tindakan melestarikan budaya adalah sangat penting yakni merawat kebudayaan.

Budaya lokal dan pengetahuan lokal adalah kekayaan masyarakat yang harus terus dirawat. Pengetahuan lokal yang dimiliki oleh etnik di Indonesia merupakan asset dan kearifan lokal yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada.

Lampung sebagai daerah transmigrasi, memiliki sumber daya alam yang kaya. Saat ini, etnik Lampung sendiri populasi lebih kecil dibandingkan pendatang, tanah-tanah yang mereka miliki sebagian besar habis terjual akibat perilaku yang konsumtif. Pengetahuan lokal yang mereka miliki juga terpinggirkan, oleh laju pendatang dan pembangunan, padahal pengetahuan lokal memiliki nilai-nilai kearifan yang merupakan asset yang perlu dikembangkan. Sebagaimana yang diungkapkan hasil penelitian Dove (1993), dan Tjitradjaja (1994) bahwa para pembuat kebijakan seringkali mengabaikan pengetahuan lokal masyarakat sebagai landasan pembuat kebijakan, dan ada kesalahan-kesalahan masa lalu yang memandang sepele terhadap pengetahuan lokal masyarakat, padahal pengetahuan lokal memiliki kemampuan yang sangat lentur terhadap pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Salah satu kegiatan merawat warisan budaya yang dilakukan oleh pihak swasta adalah dengan dana CSR.

Saat ini di Lampung dilaporkan bahwa pelaksanaan CSR belum maksimal bahkan sebagian besar belum terlaksana dengan baik, oleh karena itu diperlukan suatu program dan model yang betul-betul menyentuh keperluan masyarakat, sehingga program CSR tidak hanya sekedar bantuan, dan candu saja bagi masyarakat.

2. Wisata Budaya dan Riset Adat

Seorang wisatawan mengadakan perjalanan wisata karena didorong oleh berbagai motif yang tercermin dalam berbagai macam jenis pariwisata. Bagi daerah sangat perlu mempelajari motif karena berhubungan dengan fasilitas yang perlu disiapkan dan program-program promosinya. Menurut Hunziger dan Krapf dalam Soekadijo (1999), mendefinisikan Pariwisata sebagai “Keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal di situ untuk melakukan pekerjaan yang penting yang memberikan keuntungan yang bersifat permanent maupun sementara.” Definisi ini terdiri atas dua bagian. Bagian pertama (keseluruhan gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing) adalah definisi pariwisata seperti sudah dijelaskan diatas. Definisi yang pada umumnya dianggap baik itu pada bagiannya yang kedua mengartikan ‘tinggal untuk sementara’ atau ‘tidak menetap’ secara ekonomik dan menjabarkan sebagai ‘wisatawan tidak melakukan pekerjaan penting yang memberi keuntungan’.

Pendit, Nyoman S. (1999) membagi pariwisata kedalam beberapa jenis pariwisata yaitu antara lain :

1. Wisata Budaya yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang engan jalan menunjukkan kunjungan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat, cara hidup, kebudayaan dan seni mereka.
2. Wisata Kesehatan yaitu perjalanan seorang wisatawan yang bertujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari dimana ia tinggal demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan rohani.
3. Wisata Olahraga yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan untuk berolahraga atau memang sengaja untuk mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga dalam suatu tempat atau Negara.
4. Wisata Komersial yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial.

5. Wisata Industri yaitu perjalanan yang dilakukan oleh rombongan mahasiswa atau pelajar, atau orang-orang awam ke suatu tempat perindustrian dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan penelitian. Wisata Bahari yaitu perjalanan yang dikaitkan dengan olahraga air seperti danau, pantai, dan laut.
6. Wisata Cagar Alam yaitu jenis wisata yang biasanya banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, Taman Lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya, yang kelestariannya dilindungi oleh Undang-Undang.
7. Wisata Bulan Madu yaitu suatu perjalanan yang dilakukan bagi pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan.

3. Pemberdayaan Masyarakat

a. Melakukan Promosi

Promosi merupakan usaha untuk memperkenalkan sebuah produk atau jasa. Tujuan supaya produk dan jasa itu laku dijual dan terkenal. Assuari (2011) berpendapat bahwa usaha perusahaan untuk mempengaruhi dengan merayu calon pembeli, melalui segala unsur acuan pemasaran. Menurut Payne (2001), menuliskan bahwa selain tujuan utama diatas, promosi dapat pula menambah keberwujudan suatu jasa sehingga dapat membantu pelanggan membuat penilaian tawaran jasa dengan lebih baik.

Dalam hal bauran promosi ini, George, W. R and Leonard L. B. (1981) telah mengidentifikasi beberapa pedoman promosi jasa yang dapat digunakan untuk menggambarkan promosi dalam ekowisata, yaitu :

1. Memberikan petunjuk berwujud
2. Membuat jasa dimengerti
3. Menjanjikan apa yang mungkin diberikan
4. Mengkapitalisasi *Word Of Mouth*. *Word Of Mouth* merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam promosi jasa.
5. Komunikasi langsung kepada orang.

Menurut Kotler (2000), kegiatan promosi dalam prakteknya adalah sebagai alat untuk:

1. Modifikasi tingkah laku. Orang yang melakukan komunikasi itu memiliki alasan antara lain mencari kesenangan, mencari bantuan, memberikan pertolongan atau intruksi. Penjual sebagai sumber berusaha memberikan kesan yang baik yang ada pada perusahaannya untuk mendorong peningkatan pembelian barang atau jasa yang ditawarkan.
2. Pemberitahuan. Kegiatan promosi dapat ditujukan untuk memberitahu serta menginformasikan pasar yang dituju tentang penawaran hasil produk atau jasa suatu perusahaan.
3. Membujuk. Promosi bersifat membujuk umumnya kurang disenangi, namun kenyataannya promosi yang bersifat persuasive relatif berkembang karena lebih responsive dan hasilnya sangat menguntungkan.
4. Mengingat. Promosi yang bersifat mengingatkan dilakukan terutama untuk mempertahankan merek atau nama suatu produk atau jasa agar tetap dinikmati oleh para konsumen sejatinya.

b. Pemasaran Pariwisata

Pemasaran adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan promosi, tanpa adanya pemasaran maka kegiatan promosi tidak akan berjalan. Memasarkan sesuatu produk biasanya penuh tantangan, baik itu berupa barang maupun jasa. Kalau merupakan barang maka sebuah hakekat pemasaran adalah mampu meyakinkan konsumen untuk membeli

barang tersebut dan tentu saja dengan manfaat yang ia peroleh dan alasan kenapa harus membeli barang yang ditawarkan. Berbeda dengan memasarkan jasa, seperti promosi wisata. Wisata dalam dunia pemasaran adalah sebuah produk jasa yang perlu penanganan yang revolusioner. Dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini maka sangat berkaitan dengan kegiatan pariwisata. Dengan informasi yang baik maka pesan akan tersampaikan, sehingga wisata yang kita tawarkan akan cepat dikenal oleh masyarakat di dunia lain. Banyak saat ini tempat wisata terkenal secara mendadak karena informasi dari internet dan media sosial. Hal ini tentu mempermudah usaha sebuah promosi wisata. Pemasaran wisata memerlukan strategi penting dalam menjalankan usahanya. Wisata yang dimiliki oleh masyarakat, pemerintah dan swasta mestilah memerlukan manajemen yang baik. Banyak orang datang berwisata bukan hanya karena keindahan alam atau tempat tapi pelayanan yang baik juga merupakan indikator yang penting. Menurut Wahab, S, Crampon, J and Rothfield L. (1997) pemasaran pariwisata yaitu suatu proses manajemen yang dilakukan oleh organisasi pariwisata nasional atau perusahaan-perusahaan. Termasuk dalam kelompok industri pariwisata untuk melakukan identifikasi terhadap wisatawan yang sudah punya keinginan untuk melakukan perjalanan wisata.

Salah satu usaha pemasaran wisata yang baik saat ini dengan menggunakan media sosial dan aplikasi internet lainnya. Oleh karena itu diperlukan keterampilan khusus masyarakat dan siempunya wisata untuk mampu mempromosikan wisatanya kepada dunia luar. Namun sebagaimana yang telah dikatakan tadi bahwa menjual keindahan tempat saja tidak cukup, melainkan sarana prasarana serta kenyamanan dan keamanan juga menjadi sangat penting. Kenyamanan dan keamanan tempat wisata adalah hal pertama yang dilihat oleh wisatawan. Kemudian adalah sarana dan fasilitas dari tempat wisata juga sangat penting. Terakhir adalah perbedaan budaya, budaya wisatawan dengan budaya tempat masyarakat tujuan wisata tentu akan berbeda, oleh karena itu perlu kesiapan oleh wisatawan dan masyarakat ditempat wisata itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat adalah strategi penting dalam hal ini.

c. Strategi Pemberdayaan

Telah dilaksanakan strategi pemberdayaan masyarakat, yang didahului dengan melakukan penelitian terlebih dahulu oleh tim peneliti. Tim peneliti kemudian melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan bentuk pendampingan kepada informan. Pendampingan dilakukan selama tiga hari, dan diikuti oleh 20 orang informan. Informan terdiri dari remaja yang berusia sekitar 17 sampai 25 tahun. Mereka berlatar belakang lulusan SMA dan mahasiswa.

Dari informan yang hadir pada saat pendampingan dilakukan, mereka sangat antusias dalam melakukan pendampingan ini. Ini dikarenakan baru pertama kalinya dilakukan pendampingan semacam ini untuk mengembangkan museum yang ada di wilayah mereka. Seperti diketahui museum ini didirikan atas partisipasi warga masyarakat, yakni pencetusnya adalah bapak Abu Sahlan yang memiliki banyak peninggalan dari nenek moyangnya dalam bentuk benda-benda purbakala. Dengan bantuan dari PT Nataramining maka mereka mendapatkan dana CSR untuk mendirikan museum ini. Museum ini sangat menarik karena menyimpan banyak peninggalan sejarah, oleh karena itu perlu partisipasi generasi muda untuk memajukan museum ini.

Remaja-remaja yang menghadiri pendampingan, terdiri dari laki-laki dan perempuan sama komposisinya. Mereka sangat antusias ingin memasarkan museum ini kepada masyarakat luas, oleh karena itu perlu pemasaran yang baik. Namun sebelum dipasarkan para remaja harus memahami terlebih dahulu kebudayaan dari mereka sendiri yang mulai pudar. Kearifan lokal yang berasal dari nenek moyang mereka harus dipahami terlebih dahulu untuk mampu memasarkan museum tersebut. Sehingga dalam pelatihan ini diawali dengan melakukan pre test, isinya adalah pengetahuan informan terhadap pengetahuan lokal dan budaya setempat sampai pengetahuan tentang promosi dengan

melalui teknologi seperti internet dan media sosial. Soal-soal pre test ada sebanyak 10 soal yang terdiri dari berbagai macam jenis soal tentang kearifan lokal, promosi dan wisata. Informan selama 10 menit menyelesaikan soal-soal tersebut.

Setelah dilakukan pre test kemudian dilakukan pelatihan oleh nara sumber ada 4 orang. Nara sumber melakukan FGD (*Focus Group Discussion*) secara bergantian kepada informan dengan berbagai jenis topik. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2. Hasil sebelum dan sesudah FGD

NO	Nama Informan	Pre Test	Post Test
1	Eka Safitri	50	80
2	Herda Aprilina	40	70
3	Merita Ulfa Agustia	40	70
4	Cantika Putri Sahlana	50	80
5	Sartika Sari	40	80
6	Yulyanti	40	80
7	Yuliza Putri	30	70
8	Yeni Oktavia	50	90
9	Mursadah	40	80
10	Ipi alias Suhaipi	30	70
11	Adiansyah	40	80
12	Robinson	40	80
13	Sukron	40	80
14	Erwansyah	40	80
15	Sarwono	60	90
16	Pirman	60	90
17	Dedy Zulkarnain	60	90
18	Rendy Yanuar	60	90
19	Sandrian	40	80
20	Herlan Heriza	40	80

Para informan menjalani pendampingan selama tiga hari dan dengan materi yang Para informan menjalani pelatihan selama tiga hari dan dengan materi yang berbeda-beda. Setelah dilaksanakan pemberian materi maka dilakukan praktek sesuai dengan tema masing-masing materi. Informan sangat menikmati kegiatan ini. Praktek ini telah menghasilkan berbagai kreasi promosi wisata, yakni promosi lewat media sosial, yakni Instragram, Blogspot dan stiker serta leaflet dari informan. Hal ini dapat ditunjukkan dalam beberapa bentuk hasil praktek.

Instragram adalah media sosial yang digandrungi saat ini, selain memiliki fungsi sebagai media sosial juga memiliki potensi untuk memperkenalkan wisata melalui foto-fotonya.

Selanjutnya adalah blogspot, dari hasil praktek telah dihasilkan blogspot sebagai berikut :

http://museumsanggiunggak.blogspot.co.id/2016/08/normal-0-false-false-false-in-x-none-x_22.html

Para informan sudah mampu membuat blogspot untuk mempromosikan museum adat Sanggi Unggak. Dengan memberikan gambaran umum yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di museum Sanggi Unggak, gambaran umum berupa sejarah dan benda-benda apa saja yang dikoleksi oleh museum untuk memikat para wisatawan datang menyambangi museum ini. Selain blogspot ada juga stiker, dimana peserta berhasil membuat stiker untuk dibagikan kepada para tamu yang datang nantinya.

Selain stiker ada juga leaflet baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Isinya adalah memperkenalkan museum tersebut dengan deskripsi dan sejarah budaya dari museum tersebut. Kemudian juga mempromosikan koleksi yang terdapat dalam museum tersebut.

Dari hasil uji coba sebelum FGD telah dapat dilihat bahwa informan mendapatkan nilai yang rendah di bawah rata-rata, maknanya informan belum memahami tujuan promosi wisata berbasis budaya lokal ini. Namun terjadi peningkatan setelah dilakukan pendampingan, yakni diatas rata-rata. Peningkatan ini terjadi dengan range rata-rata 186%, dimana informan mengalami peningkatan pengetahuan. Adapun peningkatan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Presentase Kenaikan setelah FGD

No	Nama Informan	Pre Test	Post Test	%
1	Eka Safitri	50	80	160%
2	Herda Aprilina	40	70	175%
3	Merita Ulfa Agustia	40	70	175%
4	Cantika Putri Sahlana	50	80	160%
5	Sartika Sari	40	80	200%
6	Yulyanti	40	80	200%
7	Yuliza Putri	30	70	233%
8	Yeni Oktavia	50	90	180%
9	Mursadah	40	80	200%
10	Ipi alias Suhaipi	30	70	233%
11	Adiansyah	40	80	200%
12	Robinson	40	80	200%
13	Sukron	40	80	200%
14	Erwansyah	40	80	200%
15	Sarwono	60	90	150%
16	Pirman	60	90	150%
17	Dedy Zulkarnain	60	90	150%
18	Rendy Yanuar	60	90	150%
19	Sandrian	40	80	200%
20	Herlan Heriza	40	80	200%
		44,5	80,5	186%

Dari tabel di atas dapat dianalisis bahwa pendampingan ini telah memberikan manfaat bagi informan dimana informan telah mendapatkan banyak pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan promosi wisata di museum Sanggi Unggak Tanggamus. Ini dibuktikan dengan peningkatan hasil post test dari nilai 44.5 menjadi 80.5 point, sehingga terjadi perubahan dan peningkatan yang signifikan dari hasil penelitian pemberdayaan dan pendampingan ini.

Kesimpulan dan Saran

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa ada satu aspek penting dalam melestarikan kebudayaan yakni upaya merawat kebudayaan itu sendiri oleh masyarakatnya. Hal ini telah dilakukan oleh bapak Abu Sahlan. Namun hal ini tidak bisa akan terus terawat apabila tidak didukung oleh berbagai pihak, yakni keseriusan pemerintah daerah dalam merawat budayanya, keterlibatan pihak swasta dengan dana CSR dan proses pewarisan budaya itu terhadap generasi muda yang dilakukan oleh masyarakat adat tersebut. Proses regenerasi ini membutuhkan strategi pemberdayaan yang khusus dengan melibatkan generasi muda agar termotivasi merawat kebudayaannya sekaligus menciptakan peluang usaha ekonomi kreatif bagi mereka. Dalam hal ini menjadikan museum adat sebagai tujuan wisata adat dengan mempromosikannya dengan teknologi yang ada. Sehingga dengan berkembangnya museum adat sebagai destinasi wisata adat dapat mengembangkan masyarakat disekitarnya dengan menciptakan ekonomi kreatif sehingga menjadi peluang bisnis yang tinggi.

Dari hasil penelitian ini telah dikembangkan strategi pemberdayaan masyarakat dengan cara pendampingan kepada generasi muda untuk dan pemberdayaan masyarakat, telah dilakukan pendampingan dengan melibatkan 20 orang informan, telah memperoleh hasil yakni memproduksi leaflet, instagam, blogspot dan stiker dari hasil praktek dan pendampingan bagi para informan ini. Selain itu peserta memperoleh pengetahuan dimana ini terbukti dari kenaikan nilai FGD sebelum dan sesudah dilakukan. Dimana nilai sebelum FGD mendapatkan nilai rata-rata 44,5 point, kemudian setelah dilakukan post test makan mendapatkan nilai rata-rata 80,5 point. Kenaikan ini sangat signifikan sekali sehingga memberikan kepuasan yakni kenaikan berkisar 186% dari nilai sebelum dan sesudah FGD. Disamping manfaat yang diterima yakni hasil produk dari kegiatan ini untuk melakukan promosi wisata.

Dari kegiatan pendampingan yang dilakukan ini ditemukan hambatan-hambatan, yakni jaringan koneksi internet yang agak sulit karena lokasi yang jauh di pedesaan. Sehingga sebagai saran, jika kegiatan ini berlanjut perlu diadakan pemasangan jaringan internet atau warung internet di museum ini sehingga ramai dikunjungi oleh remaja dan wisatawan***.

Daftar Pustaka

- Assauri, Sofjan. 2007. Manajemen Pemasaran. Rajawali Pers. Jakarta
- Darwin, Ali, 2007. "Jalan Panjang Audit Lingkungan", *Akuntan Indonesia*, 3 (1), 9-11.
- Dove, Michael R. 1993. *Uncertainty, Humility, and Adaptation in the Tropical Forest: The Agricultural Augury of the Kantu* dalam *Ethnology* 40(2): 145-167.
- George, W. R and Leonard L. B. 1981. *Guidelines for the Advertising of Services. Business Horizons*, Vol. 24 No. 4, Juli-Agustus, hal 52-56.
- Hadi, Nor. 2011. Corporate Social Responsibility. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Kotler, Philip. 2000. *Marketing Manajemen*, Prentice Hall, Inc. Singapore.
- Orlove, Benjamin. 1980. *Ecological Anthropology. Annual Review of Anthropology*. Volume 9 (p235-273). Pato Alto ; California, USA.
- Payne, A. 2001. *Service Marketing*. Alih Bahasa oleh Fandy Tjiptono. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Pendit, Nyoman S. 1999. Wisata Konvensi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Soekadijo. 1996. Anatomi Pariwisata-Memahami Pariwisata Sebagai Systemic Linkage. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Tjitradjaja, Iwan dkk. 1994. Kajian Pengembangan Institusi Masyarakat di dalam dan sekitar Hutan: Kasus Pengelolaan Hutan Damar di Krui Lampung Barat. Laporan Penelitian. Program pasacasarjana Antropologi UI dan Departemen Kehutanan.
- Wahab, S, Crampon, J and Rothfield L. 1997. *Pemasaran Pariwisata*. Alih Bahasa oleh Drs. Frans Gromang. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.

EKONOMI KREATIF BUDIDAYA CACING TANAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT BANYUAJUH, KAMAL, BANGKALAN

Sugeng Purwoko, Abdur Rohman, Ahmad Mughni

Universitas Trunojoyo Madura (UTM)

Email: sugengpwkutm@yahoo.com

Abstrak

Kegiatan sehari-hari rumah tangga memunculkan permasalahan sampah, yang terdiri hampir 70 % limbah organik. Ditambahkan lagi dengan kegiatan peternakan seperti sapi, kambing, ayam yang juga menghasilkan limbah organik yang berpotensi mengganggu lingkungan bila tidak dikelola dengan baik. Pemanfaatan limbah organik dari rumah tangga, ternak, kebun dan lainnya dapat dikonversikan menjadi produk yang bermanfaat dengan bantuan cacing tanah yang secara ekonomi mempunyai nilai yang tinggi sebagai sumber protein dan farmasi, serta limbah bekas cacing sebagai pupuk organik potensial yang sangat kuat dan bermanfaat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dibagi dalam 3 fase kegiatan yaitu : 1) Teknik budidaya cacing lumbricus, 2) Pembuatan kompos komplit untuk budi daya pertanian, dan 3) pemanfaatan cacing tanah sebagai probiotik yang bermanfaat. Dari 10 peserta pelatihan menjadi target, terdapat 2 peserta pelatihan yang tidak meneruskan program, sementara yang 8 peserta yang sukses telah mampu menjual cacing segar rata-rata 2 kali selama kurun waktu 5 bulan. Hal ini menunjukkan transfer pengetahuan dalam budidaya cacing tanah telah mampu memberikan dampak peningkatan penghasilan dengan rata-rata penjualan 45 kg, dengan harga rata-rata 30.000 per kg atau sekitar Rp1.350.000 per orang selama 5 bulan. Sedangkan dalam pengembangan kompos dan pemanfaatan untuk suplemen dalam bentuk probiotik masih belum nampak. Pengembangan kompos skala komunitas perlu dipertimbangkan untuk memanfaatkan sisa bekas cacing (kascing) sebagai kompos komplit yang bisa dijual terpisah untuk keperluan pertanian dan perkebunan. Untuk probiotik memang sebagaiantisipasi saat produk cacing segar mengalami booming dan tidak laku jual. Sehingga karena alasan itu, petani cacing lebih memilih menjual segar daripada membuat sendiri suplemen probiotik.

Kata kunci: Pemberdayaan, cacing lumbricus, kompos komplit, probiotik, peningkatan pendapatan

Pendahuluan

Jumlah sampah organik yang melimpah akan mengganggu keindahan dan kesehatan lingkungan, sebagai sarang bibit penyakit dan sumber bau. Pengelolaan yang baik, sampah bisa menjadi sumber pendapatan masyarakat dengan sentuhan teknologi budidaya tertentu seperti cacing tanah, mengkonversi sampah menjadi pupuk organik, daur ulang, dan sebagainya. Adanya anggota masyarakat usia produktif yang masih belum mandiri melatarbelakangi ide munculnya usaha kreatif mengubah sampah organik menjadi sumber pendapatan masyarakat setempat. Peran perguruan tinggi sebagai agen dalam mentransfer ilmu pengetahuan ke masyarakat setempat sangat diperlukan. Pemanfaatan sampah sebagai media dan pakan budidaya cacing tanah, mengkonversi cacing segar menjadi produk lain yang berguna serta mengubah sisa hasil budidaya cacing tanah menjadi sumber pendapatan pada sektor pertanian lain.

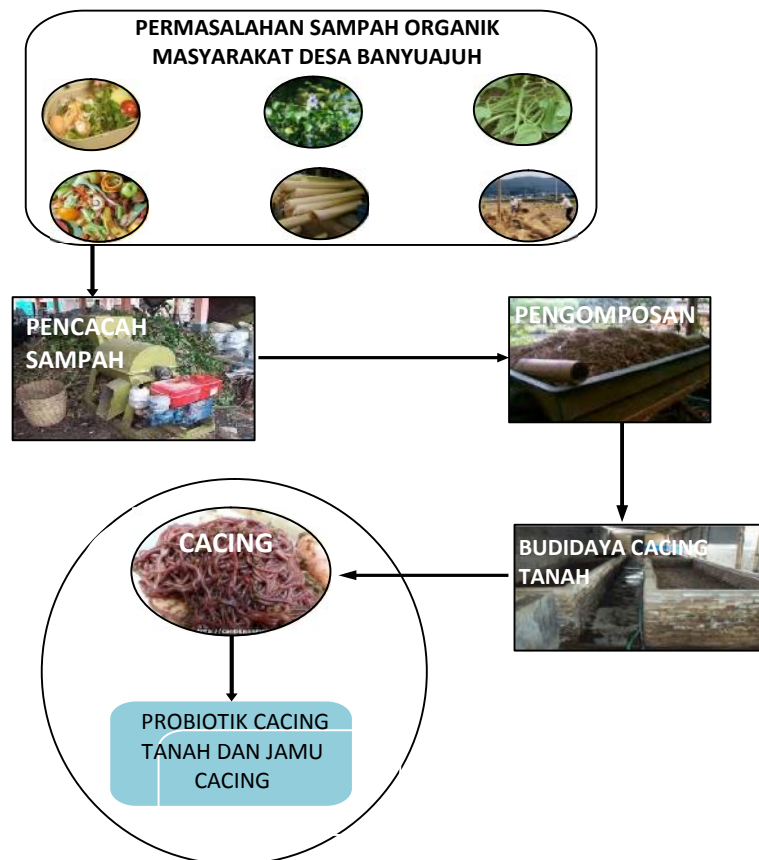
Kegiatan pemberdayaan pada masyarakat ini berupa bantuan bibit cacing dan pendampingan selama kurun waktu kegiatan yang direncanakan (8 bulan). Pendampingan akan dilakukan oleh tim dari perguruan tinggi (UTM) yang telah berpengalaman dalam

budidaya cacing dan pembuatan probiotik cacing. Peserta adalah masyarakat umum di RT 3 dan RT 4 Desa Banyuajuh, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan. Jumlah peserta terdiri atas 10 orang yang secara administratif dan iktikad lolos seleksi, hal dimaksudkan agar kegiatan yang direncanakan mempunyai dampal nyata dalam peningkatan pendapatan peserta pelatihan.

Metode

Metode pemberdayaan ini tidak lagi dilandasi dengan menggali permasalahan masyarakat seperti pada konsep PRA (*Participatory Rural Appraisal*) akan tetapi atas dasar pemahaman dan pemanfaatan cacing tanah sebagai agen untuk mengatasi masalah sosial. Kegiatan pemerdayaan ini secara runtut dan sistematis seperti sebagai berikut :

1. Mendata calon peserta dengan kriteria tertentu pada wilayah yang menjadi target kegiatan.
2. Pembekalan teoritis yang dikelola oleh tim pengusul dengan nara sumber pelaku budidaya cacing tanah.
3. Pemahaman tentang pemanfaatan cacing segar sebagai obat herbal dan teknik pembuatan probiotik cacing.
4. Pengolahan sampah dan kascing menjadi produk kompos komplit yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perikanan.
5. Pemberian bibit cacing pada 10 peserta pelatihan secara gratis.
6. Pendampingan selama periode kegiatan, dengan melihat langsung kandang budidaya, lokasi, teknik memanen cacing dll.
7. Penampungan hasil budidaya cacing tanah dari peserta pelatihan, mencatat dan mengukur hasil panen untuk keperluan evaluasi.
8. Penyajian laporan lengkap



Gambar 1. Model Transfer Pengetahuan Kegiatan Pemberdayaan



Gambar 2. Dokumentasi Proses Kegiatan Pemberdayaan

Pembahasan

Budiidaya cacing tanah sangat mudah dan mempunyai keonomis tinggi, akan tetapi faktor ketekunan dan keseriusan menjadi salah satu kunci keberhasilannya. Pelatihan dilaksanakan dengan 2 metode yaitu teoritis dan praktek. Teoritis dilaksanakan selama 1 hari, kemudian 2 hari yang lain secara terpisah praktek pembuatan probiotik dan kompos dari sisa limbah cacing. Dari pengamatan langsung beberapa kondisi selama pelatihan antara lain :

1. Tingkat partisipasi peserta sangat baik, hal ini bisa dilihat dari diskusi dan pertanyaan berjalan dengan sangat menarik.
2. Motivasi peserta yang cukup baik, hal ini memang didasarkan pada ketertarikan dan upaya menambah pendapatan.
3. Peserta adalah usia produktif di desa Banyuajuh
4. Dari sisi pekerjaan mereka adalah petani dan pensiunan.

Dari 10 peserta pelatihan ternyata hanya 8 peserta yang sampai menjual cacing segar. Sedangkan yang 2 peserta lainnya dianggap gagal karena belum pernah setor cacing segar. Berikut ini data untuk peserta pelatihan seperti berikut :

Tabel 1. Tingkat hasil panen peserta pelatihan budidaya cacing selama 5 bulan

Peserta	Pendidikan	Panen 1	Panen 2	Total panen
1	SD	15	30	45
2	SD	20	25	45
3	SLTA	15	30	45
4	SLTP	10	30	40
5	SLTP	10	30	40
6	SLTA	15	25	40
7	SLTP	20	35	55
8	SLTP	15	25	40
9	Mahasiswa	-	-	-
10	Mahasiswa	-	-	-

Dari tabel menunjukkan total hasil panen rata-rata 45 kg, yang setara dengan pendapatan tambahan Rp 1.350.000 selama kurun waktu 5 bulan. Pada masa berikutnya bila pengelolaannya bagus bisa memberikan tambahan yang lebih besar lagi karena hasil panen juga akan meningkat.

Untukantisipasi saat terjadi panen serempak dan melimpah dan kemampuan pasar menyerap hasil cacing segar, peserta pelatihan juga diberikan pelatihan bagaimana mengolah cacing segar menjadi produk lain yang bermanfaat. Dalam kegiatan ini cacing diolah menjadi jamu herbal probiotik yang diharapkan bisa menjadi obat bagi manusia, hewan maupun sebagai pupuk cair yang sangat kuat. Saat ini tim pengelola kegiatan telah mengembangkan produk turunan cacing dengan bebarapa manfaat yang antara lain : pupuk cair, jamu hebal, kapsul cacing dan kompos cacing. Secara tradisional, cacing tanah telah dipakai sebagai obat penurun panas dan typus yang efektif. Secara medis telah pula diteliti manfaat cacing tanah untuk berbagai penyakit antara lain : jantung, darah tinggi, diabetes militus, kolesterol, asam urat dan lain sebagainya. Dengan penambahan unsur herbal lain, diharapkan hasil dari produk herbal probiotik cacing juga bisa lebih bermanfaat secara luas. Apalagi Madura telah dikenal sebagai produsen herbal yang cukup dikenal secara nasional dengan ramuan madura nya. Disamping itu, dengan mengkonversi herbal probiotik yang dikelola secara tradisional tidak membebani konsumen dengan harga yang relatif mahal.

Berikut ini adalah produk yang telah dihasilkan melalui kegiatan budidaya cacing tanah:



Gambar 3. Produk hasil dari turunan cacing tanah

Daftar Pustaka

- Agus Basuki. 2012. *Cara parktis budidaya cacing tanah lumbricus*. Malang.
- Amos Setiadi. 2011. *Perilaku pro-lingkungan pada permukiman perkotaan studi kasus pengelolaan sampah di kampung sukunan*. Yogyakarta.
- Dewi, T.Q. 2007. *Penanganan dan Pengolahan Sampah*. Penebar Suwadaya.
- Endah S, Et.al. 2009. *Efektivitas kompos sampah perkotaan sebagai pupuk Organik dalam meningkatkan produktivitas dan Menurunkan biaya produksi budidaya padi*. ITB, Bandung

- Nasih Widya Yuwono. 2010. *Pengelolaan Sampah Yang Ramah Lingkungan di Sekolah*. Yogyakarta
- Siti Anggita R, Et.al. 2010. *Biokonversi sampah organik dengan aplikasi metode vermicomposting* (studi kasus pt. sari ater, subang-jawa barat). UNSRI.
- Shinoda Evrina. 2013. *Pengembangan Jamu Sebagai Warisan Budaya*. Biofarmaka IPB, Jamu, Kesehatan Tanaman Obat.
- Sudewo Bambang. 2004. *Buku tanaman obat populer*. PT. Agro Media Pustaka: Yogyakarta.
- Sugeng P. 2014. *Ternak cacing dan turunannya*, group diskusi, Facebook
- Suharmiati. 2003. *Menguak Tabir dan Potensi Jamu Gendong*. Agromedium pustaka, Jakarta
- Suharmiati, dan Handayani, L. 2005. *Sehat Dengan Ramuan Tradisional*. Agromedia Pustaka, Jakarta.
- Wahyu Surakusumah. 2009. *Permasalahan sampah kota bandung dan alternatif solusinya*. UPI Bandung
- Yoga Maryanto A. 2010. *Pengelolaan Sampah Yang Ramah Lingkungan Di Sekolah*, Thesis. UI, Jakarta.

**TANAH UNTUK RAKYAT
(SUATU PELAYANAN DIAKONI GEREJA MELALUI YABIMA
INDONESIA DALAM BENTUK ADVOKASI ALIH FUNGSI TANAH
MUKIM DAN GARAP UNTUK PEMBERDAYAAN PETANI)**

Ikram

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
Email: ikram_badila@yahoo.com

YABIMA (Yayasan Bimbingan Mandiri)

YABIMA (Yayasan Bimbingan Mandiri) berdiri sejak tanggal 28 Oktober 1989 di Kota Metro, Provinsi Lampung. YABIMA didirikan oleh Sinode Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS). YABIMA didirikan untuk maksud memperkuat sarana gereja GKSBS dalam pelayanan diakonia (sosial) gereja. Pada tahun 2013 – berkaitan dengan perubahan Undang-undang Yayasan – Yabima berganti nama menjadi YABIMA Indonesia.

Hubungan YABIMA Indonesia dengan Gereja

Sekali pun didirikan oleh gereja dan dalam rangka mewujudkan misi (diakonia) gereja, pada prakteknya YABIMA Indonesia sangat otonom dalam menjalankan misinya. Kontrol gereja terhadap keseluruhan keberadaan YABIMA Indonesia hanya dilakukan pada saat Sidang Sinode yang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali. Sedangkan kontrol terhadap keuangan dilakukan melalui pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Sinode GKSBS setahun sekali. Sidang VIII Sinode GKSBS tahun 2005 menegaskan kembali posisi, peran dan fungsi YABIMA Indonesia dalam gereja GKSBS. Sidang VIII Sinode GKSBS, YABIMA Indonesia ditegaskan posisinya sebagai alat gereja dan salah satu fungsinya yang vital adalah sebagai wahana refleksi gereja – khususnya – dalam karya diakonia gereja. Selanjutnya, Sidang XI Sinode GKSBS, Agustus 2015 memperkuat komitmen gereja GKSBS untuk menjadikan YABIMA Indonesia ke dalam gereja GKSBS, dengan cara mengefektifkan keputusan Sidang VIII Sinode GKSBS tahun 2005 yang menetapkan Majelis Pekerja (Pimpinan) Sinode GKSBS secara kelembagaan sebagai Pembina YABIMA Indonesia.

Visi, Misi, Nilai, dan Isu-Isu Strategis

Visi YABIMA Indonesia yakni terwujudnya organisasi petani untuk memiliki kesempatan dan kemampuan dalam mengelola sumberdaya yang ada di sekitar mereka melalui pertanian berkelanjutan dan memiliki lembaga keuangan lokal serta mampu menjual produk pertanian mereka dengan harga yang adil. Sedangkan, Misi YABIMA Indonesia adalah untuk menguatkan organisasi rakyat agar mereka dapat mengelola berbagai sumber daya di sekitar mereka dan mengungkap nilai-nilai komunitas untuk kemandirian yang holistik.

YABIMA Indonesia dimandatkan bekerja di Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, dan Bangka Belitung. Nilai-nilai yang hendak dibangun dalam strategi dan tata kelola program Yabima yang ada di masyarakat adalah: Asketisme untuk Berbagi, Keadilan yang Berpihak, Spiritualitas, Pendidikan, Keadilan Gender, Penguatan Organisasi Rakyat, Lembaga Keuangan Lokal, Dialog untuk Partisipasi, Sensitif Etnis dan Akuntabilitas. Filsafat pelayanan yang menjadi dasar YABIMA Indonesia adalah Lukas 4: 18-19.

Isu-isu Strategi yang dikelola YABIMA Indonesia (1) Meningkatkan integrasi pertanian dan peternakan bagi petani lahan sempit, (2) Menguatkan kapasitas organisasi

seraya mendorong nilai-nilai Yabima, dan (3) Meningkatkan partisipasi kaum tani dalam otonomi daerah dan *land reform*.

Pada masa awal pelayanannya, YABIMA Indonesia hanya fokus pada program *income generating* melalui gaduhan ternak dan bantuan modal untuk usaha pertanian. Tetapi YABIMA Indonesia juga memiliki mandat untuk menguatkan kapasitas organisasi dengan mendirikan Kantor Bantuan Hukum yang diharapkan dapat menjalankan tugas melakukan penyuluhan dan layanan bantuan hukum untuk masyarakat yang membutuhkan, dalam hal ini, petani agar dapat meningkatkan partisipasi petani dalam otonomi daerah dan *land reform*.

Pada tahun 1995-an, YABIMA Indonesia mulai merekrut beberapa sarjana hukum untuk mempersiapkan lahirnya Kantor Bantuan Hukum. Keberadaan beberapa sarjana hukum mendorong YABIMA Indonesia untuk menangani kasus-kasus hukum yang bersifat struktural, dimana pihak yang berperkara adalah rakyat dan negara. Kasus yang cukup fenomenal ditangani adalah sengketa lahan transmigrasi di Desa Gaya Baru, Kabupaten Lampung Tengah dan lahan di Desa Purwo Kecono, Kabupaten Lampung Timur, serta di Desa Jati Agung (register 40), Kabupaten Lampung Selatan.

Terkait dengan penguatan organisasi rakyat dan partisipasi dalam otonomi daerah dan *land reform* dilakukan dengan tujuan untuk mendorong adanya struktur agraria yang lebih adil dengan membangun organisasi rakyat untuk memiliki program strategis *land reform*, adanya pemimpin-pemimpin masyarakat yang tahu dan sadar akan hak ekonomi, sosial, budaya serta sipil dan politik. Adapun kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan adalah pelatihan-pelatihan dan pengorganisasian, di antaranya pelatihan para *legal* (mediator, pendamping hukum berbasis masyarakat), pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM), cara berpartisipasi dalam musrenbang, penyusunan peraturan desa, dan pelatihan pengelolaan sumber daya pro masyarakat miskin. Keluaran *capacity building* yang dilakukan Yabima adalah guru kader, dan kader-kader Yabima yang siap melakukan advokasi kasus-kasus hukum (terutama tanah) yang bersifat struktural.

Kasus Tanah Register 40

Kronologis Kasus

Pada tahun 2010, Gubernur Provinsi Lampung - Bapak Drs. Syahrudin ZP - menetapkan Proyek Pembangunan Kota Baru Provinsi Lampung di atas lahan eks Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung (Register 40) yang sudah dan sedang digarap oleh masyarakat. Luas lahan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Lampung untuk menjadi *site plan* Kota Baru adalah 1.587 hektar.

Menurut rencana awal yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Proyek Pembangunan Kota Baru tidak di atas lahan Register 40, melainkan di atas lahan PTP Nusantara 7 di Kecamatan Natar. Tetapi oleh sebab dan proses yang tidak jelas, Gubernur Provinsi Lampung memindahkan pembangunan Kota Baru di Kecamatan Jati Agung – di atas lahan Register 40 – yang sedang digarap oleh masyarakat. Petani penggarap dan sebagian juga mukim di tanah Register 40 menjadi target atau sasaran proyek tersebut.

Sejak setelah ditetapkan (2010) sebagai *site plan* Proyek Pembangunan Kota Baru, masyarakat yang selama ini menggarap eks lahan LIPI dan Bappeda digusur. Pemerintah Provinsi Lampung menyediakan “uang *tali-asih*” sebesar Rp. 2.000.000. per hektar tanah yang digusurnya. Sebagian besar masyarakat menerima uang tali asih dan memberikan keterangan bahwa pengambilan uang tali asih diambil masyarakat secara terpaksa akibat ada surat edaran yang menyebutkan pengambilan uang tali asih ada batas waktunya sehingga masyarakat mengambil uang tali asih daripada tidak mendapat dapat ganti rugi sama sekali. Semua penggarap eks lahan LIPI dan Bappeda (seluas 1.300 hektar) dinyatakan sudah menerima keputusan Pemerintah Provinsi Lampung. Tetapi menurut

penuturan masyarakat belum semua penggarap yang di atas lahan 1.300 hektar mendapatkan “uang *tali asih*”. Ini awal keberhasilan satuan tugas (satgas) pembebasan tanah Register 40 yang dibentuk pemerintah provinsi melalui lobby, negosiasi, tekanan/ancaman dan mediasi dengan kepala desa dan masyarakat.

Tahun 2012, satgas menyampaikan kepada masyarakat jika karet yang ada di atas lahan Proyek Pembangunan Kota Baru ditebang maka masyarakat dapat menanam singkong. Namun, setelah masyarakat menanam singkong selama 3 (tiga) bulan di Oktober 2013, satgas dengan dikawal polisi Tanjung Bintang melakukan penggusuran dan *land clearing* serta pembuatan tapak jalan. Masyarakat melakukan perlawanan secara tidak terorganisir, menghadang dan akhirnya penggusuran hanya dapat dilakukan pada lahan seluas 1.300 hektar dari 8 hektar. Dengan digusur dari lahan yang selama ini digarap, masyarakat eks penggarap kehilangan sumber mata pencaharian. Dari 1.300 keluarga yang digusur, ada 1.000 keluarga yang benar-benar kehilangan sumber mata pencaharian.

Masyarakat yang telah dan terancam tergusur mengorganisir diri dan membentuk organisasi – yang bernama – Gabungan Petani Lampung (GPL)¹. Perlawanan secara terorganisir dilakukan melalui wadah GPL. Demonstrasi dilakukan beberapa kali. Penghadangan terhadap alat-alat berat juga dilakukan. Masyarakat yang tergabung dalam GPL menginginkan agar pembangunan Kota Baru dibatalkan atau tidak dibangun di atas lahan yang mereka garap. Berkat perlawanan yang dilakukan secara terorganisir oleh GPL, Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan nilai “uang *tali asih*” menjadi Rp. 5.000.000. per hektar.

Pada tahun 2013, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan kesempatan kepada masyarakat eks gusuran Proyek Pembangunan Kota Baru untuk menyewa lahan yang belum dimanfaatkan untuk pembangunan Kota Baru. Harga sewa ditetapkan oleh SK Gubernur Nomer 6/460/B.X/Hk/2012 sebesar Rp. 1.000.000. per hektar. Dalam SK Gubernur ini ditetapkan bahwa pelaksanaan distribusi penyewaan dilakukan oleh Kepala Desa dari 6 (enam) desa.

“Pemerintah melakukan sosialisasi di balai desa masing-masing desa oleh Satgas Proyek Pembangunan Kota Baru dengan didampingi kepala desa dan didampingi oleh Badrun (orang luar) yang mengaku sebagai koordinator petani. Masyarakat pada saat sosialisasi menolak penyewaan tanah tersebut. Bentuk penolakannya dengan melakukan demonstrasi atas nama GPL di DPRD Provinsi Lampung. DPRD Provinsi menyatakan tidak tahu (pura-pura) atas permasalahan tersebut. Di samping itu, melalui internet dan brosur ada orang yang menawarkan kavling di atas tanah eks gusuran LIPI dan Bappeda dengan ukuran 15 x 10 meter seharga Rp. 15 Juta Per kavling (Pak Maryono).”

Dampak pada Warga Desa Purwoekencono dan Desa Jati Agung

Akibat dari penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung terhadap penggarap eks lahan LIPI dan Bappeda di Jati Agung, ada 1.300 keluarga kehilangan sumber mata pencaharian dan yang benar-benar kehilangan mata pencaharian sekitar 1.000 keluarga. Akibat dari hilangnya mata pencaharian banyak anak-anak putus sekolah, sebagian besar warga masyarakat beralih profesi sebagai buruh, baik buruh tani

¹ GPL, organisasi petani yang pembentukannya difasilitasi oleh kader-kader Yabima. Sampai saat ini, organisasi ini masih aktif dan terus melakukan perlawanan terhadap negara/pemerintah akibat penggusuran tanah mukim dan garap petani milik Kementerian Kehutanan.

maupun buruh bangunan. Selain itu, terjadi kerenggangan hubungan antara pamong dengan masyarakat dan frekuensi pencurian meningkat pasca penggusuran.

Profil Pihak yang Berkonflik

Pemerintah Provinsi Lampung. Dengan alasan optimisasi pelayanan, Pemerintah Provinsi Lampung merencanakan pemindahan Kantor Gubernur ke sebuah kawasan yang akan diberi nama “Kota Baru”. Menurut rencana, sesuai dengan Perda, Proyek Pembangunan Kota Baru akan dilakukan di Kecamatan Natar dengan menggunakan lahan milik PTPN VII. Dengan alasan yang tidak diketahui oleh publik, tiba-tiba pembangunan “Kota Baru” dipindahkan ke Kecamatan Jati Agung di atas lahan eks LIPI dan Bappeda – yang merupakan kawasan Register 40. Pemerintah Provinsi Lampung telah mengajukan permohonan konversi atas lahan Register 40 yang akan digunakan membangun “Kota Baru” kepada Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan – kabarnya – telah memberikan persetujuan.

Karena di atas lahan yang di-inginkan oleh Pemerintah Provinsi untuk tapak “Kota Baru” sudah sejak 1998 digarap oleh masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Lampung dengan kewenangannya mengusir masyarakat penggarap dengan kompensasi Rp. 2.000.000. per lahan. Tetapi setelah mendapatkan perlawanan dari masyarakat penggarap, Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan uang kompensasi menjadi Rp. 5.000.000. per lahan. Segera setelah sebagian masyarakat berhasil diusir, Pemerintah Provinsi Lampung mulai melakukan *land clearing* dan pembangunan tapak jalan. Untuk mengerjakan pembangunan “Kota Baru”, Pemerintah Provinsi Lampung menggandeng investor dari Malaysia.

Penggarap lahan eks LIPI dan Bappeda. Penggarap areal eks LIPI dan Bappeda pada umumnya adalah masyarakat yang ada di sekitar lahan – yang tinggal di Kecamatan Jati Agung. Para penggarap ini pada umumnya sangat tergantung dari lahan garapannya. Mereka tidak memiliki lahan garapan lainnya. Hanya ada beberapa orang yang memang mau “mencari kekayaan” dari lahan eks LIPI. Setelah digusur, banyak anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah, anak terpaksa putus sekolah karena membantu orang tua dengan *leles* jamur, dan mencari telur semut. Beberapa kepala keluarga beralih profesi sebagai buruh tani atau buruh bangunan.

Masyarakat yang tinggal di atas Register 40. Belum ada kepastian sejarah, sejak kapan Register 40 sudah dihuni oleh masyarakat. Saat ini, sudah ada 6 (enam) desa definitif yang berada di atas Register 40, yakni Desa Sinar Negeri, Purwo Tani, Margodadi, Sindang Anom, Gunung Agung, dan Karang Rejo. Di setiap desa sudah memiliki fasilitas umum yang berupa sekolah (TK, PAUD, SD), pasar, jaringan listrik. Rata-rata setiap desa dihuni oleh 600 keluarga.

Saat ini masyarakat desa yang ada di atas register 40 gelisah. Sebab pemerintah, melalui Kementerian Kehutanan telah melakukan sosialisasi untuk membuat program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di seluruh areal Register 40. Menurut informasi, Desa Karangrejo sudah menyetujui dan akan dilakukan pelaksanaan program HTR). Masyarakat – khususnya – dari 5 desa (Purwo Tani, Sinar Rejeki, Margodadi, Gunung Agung, indang Anom) menyatakan menolak. Pada tahun 2004, Kepala Desa dari 6 desa yang ada di atas Register 40 telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Kehutanan untuk alih fungsi lahan. Tetapi pemerintah belum mengabulkan.

Kementerian Kehutanan. Pada tahun 1970 menyerahkan sebagian Register 40 yang belum dihuni oleh masyarakat kepada PT. Mitsugoro. Pada tahun 1984, Pemerintah menghibahkan tanah eks PT. Mitsugoro kepada (a) 1.000 hektar eks lahan PT. Mitsugoro kepada LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) untuk ditanami lamtoro gung, (b) 3.000 hektar diserahkan kepada PTP – yang dikemudian hari masyarakat mengenalnya sebagai lahan BAPPEDA, dan (c) 200 hektar untuk transmigrasi eks karyawan PT. Mitsugoro. Lalu 1987 ditambah lagi 250 hektar, sehingga total lahan transigrasi menjadi

450 hektar – yang menjadi Desa Purwo Tani. Sedangkan, 400 hektar lahan eks LIPI dibiarkan digarap secara liar oleh masyarakat yang ada di sekitar Register 40.

Pada tahun 1970 memberikan ijin berdirinya PT. LPF di atas lahan Register 40. Pada tahun 2004 menerima permohonan alih fungsi dari 6 (enam) Kepala Desa yang ada di Register 40. Pada tahun 2010 memberikan ijin prinsip kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk membangun “Kota Baru” di atas Register 40. Pada tahun 2012 memberikan ijin kepada Yayasan Insan Cendekia Lampung beroperasi di atas lahan Register 40. Yayasan ini belum memiliki kegiatan untuk masyarakat.

PT. LPF. Merupakan pabrik pengolahan singkong yang berdiri di atas lahan Register 40. Masyarakat – khususnya – penanam singkong, sangat terbantu dengan keberadaan PT. LPF. Pada tahun 2011, oleh sebab yang tidak diketahui oleh masyarakat, Pemerintah mencabut ijin operasi PT. LPF. Dengan ditutupnya PT. LPF, masyarakat mengalami kesulitan untuk menjual produksi singkongnya. Kebijakan pemerintah menutup PT. LPF dipahami sangat merugikan masyarakat.

Saat ini di tengah masyarakat beredar kabar bahwa PT. LPF yang tutup akan beroperasi lagi di bawah bendera PT. Bumi Waras. Tahun 1997, telah terjadi perpindahan nama LPF menjadi Darma Hutan Lestari (DHL) untuk lahannya dan pabriknya bernama PT. Darma Agrindo. Lokasi pabrik LPF seluas 82,5 hektar.

Yayasan Insan Cendekia Lampung (Yayasan ICL). Masyarakat akhir-akhir ini mendengar kabar bahwa di atas lahan Register 40 akan berdiri Yayasan Insan Cendekia Lampung. Menurut informasi yang beredar, Yayasan ICL didirikan oleh Zulkifli Hasan – yang saat ini menjabat sebagai Meteri Kehutanan RI. Memiliki sekolah di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan dan kemungkinan di Kecamatan Jati Agung tempat Praktek bagi sekolah tersebut.

Tabel 1. *Cost – Benefit* Proyek Pembangunan Kota Baru di Provinsi Lampung

No.	Elemen/Individu	Keuntungan	Kerugian	Catatan
1	Petani penggarap dan mukim	Memperoleh uang tali asih; Pengalaman berorganisasi; Pengalaman advokasi; Sadar akan hak sebagai warga negara.	Hilangnya tanah garap dan mukim; Banyak anak-anak petani putus sekolah; Munculnya pekerja anak (<i>leles</i> jamur, mencari telur semut); Alih profesi (buruh tani atau buruh bangunan); Sering terjadi tindak pidana ringan; Memudarnya kebersamaan (prasangka antar warga).	Target proyek
2	Pemerintah Provinsi Lampung	Memperoleh alih pemilik lahan (dari Kementrian Kehutanan ke Pemda Prov Lampung); Memperoleh dukungan dana	Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah; Tidak dapat meneruskan proyek akibat pergantian pimpinan dan	Inisator Proyek

		<p>APBD untuk pembuatan site plan; Memperoleh dukungan dana untuk melakukan <i>land clearing</i> dan pembuatan tapak jalan; Memperoleh uang sewa garap lahan.</p>	<p>rendahnya alokasi dana APBD; Terbengkalainya Proyek Pembangunan Kota Baru.</p>	
3	Yabima (Divisi Advokasi Hukum)	<p>Memperoleh kepercayaan dari konstituen (penerima manfaat) atas keberadaan Yabima; Bertambahnya kader Yabima yang trampil melakukan advokasi; Dapat menjalankan mandat lembaga (Yabima Indonesia); Bertambahnya pengalaman atau cerita sukses dan gagal dalam pendampingan kasus hukum; Menjadi lembaga advokasi hukum yang professional.</p>		Mediator Proyek
4	Kementerian Kehutanan		<p>Menurunnya kepercayaan masyarakat akan program-program Kementerian Kehutanan, di antaranya Hutan Tanaman Rakyat (HTR); Kehilangan banyak lahan yang dikuasai oleh Kementerian Kehutanan; Terjadi alih fungsi lahan yang dapat menyebabkan</p>	Stakeholder Proyek

			kerusakan lingkungan.	
5	PT LPF, DHL, Dharma Agrindo	Keberadaan pabrik pengolahan singkong sangat membantu petani untuk menjual hasil produksi,	Petani sangat dirugikan dengan ditutupnya pabrik pengolahan singkong PD LPF, meskipun berdiri lagi dengan nama lain.	Stakeholder Proyek
6	Yayasan Insan Cendekia Lampung (Yayasan ICL)	Aka ada sekolah pertanian di tanah Register 40	Kementerian kehutanan kehilangan asset lahan untuk pendirian sekolah akibat praktik-praktik KKN;	Stakeholder Proyek
7	Investor Asing (Malaysia)	Memperoleh keuntungan (<i>capital</i>) atas Proyek Pembangunan Kota Baru sebagai pengembang proyek.		Stakeholder Proyek
8	Pengembang Perumahan (Patok Emas)	Memperoleh keuntungan (<i>capital</i>) atas Proyek Pembangunan Kota Baru dengan menjual kavling tanah yang dikuasai pemerintah provinsi	Pemda Prov. Lampung kehilangan asset lahan Proyek Pembangunan Kota Baru akibat praktik-praktik KKN;	Stakeholder (ancaman) Proyek
9	Badrun	Memperoleh keuntungan atas penggantian tanah garap dan mukim.		Calo Proyek